



Cerita



di Balik Pandemi

Kumpulan Liputan

CERITA DI BALIK PANDEMI

Kumpulan Liputan "Cerita di Balik Pandemi"

Buku ini merupakan kumpulan 20 liputan karya jurnalistik tentang Pandemi Covid-19 di Indonesia. Liputan berasal dari beberapa wilayah, dari Jambi sampai Nabire. Mengangkat isu-isu soal kesehatan, dampak ekonomi, sampai soal masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal di era pandemi Covid. Buku ini merupakan program AJI Indonesia dengan dukungan dari UNESCO

Penulis

Zumrotun Solichah, Widia Primastika, Shinta Maharani, Nefri Inge, I Made Argawa, Gresi Plasmanto, Triyo Handoko, Eko Widiyanto, Fadiyah, Dafi Yusuf, Jekson Simanjuntak, Suwandi, Rosniawanti Fikri, Ignatius Dwiyana, Yulia Savitri, M. Taslim Dalma, Yunita Kaunar, Manfred Kudiai dan tim, Riska dan tim, dan Luh De Suriyani dan tim.

Editor

Bayu Wardhana, Laban Abraham, Nani Afrida, dan Kresna

Diterbitkan:



AJI Indonesia

Jl. Sigura Gura No.6a/1, RT.11/RW.1, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Akun Twitter: @AJIIndonesia

Dengan dukungan dari UNESCO



Jakarta, Oktober 2020

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Umum AJI	5
Pengantar Direktur dan Kantor Perwakilan UNESCO di Jakarta	8
ANGGARAN COVID-19 DI JEMBER TERBESAR KEDUA, NAMUN MINIM KETERBUKAAN INFORMASI Zumrotun Solichah	10
TANTANGAN IBU HAMIL DI MASA PANDEMI Widia Primastika	26
MENYOAL PENGGUNAAN CHLOROQUINE UNTUK PENGOBATAN PASIEN COVID-19 Shinta Maharani	40
CARUT MARUT RSUD OGAN ILIR TANGANI PASIEN COVID-19 Nefri Inge	46
CERITA DI BALIK RESIKO PANDEMI I Made Argawa	99
PETANI, PANDEMI, DAN ELEGI DI LADANGNYA SENDIRI Gresi Plasmanto	100
SUDAH DIUPAH TIDAK LAYAK, GURU HONORER DIHANTAM PANDEMI Triyo Handoko	120
DIFABEL BERTAHAN DI MASA PANDEMI Eko Widiyanto	132
MAKIN TERISOLASI DI BALIK PANDEMI: CERITA HIDUP LGBT DI BEBERAPA KOTA SELAMA COVID Fadiyah	143

PELECEHAN DAN INTIMIDASI, TEROR WARIA DI SEMARANG SAAT PANDEMI COVID-19 Dafi Yusuf	155
POLEMIK DANA BERKALA DAN RELAKSASI KJP PLUS DI MASA PANDEMI, BUKTI MINIMNYA PENGAWASAN Jekson Simanjuntak	165
MENGEJAR BANTUAN COVID-19 UNTUK ORANG RIMBA Suwandi	193
RISIKO DAPUR DAN ANCAMAN PANDEMI: SUARA PEKERJA PEREMPUAN DARI KOTA LULO Rosniawanti Fikri	212
LAHIR BATIN BERGULAT SAAT PANDEMI Ignatius Dwiyana	220
TRAUMA ASAP KARHUTLA DI MASA PANDEMI COVID-19 Yulia Savitri	228
MENILIK DAMPAK PANDEMI: OMZET ANJLOK DI SEKTOR JASA, PEKERJA BANYAK DIRUMAHKAN M. Taslim Dalma	236
MENILIK DAMPAK PANDEMI: OMZET ANJLOK DI SEKTOR JASA, PEKERJA BANYAK DIRUMAHKAN Yunita Kaunar	275
AGAR COVID-19 CUKUP DI NABIRE SAJA Manfred Kudiai dan tim	291
MENGAIS REZEKI DI TENGAH KOTA NYARIS MATI Riska dan tim	307
MEMBURU DOLAR DI TENGAH SAMPAR Luh De Suriyani dan tim	324

Kisah Enam Bulan Pertama Penanganan Covid-19

Setidaknya ada dua peran terpenting jurnalis dan media di saat pandemi Covid19 ini: meningkatkan kewaspadaan publik akan bahaya wabah; dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pejabat publik dalam menangani pandemi ini. Kesadaran soal inilah yang mendorong AJI, dengan dukungan UNESCO, menyelenggarakan program Beasiswa Peliputan “Jurnalisme Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19”.

Program beasiswa ini diberikan kepada 20 jurnalis dari berbagai media di Indonesia. Tema yang dipilih adalah soal bagaimana pemerintah menangani Covid19 sejak Covid19 pertama kali diakui masuk ke Indonesia, Maret lalu. Buku yang ada di tangan Anda ini adalah kompilasi karya jurnalistik dari para penerima beasiswa tersebut, yang dihasilkan setelah melakukan peliputan Juni - Agustus 2020. Liputan ini memotret 6 bulan pertama Indonesia bergulat dengan pandemi.

Tema yang dipilih oleh penerima beasiswa cukup beragam. Beberapa karya mengungkap bagaimana kegagalan pemerintah dalam menangani Covid19. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah cenderung meremehkan bahaya wabah ini. Ini ditandai dengan sikap santai pemerintah saat wabah itu pertama kali muncul dari Kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019 lalu.

Sekitar dua bulan setelah wabah itu muncul dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, pemerintah kurang menunjukkan

sikap bahwa ancaman itu nyata. Saat sejumlah negara menutup pintu bagi wisatawan dari daerah yang terinfeksi wabah, kita tak segera mengikutinya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2020 tercatat ada 1,27 juta kunjungan turis asing ke Indonesia, termasuk dari Cina.

Yang juga sangat mengagetkan adalah soal lonjakan ekspor masker pada Februari 2020 saat wabah itu menyebar, dan ini berdampak pada kelangkaan di dalam negeri saat wabah diakui resmi masuk Indonesia sebulan kemudian. Ini juga yang berkontribusi bagi kesulitan APD yang dialami para tenaga kesehatan kita.

Kelangkaan APD (alat perlindungan diri) inilah yang membuat sejumlah tenaga kesehatan memakainya secara bergantian. Di Sumatera Selatan, ada tenaga kesehatan yang mempersoalkan terbatasnya APD itu, yang ironisnya justru membuat mereka dipecat. Padahal, itu adalah aspirasi yang sangat beralasan dengan pertimbangan keselamatan.

Salah satu topik lain yang juga tak lupa dari sorotan adalah dampak ekonomi dari pandemi, seperti merosotnya omzet usaha serta kasus PHK di banyak sektor dalam jumlah besar. Di tengah situasi sulit itu, memang juga muncul upaya-upaya bertahan hidup masyarakat, yang salah satunya adalah upaya untuk mengolah lagi lahan pertanian yang selama ini banyak diabaikan.

Di masa pandemi ini, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat pandemi. Selain menjadi korban langsung pandemi, juga karena dampak tidak langsung –termasuk beban yang kian bertambah karena pembatasan sosial dan kerja dari rumah. Kelompok marjinal juga mengalami diskriminasi. Salah satunya adalah kelompok LGBT. Mereka mengalami kekerasan di saat pemerintah menjalankan pembatasan sosial berkala besar, yang diniatkan untuk membatasi penyebaran wabah.

Dari berbagai karya jurnalistik ini kita dapat melihat bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi wabah. Selain cenderung

meremehkan wabah, pemerintah juga tidak belajar dari negara lain yang lebih dulu sudah terpapar wabah. Salah satu sikap itu ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya transparansi dalam penanganan wabah ini.

Di tingkat pemerintah pusat, ini ditunjukkan dengan adanya upaya untuk menutupi data kasus infeksi dengan dalih untuk mengurangi kecemasan publik. Sikap itu banyak dikritik antara lain karena membuat publik tidak waspada dan tidak mengetahui situasi sebenarnya soal pandemi ini. Ini juga berkontribusi bagi meluasnya penyebaran wabah karena ada yang menilai bahwa wabah ini tak sebahaya yang diyakini banyak orang.

Akhir kata, selamat untuk 20 jurnalis yang menghasilkan karya jurnalistik ini. Cerita ini akan menjadi dokumen tidak resmi tentang bagaimana pemerintah dalam menangani pandemi. Kita berharap ini bisa menjadi alat bercermin bagi pejabat publik, dan juga masyarakat, agar ada perbaikan dalam menangani wabah yang kini belum terlihat jelas kapan berakhirnya ini.

Jakarta, 29 Oktober 2020

Abdul Manan
Ketua Umum AJI

Kata Pengantar

Cerita di Balik Pandemi

Di masa krisis kesehatan, kita tidak dapat meremehkan pentingnya akses publik terhadap jurnalisme yang akurat dan terpercaya.

Wartawan memainkan peran penting dalam penyampaian informasi kepada publik mengenai krisis COVID-19 yang masih berlangsung dan telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa serta gangguan secara global, termasuk di Indonesia.

Semua wartawan – baik wanita maupun pria, berada di garis depan dan mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari demi memberikan informasi yang dapat diandalkan dan dapat diverifikasi kepada masyarakat tentang pandemi. Kontribusi mereka sangat berharga bagi kita semua.

Tetapi masih banyak yang kekurangan peralatan pelindung diri dan akses ke perawatan kesehatan. Beberapa bahkan berkorban nyawa demi melaporkan krisis kesehatan ini.

Selain kekhawatiran mengenai keselamatan fisik, jurnalis – termasuk mereka yang bekerja lepas, bekerja di bawah tekanan psikologis yang cukup besar. Banyak juga yang mengkhawatirkan pekerjaan mereka selama masa-masa sulit ini.

Oleh karena itu, UNESCO bekerja sama dengan asosiasi jurnalistik – termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mendukung pemberitaan pandemi yang lebih baik oleh jurnalis Indonesia.

Kami gembira melihat berbagai pemberitaan oleh 20 jurnalis Indonesia kini telah terkumpul dalam *Cerita di Balik Pandemi*, yang akan berguna bagi jurnalis lain di tanah air.

UNESCO mendukung keselamatan jurnalis melalui peningkatan kesadaran secara global, pembangunan kapasitas, dan berbagai metode – terutama seperti tertera pada Kerangka Kerja Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Jurnalis dan Memerangi Impunitas.

Dr. Shahbaz Khan
Direktur dan Perwakilan
Kantor UNESCO di Jakarta

Zumrotun Solichah

ANGGARAN COVID-19 DI JEMBER TERBESAR KEDUA, NAMUN MINIM KETERBUKAAN INFORMASI

Minggu, 9 Agustus 2020 23:53 WIB



Ilustrasi: Bupati Jember Faida bersama Dandim 0824 Jember Letkol (Inf) La Ode Muhammad Nurdin saat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Jember, Senin (20/7/2020) (ANTARA/ Zumrotun Solichah).

Kami berharap pemerintah daerah atau badan publik bisa membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat selama pandemi sehingga tidak ada informasi yang ditutupi.

Jember (ANTARA) - Pemerintah seharusnya bersikap transparan dalam menyampaikan kasus dan penanganan COVID-19 yang menjadi wabah darurat bencana nasional sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Persoalan data dapat menyebabkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat yang bisa menjadi kendala dalam penanganan COVID-19 dan menghambat kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Jember.

Di Kota Pandhalungan itu, pasien pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 ditemukan pada 27 Maret 2020, namun sayangnya hal itu tidak disampaikan secara terbuka oleh Bupati Jember Faida atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Data kasus positif COVID-19 itu baru disampaikan Bupati Faida kepada publik setelah didesak pertanyaan sejumlah wartawan yang mencegatnya saat kegiatan peresmian kawasan tertib *physical distancing* di Jalan Sultan Agung Kabupaten Jember, Sabtu (28/3) petang. Pada saat itu, Bupati Faida sekaligus mengumumkan status kejadian luar biasa (KLB) di kabupaten itu setelah satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19.

Padahal, informasi akurat terkait perkembangan COVID-19 sangat ditunggu oleh masyarakat karena penyakit corona itu merupakan virus baru yang penyebarannya juga sangat cepat sehingga masyarakat perlu melakukan antisipasi sejak dini dengan mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di wilayah setempat.

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pasien terkonfirmasi positif terus bertambah, namun lagi-lagi Tim Gugus Tugas COVID-19 Jember tidak menyampaikan penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif, pelacakan, dan penyebab pasien tertular virus corona melalui rilis atau video konferensi.

Bahkan, sejumlah jurnalis yang mencoba untuk mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Jember Dyah Kusworini

sebagai organisasi perangkat daerah yang berkompeten dalam penanganan COVID-19 juga tidak bersedia berkomentar dengan alasan yang tidak jelas.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jember melalui Surat Keputusan Bupati Jember No: 188.45/180/1.12/2020 juga sudah dibuat pada 31 Maret 2020 dan merupakan revisi dari SK sebelumnya yang mencantumkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas Jember.

Dalam SK tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, unsur Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai seksi hubungan masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan komunikasi publik, agenda setting, strategi komunikasi, media monitoring, dan juru bicara.



Lampiran SK Bupati Jember terkait Gugus Tugas COVID-19 Jember (ANTARA/HO-Diskominfo Jember)

Namun kenyataannya SK tersebut tidak berfungsi optimal sejak SK tersebut diterbitkan dan Kepala Diskominfo Jember Gatot Triyono yang ditunjuk sebagai juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baru mengumumkan jejak

perjalanan tiga orang pasien pertama COVID-19 di Jember pada 13 April 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hanya beberapa kali mengadakan konferensi pers terkait dengan kegiatan penanganan COVID-19 yang didalamnya juga disampaikan data terbaru kasus corona, namun tidak pernah menggelar konferensi pers secara khusus terkait penambahan pasien terkonfirmasi positif atau memaparkan bagaimana pasien positif tersebut tertular COVID-19.

Pada 24 Juli 2020 tercatat ada tambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 yang jumlahnya fantastis yakni mencapai 48 orang dalam sehari dan jumlah tersebut merupakan tambahan pasien positif terbanyak sejak kasus corona ditemukan di Kabupaten Jember.

Jubir Gugus Tugas menyampaikan data penambahan kasus COVID-19 tersebut hanya berupa angka grafis dan asal desa/kecamatan pasien positif melalui WAG jurnalis Pemkab Jember pada Sabtu (25/7) dini hari tanpa disertai penjelasan yang lengkap tentang alasan banyaknya pasien positif dan riwayat perjalanan pasien yang terinfeksi virus corona.



Data yang disampaikan Jubir Gugus Tugas terkait penambahan 48 kasus positif COVID-19 melalui WAG jurnalis Pemkab Jember pada 25 Juli 2020. (ANTARA/HO-Diskominfo Jember).

Hal tersebut berbeda dengan Gugus Tugas pusat dan Gugus Tugas Jawa Timur yang selalu menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 setiap hari kepada media secara detail dan beberapa Gugus Tugas di kabupaten/kota lain juga menggelar konferensi pers ketika ada penonjolan kasus terkonfirmasi positif.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Faida mengatakan transparansi dan keterbukaan informasi terkait penanganan COVID-19 sudah disampaikan melalui laman (website) resmi Pemkab Jember (<http://www.jemberkab.go.id>, <https://www.facebook.com/jemberkab/>, <https://twitter.com/PemdaKabJember>, <https://www.instagram.com/pemkabjember/>, dan <https://www.youtube.com/user/Jemberkab>).

“Kami juga menyajikan data kasus dan penanganan COVID-19 dengan menampilkan data penanganan virus Corona di Posko Gugus Tugas yang berada di Pendapa Wahyawibawagraha Jember Lantai 2 dan siapapun bisa mengakses data itu,” tuturnya. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember juga mempublikasikan informasi COVID-19 melalui dashboard data COVID-19 yang dapat diakses di <https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dashboardcovidjember>, namun kenyataannya link laman tersebut tidak disosialisasikan kepada seluruh jurnalis dan masyarakat sehingga publik banyak yang tidak mengetahuinya. Ia mengatakan Pemkab Jember tidak akan membuat laman khusus COVID-19 karena informasi perkembangan virus corona telah tersedia di laman resmi Pemkab Jember beserta penggunaan anggarannya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Anggaran penanganan COVID-19 di Jember juga cukup fantastis mencapai Rp479 miliar dan merupakan anggaran terbesar kedua setelah Makassar secara nasional di tingkat kabupaten/kota, meskipun Jember belum memiliki Perda APBD 2020 dan hanya memiliki Peraturan Bupati Penggunaan APBD Jember yang anggarannya terbatas untuk hal rutin dan mendesak.



Data sumber anggaran COVID-19 di Jember yang ditampilkan di laman resmi Pemkab Jember (ANTARA/HO- Diskominfo Jember).



Data alokasi penggunaan anggaran COVID-19 di Jember yang ditampilkan di laman resmi Pemkab Jember (ANTARA/HO- Diskominfo Jember).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Faida menjelaskan sumber dana anggaran penanganan COVID-19 berasal dari APBD Jember 2020 sebesar Rp401 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp78,4 miliar, sehingga totalnya Rp479 miliar lebih.

Anggaran yang bersumber dari APBD Jember sebesar Rp401 miliar berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar dan hasil pengalihan (refocusing) belanja organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp400 miliar.

Sedangkan anggaran yang bersumber dari DAK sebesar Rp78,4 miliar berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp45,5 miliar dan alat kesehatan rumah sakit sebesar Rp32,9 miliar.

Dana sebesar Rp479 miliar itu digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp310 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp81,9 miliar, dan penyediaan jaringan pengamanan masyarakat sebesar Rp87,4 miliar.

Sementara Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Jember yang juga Kepala Diskominfo Jember Gatot Triyono mengatakan seluruh informasi perkembangan COVID-19 sudah disampaikan di laman resmi dan media sosial Pemkab Jember dan kerja sama dengan beberapa media lokal di Jember.

“Setiap hari kami merilis perkembangan kegiatan Gugus Tugas, baik penanganan kasus COVID-19 maupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Diskominfo juga membuat dashboard COVID-19 Jember yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga ia menilai Gugus Tugas sudah menjalankan keterbukaan informasi publik.

Ia mengatakan penyampaian informasi terkait COVID-19 hanya melalui satu pintu dari Ketua Gugus Tugas (Bupati Jember) atau Jubir Gugus Tugas (Kepala Diskominfo) sehingga informasi tersebut menjadi terarah.

Pihak jubiir, lanjut dia, berusaha menjawab pertanyaan sejumlah jurnalis terkait perkembangan COVID-19, namun tentu pihaknya harus menghimpun data dulu, sehingga tidak bisa memberikan jawaban secara cepat untuk hal-hal teknis.

Faktanya semua pertanyaan diarahkan kepada jubiir, namun jubiir yang ditunjuk tidak selalu siap dengan jawaban karena tidak ada koordinasi yang baik dengan OPD yang lain, sehingga tidak ada bahan materi untuk menjawab pertanyaan sejumlah jurnalis.

Gatot juga mengakui tidak semua jurnalis dan masyarakat mengetahui link dashboard data COVID-19 yang bisa di akses publik yakni di <https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dashboardcovidjember> untuk memantau perkembangan virus corona dan link tersebut juga tidak diumumkan di website resmi dan media sosial Pemkab Jember.

Ia mengatakan data lengkap perkembangan COVID-19 bisa diakses semua masyarakat dan jurnalis di Posko Gugus Tugas yang berada di Pendapa Wahyawibawagraha Jember dan link dashboard COVID-19 juga bisa dilihat di sana.

“Kalau ada anggapan bahwa Gugus Tugas berusaha menutup informasi, hal itu tidak benar karena kami memiliki dashboard COVID-19 yang menyajikan semua data tentang penanganan corona yang bisa diakses oleh masyarakat, namun kami perlu waktu,” ujarnya.

Informasi yang disajikan dalam data dashboard COVID-19 Jember meliputi data enam kategori yakni data COVID-19 menyajikan data perkembangan data COVID-19 beserta sebarannya, radar bansos (data terpadu kesejahteraan sosial terkait bantuan sosial), protokol kesehatan (kegiatan Gugus Tugas dalam penerapan protokol kesehatan).

Kemudian, pesantren tangguh (data kegiatan Gugus Tugas di pesantren), website jemberkab.go.id menyajikan berita Pemkab Jember, pasar tangguh (data kegiatan penanganan COVID-19

di pasar), data bansos (data jaring pengaman sosial), dan new normal (video tentang penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum, perhotelan dan rumah makan).

Data dashboard COVID-19 Jember tidak selengkap laman Gugus Tugas pusat maupun Jawa Timur (infocovid19.jatimprov.go.id), namun pihak Diskominfo Jember berjanji untuk melengkapi data tersebut.

Tidak ada data rinci anggaran yang dikeluarkan dalam jaring pengaman sosial dan bantuan sosial dalam dashboard COVID-19, kemudian tidak ada data realisasi anggaran COVID-19 dan daftar rinci bantuan dari berbagai pihak yang disalurkan kepada Gugus Tugas.

Saat ditanya berapa anggaran yang dialokasikan untuk Diskominfo terkait dengan komunikasi/sosialisasi dalam penanganan COVID-19 di Diskominfo, Gatot enggan menjawabnya.

Ia mengatakan Diskominfo akan menyempurnakan data di dashboard COVID-19 karena semua data yang berkaitan dengan kasus virus corona harus disajikan sesuai instruksi dari Bupati Jember.

Berikut tabel data pasien terkonfirmasi positif di Jember, yakni mulai Maret 2020 sebanyak 1 kasus, kemudian meningkat pada April menjadi 11 kasus, Mei (41 kasus), Juni (113 kasus), akhir Juli 2020 menjadi 368 kasus.

	Pasien positif COVID-19	Sembuh	Meninggal
Maret	1	0	0
April	11	1	1
Mei	41	6	3
Juni	113	51	4
Juli	368	178	14

Berdasarkan data Gugus Tugas per 31 Juli 2020, perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 368 orang dengan rincian pasien sembuh sebanyak 178 orang (48,37 persen) dan pasien dirawat 176 orang (47,83 persen), serta kasus meninggal 14 orang.

Untuk kasus suspek di Jember sebanyak 105 orang dan total kontak erat sebanyak 2.847 orang , serta pasien yang masih dipantau sebanyak 950 orang (33,37 persen).

Sementara jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Jember yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ada enam yakni RSD dr Soebandi, RS DKT, RS Paru, RS Jember Klinik, RS Bina Sehat, dan RS Citra Husada. Sedangkan rumah sakit yang sudah diusulkan mampu melayani COVID-19 yakni RSD Balung, RSD Kalisat, RSU Kaliwates, dan RS Siloam.

Humas RSD dr Soebandi Jember drg Septiono Heriawan mengatakan fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit setempat yakni tempat tidur isolasi sebanyak 81 tempat tidur dengan rincian 6 tempat tidur isolasi tekanan negatif dan 75 tempat tidur isolasi biasa (natural air flow), ventilator sebanyak 2 unit, ruang isolasi khusus COVID-19 di IGD, ruang operasi khusus COVID-19 sebanyak satu kamar operasi.

RSD dr Soebandi Jember mendapat bantuan dari BNPB berupa alat pemeriksaan PCR yang dapat memeriksa sebanyak 150-200 spesimen per hari dan sebelumnya rumah sakit tersebut juga memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang dapat memeriksa 48 spesimen per hari.

Sedangkan jumlah tenaga dokter yang menangani COVID-19 di RSD dr Soebandi yakni dokter spesialis paru 2 orang, dokter spesialis penyakit dalam 3 orang, dokter spesialis patologi klinik 3 orang, dan dokter spesialis radiologi tiga orang.

Minimnya transparansi anggaran COVID-19

Dalam menyusun anggaran COVID-19, Pemkab Jember tidak melibatkan atau melakukan koordinasi dengan DPRD Jember, bahkan tembusan alokasi anggaran Rp479 miliar juga tidak disampaikan kepada lembaga legislatif.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan mulai dari perencanaan anggaran, distribusi, dan eksekusi anggaran tidak melibatkan DPRD sama sekali, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengontrol penggunaan anggaran COVID-19 yang cukup besar tersebut.

“Nilai angka Rp479 miliar diputuskan sendiri oleh bupati secara sepihak. Kami tidak tahu dokumen anggaran penanganan kasus corona, apalagi untuk hal-hal teknis kami semakin tidak tahu,” katanya.

Politikus Partai Gerindra Jember itu mengatakan dewan sempat memanggil beberapa kali Tim Gugus Tugas untuk rapat dengar pendapat menanyakan berbagai hal terkait perkembangan COVID-19, namun tim tersebut tidak pernah hadir saat diundang dewan sehingga pihaknya tidak tahu sejauh mana penggunaan anggaran dan progres penanganan virus corona.

“Di Jember, realitanya kami tidak dilibatkan tidak seperti di daerah-daerah lain. Anggaran yang tahu pihak eksekutif sehingga kami kesulitan untuk mengontrol realisasi anggaran, bahkan seolah-olah informasi anggaran itu ditutupi,” ujarnya. Ia menilai ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif untuk menutup-nutupi anggaran tersebut, sehingga transparansi anggaran penanganan COVID-19 di Jember sangat buruk, apalagi banyaknya bantuan yang tumpang tindih dari alokasi anggaran pusat, Pemprov Jatim, APBD Jember, dan dana desa.

“Sejauh ini keterbukaan informasi dan transparansi anggaran COVID-19 tidak terbuka kepada dewan, apalagi kepada masyarakat. Kami bisa memantau perkembangannya melalui media sosial dan pemberitaan media saja,” katanya.

Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan dalam penanganan COVID-19 jika mengacu pada Surat Edaran Komisi Informasi Publik (KIP) Nomor 2 Tahun 2020 yang diterbitkan pada April 2020 menyebutkan ada tujuh kategori informasi yang perlu diumumkan secara terbuka pada masyarakat.

1. Informasi berkenaan dengan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit (episentrum/klaster), dan bentuk upaya pencegahannya.
2. Informasi penyebaran COVID-19 dengan tetap melindungi data pribadi ODP, PDP, pasien terkonfirmasi positif, dan orang-orang yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang.
3. Informasi penyebaran COVID-19 sebagai sarana peringatan dini bagi masyarakat yang meliputi area persebaran hingga ke tingkat dusun, desa atau kelurahan dengan tetap melindungi data pribadi; dan upaya mitigasi risiko penyebaran yang dilakukan pemerintah setempat.
4. Informasi layanan kesehatan meliputi rumah sakit rujukan/fasilitas kesehatan, kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien COVID-19; rencana belanja, distribusi dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan; akses layanan rapid test; nomor hotline layanan kesehatan; mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan; dan mekanisme pengaduan atas layanan penanganan COVID-19.
5. Informasi penanganan jenazah dan lokasi pemakaman khusus bagi pasien COVID-19.
6. Informasi mengenai akses, biaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19.
7. Informasi rencana kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan perubahannya.

“Dari ketujuh parameter informasi itu, saya menilai di Jember masih dalam sebatas informasi secara kuantitatif angka dan sebarannya hingga desa dan kecamatan, namun tidak menjangkau sampai dusun,” katanya.

Sementara informasi berkenaan dengan layanan kesehatan , belanja kesehatan dan distribusi layanan kesehatan termasuk ketersediaan layanan dan mekanisme pengaduan tidak begitu dijalankan dengan maksimal, apalagi informasi kemampuan akses masyarakat dalam layanan kesehatan.

Menurut Hermanto Rohman, peran media lebih banyak dimanfaatkan sebagai kapitalisasi informasi program pemerintah dan bupati saja daripada sebagai bentuk transparansi atas data yang akurat tentang informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Hal itu diperparah dengan komunikasi publik yang buruk karena informasi kadang tidak terjawab dengan lengkap dan maksimal, serta harus melalui birokrasi yang panjang dengan terkomando dan menunggu instruksi serta izin dari bupati sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Jember,” ucap pengajar administrasi negara FISIP Unej itu.

Ia mengatakan perlu dan wajib adanya keterbukaan informasi tentang COVID-19 jika mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 yang telah mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Hal itu termasuk informasi kebijakan, program dan anggaran. Ketiga informasi itu menjadi parameter yang harus dibuka kepada publik menurut undang-undang, namun Hermanto cukup prihatin dengan kondisi di Jember.

Jika informasi kebijakan program serta arah penanganan tidak jelas, lanjutnya, akan berdampak pada efektivitas penanganan COVID-19 di Jember karena terkait dengan pandemi penyakit dan penanganan yang tidak efektif akan berdampak pada hilangnya nyawa manusia.

Menurut ia, efektivitas itu tidak bisa dikawal atau diawasi karena tidak terbukanya informasi. Ada faktor kesengajaan karena pandemi tersebut momennya bersamaan dengan pilkada sehingga rawan kapitalisasi, bahkan penyalahgunaan terutama dalam anggaran dan program.

“Dengan dana yang besar tersebut jika riil ada dan penanganan program efektif tentunya Jember akan menjadi daerah zona hijau. Itu menandakan informasi tidak terbuka rentan terjadi salah urus kebijakan bahkan anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Imadoeddin mengatakan pihaknya selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur dan mengetahui kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik setiap tahun dengan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). “Tahun 2019, kami tidak bisa memberikan penilaian kepada Kabupaten Jember apakah menjadi daerah yang sudah informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif atau tidak informatif karena tidak mengembalikan Self Assessment Questionnaire (SAQ) ke KI Jatim,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya mengirimkan SAQ kepada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk diisi yang akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim penilai dan diakhiri dengan visitasi ke badan publik, namun hanya dua kabupaten yang tidak mengembalikan SAQ itu, yakni Kabupaten Jember dan Kabupaten Madiun.

Menurut Imadoeddin, ada beberapa alasan daerah tidak berpartisipasi dalam Award Keterbukaan Informasi Publik karena tidak ingin dinilai keterbukaan informasinya, tidak ada infrastruktur dan SDM yang bisa menangani itu, dan bisa juga itu merupakan kebijakan lokal pemerintah daerah setempat.

Pada tahun 2018, Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-27 dari 38 kabupaten/kota di Jatim dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan penilaian dari KI Jatim.

“Jember merupakan daerah yang tidak informatif sehingga kami terus mendorong agar semua badan publik bisa menjadi informatif dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Terkait dengan keterbukaan informasi selama pandemi COVID-19, KI pusat juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat COVID-19 pada 6 April 2020.

Dalam surat edaran tersebut, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

KI Pusat juga meminta Ketua Gugus Tugas dan kepala daerah mengupayakan adanya sistem data/informasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara real time dan memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring selama pandemi.

“KI Jatim juga mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Program Bantuan Sosial Dampak COVID-19 di Jatim yang berisi 10 poin,” kata Imadoeddin.

Salah satu di antaranya pemerintah daerah wajib menginformasikan secara transparan kepada publik tentang program bansos, meliputi jenis dan bentuk program, sumber dan besaran anggaran, target dan sasaran penerima, persyaratan dan kriteria penerima manfaat, serta tujuan program.

Pemerintah daerah juga wajib membuat laporan realisasi program dan anggaran, serta menginformasikan kepada publik melalui papan informasi maupun sarana lain yang bisa diakses oleh masyarakat.

“Kami berharap pemerintah daerah atau badan publik bisa membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat selama pandemi sehingga tidak ada informasi yang ditutupi, baik dalam data maupun anggaran COVID-19,” katanya.

Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun, sebelum sanksi pidana dijatuhkan kepada badan publik, harus dilalui lebih dulu proses sengketa informasi yang diajukan publik ke Komisi Informasi, karena ada beberapa tahapan yang dilalui sehingga publik bisa mengadakan proses pidana badan publik ke aparat kepolisian.

Keterbukaan informasi dalam penanganan COVID-19 sangat diperlukan karena merupakan salah satu langkah untuk mengedukasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Pewarta : Zumrotun Solichah

Editor : Didik Kusbiantoro

COPYRIGHT © ANTARA 2020

<https://jatim.antaranews.com/berita/405126/anggaran-covid-19-di-jember-terbesar-kedua-namun-minim-keterbukaan-informasi>

Widia Primastika

TANTANGAN IBU HAMIL DI MASA PANDEMI

Independen -- Yulaika Romandhani merasa kehamilannya yang kedua ini membuatnya lebih cemas dibanding sebelumnya.

Yula memang hamil di saat Indonesia sedang diserang pandemi Covid-19 yang menyebabkan dokter kandungan menyarankan ibu ini untuk tidak terlalu sering ke luar rumah, termasuk ke rumah sakit.

“Lebih was-was selama pandemi ini, lebih-lebih kalau ke Rumah Sakit (RS) dan harus berinteraksi dengan pihak RS (administrasi, farmasi, dokter, dll) yang tiap harinya berurusan dengan pasien Covid-19,” ujar Yulaika Romadhani kepada Independen.id.

Larangan ini juga karena jadwal dokter selama masa pandemi memang berkurang.

“Biasanya tri semester terakhir kontrol dua minggu sekali, saat ini sebulan sekali. Dari awal hamil kedua sebulan sekali kontrol ke rumah sakit,” tutur Yula yang hamil sejak Desember 2019 lalu.

Sementara Marina Nasution, ibu hamil yang tinggal di kawasan Jatinegara mengiyakan tentang kurangnya waktu kontrol dokter selama pandemi Covid-19.

Pengurangan ini bukan hanya untuk mengurangi intensitas ibu hamil ke luar rumah, tapi juga karena pengurangan waktu kontrol dokter dan peningkatan jumlah perempuan hamil.

Kondisi ini membuat Nina --begitu Marina disapa-- khawatir, apalagi kehamilannya merupakan kehamilan pertama. Selain itu, ia dan suami merupakan perantau yang jauh dari orangtua.

Sebetulnya rumah sakit tempat Nina memeriksakan kehamilan menyediakan fasilitas konsultasi daring untuk membantu ibu hamil mendapatkan tambahan informasi, tapi Nina merasa kurang nyaman.

“Dokter saya [yang pertama] kurang komunikatif. Pun saya terlalu *clueless* untuk bertanya pada dokter saya, mungkin karena ini merupakan pengalaman pertama saya, sehingga saya *clueless* begitu,” ungkap Nina kepada Independen.id.

Karena tak tahan dengan minimnya informasi yang ia dapatkan, Nina memilih untuk mengganti dokter di tengah kehamilannya. Ia merasa, dokter yang terakhir lebih komunikatif kepada pasien. “Jujur saja, informasi dari dokter saya yang pertama tidak begitu komprehensif. Saya sangat terbantu dengan adanya media sosial. Saat ini sudah banyak akun parenting, akun-akun edukasi kehamilan di media sosial seperti Instagram dan Youtube. Saya juga mengunduh aplikasi edukasi kehamilan seperti Teman Bumil sehingga saya bisa memantau kehamilan saya,” tutur Nina.

Selama kehamilan, Nina memilih untuk periksa ke rumah sakit yang berjarak sekitar 20 menit dari rumahnya. Selain lebih dekat dengan tempat tinggal, asuransi milik kantor suaminya mendukung pengobatan di rumah sakit ini. Namun itu tak memuat kecemasan Nina memudar.

Segendang penarian, Yula juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kehamilan di masa pandemi. Hal yang bisa dilakukan Yula adalah memilih mencari tahu lewat membaca buku, saling berbagi pengalaman dengan ibu hamil lain melalui daring seperti grup WhatsApp, Instagram, maupun Zoom, serta artikel-artikel di internet.

Biaya Persalinan Membengkak

Bukan hanya masalah informasi dan jadwal kontrol dokter yang berubah drastis, biaya persalinan juga membengkak dan meresahkan mereka yang sedang menunggu buah hati.

Yula yang tinggal di Bantul Yogyakarta ini misalnya memilih untuk memeriksakan kandungan ke rumah sakit ketimbang ke puskesmas karena khawatir virus korona.

Tentu saja itu bukan pilihan yang mudah karena ia harus merogoh kocek lebih dalam untuk kehamilan keduanya.

Yula memang punya BPJS Kesehatan dan asuransi dari kantor tempatnya bekerja. Namun, BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya persalinan di fasilitas kesehatan tingkat 1 yakni di Puskesmas, sedangkan di rumah sakit tempat ia memeriksakan kandungan tidak bisa menerima rujukan kelahiran normal dengan BPJS.

“Daerahku zona paling merah se-kabupaten soalnya. Aku memilih periksa ke RS, bukan puskesmas pun karena kekhawatiran virus korona juga. Puskesmas Banguntapan 1 & 2 sempat ditutup kemarin gara-gara dokter dan beberapa perawat positif Covid-19,” kata Yula.

Sementara, asuransi kesehatan dari Yula tidak mengcover biaya lahiran.

Sama seperti Yula, Nina juga khawatir dengan tambahan biaya kelahiran yang tinggi di masa pandemi. Berdasarkan informasi yang Nina dapatkan dari media sosial, lonjakan biaya kelahiran disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Kecemasan Yula dan Nina memang terbukti. Restu Diantina Putri, perempuan yang melahirkan anak pertamanya di bulan Mei 2020 lalu membenarkan adanya pembengkakan biaya persalinan karena penerapan protokol khusus Covid-19. Biaya

tambahan yang ia keluarkan juga tidak sedikit.

“Saat melahirkan, protokolnya bertambah dengan melakukan rapid test dan rontgen thorax untuk ibu hamil dan suami atau pendamping yang akan menemani selama dan pasca persalinan. Kebetulan suamiku diketahui ada pneumonia ringan, jadi diharuskan menggunakan ruang VIP. Tidak boleh ada pasien lain. Selain itu, ibu dan bayi tidak boleh dijenguk,” ungkap Restu kepada Independen.id.

Saat hamil, Restu juga mendapatkan edukasi kehamilan dan informasi tentang biaya persalinan dari internet, bukan dari RS. Setelah melahirkan, Restu juga hanya kontrol sekali ke rumah sakit.

“Kontrol pasca lahiran cuma sekali. Harusnya kontrol lagi sekali, tapi berhubung kondisiku sudah stabil, jadi enggak kontrol lagi. Selain karena Covid, karena biaya juga,” tandasnya.

Rapid Test	Rp. 85.000, - sampai Rp. 150.000,- (per orang)
Rontgen Thorax	Rp. 180.000, - sampai Rp. 350.000,- (per orang)
Swab Test	Rp. 1,5 juta - sampai Rp. 2,5 juta (per orang)
Masker Sekali Pakai	Rp. 50.000, - sampai Rp. 150.000,- (per box)
APD	Rp. 300.000, - sampai Rp. 500.000,- (per hari)

** biaya rapid test, rontgen thorax, dan swab test merupakan biaya per orang. Saat persalinan, yang melakukan ketiga tes tersebut tak hanya perempuan hamil, tapi juga orang yang menemani ibu hamil.*

Hamil di masa pandemi memang bukan cita-cita Yula dan Nina, apalagi mengingat angka kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya.

Berdasarkan data di situs Kementerian Kesehatan per tanggal 11 September pukul 05.16 WIB, ada 207.203 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia dengan jumlah pasien meninggal mencapai 8.456 kasus.

Angka Kehamilan Meningkat di Sejak Masa PSBB

Pandemi Covid-19 ini membuat angka kehamilan meningkat, terutama sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti dikutip dari Kontan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, pada bulan Juni 2020 lalu ia menyampaikan tentang adanya penurunan peserta program Keluarga Berencana (KB) pada April 2020.

“KB aktif per bulan 36 juta. April turun banyak. Penurunan antar provinsi rata-rata 10-15% dari akseptor sebelumnya,” kata Hasto seperti diberitakan Kontan.

Hasto memperkirakan, selama masa tersebut ada penambahan angka kehamilan sekitar 370.000 sampai 500.000. Angka tersebut ia dapatkan dari persentase kehamilan Pasangan Usia Subur (PUS) paling rendah yakni 15 sampai 20 persen.

Selama masa pandemi Covid-19, beberapa daerah pun membeberkan adanya peningkatan kehamilan.

Di Jawa Barat misalnya, seperti diberitakan Pikiran Rakyat, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerangkan adanya lonjakan kehamilan yang tinggi saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Barat. Adapun kota yang tertinggi angka kehamilannya yakni Bandung (2.210 orang), Cirebon (2.210 orang), Garut (1.950 orang), Tasikmalaya (1.205 orang), Ciamis (1.188 orang), dan Sumedang (1.175 orang).

Angka kehamilan yang tinggi juga terjadi di Blora, Jawa Tengah. Seperti diberitakan Okezone.com, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Blora mencatat 4.980 kehamilan di bulan Juni. Kenaikan angka di Kabupaten Blora dimulai sejak Maret dan terus mengalami peningkatan hingga Juni.

Peningkatan angka kehamilan juga terjadi di Kabupaten Batang, seperti ditulis Radar Pekalongan, angka kehamilan di Batang mengalami peningkatan 10 sampai 15 persen. Pada bulan Januari hanya ada 735 kehamilan, tapi di bulan Juni mencapai 913 kehamilan. Begitu juga di Kabupaten Magelang, Radar Banyumas memberitakan terdapat kenaikan signifikan yang dimulai dari bulan Mei pada angka kehamilan pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Dukun (132 persen), Kecamatan Ngluwar (47 persen), dan Kecamatan Mertoyudan (34 persen).

Ibu Hamil Hadapi Masalah Faskes dan Kesiapan Mental

Nanda Dwinta Sari, Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menerangkan bahwa kebutuhan hak kesehatan reproduksi perempuan tak hanya akses mudah ke fasilitas kesehatan (faskes).

“Kesehatan reproduksi tidak hanya persoalan medis, ada persoalan mental, perubahan hormon. Itu memang bisa dilihat,” tegas Nanda.

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Ia menceritakan pengalaman kawannya yang melahirkan di tengah pandemi.

“Kawan saya yang baru melahirkan, dia hamil pertama, butuh didukung, itu enggak bisa ditungguin dengan keluarganya. Sementara itu, dia caesar dan melahirkan di malam hari. Orangtuanya juga cemas dan dia cemas. Akhirnya dia harus menjalani caesar karena sampai dia lahiran itu tensinya tinggi karena tegang. Padahal sebetulnya dia sehat. Ini sebetulnya juga jadi masalah kan?” ungkap Mike.

Masalah hak kesehatan reproduksi perempuan semakin pelik ketika mereka berada di daerah terpencil dan golongan masyarakat miskin. Menurut Nanda dan Mike, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan kebutuhan para perempuan selama pandemi Covid-19. Pemerintah harus sadar

dengan keberadaan perempuan hamil dan melahirkan yang termasuk dalam kelompok rentan.

“Kesehatan reproduksi seperti tidak menjadi perhatian. Jadi kita mendorong pemerintah untuk segera mengubah kebijakan yang fleksibel karena kondisi saat ini,” ungkap Nanda.

“Ini menjadi PR kita bersama, harus kita advokasi. Kita harus mendorong pemerintah untuk merespons situasi seperti ini secara cepat. Sayangnya, ketika kita mencoba berdialog dengan Kementerian Kesehatan, itu bukan hal yang mudah,” lanjut Nanda.

“Di wilayah kota mungkin jumlah bidan mencukupi, tapi masalahnya di daerah terpencil itu jumlah bidannya terbatas. Usulan penjangkauan dihadapkan pada problem ketersediaan bidan karena tidak semua desa, kota, kabupaten itu punya bidan yang mencukupi,” ungkap Mike.

Laporan yang masuk ke YKP dan KPI menemukan bahwa para ibu banyak mengeluhkan keterbatasan informasi, baik itu di kota besar maupun di kota kecil. Akhirnya ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini, para perempuan justru menerima informasi tidak resmi.

Penulis : Widia Primastika

Liputan ini adalah program transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 yang didukung AJI Indonesia dan UNESCO

<https://independen.id/read/khusus/960/tantangan-ibu-hamil-di-masa-pandemi/>

POTENSI LEDAKAN PENDUDUK KARENA COVID-19

Independen --- Dokter kandungan mulai mengkhawatirkan adanya ledakan penduduk di Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya (POGI Jaya), dr. Ulul Albab, SpOG mengatakan bahwa ledakan kelahiran yang diperkirakan terjadi sejak sekitar bulan Desember menjadi salah satu perhatian POGI selama pandemi Covid-19.

“Kita khawatir juga dengan baby boomer dan pandemi yang belum berakhir dan kebiasaan masyarakat yang cenderung agak acuh terhadap kesehatan. Saya khawatir kejadian ibu hamil yang positif Covid-19 akan meningkat dan ini perlu penanganan khusus. Karena kalau enam bulan lagi pandemi belum berakhir (dengan perkiraan permulaan pandemi di bulan Maret), bayi-bayi itu sekitar Desember-Januari ada ledakan kelahiran dan kita harus siap-siap,” ungkap Ulul.

Sebetulnya, kata Ulul, POGI Jaya dan PB IDI telah menyurati Kementerian Kesehatan untuk menunjuk rumah sakit khusus ibu hamil dengan Covid-19, tapi permohonan tersebut belum diwujudkan.

“Saya pikir, kan ada yang beda antara penanganan untuk ibu hamil dan pasien yang non hamil karena ibu hamil ini ada anaknya. Jadi kita harus mempersiapkan saat dia hamil, proses persalinan, maupun pasca persalinan. Kan berbeda. Sampai sekarang saya belum terinfo mana rumah sakit yang ditunjuk khusus untuk pasien hamil dengan Covid-19,” ujar Ulul.

Farida Masrurin, perempuan yang baru saja melakukan persalinan di Blitar, Jawa Timur, mengakui bahwa banyaknya pasien di rumah sakit membuat para perempuan was-was ketika memeriksakan kandungan dan pasca persalinan.

“Banyak yang ngeluh, periksa jadi banyak orang, bisa 38 atau 35 pasien karena yang hamil besar mereka periksa di rumah sakit dan enggak boleh di bidan, jadi semua pada ke rumah sakit untuk periksa dan persiapan persalinan. Jadi rumah sakit kebanjiran pasien melahirkan,” tutur Farida kepada Independen. id (18/08/2020).

Menurut Farida, seharusnya pemerintah memperkenankan bidan desa menerima persalinan bagi perempuan yang tidak berisiko tinggi agar tak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

Selain risiko penularan yang lebih tinggi karena penumpukan pasien, Farida mengatakan bahwa aturan persalinan selama masa pandemi Covid-19 memberatkan dirinya yang melakukan proses persalinan caesar karena hanya memperbolehkan satu pendamping.

“Yang agak membuat kami enggak enak itu yang menunggu pasien itu tidak boleh lebih dari satu. Padahal kalau caesar itu kalau bangun saja susah, jadi minimal dua lah ya. Ini hanya boleh satu orang,” ungkap Farida.

Kerepotan lain yang dialami Farida yakni saat kontrol pasca bersalin. Jika sebelum pandemi para pasien boleh diwakilkan saat mengambil antrian pendaftaran, saat ini para pasien harus ikut dalam proses pendaftaran. Ini tentu memberatkan dirinya yang melakukan persalinan secara caesar.

“Dulu kita bisa mengambil pendaftaran dengan diwakilkan, kalau caesar itu kan karena jalan agak susah, antri banyak agak susah, jadi nomor antrian bisa diambilkan dengan orang lain. Kalau sekarang pasien harus ambil sendiri, harus dicek

termometer tubuh dan surat pernyataan bermaterai. Tiap periksa harus menyiapkan materai enam ribu,” tambahnya.

Aditya Widya Putri, perempuan hamil yang saat ini berada di Entikong, Kalimantan Barat menuturkan bahwa informasi yang ia dapatkan saat kehamilan sudah cukup, tapi ia membutuhkan informasi lokasi persalinan.

Perempuan yang akrab disapa Adit ini khawatir, persalinan di rumah sakit umum akan meningkatkan risiko terpapar Covid-19. “Persalinan sudah mulai riset dari sekarang, harus lahiran di mana, karena kalau di rumah sakit umum itu kan kontak dengan pasien umum selain ibu hamil atau melahirkan lebih banyak. Jadi risiko terpapar Covid kan lebih tinggi. Jadi mungkin akan ambil di Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak atau klinik bersalin,” ungkap Adit.

Program “Satu Juta Akseptor” untuk Tekan Angka Kehamilan Untuk menghindari ledakan penduduk, pemerintah ternyata sedang mengadang-gadang program “Satu Juta Akseptor” dengan memberi akses kontrasepsi dari pintu ke pintu.

“Sehari di tanggal 29 Juni kemarin, dalam rangka hari keluarga. Kita lakukan kerjasama dengan bidan, TNI, dan Polri. Gerakan sejuta akseptor itu satu desa 20 akseptor. Se-Indonesia itu kan ada 74 ribu desa, kalau satu desa itu 20 kan sudah satu juta akseptor,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, kepada Independen (28/07/2020).

Dalam wawancara tersebut, Hasto menganggap bahwa angka kehamilan selama pandemi bisa ditekan setelah adanya program satu juta akseptor. Ia juga menjelaskan ihwal kekhawatiran warga untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan kontrasepsi saat pandemi Covid-19 telah dituntaskan dengan gerakan pintu ke pintu dan memperkenankan penyuluh yang biasanya tak membawa obat untuk memberikan obat.

BKKBN memang telah mengadakan program satu juta akseptor,

tapi masalah kesehatan reproduksi perempuan selama masa pandemi ternyata tak hanya di situ.

Yanti Indra, salah satu kader Keluarga Berencana (KB) di Padang Jaya, Tanah Datar, menjelaskan bahwa peningkatan kehamilan disebabkan karena para perempuan tak cocok dengan alat kontrasepsi yang tersedia sehingga banyak yang akhirnya tak menggunakan alat kontrasepsi dan melakukan KB alami.

KB alami yang dimaksud Yanti yakni menghitung kalender menstruasi atau melakukan ejakulasi di luar vagina.

“Memang KB alami itu kan ada melesetnya, makanya ada kehamilan meningkat, yang biasanya menggunakan suntik lalu suruh minum pil, karena enggak cocok menyebabkan dia hamil,” ungkap Yanti saat dihubungi Independen.id (18/08/2020).

Program sejuta akseptor yang dilakukan oleh pemerintah memang telah berjalan di wilayah tempat Yanti bekerja. Selain itu, poliklinik desa (polindes) di daerahnya juga bisa menyediakan alat kontrasepsi, tapi hal tersebut tak serta merta membuat para ibu berani pergi ke pengada layanan kesehatan.

“Kebetulan bulan kemarin orang BKKBN mengadakan safari KB di kecamatan. Bulan ini programnya masih jalan. Di polindes sih tidak ada pembatasan pasien, cuma pasiennya saja yang takut datang ke polindes. Sebetulnya kemarin sempat lancar, nah sekarang karena sudah bebas new normal dan orang rantau pulau kampung, sekarang di Tanah Datar zona merah, setiap hari kasusnya meningkat, jadi sekarang masyarakat mulai cemas lagi, takut ke polindes lagi,” tutur Yanti.

Cerita serupa juga disampaikan oleh Nurjanah, kader Posyandu di Kelurahan Selamat, Kota Jambi. Ia bersama dengan kader KB lainnya memang telah mendata penggunaan alat kontrasepsi di masing-masing rumah tangga, tapi pembatasan waktu operasional puskesmas yang terbatas menjadi kendala tersendiri. “Kendalanya jam buka puskesmas, jam delapan lewat baru buka. Jadi kendalanya mau datang ke puskesmas agak susah,”

tutur Nurjanah saat dihubungi Independen.id (18/08/2020).

Selain itu, kata Nurjanah, meski pemerintah menyediakan program satu juta akseptor gratis, banyak perempuan yang memilih untuk tidak KB atau menggunakan alat kontrasepsi berbayar di klinik karena tidak cocok dengan alat kontrasepsi yang disediakan.

“Ada beberapa yang tidak KB karena alasan enggak cocok. Mereka yang tadinya KB ada yang tetap memilih untuk bayar. Kendalanya karena yang digratiskan itu sebulan, mereka tidak mau, jadi memilih tetap membayar karena enggak cocok itu,” ungkap Nurjanah.

Masih di Kota Jambi, Hellina, salah satu kader KB di Broni, Kota Jambi, menyampaikan bahwa para perempuan tak punya pilihan selain membayar alat kontrasepsi lain apabila tak cocok dengan program pemerintah.

“Memang sih selama ini kita cuma di kelurahan ada pendataan. Di tempat saya enggak terlalu banyak yang hamil karena mereka berpikir kalau enggak cocok sama alat kontrasepsi ini, mereka pakai yang lain karena mereka juga memikirkan kondisi ekonomi, jadi ya pakai yang lain,” tutur Hellina saat dihubungi via telepon oleh Independen.id (18/08/2020).

Tentu saja memasang alat kontrasepsi ini tak semudah biasanya. Para perempuan ini harus mendaftar jauh-jauh hari sebelum memasang alat kontrasepsi.

“Sulitnya mereka tidak bertepatan dengan waktunya. Jadi harus ngikutin waktunya dengan puskesmas, harus didata dulu. Nggak ada yang tepat waktu, molor. Malah kemarin saat puasa itu mereka sempat repot. jadi aku kasih informasi kalau pelayanan KB sudah buka, tapi harus atur waktunya. Kami mengutamakan yang pasang, tapi banyak juga yang sudah waktunya bongkar,” ungkap Hellina.

Dokter di Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

(PKBI) DKI Jakarta Teza Farida mengatakan bahwa di kota besar seperti Jakarta, pasokan untuk alat kontrasepsi memang tak menjadi masalah, tapi bagi daerah terpencil, proses distribusi kontrasepsi sempat menjadi kendala.

“Biasanya cuma dua minggu, ini bisa sebulan-dua bulan baru sampai,” ungkap Teza kepada *Independen.id*, (28/07/2020).

Selain itu kata Teza, tak sedikit perempuan yang takut datang ke rumah sakit atau ke puskesmas dan memilih datang ke bidan. Di Klinik PKBI DKI Jakarta sendiri, kata Teza, untuk mengatasi kekhawatiran para perempuan, mereka membuat janji temu untuk para pasien agar terhindari dari penumpukan orang.

“Jarak antara pasien satu dan lainnya tergantung jenis pemeriksaan, antara setengah sampai satu jam. Kalau KB, tergantung jenis KB-nya, kalau suntik, biasanya setengah jam selesai. Kalau bongkar pasang IUD, sekitar satu jam selesai, tergantung dari pemasangan IUD atau implan,” kata Teza.

Independen.id telah berusaha untuk mengonfirmasi segala permasalahan hak kesehatan reproduksi pada perempuan saat pandemi Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tapi tidak ada respons dari mereka.

Permohonan wawancara kepada KPPPA telah disampaikan sejak tanggal 20 Juli 2020 melalui telepon dan WhatsApp, baik melalui staf humas maupun langsung menghubungi deputi terkait, tapi tidak pernah ada jawaban.

Surat resmi permohonan wawancara juga telah dilayangkan kepada KPPPA, tapi hingga berita ini diunggah, KPPPA tak kunjung memberikan jawaban.

Sedangkan kepada Kementerian Kesehatan, *Independen.id* juga telah berusaha mengonfirmasi masalah kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan kelahiran dan akses hak kesehatan reproduksi perempuan, tapi sejak tanggal 28 Juli 2020 hingga

berita ini diunggah, Kementerian Kesehatan juga tak merespons.
Baca juga : Tantangan Ibu Hamil di Masa Pandemi

Penulis : Widia Primastika

Liputan ini adalah program transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 yang didukung AJI Indonesia dan UNESCO

<https://independen.id/read/khusus/961/potensi-ledakan-penduduk-karena-covid-19/>

Shinta Maharani

MENYOAL PENGUNAAN CHLOROQUINE UNTUK PENGOBATAN PASIEN COVID-19

Reporter: Shinta Maharani (Kontributor)

Editor: Syailendra Persada

Senin, 24 Agustus 2020 09:32 WIB



Obat malaria, Chloroquine. Peringatan agar tidak menggunakannya sebagai obat COVID-19 meluas. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA).

TEMPO.CO, Jakarta - Sigit Purwanto gugup begitu mengetahui hasil uji usap menunjukkan dia terinfeksi virus corona pada pertengahan Juli lalu. Bersama 46 tenaga kesehatan, perawat

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta, dia menjalani tes swab karena kerap bersentuhan dengan pasien dan berisiko terpapar virus. Hanya dia seorang yang dinyatakan positif Covid-19.

Sigit tak memiliki gejala seperti batuk dan pilek. Ia akhirnya diinapkan di ruang isolasi bangsal khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Bantul. "Istri stres dan menangis. Dalam suasana ketakutan, saya berusaha keras menenangkan diri," kata dia, Selasa, 11 Agustus 2020.

Lelaki berusia 43 tahun ini mendapat perawatan khusus dari dokter spesialis paru dan jantung karena dia memiliki riwayat gangguan irama jantung atau aritmia. Dokter menyatakan ada infeksi pada paru-paru Sigit.

Riwayat aritmia itulah yang membuat dokter yang merawat Sigit tak memberinya obat Chloroquine atau klorokuin. Obat ini digunakan sebagai satu di antara sejumlah pengobatan eksperimen untuk mengatasi Covid-19 sepanjang vaksin dan obat sesungguhnya belum tersedia. Masalahnya klorokuin menimbulkan efek samping serius pada jantung.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mencabut izin penggunaan darurat klorokuin untuk merawat pasien Covid pada 15 Juni lalu. FDA menilai obat tersebut tidak menyembuhkan pasien yang terinfeksi covid. Brazil menghentikan penggunaan obat tersebut setelah beberapa pasien mengalami komplikasi jantung yang berpotensi fatal. Beberapa pasien yang menggunakan dosis tinggi obat ini mengalami detak jantung tidak teratur.

Sepuluh hari mengisolasi diri di rumah sakit, Sigit rajin mengonsumsi vitamin C, antivirus, dan antibiotik. Dia mendapat banyak pasokan buah dari keluarganya. Makan makanan bergizi, rutin minum susu, dan kacang hijau.

Selain itu, ia memutuskan berhenti menyaksikan televisi, mendengar berita-berita yang menakutkan dan menyedihkan

tentang pandemi Corona. Sigit rajin berolahraga untuk meregangkan otot dan mengusir kebosanan dengan cara melakukan panggilan video dengan keluarga dan sahabatnya.

Akhirnya, pada 26 Juli kondisi Sigit membaik. Dia menjalani tes swab pada 20 dan 22 Juli dan dinyatakan negatif. Dia berpesan untuk pasien Covid-19 agar berusaha sembuh. “Berpikir positif terapi yang manjur,” katanya.

Perawat Puskesmas Kasihan, Bantul, Siti Mulyani, juga tak menggunakan klorokuin sebagai obat selama menjalani isolasi bersama belasan pasien lainnya di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 di Bambanglipuro, Bantu. Perempuan 46 tahun ini memiliki riwayat penyakit asma.

Siti rutin minum vitamin C, B complex, madu, dan makan makanan kaya protein dan kalori. Siti percaya menjaga harapan di tengah ketakutan menjadi terapi penyembuhan. “Berpikir positif untuk menjaga kekebalan tubuh,” katanya.

Di shelter tempat dia mengisolasi diri, Siti tertib istirahat dan mematuhi semua saran dokter. Tanggal 30 Juli, kondisinya membaik dan dokter menyatakan negatif setelah dia menjalani uji swab.

Ibu tiga anak ini bercerita sempat kalut tatkala dia mengetahui hasil uji swab positif. Siti yang terisak menghubungi suaminya untuk memberi kabar hasil tersebut. Tapi, dia berusaha untuk mengatasi ketakutannya perlahan-lahan.

Namun, dokter paru di sejumlah rumah sakit rujukan Yogyakarta masih menggunakan klorokuin untuk sebagian pasien Covid-19. Salah satu rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. Ketua Tim Airborne Disease RSUP Dr. Sardjito, Ika Trisnawati mengatakan RS ini masih menggunakan klorokuin untuk pasien Covid-19.

Laporan ahli yang dipublikasikan melalui <https://www.preprints.org/manuscript/202005.0190/v1> menunjukkan satu dari 200

pasien yang menerima terapi hidroklorokuin dan azythromycin selama 24 jam mengalami kerusakan atrioventrikular block. Yaitu aritmia yang terjadi karena gangguan atau penyumbatan sebagian atau seluruh konduksi impuls listrik dari atrium jantung menuju ventrikel.

Kasus itu terjadi pada seorang laki-laki dewasa muda Indonesia dengan suspek pneumonia covid. "Satu kasus dari 200 pasien dengan hidroklorokuin," kata Ika.

Hidroklorokuin diterima secara luas pada pneumonia covid ringan dan sedang. Dokter spesialis paru RSUP dr Sardjito, Munawar Gani mengatakan klorokuin masuk dalam daftar obat yang digunakan tim Pakar Medis Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Selain klorokuin, pedoman yang disusun para pakar itu menyertakan antibiotik, vitamin C dosis tinggi, dan obat lain sesuai penyakit penyerta pasien.

Lima tim tersebut terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. "Trialnya Klorokuin disetop. Tapi dari lima organisasi masih merekomendasikan," kata Munawar Gani.

Majalah Tempo menulis Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan penghentian uji Coba Solidaritas (Solidarity Trial) untuk hidrosiklorokuin. WHO Menilai obat itu tidak bermanfaat untuk penyembuhan pasien Covid-19. Uji klinis bersama tersebut dilakukan di lebih dari 400 rumah sakit di 35 negara. Salah satu yang mendasari keputusan WHO adalah riset Oxford University yang hasilnya dipublikasikan 5 Juni.

Penelitian menunjukkan hidrosiklorokuin tak mengurangi risiko kematian. Sebanyak 26 persen pasien yang diberi obat tersebut meninggal. Sedangkan pasien yang diberi obat lain sebanyak 24 persen meninggal.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Siti Badriyah mengatakan dinasnya telah mendistribusikan 10 ribu butir klorokuin dari Kementerian Kesehatan sejak April. Distribusi klorokuin menurut Siti dilakukan sesuai permintaan rumah sakit rujukan. "Seiring berjalannya waktu tidak ada permintaan lagi," ujar Siti.

Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zullies Ikawati menyebutkan penggunaan klorokuin tidak efektif untuk pasien covid. Bukti klinis efektivitas klorokuin bervariasi dan belum signifikan untuk pasien covid. Studi observasi di Indonesia menunjukkan belum ada laporan resmi dan uji klinis bahwa penggunaan klorokuin mempersingkat perawatan pasien covid di rumah sakit.

Obat keras ini memiliki efek samping di antaranya gangguan irama jantung seperti pada perpanjangan interval QT (pada elektrokardiogram atau EKG) dan percepatan denyut jantung (takikardia). "Tidak direkomendasikan bagi pasien yang mengalami gangguan irama jantung," kata Zullies

Pada penggunaan jangka lama bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Efek samping lainnya adalah menyebabkan mual, muntah, dan diare. Menurut Zullies, sebagian rumah sakit di Indonesia sudah mulai mengurangi penggunaan obat ini.

Untuk pengobatan pasien covid meminum obat ini dua kali sehari sebanyak 500 miligram untuk jangka waktu 5-7 hari. Sebagian rumah sakit lebih memilih menggunakan obat batuk, penghilang nyeri. "Lebih baik meningkatkan sistem imun ketimbang klorokuin yang tidak terlalu efektif," kata dia.

Zullies menemukan sejumlah pasien di RS Darurat Wisma Atlet tak banyak terbantu setelah minum klorokuin hingga 14 hari masa karantina. Bersama LIPI, Zullies meneliti uji klinis kandidat imunomodulator dari produk herbal dalam penanganan Covid-19 bersama LIPI di rumah sakit tersebut.

Data sementara menunjukkan tidak meningkatkan risiko

kematian dibandingkan dengan terapi standar Covid menurut BPOM. Sejauh ini belum dilaporkan adanya kematian mendadak akibat penggunaan klorokuin atau hidroksiklorokuin di Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah membeli Chloroquine, obat influenza yang dikembangkan Toyama Chemical Jepang. Jokowi telah mendatangkan 3 juta butir klorokuin. Padahal, WHO belum merekomendasikan obat apapun untuk mengatasi Covid-19. WHO masih berupaya mencari obat terbaik untuk menyembuhkan penderita penyakit ini.

Tapi, pemerintah Indonesia malah menggunakan Hidroklorokuin, turunan dari klorokuin (Chloroquin) untuk uji klinis tiga kombinasi obat covid melalui Universitas Airlangga. Guru Besar Farmasi UGM Zullies menyebutkan di Indonesia belum ada data tentang obat tersebut sehingga ada alasan untuk diujikan.

Hingga saat ini pedoman terapi covid masih memasukkan obat itu dan diserahkan kepada dokter. “Apakah akan menggunakannya atau tidak berdasarkan keyakinan masing-masing klinisi atau dokter,” kata Zuillies.

Shinta Maharani

<https://nasional.tempo.co/read/1378773/menyoal-penggunaan-chloroquine-untuk-pengobatan-pasien-covid-19>

Nefri Inge

CARUT MARUT RSUD OGAN ILIR TANGANI PASIEN COVID-19 (I)

Nefri Inge

07 Agustus 2020, 07:30 WIB



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Pemecatan 109 orang tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumatera Selatan, terjadi di tengah pandemi Corona Covid-19 di Sumsel. Yaitu tepatnya pada hari Rabu (20/5/2020) atau beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PDTH) Nomor 191/KEP/RSUD/2020, ke 109 orang nakes di RSUD Ogan Ilir Sumsel.

Keputusan ini diambil Ilyas Panji Alam, setelah adanya laporan tentang aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan nakes, mogok kerja selama lima hari dari hari Jumat (15/5/2020) hingga Selasa (19/5/2020), hingga meminta Alat Pelindung Diri (APD), rumah singgah dan insentif yang diklaim Bupati Ogan Ilir sudah disiapkan sejak awal.

Namun hal berbeda diungkapkan beberapa orang nakes yang menjadi korban pemecatan Bupati Ogan Ilir tersebut.

IR (nama samaran), salah satu sopir ambulans di RSUD Ogan Ilir, yang sudah 7 tahun bekerja di RSUD Ogan Ilir Sumsel menceritakan apa yang terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD) saat menangani pasien Covid-19.

Awalnya para nakes mendapatkan informasi adanya 16 orang pasien Covid-19 dari satu kecamatan di Ogan Ilir, yang akan dirujuk ke IGD RSUD Ogan Ilir pada hari Kamis (14/5/2020) malam.

Akhirnya hanya 5 orang pasien Covid-19 yang mau dirujuk ke RSUD Ogan Ilir. Rumah sakit ini memang ditunjuk Gubernur Sumsel Herman Deru, sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir.

Dia mengakui jika banyak nakes di IGD RSUD Ogan Ilir, tidak diberitahu apapun tentang informasi atau pun edukasi penanganan pasien Covid-19. Penunjukan nakes sebagai Satgas Penanganan Covid-19 di RSUD Ogan Ilir juga dilakukan secara tertutup.

“Waktu pasien sampai, di-screening, cek laboratorium dan rontgen. Saat itu, ada 3 orang petugas satgas Covid-19 di ruangan IGD. Pasien tersebut seharusnya akan dirujuk kembali

ke Rumah Sehat Jakabaring Palembang. Karena 3 unit ruang isolasi khusus Covid-19 sudah penuh dengan masing-masing pasien,” ujarnya, saat ditulis Kamis (6/8/2020).

Tunjuk Nakes Non-Satgas

Direktur Utama (Dirut) RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama meminta IR, untuk membawa pasien tersebut ke Jakabaring Palembang. Namun tidak ada petugas Satgas Covid-19 yang mau mendampingi.

Karena merasa tupoksinya hanya sebagai sopir, IR pun meminta petugas Satgas Covid-19 yang sedang masuk dinas, untuk menemaninya ke Palembang.

Saat dia meminta Kepala Seksi (Kasi) Keperawatan RSUD Ogan Ilir Rika untuk menunjuk petugas Satgas Covid-19 yang akan menemaninya, Rika mengatakan jika petugas Satgas Covid-19 tidak bisa berangkat. Rika pun menunjuk nakes non-satgas Covid-19, untuk menemani IR.

“Pihak manajemen menginstruksikan perawat lain di ruang penyakit dalam, yang bukan Satgas Covid-19. Tapi itu bukan tugas mereka. Untuk apa Satgas Covid-19 dibentuk, jika masih melibatkan non-satgas. Karena kita tidak pernah ditunjuk atau diberitahu apapun,” ujarnya.

Rika juga menolak menugaskan petugas Satgas Covid-19 lainnya, yang sudah tidak masuk jam kerja dan hanya berdiam diri di rumah singgah Covid-19 Ogan Ilir.

Pakai Hazmat Berlapis

Karena tidak adanya kejelasan, IR berniat untuk membawa 5 orang pasien Covid-19 tersebut sendirian ke Palembang. Rasa panik dan tidak ada sama sekali edukasi tentang penggunaan baju Hazmat, membuat IR memproteksi diri dengan menggunakan 5 lapis pakaian.

Lapisan pertama yaitu pakaian kerja, lapisan kedua jas hujan plastik, lapisan ketiga baju Hazmat baru dan lapisan empat dan lima baju Hazmat bekas rekan kerjanya.

“Kami di IGD hanya diberi 1 lembar baju Hazmat, jadi terpaksa dicuci pakai terus. Masker juga dijatahi 1 lembar per hari. Jadi saya pakai 3 lembar masker, yaitu masker medis dan masker bedah. Saya hanya berpikir untuk memproteksi diri, karena akan bersentuhan dengan pasien Covid-19,” katanya.

Setelah menggunakan berlapis-lapis baju Hazmat, dia pun disuruh ke sana kemari untuk mencari nakes yang bersedia menemaninya ke Palembang. Karena banyak gerak dan suplai oksigen terhambat akibat penggunaan baju Hazmat yang salah, IR jatuh pingsan di depan IGD RSUD Ogan Ilir.

Rencana untuk membawa 5 orang pasien Covid-19 pun, akhirnya batal pada Kamis malam. Para pasien ditempatkan di ruangan anak-anak untuk sementara waktu, hingga keesokan harinya akan kembali dibawa ke Palembang.

CARUT MARUT RSUD OGAN ILIR TANGANI PASIEAN COVID-19 (2)

07 Agustus 2020, 09:30 WIB



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Kekesalan IR tak sampai di situ saja. Pada Jumat (7/5/2020), dia mendapatkan perundungan dari pihak manajemen RSUD Ogan Ilir Sumsel, tentang kesalahan penggunaan baju Hazmat yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai prosedur.

“Saya dicemooh, dibilang berlebihan pakai hazmat sampai lima lapis, seperti dokter saja. Di situ agak kesal, karena memang

saya tidak diberitahu, untuk supir itu level berapa penggunaan hazmat, bagaimana cara penggunaan dan melepasnya. Tidak ada sama sekali edukasi dari manajemen,” ujarnya, saat ditulis Kamis (6/8/2020).

Selain itu, IR dan supir lainnya juga tidak diarahkan oleh manajemen RSUD Ogan Ilir, tentang bagaimana tindakan untuk mencegah penularan Covid-19 setelah merujuk pasien Covid-19 ke Palembang.

Pihak manajemen juga tidak pernah memberitahu bagaimana caranya agar mendapatkan kamar di rumah singgah. Yang mana, rumah singgah tersebut hanya diisi para satgas Covid-19 yang ditunjuk manajemen RSUD Ogan Ilir saja.

Pada hari itu juga, terjadi perdebatan antara manajemen dan sopir ambulans RSUD Ogan Ilir yang sedang bertugas, disaksikan oleh keluarga pasien Covid-19.

Salah satu sopir ambulans menolak mengantar para pasien Covid-19 ke Palembang, karena tidak ada sama sekali pemberitahuan atau edukasi bagaimana caranya mengevakuasi pasien Covid-19. Salah satu pihak manajemen menyarankan sopir tersebut untuk mengundurkan diri dari RSUD Ogan Ilir, karena menolak mengantar pasien Covid-19 tersebut.

Hingga akhirnya Dirut RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama, memerintahkan satpam dan perawat dari bidang manajemen, untuk membawa 5 orang pasien tersebut ke Rumah Sehat Jakabaring Palembang.

“Saya akhirnya menemui Dirut RSUD Ogan Ilir dan menanyakan tentang semuanya. Tentang APD yang dibatasi, rumah singgah yang tidak pernah diarahkan ke kami, hingga penunjukan Satgas Covid-19 yang dilakukan tertutup oleh manajemen. Bahkan, pemberitahuan jika kami juga dilibatkan pun, tidak pernah ada,” ujarnya.

IR menjelaskan, jika Kasubag Perlengkapan RSUD Ogan Ilir Sunarko juga membenarkan di depan Dirut RSUD Ogan Ilir, jika

tidak ada koordinasi dari pihak manajemen tentang penunjukan Satgas Penanganan Covid-19 di RSUD Ogan Ilir.

Di saat itulah, Dirut RSUD Ogan Ilir baru memberitahunya jika seluruh nakes di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 menjadi Satgas Covid-19.

Pakai Baju Hazmat



Ruang IGD di RSUD Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

“Baru hari itu diberitahu. Pak Sunarko juga bingung, saat pembentukan Satgas Covid-19 oleh Ibu Rika, dia yang juga mengepalari para sopir ambulans juga tidak dilibatkan. Hanya 11 orang yang diajak rapat pembentukan Satgas Covid-19 di rumah sakit. Tidak ada juga pengumuman yang ditempelkan,” ujarnya. Namun perbincangan mereka terhenti, ketika Dirut RSUD Ogan Ilir akan menemui Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam datang ke rumah sakit. Tidak adanya jawaban pasti dan solusi yang diberikan oleh Dirut RSUD Ogan Ilir, membuat IR semakin kebingungan.

Carut marut penanganan Covid-19 di RSUD Ogan Ilir juga dituturkan NI (nama samaran), salah satu bidan yang masuk dalam daftar pemecatan Bupati Ogan Ilir.

Di bulan Mei 2020, ada pasien berusia 12 tahun yang dicurigai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 datang ke RSUD Ogan Ilir. Pasien tersebut akan dipindahkan ke ruang isolasi. Saat itu NI sedang menangani dua orang pasien khusus kebidanan di IGD.

NI yang sudah menggunakan baju Hazmat dan masker saat menangani pasiennya, langsung disuruh Kasi Keperawatan Rika untuk menangani PDP Covid-19 tersebut.

Timbang Tindih Tugas Nakes



Ilustrasi perawat (Dok. Pixabay).

“Kata Ibu Rika ‘Kamu kan pakai APD lengkap, pindahkan pasien itu. Ditunggu 10 menit, lewat belakang ke ruang isolasi naik ambulans’. Saya bingung dan bilang akan menangani pasien 2 orang dulu, karena ada juga perawat lainnya,” ujarnya. NI menolak perintah Rika, hanya karena NI menggunakan

pakaian Hazmat. Selain bukan tupoksinya dan ada perawat yang harusnya bertugas menangani pasien tersebut, dia juga mencemaskan kandungannya yang sudah memasuki usia 7 bulan.

Perdebatan kembali terjadi, karena tidak ada satu orang pun yang mau menangani PDP Covid-19 tersebut. Rika tetap bersikukuh menyuruh NI, karena NI yang sudah terlanjur menggunakan baju Hazmat.

Akhirnya ada satu perawat yang ditunjuk untuk menangani PDP Covid-19 tersebut dan langsung menggunakan pakaian hazmat. Sedangkan NI memilih pindah ke ruang bidan, agar tidak menjadi korban instruksi semena-mena penanganan pasien Covid-19.

CARUT MARUT RSUD OGAN ILIR TANGANI PASIEN COVID-19 (3)

07 Agustus 2020, 11:30 WIB



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Kasus lainnya juga diungkapkan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ogan Ilir yang dipecat, NI, ketika para satpam harusnya bertugas menjadi garda terdepan untuk menanyakan riwayat awal pasien yang baru datang, enggan melakukannya karena tidak mau menggunakan APD.

NI pun terpaksa menjadi nakes garda pertama, yang menanyakan riwayat pasien dan melakukan pemeriksaan awal.

“Pembagian APD baru dibagikan sekitar satu bulan sebelum kejadian tersebut. Itu juga kami hanya dapat 3 lembar baju Hazmat, padahal ada 4 orang bidan yang bertugas. Jadi kami terpaksa saling pinjam, dan itu harus dicuci ulang terus. Bahkan kami pernah pakai baju hazmat dalam keadaan basah, ketika ada pasien yang datang ke IGD,” ujarnya, saat ditulis Kamis (6/8/2020).

NI juga membenarkan jika pembentukan tim Satgas Covid-19 di RSUD Ogan Ilir, dilakukan secara diam-diam dan terbatas. Serta pihak manajemen tidak pernah menanyakan kesediaan mereka, untuk bergabung menjadi Satgas Covid-19 RSUD Ogan Ilir. Dia juga merasa adanya pilih kasih, antara nakes di IGD dengan Satgas Covid-19 dan nakes di ruangan lainnya. Seperti ketersediaan baju hazmat dan masker yang lengkap di ruang lain dan untuk Satgas Covid-19, sedangkan untuk para nakes di IGD dibatasi.

Lalu, tidak adanya asupan vitamin, makanan tambahan serta instruksi penggunaan rumah singgah ke mereka dan kejelasan insentif tambahan penanganan pasien Covid-19. Apalagi, seluruh pasien yang datang ke RSUD Ogan Ilir dialihkan semua ke ruangan IGD.

“Kalau kami ala kadarnya, kalau di ruangan lain semuanya lengkap. Untuk rumah singgah memang ada, tapi hanya diisi petugas Satgas Covid-19. Pihak manajemen (RSUD Ogan Ilir) tidak pernah memberitahu kami, dimana mau ambil kunci atau jadwal menginap di sana kapan,” katanya.

Kekurangan APD

Menurutnya, para nakes di IGD-lah yang menjadi garda pertama penanganan pasien Covid-19. Terlebih seluruh pasien dialihkan semua ke IGD RSUD Ogan Ilir. Sehingga paparan Covid-19 dirasakannya lebih mengancam para nakes di IGD, dibandingkan nakes di ruangan lain.

Untuk ketersediaan sarung tangan medis bagi bidan yang melayani pasien melahirkan, juga sangat terbatas. Karena penggunaan sarung tangan medis yang ada, tidak bisa dipakai jika dicuci ulang. Tidak hanya pasien yang akan terpapar bakteri, para bidan pun terancam kesehatannya.

“Kami pernah dibantu salah satu bidan desa di puskesmas Ogan Ilir. Dia memberikan kami sekotak sarung tangan medis, karena di sana pasokannya banyak. Jujur, kami malu. Karena kami bekerja di RSUD Ogan Ilir, tapi sarung tangan terbatas, di sana (puskesmas) malah ada banyak,” ucapnya.

Bantahan Dirut RSUD Ogan Ilir



ilustrasi tenaga medis yang menangani Corona | pexels.com/@polina-tankilevitch.

Namun Direktur Utama (Dirut) RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama membantah rentetan pengakuan mantan nakesnya tersebut.

Dia mengatakan bahwa apa yang diucapkan para nakes RSUD Ogan Ilir tersebut tidak benar. Seperti tidak adanya edukasi penggunaan hazmat ke para nakes di RSUD Ogan Ilir.

Serta terkait tidak ada informasi awal tentang tugas penanganan pasien Covid-19 dan pembentukan Satgas Covid-19 yang tertutup ke para nakes RSUD Ogan Ilir juga dibantahnya.

Bahkan dia juga kembali membantah, jika ada perlakuan khusus bagi 11 orang Satgas Covid-19 di RSUD Ogan Ilir, dibandingkan dengan nakes non-Satgas Covid-19.

“Tidak ada, (semua) tidak benar,” ucapnya singkat.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324618/carut-marut-rsud-ogan-ilir-tangani-pasien-covid-19-1>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324624/carut-marut-rsud-ogan-ilir-tangani-pasien-covid-19-2>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324628/carut-marut-rsud-ogan-ilir-tangani-pasien-covid-19-3end>

DRAMA KLARIFIKASI MANAJEMEN RSUD OGAN ILIR BERUJUNG PEMECATAN RATUSAN NAKES (I)

07 Agustus 2020, 11:30 WIB



Petugas kesehatan bertepuk tangan untuk mengenang Esteban, perawat yang gugur karena virus corona COVID-19 di Rumah Sakit Severo Ochoa di Leganes, Spanyol, Jumat (10/4/2020). Hingga Minggu (12/4/2020) pagi, total kasus COVID-19 di Spanyol sebanyak 163.027. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP).

Liputan6.com, Palembang - Kisruh di dalam manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel), mewarnai pelayanan pasien Corona Covid-19.

Diduga tidak adanya koordinasi pasti terkait penanganan pasien Covid-19 serta timpang tindih tugas Satgas Covid-19, membuat para nakes di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ogan Ilir bergerak untuk menyuarakan aspirasinya.

IR (nama samaran), salah satu sopir ambulans RSUD Ogan Ilir mengatakan, pada hari Jumat (15/5/2020), dia mendapat jatah libur kerja. Namun karena ada kerjaan lain, IR datang ke RSUD Ogan Ilir.

Dia melihat adanya perdebatan panjang tentang keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD), rumah singgah hingga tidak adanya edukasi penanganan pasien Covid-19.

Perdebatan tersebut terjadi antara salah satu sopir ambulans dan manajemen RSUD Ogan Ilir, di depan keluarga pasien Covid-19 yang akan dirujuk ke Rumah Sehat Jakabaring Palembang.

Peristiwa tersebut ternyata menjadi puncak emosi para nakes, yang selama ini merasa teraniaya. Karena mereka harus menangani pasien Covid-19 tanpa ada edukasi, terbatasnya APD, tidak ada arahan ke rumah singgah hingga insentif yang tidak jelas.

“Seluruh teman-teman di IGD, rawat inap dan poli, pulang serentak pada Jumat siang. Mereka takut karena serbuan pasien yang berdatangan, sedangkan APD tidak lengkap. Kalau APD dicuci ulang, itu tidak layak, harusnya langsung dibuang,” ujarnya, saat ditulis Jumat (7/8/2020).

Adanya sebagian nakes yang memilih mogok kerja, membuat para nakes yang bertugas di malam hari juga enggan untuk datang bekerja. Mereka akhirnya membuat grup WhatsApp yang berisi sekitar 150 orang nakes dan mencurahkan segala kekesalan mereka.

Di hari Sabtu (16/5/2020), hampir tidak ada nakes baik perawat, bidan maupun sopir ambulans yang bekerja sesuai shift kerjanya. Sedangkan nakes lainnya, memang mendapat jatah libur di hari tersebut. Sehingga petugas di ruang IGD RSUD Ogan Ilir hanya bersisa dokter jaga.

Dari informasi yang didapatkannya, di hari itu para dokter yang berjaga kebingungan karena tidak adanya nakes lain yang membantunya. Pihak RSUD Ogan Ilir akhirnya menurunkan nakes dari bagian manajemen, yang sebagian tidak mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR).

Dipanggil DPRD Ogan Ilir



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

“Sabtu saya memang libur, waktu hari Minggu (17/5/2020) jadwal masuk kerja saya. Tapi karena sebagian teman-teman memilih mogok kerja, jadi saya tidak masuk juga. Di hari Sabtu itu, kami mendapat selebaran adanya pengumuman pembukaan lowongan kerja. Padahal belum ada penjelasan dan ruang diskusi yang diberikan ke kami,” ungkapnya.

Aksi mogok kerja sebagian nakes di RSUD Ogan Ilir, ternyata sampai ke telinga Basri, anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir.

Salah satu nakes memberitahu pada hari Minggu (18/5/2020) sore, bahwa Basri mengundang mereka untuk bertemu dengannya pada Senin (19/5/2020) pagi pukul 09.00 WIB.

Tiba-tiba, Minggu malam ada undangan yang tersebar ke grup WhatsApp, bahwa manajemen meminta ratusan nakes honorer untuk datang ke RSUD Ogan Ilir pada hari Senin pagi.

“Karena ada undangan dari rumah sakit jam 9 pagi, jadi kami memilih datang ke rumah sakit dulu. Tapi Senin pagi itu, tidak ada satu orang pun dari pihak manajemen yang menemui kami. Akhirnya kami memilih ke DPRD Ogan Ilir,” ucapnya.



Ruang IGD di RSUD Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

Mereka dibuat kaget ketika melihat Direktur Utama (Dirut) RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama, keluar dari kantor DPRD Ogan Ilir. IN dan beberapa rekannya merasa curiga

dengan keberadaan Dirut RSUD Ogan Ilir di DPRD Ogan Ilir, sedangkan mereka diminta untuk datang ke rumah sakit di waktu bersamaan.

Ratusan nakes akhirnya melanjutkan untuk bertemu dengan Komisi IV DPRD Ogan Ilir, dengan perwakilan 11 orang yang ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di sana, mereka menumpahkan segala keluh kesahnya.

Komisi IV DPRD Ogan Ilir pun meminta waktu selama empat hari, untuk bernegosiasi dengan manajemen RSUD Ogan Ilir terkait aspirasi mereka. Komisi IV DPRD Ogan Ilir juga memastikan, tidak ada satu orang pun nakes yang akan dirumahkan oleh pihak manajemen selama negosiasi tersebut. Setelah pertemuan merangkumkan kesepakatan, ratusan nakes kembali lagi ke RSUD Ogan Ilir dan menyampaikan hasil diskusi dengan Komisi IV DPRD Ogan Ilir.

“Kami menyampaikan semua keluh kesah ke pihak manajemen. Kami juga meminta selama empat hari masa negosiasi, kami menunggu di rumah saja agar tidak ada intervensi kami dalam negosiasi tersebut. Pihak manajemen menyetujui hal itu,” ungkapnya.

DRAMA KLARIFIKASI MANAJEMEN RSUD OGAN ILIR BERUJUNG PEMECATAN RATUSAN NAKES (2)

07 Agustus 2020, 15:30 WIB

Liputan6.com, Jakarta Selama menunggu beberapa hari, para tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ogan Ilir Sumsel, mendapatkan surat panggilan dari pihak rumah sakit untuk kembali bekerja. Surat tersebut diterima melalui pesan berantai di WhatsApp, pada Rabu (20/5/2020) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun dalam isi surat tersebut, pemanggilan dilakukan tertulis pada hari Selasa namun tertera tanggal di hari berikutnya. Karena merasa surat pemanggilan itu tidak sah, ratusan nakes tersebut mengabaikannya

Tak lama kemudian, mereka kembali menerima surat panggilan pada Rabu siang sekitar pukul 14.00 WIB, dengan revisi hari dan tanggal pemanggilan melalui pesan berantai WhatsApp.

Karena para nakes tinggal di daerah berbeda-beda, sehingga mereka meminta 7 orang nakes yang tinggal dekat dengan RSUD Ogan Ilir untuk mewakili mereka bertemu manajemen rumah sakit.

IR memastikan, jika pertemuan perwakilan nakes tersebut hanya untuk meminta kejelasan dari manajemen RSUD Ogan Ilir, bukan untuk memenuhi panggilan kerja.

“Tapi di sana, 7 orang itulah yang dianggap Dirut RSUD Ogan Ilir yang masih mau bekerja. Mereka juga tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Bagaimana kami bisa datang ke sana, sedangkan surat resmi masuk jam 2 siang. Ada teman yang rumahnya jauh, bahkan ada yang pulang ke Palembang,” ungkapnya.

Pada Rabu malam, seluruh nakes yang bertugas di shift malam kembali bekerja seperti biasa. Mereka kembali dikagetkan, dengan tersebarnya foto Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) para nakes honorer RSUD Ogan Ilir, pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Foto SK PDTH tersebut juga didapatkan mereka dari media sosial (medsos) Facebook dan juga tersebar di pesan berantai WhatsApp. Kekagetan mereka tak sampai di situ saja.

Pada Kamis (21/5/2020) dini hari sekitar pukul 00.01 WIB, para nakes mendapatkan pesan berantai SK PDTH dalam bentuk PDF. Dalam SK PDTH tersebut, tertera daftar 109 orang nakes yang dipecat oleh Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Bahkan, salah satu nakes yang menghadap manajemen di Rabu siang, turut masuk dalam daftar nakes yang dipecat.

“Dirut ingkar janji dengan ucapannya, karena ada satu orang nakes yang menemui dia turut dipecat. Padahal dirut berjanji, 7 orang yang menghadap di Rabu siang itu yang akan dipekerjakan kembali,” ucapnya.

Pertanyakan Alasan Pemecatan

Para nakes yang sudah bekerja pada Rabu malam, yang juga masuk dalam daftar pemecatan, masih terus bekerja hingga waktu shift di Kamis pagi selesai.

IN yang seharusnya masuk kerja di Kamis pagi, akhirnya mengurungkan niatnya karena dia juga masuk dalam daftar nakes yang dipecat.



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

“Kami tidak menyalahkan yang dipertahankan, tapi alasan (dipecat) kenapa. 11 orang perwakilan nakes yang menghadap Komisi IV DPRD Ogan Ilir juga dipecat. Dari 109 orang nakes yang dipecat, semuanya di bawah bidang keperawatan,” ujarnya.

Harapannya kepada Bupati Ogan Ilir agar bisa menyerap aspirasi mereka, ternyata di luar ekspektasi. IR menilai, Bupati Ilyas Panji Alam tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk menjelaskan kejadian sebenarnya.

DRAMA KLARIFIKASI MANAJEMEN RSUD OGAN ILIR BERUJUNG PEMECATAN RATUSAN NAKES (3/END)

07 Agustus 2020, 17:30 WIB

Liputan6.com, Palembang - NI (nama samaran), salah satu nakes yang turut dipecat turut menyayangkan tindakan sepihak oleh Bupati Ogan Ilir terhadap ratusan nakes. Padahal NI merupakan nakes pioner di RSUD Ogan Ilir, yang mulai beroperasi sejak 7 tahun lalu.

Dia juga mendapat informasi dari rekannya yang menemui pihak manajemen di hari Rabu, jika 7 orang nakes tersebut disuruh meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka.

“Sampai sekarang SK pemecatan secara fisik, tidak pernah kami terima sama sekali. Hanya dilihat melalui medsos saja. Setelah itu, tidak ada komunikasi lagi dengan pihak manajemen. Kami sudah dianggap berhenti,” katanya, saat ditulis Sabtu (7/8/2020).

NI akhirnya membeberkan pengalamannya bekerja selama 7 tahun di RSUD Ogan Ilir. Mulai dari upah para nakes honorer sering telat dibayar hingga dirapel selama 3 bulan sekali.

Bahkan, jasa dari penanganan pasien pengguna BPJS Kesehatan di tahun 2018 dihapuskan manajemen RSUD Ogan Ilir. Dengan

alasan, datanya tidak lengkap, sehingga tidak bisa diklaim ke BPJS Kesehatan.

Mantan bidan RSUD Ogan Ilir ini juga membantah, jika seluruh nakes yang dipecat melakukan aksi mogok kerja selama 5 hari berturut-turut. Karena saat itu, ada sebagian nakes yang jadwalnya libur kerja.

Dia juga tidak terima dengan tuduhan, jika para nakes yang diberhentikan tersebut enggan melayani pasien Covid-19 dan mangkir dari tanggung jawab mereka.

“Kalau dituduh (mogok kerja) hanya karena uang, tidak ada itu. Dan juga bukan takut dengan pasien Covid-19. Pasien TBC, Hepatitis dan HIV kami tangani semua. Kalau takut, harusnya dari dulu. Kami hanya minta kejelasan saja,” ujarnya.

Kini, NI kembali menjadi bidan desa di Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel. Dia kembali ke rumah orangtuanya, sembari menunggu kelahiran anak keduanya.

Dia pun berharap, adanya pemanggilan kembali untuk bekerja di RSUD Ogan Ilir Sumsel. Kendati hanya mendapat honor sebesar Rp850.000 per bulan, namun dia sudah merasa nyaman bekerja di RSUD Ogan Ilir.

Dirut RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama menjawab semua keluh kesah mantan para nakesnya.

Menurutnya, kedatangannya ke DPRD Ogan Ilir tersebut karena memang mendapat undangan dari Komisi IV DPRD Ogan Ilir untuk menjelaskan simpang siur keluhan para nakes.

Surat Pemanggilan Nakes

“Saya memang mendapat undangan dari (Komisi IV) ke DPRD Ogan Ilir saat itu, terkait masalah para nakes RSUD Ogan Ilir Sumsel,” ucapnya.

Dia juga membantah jika hanya surat pemanggilan ke para nakes tersebut diberikan hanya satu lembar saja untuk ratusan nakes RSUD Ogan Ilir Sumsel.

Roretta mengatakan, jika satu per satu nakes yang mengadakan mogok kerja tersebut mendapatkan surat panggilan.

“Kami memerintahkan nakes untuk menghadap, suratnya by name. Jadi satu per satu ke nakes, bukan satu surat,” ucapnya.

Dia membantah jika manajemen RSUD Ogan Ilir tidak memberikan ruang diskusi kepada para nakes sebelum dipecat. Karena menurutnya, manajemen RSUD Ogan Ilir sudah melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali ke para nakes.

Dirut RSUD Ogan Ilir Sumsel menuturkan, jika tidak benar adanya tebang pilih dari manajemen RSUD Ogan Ilir terkait siapa saja yang akan dipilih. Karena menurutnya, mereka tidak punya kesempatan untuk memilih.



Kantor BPJS Kesehatan Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge).

Terkait pembayaran jasa BPJS Kesehatan tahun 2018 ke para nakes yang belum dicairkan manajemen RSUD Ogan Ilir, dia mengungkapkan bahwa dana jasa tersebut sudah ada.

“Untuk (dana) jasa sudah ada di rekening RSUD Ogan Ilir. Namun karena banyaknya (nakes) yang mutasi menjadi kendala (pencairan),” ungkapnya.

Pencairan jasa BPJS Kesehatan tahun 2018 tersebut, lanjutnya, sedang diproses oleh pihak RSUD Ogan Ilir untuk segera dibagikan ke para nakes.

Dia juga berjanji, akan mengevaluasi tim manajemen RSUD Ogan Ilir, pasca pemecatan ratusan nakes dan beragam isu yang menerpa kinerja kerja manajemen RSUD Ogan Ilir.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324897/drama-klarifikasi-manajemen-rsud-ogan-ilir-berujung-pemecatan-ratusan-nakes-1>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324911/drama-klarifikasi-manajemen-rsud-ogan-ilir-berujung-pemecatan-ratusan-nakes-2>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324923/drama-klarifikasi-manajemen-rsud-ogan-ilir-berujung-pemecatan-ratusan-nakes-3end>

OMBUDSMAN SUMSEL BONGKAR FAKTA-FAKTA PEMECATAN 109 NAKES DI OGAN ILIR (I)

08 Agustus 2020, 07:30 WIB



Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengungkapkan fakta-fakta yang dialami nakes di RSUD Ogan Ilir (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Beragam fakta dalam kasus pemecatan 109 orang tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel), kini sudah semakin terkuak.

Ombudsman RI perwakilan Sumsel pun memaparkan fakta penemuan investigasi di lapangan, terkait Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Terhormat (PDTH) Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

Kepala Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, pemecatan ratusan nakes tersebut memang benar terjadi maladministrasi.

Beberapa fakta mengejutkan pun dibebaskan Ombudsman Sumsel, seperti tidak adanya SK resmi pengangkatan para tenaga honorer di lingkup RSUD Ogan Ilir Sumsel.

“Yang ada hanyalah SK Pemberian Insentif Honorarium dari Bupati Ogan Ilir dan surat perjanjian yang menjadi pedoman para nakes selama ini,” ujarnya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Fakta lainnya yaitu, nomor SK PDTH yang diterbitkan Bupati Ogan Ilir yaitu Nomor 191/KEP/RSUD/2020 tanggal 20 Mei 2020 lalu, ternyata sudah pernah diterbitkan.

Yaitu oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Ogan Ilir, dengan Nomor 191/Kep/Balitbangda/2020 pada tanggal 6 Februari 2020 lalu.

Temuan ini menguatkan fakta yang didapatkan Ombudsman Sumsel, bahwa pihak yang menerbitkan SK tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku.

“Tidak adanya koordinasi dari manajemen RSUD Ogan Ilir ke instansi berwenang, yaitu Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Ogan Ilir,” ujarnya.

Pemecatan yang dilakukan Ilyas Panji Alam, juga tidak berdasarkan nota usulan resmi dari pihak manajemen RSUD Ogan Ilir. Dari hasil interogasi, direktur RSUD Ogan Ilir tidak pernah mengajukan usulan resmi pemecatan ratusan nakes tersebut.

Nakes Cuti Dipecat



Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ke Sekda Ogan Ilir di Palembang (Dok. Humas Ombudsman RI perwakilan Sumsel / Nefri Inge).

Ombudsman Sumsel juga membongkar kesalahan tuduhan Bupati Ogan Ilir, yang menjadi alasan pemecatan para nakes. Yaitu 109 orang nakes tersebut bolos bekerja selama lima hari berturut-turut.

“Ternyata sistem kerja di sana (RSUD Ogan Ilir) per shift. Jika diberlakukan hal tersebut, tidak ada satu orang nakes pun yang bolos bekerja selama lima hari berturut-turut,” katanya.

Adrian juga mengungkap fakta menurutnya sangat fatal. Yaitu dari 109 orang nakes yang dipecat, ada 2 orang yang diberhentikan dengan nama Sari Wulandari dan Novita Sari tersebut, ternyata sedang menjalani cuti hamil.

Lalu, satu orang nakes yang juga masuk dalam daftar PDTH yaitu Apriana Nurul. Nakes tersebut ternyata sudah mengundurkan diri di RSUD Ogan Ilir, sebelum terjadinya pemecatan massal tersebut.

Pelanggaran Kode Etik



Penyerahan LAHP ke Sekda Ogan Ilir dilakukan di kantor Ombudsman RI perwakilan Sumsel di Kota Palembang (Liputan6.com / Nefri Inge).

“Nakes tersebut sudah mengundurkan diri terhitung 1 Maret 2020, juga ikut diberhentikan,” ujarnya.

Hasil investigasi Ombudsman Sumsel juga menguak, bahwa tudingan Bupati Ogan Ilir jika 109 orang nakes tersebut melanggar kode etik adalah bukan ranahnya.

Pelanggaran kode etik yang dituduhkan juga, tidak bisa dijelaskan secara konkrit dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

“Yang lebih berhak pertanyakan pelanggaran kode etik itu adalah tenaga internal RSUD Ogan Ilir dan organisasi profesi, seperti persatuan perawat dan bidan Indonesia,” ujarnya.

OMBUDSMAN SUMSEL BONGKAR FAKTA-FAKTA PEMECATAN 109 NAKES DI OGAN ILIR (2)

08 Agustus 2020, 09:30 WIB



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Dari hasil investigasi Ombudsman Sumsel, juga menyeruak fakta lain para tenaga kesehatan (nakes) RSUD Ogan Ilir Sumsel yang dipecat. Yaitu dari status para nakes yang sering disebut sebagai tenaga honorer.

Ternyata para nakes tersebut hanya merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), dan bukan tenaga honorer seperti yang tertera dalam SK PDTH Bupati Ogan Ilir.

Kerjasama itu ternyata dilakukan para nakes dengan pihak RSUD Ogan Ilir, tanpa melibatkan BKSDM. Tidak ada SK pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer dan hanya kesepakatan dua belah pihak saja.

“Kita lihat ternyata SK pengangkatan tidak ada. Yang kami temukan hanya perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh manajemen RSUD Ogan Ilir dan pekerjanya. Tidak ada hak-hak para nakes, tapi adanya kewajiban yang harus dijalankan nakes,” ucap Kepala Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah, saat ditulis Jumat (7/8/2020).

Ombudsman Sumsel menduga, kasus ini kemungkinan juga terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Ogan Ilir dan bisa mengarah kepada kerugian negara.

Terlebih adanya informasi jika jumlah TKSK di RSUD Ogan Ilir, lebih dari 250 orang dengan total 400 orang pegawai. Padahal untuk tipe rumah sakit itu, hanya membutuhkan 250-300 orang tenaga kerja saja.

“Tapi kelebihan (tenaga kerja) itu tidak bisa jadi alasan untuk menghentikan (memecat). Jika tidak mau melanjutkannya, bisa membuat SK (pemutusan kerja) di awal tahun. BKSDM Ogan Ilir harus mendata ini. Jangan sampai terjadi di instansi lain,” katanya.

Para nakes yang dimintai keterangan juga, mengakui ke Ombudsman Sumsel jika keputusan Bupati Ogan Ilir membuat mereka terkejut. Apalagi para nakes mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya sesuai Undang-Undang (UU) kesehatan. Kendati kebijakan penuh memang berada di tangan Bupati Ogan Ilir, namun menurutnya tidak serta-merta melakukan pemecatan, terlebih tanpa pertimbangan yang patut dan layak.

Fakta lainnya yang didapatkan Ombudsman Sumsel yaitu,

pembayaran jasa klaim BPJS Kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh para nakes, belum dicairkan oleh pihak RSUD Ogan Ilir.

“Memang disebutkan pembayaran BPJS Kesehatan tahun 2018 tidak lancar. Tapi tidak kita masukkan karena objeknya berbeda. Namun bisa dikembangkan lagi, mungkin jadi usulan inisiatif untuk kedua kalinya. Kita lihat nanti, karena harus ada data awal untuk usul inisiatif,” katanya.

Saran Korektif Ombudsman Sumsel



Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengungkapkan fakta-fakta yang dialami nakes di RSUD Ogan Ilir (Liputan6.com / Nefri Inge).

Dari beragam temuan didapat, Ombudsman memberikan empat saran korektif ke Bupati Ogan Ilir. Yaitu membatalkan dan mencabut SK tentang PDTT tenaga honorer rumah sakit daerah tertanggal 20 Mei 2020.

Lalu, Bupati Ogan Ilir dan Dirut RSUD, mengembalikan hak 109 orang nakes, baik di rumah sakit dan Pemkab Ogan Ilir.

Mengevaluasi manager dan Dirut RSUD Ogan Ilir, dengan melibatkan Inspektorat Ogan Ilir.

Bahkan jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan manajemen di RSUD Ogan Ilir, Bupati Ilyas Panji Alam bisa memberikan pembinaan bahkan sanksi khusus.

“Bupati Ogan Ilir juga harus memerintahkan BKSDM Ogan Ilir untuk mendata pegawai Non PNS. Sehingga dapat terintegrasi dan jadi rujukan bupati atau OPD dalam mengambil perekrutan non PNS terhadap kebutuhan rill,” ujarnya.

Ombudsman Sumsel memberikan waktu selama 30 hari sejak LAHP diberikan pada hari Rabu (21/7/2020), untuk melaksanakan saran korektif tersebut. Jika tidak dilaksanakan hingga batas akhir, Ombudsman Sumsel akan meneruskan laporan ini ke Ombudsman RI di Jakarta.

Proses Saran Rekomendasi

Jika laporan sudah naik ke pusat, lanjut Adrian, akan ada penguatan untuk ditingkatkan menjadi saran rekomendasi. Yang mana bersifat final dan mengikat terhadap terlapor, dalam hal ini Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

“Ini memang terbukti maladministrasi, jadi ada tindakan korektif yang harus dijalani bupati. Jika saran korektif tidak dilakukan, akan ada saran rekomendasi dari pusat. Jika tidak juga dilaksanakan, akan diteruskan ke Presiden RI, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.

Ombudsman RI juga akan mempublikasi tindakan terlapor yang tidak melaksanakan saran rekomendasi tersebut. Yang mana, akan berdampak pada sanksi sosial karena terlapor tidak mengindahkan saran dari Ombudsman untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Untuk itu, Ombudsman Sumsel meminta kepada Bupati Ogan Ilir untuk membaca terlebih dahulu LAHP tersebut. Ombudsman

Sumsel juga menunggu pelaksanaan saran korektif yang harus dilakukan terlapor, sebelum batas akhir selesai, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020.

OMBUDSMAN SUMSEL BONGKAR FAKTA-FAKTA PEMECATAN 109 NAKES DI OGAN ILIR (3/END)

08 Agustus 2020, 11:30 WIB



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam bersiap untuk menggelar konferensi pers tatap muka langsung ke para jurnalis tentang dirinya positif Covid-19 (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Satu minggu setelah perwakilan Pemkab Ogan Ilir menerima LAHP Ombudsman Sumsel pada hari Rabu (21/7/2020), Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam terkonfirmasi positif Corona Covid-19.

Namun batas waktu saran korektif Ombudsman Sumsel selama 30 hari sejak LAHP diserahkan, masih terus berjalan.

Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman Sumsel Hendrico mengatakan, batas waktu 30 hari kerja yang diberikan itu jika kondisi normal. Dan waktunya akan berakhir pada awal bulan September 2020 mendatang.

“Karena kondisi yang bersangkutan sebagai (pasien) Covid-19, terkait ini belum kami sikapi secara kelembagaan. Nanti akan kami bahas lagi di rapat, dengan melibatkan seluruh tim keasistenan Ombudsman Sumsel,” ucapnya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Namun Ombudsman Sumsel tetap mempunyai kewajiban menjadwalkan monitoring seberapa jauh langkah-langkah yang sudah ditempuh Bupati Ogan Ilir. Bisa melalui Sekda atau Inspektorat Ogan Ilir Sumsel.

Bupati Ogan Ilir mengumumkan dirinya positif Covid-19 pada hari Senin (27/7/2020) sore di rumah dinas. Dia mengetahui terjangkit Covid-19, usai melakukan swab test pada Senin pagi di RS Bhayangkara Palembang Sumsel.

“Dari hasil swab test di RS Bhayangkara Palembang yang keluar tadi pagi, saya dinyatakan positif Covid-19. Kepada orang yang pernah kontak dengan saya supaya melakukan isolasi dan Swab test,” ujarnya.

Dia pun melakukan isolasi mandiri di rumdinnya, namun beberapa hari kemudian Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam dilarikan ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang.

Terkait dengan kondisi terbaru Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, pihak RSMH Palembang tidak bisa membocorkan informasi tersebut.

Menurut Kasubag Humas RSMH Palembang Hidayati, pihak

rumah sakit sudah berkoordinasi dengan keluarga Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

“Beliau (Bupati Ogan Ilir) keberatan untuk dipublikasikan, karena hal tersebut adalah hak privasi pasien. Jadi kami sangat menghargai privasi beliau,” ucapnya.

Kondisi Bupati Ogan Ilir



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam (Liputan6.com / Nefri Inge).

Namun pada hari Rabu (5/8/2020), Bupati Ogan Ilir sudah kembali ke rumah dinas, karena hasil swab test di RSMH Palembang menyatakan Ilyas Panji Alam negatif Covid-19.

“Sesuai arahan dokter di RSMH Palembang, dan dinyatakan sudah negatif. Sudah kembali ke rumah dinas,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir Herman.

Kendati sudah dinyatakan negatif Covid-19 dan sudah pulang dari RSMH Palembang, Bupati Ogan Ilir masih menjalani isolasi mandiri di rumdin.

Serta terus menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Salah satunya, menerima berkas-berkas yang harus dicek dan ditandatangani.

“Dokter tetap mengawasi, baik saat isolasi ini. Isolasi lebih kurang 14 hari. Tapi kondisi sudah sehat, karena dia sudah negatif (Covid-19),” ujarnya.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324943/ombudsman-sumsel-bongkar-fakta-fakta-pemecatan-109-nakes-di-ogan-ilir-1>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324961/ombudsman-sumsel-bongkar-fakta-fakta-pemecatan-109-nakes-di-ogan-ilir-2>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324979/ombudsman-sumsel-bongkar-fakta-fakta-pemecatan-109-nakes-di-ogan-ilir-3end>

BERAGAM FAKTA LAHP KASUS PEMECATAN RATUSAN NAKES DIBANTAH BUPATI OGAN ILIR (I)

08 Agustus 2020, 09:30 WIB



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) investigasi pemecatan ratusan tenaga kesehatan (nakes) oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel),

telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir, pada hari Rabu (21/7/2020) lalu.

Dalam LAHP Ombudsman Sumsel tersebut, menguak berbagai fakta mengejutkan dalam SK Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PDTH) oleh Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, serta carut marut manajemen di RSUD Ogan Ilir.

Pada hari Kamis (22/7/2020), Bupati Ogan Ilir akhirnya merespon LAHP Ombudsman Sumsel tersebut. Serta empat poin saran korektif, yang harus dilaksanakan Bupati Ogan Ilir selama 30 hari sejak LAHP diserahkan.

Bupati Ilyas Panji Alam mengatakan, jika maladministrasi yang ditujukan ke dirinya akan dia perbaiki. Yaitu berkoordinasi dengan Inspektorat Ogan Ilir serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan maladministrasi tersebut.

Dia juga sudah mengetahui, jika 3 orang nakes dari 109 nakes yang dipecat sedang menjalani cuti hamil dan sudah mengundurkan diri pada 1 Maret 2020 lalu.

Perbaikan administrasi juga akan dilakukan, terkait SK PDTH dengan Nomor 191/KEP/RSUD/2020, yang ternyata sudah diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Ogan Ilir, pada tanggal 6 Februari 2020 lalu.

“Kita perbaiki administrasinya, saya juga tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Dosa jika saya hukum orang yang tidak bersalah. Saya sudah perintahkan inspektorat,” ujarnya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Terkait saran korektif yang diusulkan Ombudsman Sumsel yaitu mempekerjakan kembali para nakes, Bupati Ogan Ilir akan mengabulkannya.

Namun, dia hanya akan mempekerjakan kembali beberapa orang nakes saja yang dinilainya tidak melakukan kesalahan, seperti yang dituduhkan selama ini.

Pekerjakan Kembali Nakes

“Kalau beberapa (nakes) iya tidak seluruhnya. Ngapain (seluruh nakes), demo, 5 hari tidak masuk kerja, lari dari tanggung jawab,” katanya.

Tuduhan aksi mogok kerja selama 5 hari tersebut, juga tidak dibenarkan dari hasil investigasi Ombudsman Sumsel. Karena para nakes bekerja secara sistem shift, sehingga Ombudsman merangkum tidak ada satu orang pun nakes yang mogok kerja selama lima hari.

Pernyataan Ombudsman Sumsel tersebut langsung dibantah Bupati Ogan Ilir Panji Ilyas Alam. Menurutnya, hal tersebut merupakan statement versi para nakes saja, bukan yang terjadi selama ini.

Bantah APD Kurang

Termasuk keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan rumah singgah hingga insentif, yang diklaim Bupati Ilyas sudah tersedia semua.

“(Tidak mogok kerja), itu versi mereka. APD tidak lengkap, Ombudsman sudah lihat, APD mana yang kurang, tidak ada. Insentif ada, pemerintah pusat saja ada, apalagi kita. (Pencairan honor) kerja dulu dong,” katanya.

“Menurut kamu gimana kalau orang tua dan saudara yang sakit, datang ke rumah sakit, tenaga kesehatan kabur tidak mau melayani. Besoknya demo, (bilang) APD tidak ada padahal APD dibuang. Rumah singgah tidak ada, malah bagus,” ucapnya.

BERAGAM FAKTA LAHP KASUS PEMECATAN 109 NAKES DIBANTAH BUPATI OGAN ILIR (2/END)

08 Agustus 2020, 15:30 WIB



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam berkata, jika kasus penggunaan jas hujan plastik yang dicuci pakai tersebut, terjadi sebelum pembelian Alat Pelindung

Diri (APD). Dan peristiwa itu diakuinya, terjadi di awal-awal pandemi Corona Covid-19.

Kendati berkurangnya jumlah nakes di RSUD Ogan Ilir Sumsel, Bupati Ogan Ilir meyakinkan jika pelayanan di rumah sakit tidak terganggu. Namun dia akan melihat ke depannya, apakah ada kebutuhan penambahan nakes baru atau tidak.

Ketidakjelasan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ratusan nakes jadi tenaga honorer, diakui Bupati Ogan Ilir bukan kebijakannya. Karena, ratusan nakes tersebut dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), di masa kepemimpinan Bupati Ogan Ilir sebelumnya.

“Itu bukan zaman saya. Saya masuk, itu (TKSK nakes) sudah ada. Tanya dengan yang dulu. Makanya saya sudah instruksikan, dilihat dimana kesalahannya. Saya tidak tahu, satu pun tidak ada yang diangkat dari saya,” ucap Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Status apa pun yang disematkan ke nakes, Bupati Ogan Ilir merasa dia punya kewenangan untuk memecatnya. Terlebih menurutnya, para nakes tersebut tidak masuk beberapa hari.

Saran korektif lainnya, yaitu mengevaluasi kinerja manajemen dan Direktur Utama (Dirut) RSUD Ogan Ilir. Dia menuturkan, sangat mudah mengganti dirut lama dengan pejabat yang baru. Karena menurutnya, sudah sejak lama dia mendengar kabar jika pelayanan nakes di RSUD Ogan Ilir ke pasiennya sangat kurang. Padahal pasien yang dilayani dan dirawat di RSUD Ogan Ilir tidak banyak. Dia berjanji akan membenahi manajemen rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Sumsel tersebut.

Namun Ilyas Panji Alam tidak terlalu merespon adanya timpang tindih tugas Satgas Covid-19 dan non-satgas. Menurutnya, semua nakes di RSUD Ogan Ilir wajib melayani pasien yang mengidap semua penyakit, termasuk Covid-19.

LAHP Ombudsman Sumsel

“Tidak boleh apa bupati menghentikan mereka. Nanti (bisa) semaunya saja, satu minggu tidak masuk,” ujarnya.

Terkait batas akhir pelaksanaan saran korektif Ombudsman Sumsel selama 30 hari sejak LAHP diserahkan, Bupati Ogan Ilir tidak memberikan kepastian pelaksanaan saran korektif. Dia juga hanya mengembalikan kewenangan kepada Ombudsman.

Dia menegaskan, jika pelayanan kesehatan tetap berjalan di tengah kasus pemecatan ratusan nakes di RSUD Ogan Ilir. Bahkan dengan penerapan New Normal di Ogan Ilir, peningkatan pelayanan untuk pasien Covid-19 tetap ketat dilaksanakan.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324997/beragam-fakta-lahp-kasus-pemecatan-ratusan-nakes-dibantah-bupati-ogan-ilir-1>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4325011/beragam-fakta-lahp-kasus-pemecatan-109-nakes-dibantah-bupati-ogan-ilir-2end>

DIRUT RSUD OGAN ILIR JAWAB HASIL INVESTIGASI LAHP OMBUDSMAN SUMSEL

08 Agustus 2020, 17:30 WIB

Liputan6.com, Palembang - Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), ada beberapa fakta yang terungkap dari hasil investigasi pemecatan ratusan orang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Ogan Ilir Sumsel.

Seperti ketidakjelasan SK pengangkatan para nakes yang dipecat, ada 3 orang nakes yang cuti hamil dan sudah mengundurkan diri masuk dalam daftar pemecatan dan lainnya.

Dirut RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama mengatakan, bahwa status 109 orang nakes RSUD Ogan Ilir yang dipecat tersebut adalah tenaga honorer. Karena sudah ada Surat Keputusan (SK) Penempatan Pegawai.

“Seluruh honorer yang dinyatakan diterima (bekerja di RSUD Ogan Ilir) mendapatkan SK Penempatan. Tapi (managemen RSUD Ogan Ilir) tidak pernah koordinasi dengan BKSDM Ogan Ilir untuk tenaga honorer, namun untuk Pegawai Sipil Negara (PNS) berkoordinasi,” katanya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Dia juga menjawab alasan tiga orang nakes berstatus cuti hamil dan sudah mengundurkan diri, masuk dalam daftar pemecatan 109 orang nakes di RSUD Ogan Ilir.

Menurutnya, dua orang nakes yang sudah cuti hamil tersebut ikut menandatangani surat saat demo. Sedangkan satu orang yang mengundurkan diri itu, surat pengunduran diri baru dilayangkan pada bulan Mei 2020.

“Ini bisa dibuktikan dengan yang bersangkutan masih menerima honor sampai bulan Mei 2020. Surat pengajuan mengundurkan dirinya untuk bulan Maret 2020, tetapi suratnya di Bulan Mei 2020 dibuat,” katanya.

Roretta juga siap jika dengan adanya kasus ini, posisinya akan dicopot sebagai Dirut RSUD Ogan Ilir oleh Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam dan diganti dengan pejabat lain. Sebelumnya, dia menegaskan jika pihaknya tidak terlibat sama sekali dan tidak ada memo khusus untuk memecat 109 orang nakes di RSUD Ogan Ilir.

Pemanggilan Para Nakes

Dia mengungkapkan, jika pemberhentian ratusan nakes tersebut sudah melalui rapat dan dikonsultasikan ke Bagian Hukum Setda Ogan Ilir. Termasuk sudah ditandatangani oleh Sekda Ogan Ilir dan Asisten 1.

“Kami tidak pernah memberikan memo (pemecatan 109 nakes) untuk diberhentikan. Kalau diminta nama-nama nakes, maka kami berikan,” katanya.

Roretta mengatakan, jika pihak RSUD Ogan Ilir sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap ratusan nakes untuk bekerja kembali, sebelum SK PDTH dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4325025/dirut-rsud-ogan-ilir-jawab-hasil-investigasi-lahp-ombudsman-sumsel>

RESPON MULTI STAKEHOLDER PASCA PEMECATAN RATUSAN NAKES DI OGAN ILIR (I)

08 Agustus 2020, 19:30 WIB



Gubernur Sumsel Herman Deru akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Sumsel (Dok. Humas Pemprov Sumsel / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Sebelum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Sumsel keluar dan adanya saran korektif mempekerjakan kembali 109 nakes

yang dipecat. Hal yang sama sudah dilayangkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru kepada Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Herman Deru sudah menyarankan agar 109 orang nakes dipanggil dan dipekerjakan kembali di RSUD Ogan Ilir. Terlebih di tengah kasus pandemi Corona Covid-19, yang masih terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Sumsel.

“Saya anjurkan begitu, ditampung lagi. Saya sarankan ke bupati, (nakes) tersebut diwawancarai atau diinterogasi satu-satu, bakatnya dimana,” ungkapnya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Langkah pendekatan tersebut disarankan Gubernur Sumsel, untuk mengetahui bakat dan kemampuan apa yang dimiliki 109 orang nakes yang dipecat. Kemungkinan dari hasil wawancara tersebut, para nakes memang tidak cocok ditempatkan di bidang pelayanan.

Dia juga meminta Bupati Ogan Ilir mempertimbangkan masa kerja para nakes yang dipecat. Karena ada banyak nakes yang sudah mengabdikan di RSUD Ogan Ilir, sejak didirikan pada tahun 2012 lalu.

“Harus dihitung juga masa kerjanya. Kasihan juga, mungkin ada yang jadi tulang punggung keluarga. Semoga bupati bisa ikut lah,” ujarnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumsel Subhan juga angkat bicara, terkait pemecatan 109 nakes di Ogan Ilir.

Hingga saat ini, PPNI Sumsel masih mendukung upaya persuasif yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPNI Ogan Ilir, agar ratusan nakes dipekerjakan kembali.

“Mereka itu akan menyalurkan aspirasi tentang hak-hak mereka, itu yang kami tangkap saat investigasi kemarin. Yaitu melengkapi APD standar dan dapat insentif sesuai janji, bahkan dari Presiden Joko Widodo. Sementara mereka menyampaikan

ke pimpinan institusi, tapi tidak kooperatif dengan mereka,” ujarnya.

Puluhan Perawat Dipecat

Dia juga mendengar dari pengakuan para nakes yang dipecat, jika APD yang disiapkan RSUD Ogan Ilir tidak lengkap dan tidak sesuai standar kesehatan.

Seperti jumlah nakes yang dibatasi APD terpaksa dicuci ulang, insentif yang tidak jelas dan tidak adanya koordinasi penggunaan rumah singgah.

Namun hal berbeda disampaikan Bupati Ogan Ilir ke PPNI Sumsel, bahwa semua tuntutan tersebut sudah ada dan disediakan.

“Kita serahkan (laporan akhir) ke PPNI pusat untuk upaya lainnya. Yang dipecat sendiri yaitu 44 orang perawat, sisanya bidan dan sopir ambulans,” ujarnya.

Sebelum SK PDTH dikeluarkan Bupati Ogan Ilir, Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir Rizal Mustopa bersama timnya sudah menyusun rekomendasi nota dinas berisi 5 poin.

Kurangnya Komunikasi

Yang mana didominasi tentang kewajiban Pemkab Ogan Ilir untuk memenuhi tuntutan para nakes yang menjadi haknya. Serta meminta Bupati Ogan Ilir mengevaluasi manajemen RSUD Ogan Ilir.

“Itu kan artinya kurang komunikasi, manajemen tidak bisa menyampaikan dengan benar. Jika sudah ada dan siap (tuntutan nakes), kok bisa mogok? Sepertinya ada miskomunikasi,” katanya. Namun sayangnya, rekomendasi dari Komisi IV DPRD Ogan Ilir tersebut seakan ‘mandul’, dengan keluarnya SK PDTH 109 orang nakes.

Menurutnya, para nakes datang ke Komisi IV DPRD Ogan Ilir hanya untuk menyampaikan aspirasi bukannya demonstrasi. Tapi Pemkab Ogan Ilir malah menyimpulkan jika para nakes menggelar aksi demo.

RESPON MULTI STAKEHOLDER PASCA PEMECATAN RATUSAN NAKES DI OGAN ILIR (2)

08 Agustus 2020, 21:30 WIB



Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam (Liputan6.com / Nefri Inge).

Liputan6.com, Palembang - Komisi IV DPRD Ogan Ilir juga masih akan menunggu, apakah Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam akan melaksanakan saran korektif dari LAHP Ombudsman Sumsel selama 30 hari ke depan.

Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada langkah konkrit dari Bupati Ogan Ilir, mereka akan melakukan beberapa hal.

“Kita akan kaji dulu dan menanyakan ke pemda, apa yang jadi alasan mereka tidak menjalankan saran korektif itu. Namun jika ada ego sektoral dalam kasus ini, kami akan bentuk pansus, untuk menginvestigasi mendalam kasus ini,” ucapnya, saat ditulis Sabtu (8/8/2020).

Komisi IV DPRD Ogan Ilir juga berkemungkinan akan melayangkan Mosi Tidak Percaya ke Bupati Ogan Ilir, yang diperkuat dengan beragam bukti-bukti yang didapatkan.

Dari Mosi Tidak Percaya tersebut, lanjutnya, menjadi sanksi sosial bagi Bupati Ogan Ilir. Serta masyarakat bisa melihat bahwa Bupati Ogan Ilir tidak menjalankan saran korektif dari lembaga resmi, yaitu Ombudsman dan DPRD.

Rizal Mustopa meyakinkan jika Komisi IV DPRD Ogan Ilir akan terus memperjuangkan para nakes. Terlebih dengan pengabdian para nakes yang sudah lama di RSUD Ogan Ilir.

“Pengabdian mereka sudah lama, ada yang 5-7 tahun. Seharusnya mereka mendapatkan penghargaan yang lebih baik, bukannya pemecatan,” katanya.

Sama halnya diungkapkan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, bahwa pemecatan 109 orang nakes di Ogan Ilir sangatlah tidak tepat. Dia juga mengingatkan ke Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto, untuk menyikapi kasus ini.

Nakes Covid-19 Dibutuhkan

Menurutnya, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada nakes yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa pasien Covid-19. Dan harus ada perhatian terhadap nakes tersebut.

“Saya sangat menyayangkan pemecatan itu, karena para nakes harusnya mendapatkan perhatian ekstra. Jika ada kesalahan, harusnya diberi Surat Peringatan (SP) dulu, bukannya langsung dipecat,” ucapnya.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel Yusri juga berharap, ratusan nakes tersebut bisa dipekerjakan kembali. Dan sinergi kerja tim harus ditingkatkan, agar penanganan Covid-19 cepat tuntas hingga pandemi selesai.

“Kami tidak sependapat dengan pemecatan nakes tersebut. Kita saat ini membutuhkan tenaga medis, karena kasus Covid-19 cukup tinggi,” ujarnya.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4325751/respon-multi-stakeholder-pasca-pemecatan-ratusan-nakes-di-ogan-ilir-1>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4325763/respon-multi-stakeholder-pasca-pemecatan-ratusan-nakes-di-ogan-ilir-2>

I Made Argawa

CERITA DIBALIK RESIKO PANDEMI

Topik: Jurnalisme Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas
Pandemi COVID-19

Wilayah : Bali-Tabanan

Kontributor: I MADE ARGAWA

Tayang di INews TV pada Sabtu 29 Agustus 2020

Tayangan dalam bentuk video dapat disaksikan di link berikut:
<http://bit.ly/ceritadibalikresikopandemi>



Atau QR Code:



Cerita Dibalik Resiko Pandemi

Gresi Plasmanto

PETANI, PANDEMI, DAN ELEGI DI LADANGNYA SENDIRI

Sabtu 8 Agustus 2020



Kelompok tani Sekato Jayo di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, adalah salah satu kelompok yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan PT WKS (APP Sinar Mas). Konflik yang telah terjadi sejak 2007 itu sampai sekarang belum terselesaikan. Saat masa pandemi Covid-19, konflik kembali terjadi.

Masyarakat tani di desa itu berharap konflik ini dapat segera terselesaikan. Mereka minta pemerintah bisa melindungi

keberadaan petani supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Liputan ini adalah hasil fellowship Jurnalisme Mengawal Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan AJI Indonesia dan UNESCO.

Menjelang sore yang masih terik, ketika Ahmad baru beranjak beberapa meter menyusuri sebidang lahannya, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Tatapannya langsung masygul saat menunjukkan jejeran tanaman jengkolnya yang baru ditanam di Bukit Rinting, Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi. “Saya masih sedih, tanaman jengkol saya mati, kering,” ujar laki-laki 40 tahun itu sembari menunjukkan jejeran tanaman pohon jengkol setinggi 30 centimeter yang mati.

Kemasygulan itu tak bisa disembunyikan dari raut muka Ahmad. Sebab, bibit jengkol anggota kelompok tani Sekato Jayo itu kata dia, bantuan dari pemerintah yang baru ia tanam. Belum tumbuh sempurna, tanamannya mendadak terkena racun herbisida yang disemprot menggunakan pesawat nirawak (drone) oleh PT Wira Karya Sakti (WKS), kelompok usaha APP Sinar Mas.

“Punya saya ada 200 batang jengkol dan duren yang baru ditanam, 40 batang disemprot dan digilas mati. Belum lagi di sebelah sana, tanaman sayur juga mati,” ujar Ahmad kepada jurnalis Kilasjambi.com di lokasi lahannya pada medio Juli 2020 lalu.

Di antara tanaman yang nelangsa itu, Ahmad menceritakan kronologi bagaimana saat itu drone dioperasikan—menebarkan racun herbisida. Kebetulan waktu itu ia berada di lokasi. Setelah mengetahui yang disemprotkan adalah herbisida gulma, lantas dia dan beberapa petani lainnya yang melihatnya langsung mengejar operator drone supaya menghentikan kegiatannya. Pesawat nirawak saat itu kata Ahmad, diterbangkan mencapai ketinggian 15 meter, kadang lebih tinggi lagi meliuk-meliuk

di udara. Perbuatan perusahaan dengan menggunakan drone-menyemprotkan herbisida itu juga mengenai tanaman produktif lainnya milik rekan Ahmad, sesama anggota kelompok tani Sekato Jayo.

“Kami tidak mau ribut, tapi sekarang tengoklah, tanaman kami mati, kuning-kuning sampai mati busuk, kemungkinan dosis untuk gulma yang dipakai besar,” ucap Ahmad.

Konflik yang terjadi antara petani dengan PT WKS telah berlangsung sejak lama dan telah terjadi rentetan konflik sebelumnya. Konflik ini pun kembali memuncak saat masa pandemi. Tindakan yang dilakukan perusahaan pada saat pandemi Covid-19 ini menjadi ancaman bagi petani, sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan pangan keluarga.

Alih-alih memberi ruang kepada petani untuk mengembangkan tanaman pangan, perusahaan besar Asia Pulp and Paper (APP Sinar Mas) melalui pemasoknya di Provinsi Jambi PT WKS justru menggusur pertanian produktif yang menjadi sumber pangan masyarakat.

Humas PT WKS, Taufik Qurochman mengklaim, penyemprotan herbisida itu disebut dengan kegiatan Pre-Planting Spraying (PPS). Itu dilakukan perusahaan untuk mempertahankan lahan untuk tanaman industri di wilayah konsesi mereka. “Kami sadar metode tersebut adalah baru, menggunakan teknologi drone. Namun kami tetap mengedepankan Standar Operating Prosedur (SOP) yang mengutamakan keamanan dan keakuratan,” kata Taufik.

Taufik menyebut, perusahaan senantiasa berupaya mengedepankan dialog untuk mencapai kesepahaman dengan pihak terkait. Selain itu ia mengklaim menjunjung tinggi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dengan kelompok tani.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan klaim perusahaan. Justru yang terjadi di lapangan pelbagai kriminalisasi masih

kerap dialami petani. Bahkan setelah penyemprotan herbisida, seorang petani masih mengalami kriminalisasi. Ahmad dilaporkan perusahaan ke polisi atas tuduhan perambahan hutan akasia. Ahmad secara kooperatif datang ke Polres Tebo dan menjelaskan bahwa ia menanam lahannya sendiri yang menjadi haknya. Di lokasi yang ditanami itu kata Ahmad, tidak ada pohon akasia.

“Udah sampai disitu, sampai saat ini perusahaan tidak mencabut laporannya, saya minta salinan BAP tidak dikasih, alasannya saya bukan tersangka,” ujar Ahmad.

Setelah insiden penyemprotan herbisida, kriminalisasi terhadap petani masih terjadi. Pada 28 April, petani bernama Agus saat membersihkan kebunnya didatangi dua orang berbadan tegap dan beberapa orang pengamanan perusahaan. Agus tak bergeming ketika dihardik oleh orang “suruhan” perusahaan. “Tiba-tiba terus dikeluarkan dua kali tembakan ke atas,” kata Agus.

Selain itu, pasca-penyemprotan itu pihak perusahaan sengaja menaruh dua unit alat berat di sekitar garapan di lahan warga. M Jais, Ketua Poktan Sekato Jayo, menduga alat berat itu sengaja ditaruh oleh perusahaan. Hal itu menurut Jais, supaya petani tersulut emosinya.

Logikanya sambung Jais, alat berat tersebut dalam sehari hanya dioperasikan dua jam. “Tanaman kami diinjak, logikanya alat berat itu sudah buruk, jadi memang sengaja dipasang supaya kami marah dan merusak alat berat itu,” kata M Jais. “Tapi kami diam saja, kami tahu itu pancingan, kalau merusak nanti pasti akan dilaporkan dan kami menjadi berhadapan dengan hukum.” Tak hanya dibayangi ketakutan, setelah insiden penyemprotan herbisida dan kriminalisasi itu, petani juga kehilangan masa panen dan tak bisa memetik hasil. Akibat penyemprotan racun itu, petani juga merugi secara materil dan tenaga.

Berdasarkan hitungan yang dilakukan kelompok tani Sekato Jayo bersama tim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Jambi, tanaman petani yang rusak akibat penyemprotan racun menggunakan drone itu mencapai 2 hektar.

“Petani yang tanamannya mati mengalami kerugian jutaan rupiah, belum lagi kerugian tenago,” kata M Jais.

Setelah peristiwa penyemprotan drone, dan petani telah membeberkan jumlah kerugian, namun kata M Jais, sampai sekarang mereka belum mendapat ganti rugi. “Yang tanamannya mati itu punyanya Pak Surbakti, pak Halim, juga punya Ahmad,” kata dia.

M Jais mengatakan, kelompok tani yang diketuainya itu mempunyai hak menggarap tanah seluas 1.500 hektar. Tanah tersebut kata dia, merupakan tanah adat Desa Lubuk Mandarsah, yang diamanahkan Lembaga Adat setempat kepada Poktan Sekato Jayo untuk digarap menjadi ladang pertanian dan perkebunan.

“Tahun 1985 orang tua saya sudah buka ladang pertanian di sini,” kata Jais.

Nelangsa Setelah Tak Bisa Panen



Ahmad saat menunjukan tanaman cabai yang kering akibat imbas penyemprotan racun herbisida yang dilakukan PT WKS. (kilasjambi.com/gresi plasmanto).

Ahmad lalu beranjak mengajak saya ke lahan milik kawannya yang bernama Surbakti. Jaraknya yang hanya sepelemparan batu dari lokasi lahannya, Ahmad menunjukkan beragam tanaman sayuran seperti cabai dan semangka yang ditanam di atas tanah seluas setengah hektar. "Ini juga terimbas penyemprotan racun herbisida yang dilakukan perusahaan," kata Ahmad menunjukkan jejeran tanaman cabai itu.

Puluhan batang cabai rawit yang telah ditanam berjejer itu daunnya kerontang, buahnya tak ada. Padahal saat ini menurut Ahmad, tanaman cabai tersebut merupakan puncaknya periode panen.

Namun apa daya, harapan petani untuk memetik hasil pertaniannya kini pupus sudah. Tak hanya cabai, tanaman semangka di lahan itu pun sudah ludes, tak bisa dipanen. Sebuah pondok beratap terpal biru yang berada di sekitar tanaman cabai yang nahas itu sekarang tak ditempati lagi oleh Surbakti.

"Waktu (penyemprotan herbisida) itu arah anginnya ke barat sini, merembet kemana-mana sampai kena tanaman sayuran kami ini, di sini ada cabai, semangka, tanaman katuk, dan pisang," ucap Ahmad dengan nada murung. "Kami nelangsa, apa yang mau dipanen, sudah mati kering begini."

Petani kecil seperti Ahmad dan lainnya mengaku, sangat dirugikan dengan tindakan perusahaan. Apalagi mereka bertani hasilnya tidak untuk mereka sendiri, melainkan juga akan dijual. Hasil panen mereka kerap dibeli tukang sayur keliling atau yang mereka sebut dengan istilah along-along. Dan along-along itu lah kemudian yang membawa hasil panen mereka untuk dijual ke desa-desa tetangga menggunakan keranjang sepeda motor.

Saat masa pandemi Covid-19 ini kata Ahmad, berdampak pada sektor pertanian mereka, terutama saat tanaman mereka mati dan gagal panen akibat tindakan perusahaan. Petani yang tanamannya mati, kini memenuhi kebutuhan pangannya dengan memetik dan mengumpulkan sayuran yang tumbuh di rawa yang berada di sekitar ladang mereka.

“Kami yang tanamannya mati kena herbisida itu sekarang ngumpulin kangkung, genjer yang tumbuh di rawa, kalau genjer banyak di sini, dikumpulin untuk disayur, kalau dapatnya banyak dijual,” kata Ahmad.

Dampak dari penyemprotan racun kimia herbisida menggunakan drone itu tak hanya mengenai tanaman petani. Namun, juga berimbas pada koloni lebah madu yang bersarang di pohon Sialang yang berada tak jauh dari lokasi penyemprotan.

Di lokasi itu terdapat empat batang pohon Sialang berukuran besar seperti Sialang Kedondong. “Biasanya ada sampai puluhan titik gerombolan lebah, tapi sekarang lebah pergi, padahal ini bisa dipanen madunya,” ujar Ahmad.

Anggota Poktan Sekato Jayo sangat berharap agar konflik ini dapat segera terselesaikan. Mereka berharap pemerintah bisa melindungi keberadaan petani. Hanya satu permintaan mereka, yakni ingin hidup tentram dan nyaman dengan bertani, tidak diganggu-ganggu.

“Jangan ada intimidasi apapun saat kami bertani, supaya kami bisa memetik hasilnya, petani menanam pasti mengharapkan hasilnya untuk dimakan,” ucap Ahmad.

Urusan kedaulatan pangan di Jambi dengan penduduk 3,6 juta jiwa itu masih menjadi persoalan serius. Mendatangkan pangan dari luar daerah menjadi sebuah ironi.

Provinsi Jambi dengan luas daratan yang mencapai 50.160 kilometer persegi itu kebutuhan pangannya masih bergantung pada daerah di luar Jambi. Produksi pangan yang berasal dari petani lokal hanya mampu memenuhi kebutuhan sebanyak 60 persen.

“40 persen semua kebutuhan pokok di Jambi masih dipasok dari luar provinsi,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rosnifa.

“Untuk komoditi cabai di Jambi masih mengandalkan dari Jawa. Sayuran juga masih didatangkan dari luar seperti dari Curup, dan daerah Sumatra Barat,” sambung Rosfina.

Ketidaktransparan Penyelesaian Konflik saat Masa Pandemi



Alat drone yang digunakan perusahaan PT WKS. (dok Poktan Sekato Jayo).

Indonesia masih dilanda pandemi. Bahkan ketika pandemi, kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani tetap terjadi. Konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi pada masa pandemi terjadi pada kelompok tani Sekato Jayo. Puncaknya 10 April 2020, PT WKS dengan menggunakan drone melakukan penyemprotan racun herbisida di tanaman petani.

Akibat pandemi Covid-19 itu telah membawa dunia pada potensi krisis pangan. Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengeluarkan imbauan kepada seluruh negara, termasuk Indonesia agar berhati-hati menghadapi pandemi ini.

Data hingga akhir Juli 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif di Tanah Air telah mencapai angka 108.376 kasus dan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 5.131 orang. Sedangkan di Provinsi Jambi, tercatat 162 orang terinfeksi. Dari jumlah ini di antaranya 115 sembuh dan empat pasien meninggal dunia.

Langkah-langkah dari pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar krisis pangan tidak terjadi saat masa pandemi. Namun masalah lain, alih-alih memberikan kesempatan petani untuk menggarap pertaniannya, pelbagai kriminalisasi malah masih menggosur lahan pertanian produktif.

Bagi anggota kelompok tani Sekato Jayo di Desa Lubuk Mandarsah, menanam adalah profesi. Mereka bercocok tanam-hasilnya menjadi bekal sehari-hari. Namun, petani di desa itu belum mendapatkan keadilan, lahan garapan petani belum diakui negara.

Bahkan saat masa pandemi Covid-19 itu petani belum bisa leluasa menggarap, menanam dan memanen hasil. Mereka belum mendapatkan hak atas tanah untuk mereka memproduksi sumber pangan sendiri melalui tanaman pangan. Kelompok tani itu semakin termarginal lantaran juga mendapatkan intimidasi atau kekerasan dari tim keamanan perusahaan.

Bentuk intimidasi, kriminalisasi, hingga perusakan tanaman petani yang terjadi di Poktan Sekato Jayo, Desa Lubuk Mandarsah sangat ironis. Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Rudiansyah, mengatakan dalam situasi menghadapi pandemi global ini seyogyanya semua pihak bahu-membahu dan saling meringankan beban bersama.

Rudi menyalahkan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan perusahaan saat masa pandemi.

Menurut Rudi, dalam situasi pandemi sekarang ini menjadi bukti ada ketimpangan problem yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi jurang krisis pangan. Selama ini pemerintah di Jambi masih berfikir ketersediaan pangan masih bergantung dari luar daerah.

Semangat pemerintah, baik itu di pusat dan daerah terhadap kedaulatan pangan kata Rudi, tidak diterjemahkan dengan baik. "Seharusnya pemerintah menetapkan fungsi-fungsi

areal pertanian berkelanjutan itu untuk ditingkatkan produktivitasnya, tapi malah pemerintah masih cenderung menutup mata terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi untuk menghancurkan tatanan pertanian,” kata Rudi. Rudi menilai kriminalisasi terhadap petani merupakan bentuk ketidaktransparan pemerintah dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi saat masa pandemi ini. Pemerintah menurut dia, telah diam dan membiarkan wilayah pertanian masyarakat yang terancam oleh tindakan korporasi.

“Ini bentuknya sudah nyata ya, dari teriakan masyarakat tani itu tidak pernah dilihat bentuk action nyata yang dilakukan pemerintah di lapangan,” ucap Rudi. “Akhirnya pemerintah itu hanya sekedar yang tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.”

Gagalnya Komitmen FCP APP Sinar Mas



Herbisida yang digunakan oleh PT WKS. (dok Poktan Sekato Jayo).

Merespon tindakan penyemprotan racun herbisida yang dilakukan PT WKS (APP Sinar Mas Group) membuat koalisi masyarakat bergerak membela petani. Sebanyak 90 koalisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan Internasional menyurati investor dan buyer APP Sinar Mas.

Menurut koalisi, cara yang dilakukan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat itu membahayakan sumber kehidupan masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menurut koalisi, tindakan yang dilakukan perusahaan bukan yang pertama. PT WKS pernah bertindak sewenang-wenang kepada kelompok tani Lubuk Mandarsah. Pada tahun 2015, sekelompok pengamanan perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di bawah naungan APP Sinar Mas, terlibat pembunuhan terhadap pejuang tani, Indra Pelani.

Pada waktu itu jasad Indra Pelani dalam kondisi penuh luka tusuk dan pukulan benda tumpul. Ia ditemukan sekitar 8 kilometer dari pusat desa. Hasil investigasi Walhi Jambi dan koalisi NGO mengungkap insiden meninggalnya Indra Pelani melibatkan unsur terencana yang dilakukan 5 orang pegawai keamanan perusahaan. Kelima orang tersebut kini telah dijatuhi hukuman.

Setelah peristiwa terbunuhnya Indra Pelani, perusahaan dikenakan denda adat oleh masyarakat. Perusahaan menjalin kesepakatan kepada masyarakat, yang intinya tidak saling mengganggu. “Namun kesepakatan itu tidak direalisasikan perusahaan,” ujar Rudi.

Berdasarkan studi yang dilakukan Environmental Paper Network (EPN) dan koalisi NGO, Lubuk Mandarsah adalah 1 dari 107 yang mendera konflik aktif dengan perusahaan raksasa itu sejak tahun 2007. Namun, sejak tahun tersebut hingga sekarang penyelesaian konflik tak kunjung selesai.

Sebenarnya pada tahun 2013, APP Sinar Mas telah komitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Komitmen itu disebut Forest Conservation Policy (FCP). Sayangnya sejak komitmen itu diganggu berbagai masalah masih berlanjut.

Direktur Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan, apa yang terjadi

antara perusahaan dengan masyarakat Lubuk Mandarsah menjadi bukti kegagalan dari klaim penyelesaian konflik dan perubahan pola bisnis sebagaimana yang digaungkan APP kepada masyarakat global selama ini.

“Dalam surat yang kami kirimkan ke investor dan buyer itu, kita meminta untuk tidak melakukan bisnis dengan APP dan atau perusahaan afiliasinya sampai terbukti memenuhi janjinya sebagaimana yang mereka komitmenkan dalam FCP 2013 itu,” ujar Rudi.

Sementara itu, Humas PT WKS, Taufik Qurachman ketika dihubungi enggan menanggapi terkait dengan surat yang dilayangkan koalisi NGO itu. Taufik hanya mengirimkan sebuah tautan siaran pers yang dirilis APP Sinar Mas. Tautan itu berjudul *Correcting the record on allegations that APP damaged food security in local community* “Ada tuh (siaran pers) bro disitu, udah statement resmi kami,” ujar Taufik.

Dalam siaran pers yang dirilis di laman asiapulppaper.com pada 13 Mei 2020 itu, APP Sinar Mas menampik segala tuduhan yang dilayangkan Walhi Jambi. Tuduhan-tuduhan itu menurut APP, adalah kesalahan penyajian fakta di lapangan.

“Kami terbuka untuk melibatkan pihak ketiga yang kredibel dan berkomitmen untuk bergabung dalam proses mediasi, sehingga kami dapat mencapai resolusi yang adil dan setara,” demikian salah satu poin statement APP.

<https://kilasjambi.com/petani-pandemi-dan-elegi-di-ladangnyasendiri/>

Gresi Plasmanto

MUASAL TANAH ADAT DI LUBUK MANDARSAH DAN RENTETAN KONFLIK DENGAN APP SINAR MAS

Sabtu 8 Agustus 2020



Pohon sialang kedondong yang masih tersisa di wilayah Bukit Rinting, Desa Lubuk Mandarsah. (kilasjambi.com/gresi plasmanto).

Tiga ikat sayur genjer tergeletak di atas meja yang berada di halaman rumah M Jais. Sayuran jenis kelayan (*Limnocharis flava*) itu baru saja dipetik dari rawa-rawa alam yang berada di Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi.

Sore itu, tak berselang lama setelah saya duduk di depan meja tadi, tiba seorang perempuan yang kemudian membawa tiga ikat genjer itu. Sayuran itu akan diolah menjadi hidangan makan malam.

Malam harinya – benar sayur genjer telah dihidangkan menjadi tumis beserta nasi dan lalapan jengkol di meja makan di dalam dapur rumah M Jais. “Ayo dimakan, *ikolah seadonyo*,” ujar M Jais saat mempersilakan saya makan malam di rumahnya 15 Juli 2020 lalu. “Genjer ini di sini tumbuh banyak di rawa, ada kangkung juga.”

M Jais adalah Ketua Kelompok Tani Sekato Jayo. Kelompok tani ini diberi mandat oleh lembaga adat desa setempat untuk mengelola tanah adat seluas 1.500 hektare. Kelompok tani ini punya anggota aktif sebanyak 380 orang warga Lubuk Mandarsah.

Wilayah yang dimandatkan ini kata M Jais, masuk areal yang berkonflik dengan PT Wira Karya Sakti (WKS), kelompok usaha APP Sinar Mas. Meski masih dilanda konflik, kini di lokasi yang digarap kelompok tani telah diakui secara administratif dan dimekarkan menjadi RT 06 Dusun Pelayang Tebat, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.

“Yang menetap di sini (RT 06) ada 67 KK, di wilayah sini juga sedang dibangun pesantren,” ujar M Jais.

Jais yakin betul wilayah yang dikelola kelompoknya adalah tanah ulayat. Di wilayah itu masih terdapat tinggalan pohon-pohon tua seperti pohon Silang. M Jais semakin yakin, setelah mendapat mandat dari lembaga adat setempat untuk mengelola bersama-sama.

Dalam surat mandat yang ditandatangani Ketua Adat Lubuk Mandarsah, Jamali A.B pada 13 Maret 2015 disebutkan tanah ulayat adat itu menghampar berada di Bukit Rinting dan Bukit Kumbang. Lembaga adat meminta supaya tanah ulayat tersebut dimanfaatkan bagi masyarakat untuk digarap dan dikelola

dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ketika ditemui di rumahnya, Jamali A.B (72) bercerita panjang lebar muasal tanah ulayat dalam silsilah tambo. Tambo yang diceritakan Jamali, adalah legenda moyang mereka yang pertama kali datang ke Lubuk Mandarsah.

Moyang orang Lubuk Mandarsah kata Jamali, bernama Pati 11 atau yang biasa disebut Moyang Teguh, berasal dari suku Minang. Pada tahun 1600 Pati 11 mencari kerabatnya yang bernama Sultan Kelambuano di huluan Sungai Ketalo, namun kemudian bertemu dengan Panglimo Serio di Sungai Landai Lubuk Mandarsah.

Pati 11 atau Moyang Teguh ini dikenal sakti dapat membunuh ular tedung besar. Saat ini kata Jamali, cerita itu masih membekas di danau dan anak sungai Ketalo.

“Moyang Teguh ini pertama kali menemukan keberadaan masyarakat yang bermukim untuk mencari penghidupan sekitar Sungai Landai, sehingga Moyang Teguh diangkat sebagai depati pertama di Lubuk Mandarsah,” kata Jamali. “Cerita ini turun temurun.”

Makam dari moyang mereka itu kini terletak di Sungai Rambai yang saat ini masuk wilayah Lubuk Mandarsah. Kuburannya mencapai panjang 4 meter dan masih terpelihara sebagai kuburan leluhur.

Di sela menceritakan silsilah moyang mereka, Jamali yang juga Kepala Desa Lubuk Mandarsah yang pertama itu, lantas menyodorkan situs-situs makan kuno yang tersebar di desanya. Tercatat ada belasan makam kuno yang tersebar di sana, termasuk di wilayah Bukit Rinting.

Mulai dari Moyang Teguh, Moyang Gajah Meno, Tapak Sembilan, Sultan Kelambuano, Moyang Bontet, Moyang Batu Sungkai, Moyang Biduk Patah, Moyang Rambalayam, Panglimo Rimbo, Raden Swat, Hijau, Bulu Lidah, dan Moyang Serio.



Kuburan Moyang Teguh atau Pati 11 di Lubuk Mandarsah. (dok Jamali AB).

Sejarah masih terus berlanjut, pada tahun 1916 di zaman sarekat Islam Merah, masyarakat Lubuk Mandarsah telah memulai kehidupan dengan bertani dan berkebun untuk bertahan hidup melawan penjajah Belanda, sampai kemudian Indonesia merdeka.

Di masa proses penggarapan lahan itu masyarakat di Lubuk Mandarsah telah diatur oleh aturan adat setempat. Hal itu supaya tidak ada konflik antar sesama masyarakat dan semua mendapatkan hak atas tanah. Kemudian di masa depati hingga tahun 1978 masyarakat tidak pernah berkonflik.

Namun ketika masa peralihan pada tahun 1995 masalah perusahaan Inhutani V. Saat itu lah mulai pecah konflik pertama antara masyarakat dan perusahaan.

Sampailah masuk perusahaan PT WKS tahun 2006 yang dimulai dari wilayah Bukit Bakar, dan tahun 2007 perusahaan mulai menggusur kawasan pertanian dan perkebunan masyarakat di Lubuk Mandarsah.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Lubuk Mandarsah dengan PT WKS sampai sekarang tak kunjung selesai. Kelompok tani masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya.

“Bukti-buktinyo sudah ado, jadi jangan disio-siokan amanat ini, terus perjuangkan hak ulayat untuk kehidupan bersama,” kata Jamali.

Konflik yang Tak Kunjung Usai



Indra Pelani, petani Tebo, yang ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa sekuriti sewaan PT WKS tahun 2015. Foto: Walhi Jambi.

Desa Lubuk Mandarsah berdasarkan studi yang dilakukan Walhi Jambi merupakan satu dari ratusan desa yang berkonflik dengan PT WKS. Konflik agraria yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat tani belum ada penyelesaian konkrit sejak 2006. Sejak saat itu, letusan konflik antara pihak masyarakat dan perusahaan terus berulang tanpa ada inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan. Hingga akhirnya pada masa pandemi, perusahaan masih mengkriminalisasi keberadaan petani di Lubuk Mandarsah.

Di sisi lain dalam studi itu tim Walhi Jambi juga mencatat sebanyak 33 desa dan komunitas masyarakat berkonflik aktif dengan perusahaan, dan 127 desa berpotensi konflik yang teridentifikasi di lima kabupaten di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut 100 persen kasus terkait sengketa lahan disertai penggusuran.

Petani di lima kabupaten, yakni Tebo, Muaro Jambi, Batanghari,

Tanjungabung Timur dan Tanjungabung Barat, berdasarkan studi yang dilakukan Walhi Jambi dan koalisi NGO, telah kehilangan lahan seluas 41.000 hektare.

Masih menurut studi itu, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah mengatakan, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam jumlah konflik sosial yang melibatkan APP Sinar Mas. Dengan kawasan kelola konsesi HTI seluas 349.396, konflik itu melibatkan kelompok usaha Sinar Mas, yakni PT WKS dan PT Rimba Hutani Mas (RHM).

Bahkan PT WKS sejak baru beroperasi di Jambi pada tahun 1996, perusahaan pemegang konsesi HTI itu telah terlibat konflik dengan masyarakat di Kuala Dasal, Kabupaten Tanjung Jabung, kata Rudi.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan raksasa PT WKS itu kata Rudi, telah mengakibatkan 3 orang petani tewas. Pada Desember 2007 di Muaro Killis Tebo, petani bernama Sukamto, meninggal dunia terkena serangan jantung saat melihat sawahnya digusur.

Kemudian pada November 2010 di Senyerang, Tanjungabung Barat, seorang petani Ahmad Adam tewas tertembak oleh oknum aparat. Yang terakhir Februari 2015, di Lubuk Mandarsah, Indra Pelani tewas dibunuh oknum security perusahaan PT WKS.

“Kami sudah mengirim surat terbuka kepada buyer dan investor APP, untuk mengurai fakta bahwa perusahaan melanggar komitmen Forest Conservation Policy (FCP),” kata Rudi.

Sementara itu, dalam siaran persnya siaran pers yang dirilis di laman asiapulppaper.com pada 13 Mei 2020 itu, APP Sinar senantiasanya terlibat secara langsung dengan kelompok masyarakat setempat di Jambi. Hal itu dilakukan untuk menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif.

“Kami selalu terbuka untuk membangun dan terlibat dengan pemangku kepentingan dan melibatkan pihak ketiga yang

kredibel berkomitmen untuk bergabung dalam proses mediasi, sehingga kami dapat mencapai resolusi yang adil dan setara,” tulis siaran pers itu.

Upaya Mereduksi Konflik

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Gushendra, mengatakan, pemerintah, baik tingkat provinsi dan kabupaten telah membentuk tim resolusi konflik sektor Hutan Tanaman Industri (HTI).

Tim tersebut kata Gushendra, bekerja untuk menangani konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemegang izin konsesi. Tim resolusi konflik yang melibatkan instansi terkait itu melaksanakan mediasi dan menguraikan persoalan di lapangan. “Di Jambi ini sudah terpetakan konflik yang terkait dengan sektor kehutanan, rata-rata masyarakat dengan perusahaan HTI,” kata Gushendra.

Ditanya terkait konflik memuncak yang terjadi saat pandemi Covid-19, Gushendra mengatakan, tim terpadu di daerah yang mengkaji persoalan konflik yang terjadi di daerah masing-masing. “Gunanya untuk cegah dini,” kata dia.

Sejauh ini lanjut Gushendra, mekanisme yang ditawarkan untuk mengakhiri konflik antara masyarakat dan perusahaan HTI mengacu pada mekanisme Perhutanan Sosial, yakni pola Hutan Kemitraan (Hkm).

“Kalau memang permintaannya di luar Hutan Kemitraan, silakan diajukan ke kementerian, karena yang berhak mengurangi kawasan hutan adalah kementerian, kami di pemerintah provinsi tidak bisa,” ucap Gushendra.

Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, Fran Dodi mengatakan, saat masa pandemi ini petani tidak meminta apa-apa ke negara. Mereka hanya minta diberikan haknya bertani dengan tentram.

“Dalam pandemi ini siapa yang bisa mempertahankan pangan? Ya Cuma petani. Saat petani menggarap, menanam dan mau memetik hasil, malah digusur. Negara kalah dengan korporasi,” kata Dodi.

Dodi mengatakan, negara tidak boleh kalah dengan korporasi. Pemerintah tidak perlu lagi mencari objek reforma agraria. Menurut Dodi, objek reforma agraria sudah jelas tersedia di wilayah-wilayah konflik di 5 kabupaten yang melibatkan antara petani dan PT WKS.

“Langsung saja ditetapkan, objek sudah ada. Ini saja langsung ditetapkan jadi objek reforma agraria, dan ini akan menjadi jawaban dan membantu negara menghadapi krisis pangan,” kata Dodi.

Dia memastikan reforma agraria di wilayah konflik dengan perusahaan akan menjadi jawaban membantu negara dalam menghadapi krisis pangan. Sebab di wilayah konflik itu banyak kegiatan pertanian.

“Tapi ketika pemerintah tidak mau melaksanakan itu (reforma agraria) artinya kita tunggu saja akan menjadi boom waktu, banyak yang kelaparan, anak-anak putus sekolah” ujar Dodi.

<https://kilasjambi.com/muasal-tanah-adat-di-lubuk-mandarsah-dan-rentetan-konflik-dengan-app-sinar-mas/>

Triyo Handoko

SUDAH DIUPAH TIDAK LAYAK, GURU HONORER DIHANTAM PANDEMI

by Triyo Handoko
29 September 2020



Illustrator oleh Deasynta.

Masa pandemi beban kerja 5.900 guru honorer di Gunungkidul bertambah. Upah masih tidak layak dan tidak ada jaminan kesehatan. Transparansi anggaran menjadi teka-teki. Akuntabilitas tata kelola tenaga kependidikan dipertanyakan.

Ismawati Nur Rahmadhani terlihat sedang mengajar di ruang Kelas II SD Negeri Mentel 2, Tanjungsari, Gunungkidul. Ia menjelaskan isi dan keterangan buku teks pelajaran yang akan digunakan selama satu semester kedepan.

Ruang kelas tersebut tidak terisi penuh, hanya bangku sisi kanan saja yang digunakan murid. Di tengah penjelasannya, anak didik Isma yang duduk di bangku belakang mengangkat tangan dan bertanya, “Sampai kapan belajar dari rumah, ibu guru?”

Isma menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul No. 421/2762/MP-3. “Sampai pada waktu yang belum ditentukan. Nanti ibu akan sampaikan ke orang tua jika sudah ada kejelasan sampai kapan belajar di rumahnya,” kata Isma, lalu melanjutkan penjelasan buku pelajaran.

Jam dinding di tembok bagian belakang ruangan menunjukkan pukul 09.15 ketika Isma mengakhiri penjelasannya. Hari itu adalah Kamis, 16 Juli 2020, jadwal siswa kelas dua masuk sekolah untuk mengambil buku pelajaran. Hari pertama bagi Isma menjumpai siswa di kelasnya sejak 16 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 membuat Isma mengajar secara jarak jauh. Berbekal buku pelajaran yang dibagikan ke setiap siswa dan grup Whatsapp wali murid, ia menunaikan tugasnya sebagai guru honorer.

Sore hari Isma mulai mengajar di teras rumahnya. Di atas meja, Isma sudah menyiapkan buku pelajaran, telepon pintar, laptop, dan sebuah buku catatan. Sore itu, Isma mengajar Bahasa Indonesia.

Selepas mengirimkan bahan pembelajaran dan tugas, ia menunaikan salat. Saat itu telpon pintarnya tidak berhenti berdering. Tujuh panggilan Whatsapp tak terjawab dari wali murid yang bingung dengan penjelasan tugas.

Isma menjelaskan lagi dan lagi hingga wali murid paham dengan maksud pembelajaran dan tugas yang disampaikannya. “Beban tambahan dari pembelajaran daring adalah komunikasi dengan wali murid,” kata Isma.

Tidak hanya itu, jadwal mengajarnya juga sangat acak. Tidak

terjadwal dengan sistematis. “Saya harus menyesuaikan kesibukan wali murid, kadang saya harus mulai bekerja sejak subuh karena ada wali murid yang bisanya di waktu itu,” jelasnya.

Paling banyak waktu yang dihabiskannya untuk mengajar pada sore hingga malam hari. Jika dikalkulasi jam mengajar Isma bertambah dibanding sebelum masa pandemi. Selain itu, Isma juga harus mengunjungi tiga rumah siswanya yang tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh. “Saya cetak sendiri tugasnya, kemudian saya antarkan ke rumahnya,” jelas Isma.

Isma merasa lebih melelahkan mengajar di masa pandemi. “Selain karena pandemi ini menjadikan kondisi psikis yang cepat lelah, juga kenyataannya beban kerja memang bertambah,” jelas Isma.

Munculnya kasus Covid-19 di Gunungkidul memang berdampak besar pada kehidupan guru honorer seperti Isma. Begitu kebijakan sekolah online diterapkan, beban dipundak Isma pun makin berat.

Semua itu bermula dari kasus pertama Covid-19 di Gunungkidul yang diumumkan oleh Dewi Irawaty Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul pada 25 Maret 2020. Dalam pengumuman tersebut Dewi mengumumkan delapan orang sudah positif Covid-19.

Tidak disebutkan riwayat perjalanan delapan orang positif Covid-19 pada pengumuman kasus pertama tersebut. Tidak juga diketahui mana orang pertama dari delapan orang tersebut yang terinfeksi. Delapan orang tersebut dari tiga kecamatan berbeda, yaitu Wonosari, Karangmojo, dan Ponjong.

Laman resmi Pemerintah Daerah (Pemda) Gunungkidul, Gunungkidulkab.go.id, pada 19 Maret lalu mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19. Dibentuk dengan Surat Edaran Bupati, tetapi tidak disebutkan nomor dan keterangan suratnya. Setelah ditilik di laman

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Gunungkidul juga tidak ditemukan.

Publik mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemda Gunungkidul. Salah satunya Joko Susilo penggagas Gunungkidul Menginspirasi yang kadung pesimis dengan Pemda Gunungkidul. Bersama jejaring organisasi, komunitas, dan kelompok relawan, Joko bergerak dengan aliansi #GKLawanCorona mulai 7 April hingga 7 Juni lalu.

Per 29 Juli 2020, total positif Covid-19 di Gunungkidul adalah 104 orang. Dua orang meninggal dunia dengan status positif, 36 meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan.

Joko menyayangkan gerak penanganan Covid-19 oleh Pemda Gunungkidul. "Kelompok rentan sosial-ekonomi yang paling terdampak dari tidak memuaskannya penanganan Pemda Gunungkidul," kata Joko. Termasuk didalamnya guru honorer lantaran selama ini diupah tidak layak dan tidak diberikan jaminan kesehatan.

Nasib buruk itu sebenarnya bukan terjadi setelah Covid-19 merebak di Gunungkidul, tapi sejak Isma mengajar di sekolahnya sebagai Guru Tidak Tetap (GTT).

Mulai mengajar pada 5 Agustus 2019, Isma mengaku belum pernah melihat surat tugasnya. "Kata Kepala Sekolah, surat tugas saya disimpan pihak sekolah," imbuh Isma. Statusnya sebagai GTT, menandakan bahwa hubungan kerjanya hanya pada sekolah. Tidak dengan Dinas Pendidikan, lebih-lebih dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun sekolah tempatnya mengajar adalah instansi negara.

Isma menilai beban kerja yang ditanggungnya tidak sebanding dengan hak yang diperolehnya. "Apalagi di masa pandemi, upahnya tetap sama," ungkap Isma. Selama masa pandemi upahnya masih sebesar Rp. 400 ribu, sama seperti sebelum pandemi.

Di masa pandemi, Isma hanya mendapat uang tambahan untuk paket internet sebesar Rp. 50 ribu. Tidak ada jaminan kesehatan baik sebelum maupun semasa pandemi.

Upah Tidak Layak, Tidak Ada Jaminan Kesehatan



Aris Wijayanto saat menjelaskan polemik yang dihadapi guru honorer. Foto oleh Triyo.

Keluhan serupa tidak hanya dari Isma. Aris Wijayanto Koordinator Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul menyampaikan hampir seluruh guru honorer mengeluhkan hal tersebut. “Apalagi pada masa pandemi seperti ini,” kata Aris.

Aris yang juga guru honorer di SD Negeri Karang Sari, Semin, Gunungkidul, menyebutkan tidak ada bantuan apapun dari Pemda Gunungkidul terhadap guru honorer di masa pandemi. Perubahan atas Permendikbud No. 8/2020 menjadi Permendikbud No. 19/2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak signifikan diimplementasikan.

“Maksud dari Permendikbud No.19/2020 untuk memastikan

guru honorer apapun statusnya mendapat upah layak di tengah pandemi, selain untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah,” keluh Aris.

Guru honorer dengan status GTT di Gunungkidul, menurut data FHSN Gunungkidul, hanya mendapat uang tambahan untuk paket internet.

“Paket internet memang menjadi kewajiban sekolah karena pembelajaran lewat internet,” imbuh Aris. Sedangkan untuk guru honorer berstatus guru pengganti dan guru honorer berinsentif mendapat tambahan upah.

Sebelum masa pandemi guru pengganti diupah Rp. 800 ribu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk guru honorer berinsentif diupah Rp. 300 ribu dari dana BOS. Sedangkan untuk GTT tergantung dari pihak sekolah, kata Aris “Hal ini karena GTT tidak diangkat oleh Dinas Pendidikan dan tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).”

Semasa pandemi, guru pengganti dan guru honorer berinsentif mendapat upah tambahan dari kelonggaran pengelolaan dana BOS. Untuk guru pengganti upahnya standar Upah Minimum Regional (UMR) Gunungkidul yaitu Rp1,7 juta. Sedangkan guru honorer berinsentif peningkatan upahnya variatif, namun mayoritas masih di bawah UMR.

Nasib paling nahas menimpa guru honorer berstatus GTT. Lantaran, menurut Aris, tidak ada kemauan dari sekolah dan ketegasan dari Dinas Pendidikan untuk mensejahterakan guru honorer. “Sudah jelas dalam Permendikbud No.19/2020 bahwa sistem NUPTK dihapuskan, sehingga guru dengan status apapun bisa diupah dengan dana BOS termasuk GTT,” jelas Aris.

Namun kenyataanya, menurut data FHSN, tidak ada sekolah yang melakukan terobosan tersebut. “Jika sebelum pandemi sekolah dan Dinas Pendidikan beralih tidak diperbolehkan mengupah GTT dengan dana BOS karena regulasi, sekarang

regulasi sudah memperbolehkan tapi tetap tidak dilakukan,” jelas Aris.

Untuk jaminan kesehatan di masa pandemi, menurut data FHSN, tidak ada sama sekali jaminan yang diberikan. Padahal menurut Aris, masih banyak guru honorer yang harus mengajar dari rumah ke rumah siswa. Sehingga resiko terinfeksi Covid-19 karena mengajar ada.

Aris mencontohkan dirinya sendiri yang harus mengajar lima siswa didiknya dari rumah ke rumah. “Jadi misal saya terinfeksi Covid-19, saya harus gimana? Sudah upah pas-pasan, tidak ada jaminan kesehatan,” ujarinya. Padahal beban kerjanya sama seperti guru PNS pada umumnya, tetapi haknya berbeda.

Bahkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker tidak disediakan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan. Aris menyayangkan sikap sekolah maupun Pemda Gunungkidul yang tidak memperdulikan keselamatan guru honorer. “Padahal hal tersebut bisa disediakan oleh sekolah atau Dinas Pendidikan dengan kelonggaran regulasi yang ada,” imbuh Aris.

Teka-teki Transparansi Anggaran



Kamis, 16 Juli saat Bahron Rasyid ditemui. Foto oleh Triyo.

Ditemui di ruang kerjanya, Bahron Rasyid Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul menjelaskan pengelolaan dana BOS sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah sesuai regulasi yang berlaku. “Soal Permendikbud No.19/2020 tentang juknis BOS yang menghapus NUPTK untuk honorarium guru honorer adalah kewenangan sekolah,” kata Bahron.

Untuk itu menurutnya Dinas Pendidikan tidak bisa mengintervensi. “Kami sudah buat forum sosialisasi Permendikbud No.19/2020 dan itu sudah cukup,” kata Bahron. Soal guru honorer berstatus GTT, Bahron menyerahkan sepenuhnya pada sekolah meskipun bekerja pada instansi di bawah naungannya.

Soal perubahan APBD Gunungkidul penyesuaian masa pandemi 2020, Bahron tidak menganggarkan APD bagi guru pada setiap status. Lebih-lebih jaminan kesehatan khusus guru honorer yang sebelum pandemi saja tidak diberikan.

“Anggaran untuk Dinas Pendidikan dari APBD dipotong, kami tidak bisa menganggarkan macam-macam,” jelas Bahron. Pemotongan APBD penyesuaian masa pandemi sebesar Rp. 27 M untuk Dinas Pendidikan. Dari Rp. 669 M menjadi Rp. 641 M. Suryana Kepala Sekolah SD Negeri Mentel 2, sekolah Isma mengajar, menjelaskan mengapa tidak memanfaatkan Permendikbud No.19/2020 untuk menggaji GTT di sekolahnya. “Bersama pihak Komite Sekolah sudah ada anggaran tersendiri untuk GTT, selain kami takut resikonya jika salah,” jelas Suryana di Ruang Kepala Sekolah.

Suryana mengakui upah GTT di sekolahnya tidak layak. Namun, bagi Suryana, hal tersebut adalah ladang amal untuk GTT. “Selain itu upah kecil tersebut sebagai penyemangat bagi GTT untuk terus istiqamah mengabdikan,” imbuhnya.

Ditanya soal jaminan kesehatan dan APD bagi guru honorer yang masih mengajar dari rumah ke rumah selama pandemi, Suryana menjawab tidak menganggarkan hal tersebut dalam kebutuhan dana BOS. “Untuk BPJS memang tidak ada, untuk

APD saya kira guru bisa mengusahakan sendiri,” jelasnya.

Wasito Ketua Komite SD Negeri Mentel 2 ketika ditemui di rumahnya yang berjarak kurang dari satu kilometer dari sekolah menjelaskan bahwa GTT diupah dari infaq siswa setiap minggu. “Infaq tersebut dilakukan setiap Jumat oleh guru kelas, minimal infaq Rp. 2.000,” jelas Wasito.

Setiap bulan, rata-rata terkumpul uang infaq sebesar Rp. 1 juta. “Uang infaq tersebut 10% untuk kas Komite Sekolah, sisanya kami serahkan ke sekolah untuk upah guru honorer,” kata Wasito. Soal guru honorer dengan status apa yang diupah dari infaq, Wasito tidak mengetahui.

Wasito menyadari apa yang dilakukan Komite Sekolah dengan infaq tersebut bisa terindikasi sebagai pungutan liar yang dilarang. Namun menurutnya hal tersebutlah cara agar sekolah di padukuhannya agar tetap berjalan. “Sekolah kami kekurangan guru dan sudah lama kami menunggu formasi guru PNS namun tidak kunjung ada,” keluh Wasito.

Upaya Wasito tersebut menjadi percontohan bagi sekolah lain. Wasito menjelaskan bahwa kekurangan guru juga terjadi di sekolah lain dan cara memenuhinya dengan mengangkat GTT. “Pertengahan 2019 kemarin saya diundang forum Komite Sekolah tingkat kabupaten dan kecamatan untuk menjelaskan model infaqnya sebagai percontohan sekolah lain,” kata Wasito. Ditanya soal infaq pada masa pandemi, Wasito menjawab tidak ada penarikan infaq karena siswa di rumah, sehingga tidak memungkinkan. Ditanya soal upah GTT pada masa pandemi, Wasito berkata “Kami belum ada pembicaraan soal ini dengan Kepala Sekolah.”

Bahron tidak bisa menjelaskan transparansi upah GTT di masa pandemi. Khususnya apa yang terjadi di SD Negeri Mentel 2 ketika Komite Sekolah tidak menarik infaq dan Kepala Sekolah tidak juga menganggarkan dari dana BOS. “Kami baru tahu dan perlu mengevaluasi,” katanya.

Tata Kelola Tenaga Kependidikan Semrawut



Budhi Masthuri saat menjawab pertanyaan seputar tata kelola tenaga kependidikan. Foto oleh Triyo.

Perkara serupa SD Negeri Mentel 2, menurut Aris, banyak terjadi. “FHSN Gunungkidul tidak bisa mencari data menyeluruh karena keberadaan GTT tidak ada data lengkapnya, hanya sekolah yang tahu” ujar Aris. Hal tersebut, menurut Aris, rentan disalahgunakan. “Saya pernah menemui GTT yang diupah dari dana BOS dengan item pembelanjaan barang,” jelas Aris.

Guru honorer berstatus guru pengganti dan guru honorer berinsentif yang datanya bisa diakses. “Ada 5.700 guru honorer di jenjang SD dan SMP di Gunungkidul, jumlah tersebut belum termasuk GTT,” jelas Aris. Sementara hanya ada 800 guru pengganti, sisanya guru honorer berinsentif.

Tuntutan utama FHSN Gunungkidul adalah payung hukum yang memadai bagi guru honorer. “Melalui payung hukum posisi guru honorer akan lebih kuat dan bisa menuntut haknya,” kata Aris. Tanpa payung hukum, status kepegawaian guru honorer di Pemda lemah dan terabaikan.

Budhi Masthuri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta

ketika ditemui di kantornya Selasa, 21 Juli lalu menjelaskan posisi guru honorer rentan dalam kepegawaian daerah. “Tidak hanya di Gunungkidul, di setiap daerah permasalahannya serupa,” kata Budhi. Budhi merujuk pada Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Undang-undang yang mengatur ASN tidak ada status kepegawaian honorer. “Yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelas Budhi. Status pegawai honorer sudah dilarang melalui Peraturan Pemerintah No. 48/2005 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 43 /2007.

Budhi menjelaskan bahwa kekurangan guru tidak bisa diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan. “Dari data PGRI 2019, kita kekurangan satu juta guru secara nasional,” kata Budhi. Tidak heran, menurut Budhi, mengangkat GTT adalah cara paling jamak yang digunakan oleh sekolah sebagai scope paling kecil untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Lantaran hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74/2008 tentang Guru. “Memang membingungkan sekali perundang-undangan soal tenaga kependidikan, di sisi lain ada larangan pengangkatan pegawai honorer, tapi ada peraturan yang secara tidak langsung memperbolehkannya,” jelas Budhi.

Menanggapi tuntutan FHSN Gunungkidul soal payung hukum guru honorer, Budhi menganggap hal tersebut tidak tepat. “Di Gunungkidul ada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas soal Guru Pengganti, SK tersebut turunan dari Peraturan Pemerintah No. 19/2017, namun kenyataannya hak dasar guru pengganti juga masih belum layak,” kata Budhi.

Reformasi birokrasi, menurut Budhi, menjadi kunci permasalahan tata kelola tenaga kependidikan yang semrawut. “Semuanya perlu dikembalikan pada Undang-undang No.5/2014 tentang ASN,” imbuh Budhi. Sehingga jika merujuk pada Undang-

undang No.5/2014, semua tenaga kependidikan pada sekolah negeri hanya ada dua jenis.

Yaitu PNS dan PPPK. Dimana hak dan tanggung jawab tenaga kependidikan dapat dievaluasi dengan baik. Selain tata kelola tenaga kependidikan lebih sistematis dan rapi.

Permasalahannya, menurut Budhi, adalah kemauan politik dari Pemda. Jika sudah ada kemauan politik, Pemda tinggal mengangkat guru honorer yang ada menjadi PPPK sesuai regulasi yang berlaku. "Sehingga permasalahan guru honorer tidak serumit ini, apapun kondisinya termasuk masa pandemi," pungkas Budhi.

Artikel ini didukung oleh dana hibah liputan dari UNESCO dan AJI Indonesia

<https://jurnalgunungkidul.com/sudah-diupah-tidak-layak-guru-honorer-dihantam-pandemik-/393/>

Eko Widiyanto

DIFABEL BERTAHAN DI MASA PANDEMI

Penulis: Eko Widiyanto

14/09/2020



Finantius Feriadi dan Adi Gunawan beserta penyandang tuna daksa memproses pewarnaan kain dengan teknik jumput dan kain ikat. (Terakota/Eko Widiyanto).

Tuna netra banyak yang tak bisa mengakses pendidikan dan keterampilan. Bahkan sebagian mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Sejak empat tahun lalu, Adi Gunawan mendirikan Adi Gunawan Institut (AGI), Lembaga pelatihan keterampilan, akses informasi dan latihan kerja.

Terakota.id—Sejak pagi, Damanhuri termenung dan duduk di rumah sembari mendengarkan radio. Sejak Maret, tak banyak

aktivitas yang dilakukan. Termasuk berpraktik sebagai pemijat tuna netra. Menganggur, dan tak ada pemasukan. Apalagi saat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Mei 2020.

“Susah. Banyak teman tuna netra tak bekerja sama sekali. Usaha pijat mati suri,” katanya. Peraturan Wali Kota (Perwal) Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatur usaha pijat. Panti pijat dilarang beroperasi, lantaran terjadi kontak fisik antara terapis dengan pelanggan. Dikhawatirkan terjadi penularan Covid-19.

Sebagian, katanya, membuka usaha secara sembunyi-sembunyi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Antara lain menggunakan masker, dan hand sanitizer. Hidup melajang, Damanhuri setiap bulan kebutuhan hidup sehari-hari hampir Rp 2 juta. Sedangkan selama pandemi Covid-19 pendapatan kurang dari Rp 1 juta. Untuk itu, ia harus menghemat pengeluaran.

“Beruntung dapat bantuan dari saudara,” ujarnya. Rata-rata, katanya, mereka membuka praktik memijat di rumah sewaan. Jika tak boleh buka usaha pijat tuna netra, katanya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi seperti saat ini.



Pengukuran suhu tubuh. (Foto : Balebengong).

Damanhuri menerima bantuan sosial yang berupa uang Rp 380 ribu per bulan. Bantuan disalurkan Dinas Sosial Kota Malang melalui Bank Jatim. Bantuan dari pusat, ujarinya, lancar sedangkan bantuan dari kota Malang kurang begitu lancar. "Baru menerima bantuan satu kali," tutur Damanhuri.

Kondisi pandemi seperti sekarang, memberatkan para penyandang tuna netra. Mereka kehilangan pekerjaan dan tak mendapat pemasukan. Ia berharap donasi dari masyarakat untuk difabel yang kesulitan ekonomi karena tak bekerja. "Bagaimana tuna netra bisa menghidupi anak dan keluarganya," ujarinya. "Menurut Wali Kota Malang, 100 persen bantuan sudah tersalurkan. Bahkan bantuan disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Kenyataannya tidak seperti itu yang alami difabel," ujarinya.

Sebagian Difabel tak Menerima Bansos

Sementara Finantius Feriadi asal Kabupaten Sanggau, Canggang, Kalimantan Barat tak mendapat bantuan sosial. Meski ia telah tinggal di Malang selama lima tahun terakhir. "Tak terdata, tak menerima bantuan karena bukan KTP Malang," ujarinya.

Ia merantau ke Malang sejak bapaknya meninggal. Ia belajar memijat di Yayasan Bhakti Luhur Malang. Sebelum pandemi, ia menerima pijat panggilan satu sampai dua orang per hari. "Sejak 16 Maret tak memijat. Tinggal di kontrakan. Tak dapat pemasukan selama tiga bulan, sama sekali," katanya.

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang Supriyadi sekitar 90 persen tuna netra bekerja menjadi memijat. Mereka tak memiliki keterampilan lain, tak bisa bekerja selain memijat. Sehingga, praktis selama pandemi mereka tak memiliki penghasilan.

"Kami ingin tetap memijat, tak berhenti," ujarinya. Sebelum pandemi, setiap pecan Supriyadi menerima 10 sampai 12 pelanggan. Namun, sejak pandemi Covid-19 pendapatannya menurun.

Dari total 85 anggota Pertuni Kota Malang, hanya 40 orang yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan. “Yang lain tak dapat. Hanya tiga bulan. Agustus ini tak tahu, belum dapat informasi,” katanya.

Selain bantuan tunai, katanya, tak ada bantuan bahan pokok yang disampaikan kepada anggota Pertuni. Justru Pertuni, menerima bantuan pokok dari masyarakat. Supriyadi menyampaikan tetap bersyukur mendapat bantuan saat mengalami kesulitan keuangan seperti sekarang. “Rezeki Allah yang mengatur. Pasrah. Semoga Allah memberi jalan keluar,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mendata total penyandang disabilitas di Kota Malang sebanyak 1.397 jiwa. Terdiri atas laki-laki 755 dan perempuan 642. Penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di Kota Malang sebanyak 18 ribu keluarga. Sumber dana bantuan sosial berasal dari APBD Kota Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN.

Bantuan Sosial tak Merata

Malang Corruption Watch (MCW) menilai terjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. MCW menemukan adanya tumpang tindih data, yang mengakibatkan data ganda. Sehingga terjadi duplikasi anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Orang yang sudah meninggal terdata penerima bantuan. Seharusnya Pemerintah Kota Malang berkoordinasi dengan kelurahan,” ujar Kepala unit riset dan informasi Badan Pekerja MCW Rina Dwi Astika Duri.

Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 210 miliar. Anggaran digunakan untuk beberapa sector kesehatan, ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar 7,7 persen dari total APBD Kota Malang sebesar Rp 2.7 triliun.

Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 300 ribu per keluarga untuk 29 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga kali. Total anggaran bantuan social tunai Pemerintah Kota Malang mencapai Rp 26 miliar. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 ribu per jiwa untuk 20.098 KPM. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 200 ribu untuk 15 ribu KPM dengan total anggaran Rp 9 miliar.



Kereta penumpang disemprot disinfektan mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). (Foto : Dokumen PT KAI Daop 8 Surabaya).

Sasaran penerima bantuan sosial tak tepat dan tak merata. Sejumlah warga miskin tak menerima bantuan sedangkan yang mampu justru mendapat bantuan. Selain itu, terjadi data ganda. Ditemukan keluarga menerima bantuan dari dua sumber anggaran berbeda. "Pemerintah Kota Malang tidak responsif," kata Rina.

Data BPS Kota Malang mencatat jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 874.890 jiwa sedangkan 35.890 jiwa diantaranya kategori miskin. Pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 1.303 orang dirumahkan, dan 162 orang dipecat.

Wali Kota Malang Sutiaji mengklaim semua keluarga yang terdampak telah menerima bantuan. Penerima bantuan

bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Verifikasi dilakukan melalui Sistem bantuan Sosial (Sibansos) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Bantuan sosial sudah saya kira. Tinggal menunggu. Ada 20 ribu yang dari Provinsi Jawa Timur agar tak overlapping. Kemarin ada overlapping 3 ribu,” katanya.

Namun, untuk penyaluran berikutnya Sutiaji menjamin tak lada lagi penerima yang mendapat anggaran ganda. Selain itu, ia memastikan seluruh masyarakat miskin yang terdampak mendapat bantuan. “Inshaallah semua masuk. Tinggal validasi, Tetap tiga kali,” ujarnya.

Data Dinas dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang jumlah disabilitas sebanyak 881 orang. Sebanyak 258 difabel dapat bantuan BST Covid-19, sedangkan 43 difabel menerima Asistensi Sosial Penyandang Difabel (ASPD) dan 201 difabel menerima bantuan sembako daerah terdiri atas beras, minyak goreng, mie instan dan masker.

Sedangkan 478 belum menerima bantuan. Kepala Dinsos-P3AP2KB Peni Indriani memperkirakan penyandang difabel yang tak menerima bantuan karena dalam satu kartu keluarga ada beberapa penyandang difabel. “Kemungkinan bapaknya sudah dapat. Satu keluarga cukup satu orang,” katanya.

Peni mengklaim mengutamakan Pertuni, semua anggota Pertuni telah mendapat bantuan sosial dampak Covid-19. Jika tak dapat bantuan dari APBD Kota Malang, diusahakan mendapat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Sosial. Sedangkan alur pengajuan bantuan melalui Pusat Kesehatan Sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan.

“Data Puskesmas mengetahui Lurah dan divalidasi di Dinsos,” ujarnya. Ia tak menyangkal kemungkinan ada data yang tercecer. Sementara pendataan dihentikan, lantaran masih ada data yang terkumpul belum mendapat bantuan.

Batik Netra

Lembaran kain berwarna warni beragam motif terpajang di ruang kerja Adi Gunawan, Direktur Adi Gunawan Institut. Sebuah lembaga pendidikan khusus memberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi tuna netra di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). Kain ini merupakan karya para penyandang tuna netra dengan pewarnaan menggunakan teknik ikat celup dan jumputan. Mereka menyebut kain batik netra. Batik netra dipasarkan melalui akun agishopofficial

Kain dijual setiap lembar seharga Rp 85 ribu sampai Rp 350 ribu. Harga menyesuaikan jenis kain, motif dan kerumitan pewarnaan. Tak mudah bagi tuna netra untuk belajar pewarnaan kain. Adi berinovasi menciptakan peluang usaha dalam masa pandemi covid-19. “Banyak tuna netra bekerja sebagai terapis atau tukang pijat. Sementara saat ini pemerintah Kota Malang melarang operasional panti pijat,” kata Adi Gunawan.



Direktur Adi Gunawan Institut, Adi Gunawan menunjukkan batik netra produk para penyandang disabilitas (Terakota/Eko Widiyanto).

Adi terbiasa mandiri sejak kecil, hingga menamatkan pendidikan sampai jenjang sarjana. Terbiasa dengan keterbatasan berinteraksi dengan lingkungan. Menjalani kondisi hidup secara

mandiri dan inklusif. Adi merupakan seorang wirausaha sosial. Dikenal wirausaha bidang jasa, instruktur musik dan vokal. Ia mengawali bekerja sebagai staf keuangan.

Belakangan ia menemukan sesama tuna netra banyak yang tak bisa mengakses pendidikan dan keterampilan. Bahkan sebagian mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Sejak empat tahun lalu, Adi mendirikan Adi Gunawan Institut (AGI), sebuah lembaga pendidikan, belajar dan berkarya. Melalui AGI, Adi mengenalkan teknologi komunikasi komputer dan ponsel bicara, kepada penyandang tuna netra.

Selain itu juga melatih sesama tuna netra dengan berlatih musik, belajar membaca huruf braille, latihan mobilitas, mengasah kepekaan indera, latihan komunikasi dan membekali keterampilan kerja. Hingga kini telah melatih 300 orang tuna netra. Adi melatih para tuna netra membuat diawali dengan mengasah kepekaan menggunakan perabaan, memperhatikan pola, melipat kain, menjepit dan memasang tali kain.

Finantius Feriadi asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini terampil melipat dan mengikat kain. Usai melipat sesuai motif, ia berjalan mendekati Indri temannya penyandang tuna daksa. Indri membantu meneteskan pewarna di atas kain putih yang diikat Feriadi. Selanjutnya, dicelupkan larutan cairan pengikat warna.

Tahap selanjutnya, ikatan kain dilepas dan kain dijempur di bawah terik matahari. Feriadi mengaku awalnya mengalami kesulitan dalam melipat kain. Apalagi, dengan keterbatasan indera penglihatan yang dialaminya. "Niat belajar meski tak tahu warna. Bentuk bunga dan bulat itu bagaimana? Saya tak tahu," katanya.

Namun, ia tekun belajar hingga bisa menghasilkan kain ikat dengan motif unik. Sehingga ia memiliki keterampilan lain selain memijat. Feriadi berharap bisa menambah pendapatan, terutama saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Distribusi batik tulis juga dibantu Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) lembaga peduli difabel. Batik netra didistribusikan melalui jejaring lembaga dan media sosial. Respons pelanggan positif, sementara diedarkan di sekitar Malang. “Masyarakat merespons, kami juga memproduksi batik netra dengan warna alami,” ujar Koordinator Linksos Ken Kerta.



Berbagai motif kain batik netra karya penyandang difabel mendapat respons positif publik. (Terakota/Eko Widiyanto).

Linksos mendampingi sekitar 122 difabel melalui posyandu disabilitas. Mereka juga dilatih kewirausahaan seperti berdagang, memproduksi masker, keripik tempe dan olahan susu. Difabel, katanya, sulit memperoleh bekerja secara formal. Sejauh ini sebanyak 50 difabel yang bekerja di pabrik rokok. “Masih ada stigma negatif di masyarakat,” katanya.

Sementara sebagian tak merasakan bantuan sosial dari pemerintah selama masa pandemi. Padahal mereka merupakan kelompok rentan yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi Covid-19. “Tak semua terdata, hanya separuh yang mendapat bantuan sosial,” ujarnya.

Penderita Covid-19 Terus Menggelembung

Penderita Covid-19 semakin bertambah dan meluas. Pada 17 Mei 2020 hari pertama diterapkan PSBB sebanyak 26 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 12 orang sembuh. Usai diterapkan PSBB dan memasuki periode transisi penderita tambah melonjak. Pada 30 Mei 2020 meningkat menjadi 47 pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan penyebaran Covid-19 di Kota Malang meledak sejak sebulan terakhir. Penambahan pasien positif Covid-19 setiap hari menjadi puluhan. Bahkan Kelurahan Bunulrejo pasien Covid-19 sebanyak 30 sedangkan Kelurahan Mergosono sebanyak 17 orang. Kedua Kelurahan telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).

Data Satgas Covid-19 Kota Malang pada 10 Agustus 2020 total konfirmasi positif 894, bertambah 7 orang. Sebanyak 65 orang meninggal, sembuh 479 dan dalam pemantauan 350. Sedangkan total suspek 1.786 bertambah 8 orang. Sebanyak 95 isolasi di Rumah Sakit, isolasi rumah 275, probable 74 dan discarded 1.342. Sedangkan pada 11 Agustus 2020 Satgas Covid-19 melaporkan total jumlah konfirmasi positif sebanyak 906 orang atau bertambah 12. Sebanyak 65 di antaranya meninggal, 495 sembuh dan dalam pemantauan sebanyak 346. Sementara total suspek 1.809 atau bertambah 23. Meliputi isolasi Rumah Sakit sebanyak 106, isolasi rumah 287, probable 74 dan discarded 1.342.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan lonjakan covid-19 lantaran rendahnya testing atau uji swab. Sehingga kesulitan melakukan tracing dan mencegah penyebaran lebih luas. "Penyebaran covid karena kurang 3T, tracing, treatment dan testing," ujarnya.

Tak bisa tracing, ujarnya, lantaran uji swab lambat karena hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Lavalette dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hasil uji swab baru bisa diketahui 16 hari usai uji swab. Beruntung, PT HM Sampoerna menyumbangkan polymerase chain reaction (PCR) untuk uji swab.



Berbagai motif kain batik netra karya penyandang difabel mendapat respons positif publik. (Terakota/Eko Widiyanto).

“Bantuan ini kami tunggu-tunggu,” katanya. PCR akan dipasang di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Kapasitas pengujian sebanyak 32 sample selama 30 menit. PCR, kata Sutiaji, akan memudahkan dan mempercepat uji swab. Selama ini sejumlah daerah seperti Probolinggo, Blitar dan Kediri juga melakukan uji swab di Malang.

“Terima kasih kalau ada bantuan lagi. Mungkin sembako,” ujar Sutiaji. Bantuan PT HM Sampoerna disalurkan melalui mitranya Yayasan Stapa Center. Direktur Yayasan Social Transformation and Public Awareness (Stapa) Center Agus Rachmatullah menuturkan bantuan PCR satu paket. Terdiri atas reagen, mesin ekstraksi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

“Tinggal operasional saja,” ujarnya. Sampoerna telah menyalurkan PCR serupa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Universitas Airlangga Surabaya. PCR didatangkan langsung dari Inggris.

<https://www.terakota.id/difabel-bertahan-di-masa-pandemi/>

Fadiyah

MAKIN TERISOLASI DI BALIK PANDEMI: CERITA HIDUP LGBT DI BEBERAPA KOTA SELAMA COVID

KONDETUESDAY, SEPTEMBER 01, 2020



Dituduh sebagai pembawa virus dan merasakan ketakutan jika sedang berada di luaran adalah kondisi yang dialami sejumlah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di beberapa kota di Indonesia di masa Covid. Pandemi ini membuat kondisi LGBT semakin terisolasi

Ratna, seorang transpuan mencoba mengingat kembali kejadian yang belum lama ini dialaminya saat ia keluar rumah. Ia saat itu keluar rumah hanya sekadar untuk membeli kebutuhan sehari-hari di sebuah minimarket.

“Aku dituduh ‘ih, pembawa corona’ gitu. Jadi aku gak bisa melakukan perlawanan karena sendiri kan,” kisah Ratna (30).

“Jadi aku terima apa yang di-bully orang, orang-orang melakukan kekerasan, itu menerima aja gitu. Jadi enggak tahu mau buat apa lagi,” ujarnya kepada Konde.co dalam percakapan melalui telepon pada Sabtu (11/7/2020) siang.

Hinaan dari orang yang tidak ia kenal yang ditemuinya di pinggir jalan secara tiba-tiba biasa dirasakan oleh Ratna. Ratna adalah nama yang sengaja dipilihnya untuk menutup identitasnya dan identitas kawan-kawannya sesama transpuan yang berasal dari ujung pulau Sumatera.

“Padahal aku pakai APD [alat pelindung diri], pakai masker,” ungkapinya.

Ratna merasa khawatir dan takut untuk keluar dari tempat tinggalnya selama pandemi. Kekhawatirannya pun tak sebatas karena tuduhan sebagai pembawa dan penyebar virus Covid-19, melainkan juga cercaan yang diterima di jalan, atau tempat umum.

“Yang aku hadapi saat ini, ya mengganggu secara psikologis ya. Aku tuh takut ketika melihat orang lain di luar komunitas [transgender],” serunya.

Tak berhenti di sana, kerentanan terhadap Ratna dan komunitasnya semakin menjadi selama masa pandemi terutama berkaitan dengan pilihan tempat tinggal. Terlebih, dengan kebijakan untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah.

“Di sini sulit sekali mendapatkan kosan atau sewa rumah yang

mau menyewakan ke komunitas [transpuan]. Jadi biasanya para transpuan itu tinggal di tempat usahanya masing-masing. Jadi akan terkumpul di titik-titik usaha,” terangnya.

Ratna memiliki usaha salon di sebuah ruko dua lantai. Lantai satu khusus untuk operasi salon dan lantai dua dia gunakan sebagai tempat tinggal bersama teman sesama transpuan dengan memanfaatkan kamar seluas 2x2 meter.

Namun, selepas pandemi, banyak transpuan yang kemudian kehilangan pekerjaannya. Mereka pun ditampung dan disediakan lapangan kerja oleh teman-teman sesama transpuan. Ratna sendiri kini menampung empat orang di salonnya untuk saling berbagi ruang.

Beban yang dihadapi oleh transpuan memang semakin berlipat ganda selama pandemi ini. Menurut Ketua Komunitas Sehati Makassar (KSM) Eman Memay Harundja, yang berfokus pada isu hak LGBT, terdapat setidaknya dampak ekonomi, psikologis, hingga kesehatan yang terjadi pada kelompok transgender selama pandemi.

“Mereka kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan, bahkan ada yang tidak memiliki pendapatan, bahkan beberapa kelompok transpuan itu tidak bisa membayar biaya rumah,” jelas Eman kepada Konde.co saat dihubungi pada Kamis (18/7/2020).

Eman menjelaskan bahwa mayoritas dari kelompok transgender memiliki pekerjaan informal karena masih banyaknya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Selain itu, banyak pula yang tak diakui keluarga, sehingga harus beranjak dari keluarga sebelum benar-benar memiliki bekal keterampilan, ataupun pendidikan.

Jadi banyak yang akhirnya bekerja secara informal, seperti di salon, atau di pinggir jalan, seperti pekerja seks. Kebanyakan memang jadi pekerja seks, salon, atau tukang salon keliling,” ungkap Eman.

Keadaan pandemi memunculkan beban yang semakin berlipat ganda bagi mereka. “Nah, selama covid ini itu semua hilang pendapatannya. Misalnya, yang di salon,” jelasnya.

Bagi mereka yang mendapatkan penghasilan dengan menjadi pekerja seks pun turut terdampak. Penghasilan mereka turun drastis. Namun, beberapa dari mereka tetap bekerja karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekali pun pengunjungnya sepi dan risikonya tinggi.

“Mereka pun mau nggak mau tetap bekerja di jalan, tetapi ada risiko keamanan yang bisa sistem kekebalan tubuh mereka, maupun covid,” terang Eman.

Namun, dengan segala dampak yang muncul kepada transgender, baik Eman, maupun Ratna, belum pernah mendengar ada bantuan dari pemerintah. Bahkan, rangkaian perlakuan diskriminatif terhadap transpuan juga tak surut selama pandemi.

Contohnya, pada masa awal masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, warga Jakarta justru dikejutkan dengan berita pembunuhan Mira di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Mira terakhir kali menghembuskan napasnya 5 April 2020. Ia merupakan transpuan yang dibakar dalam keadaan hidup.

Tak lama setelah itu pada Jumat (1/5/2020) dini hari, muncul kasus lainnya di Bandung berupa prank atau jebakan kepada dua transpuan. Jebakan tersebut dilakukan salah satunya oleh seorang Youtuber bernama Ferdian Paleka.

Ferdian memanggil para transpuan yang ia temui di pinggir jalan. Kemudian ia memberikan bingkisan yang Ferdian akui sebagai sembako. Alih-alih berisikan makanan, bingkisan tersebut ternyata berisikan sampah. Ferdian pun merekam video tersebut dan mengunggahnya secara daring, hingga sempat viral.

Kasus lainnya hadir belum lama ini, Kamis (12/7/2020), saat adanya penusukan terhadap transpuan, Alin, di Aceh. Kelompok komunitas yang fokus pada isu gender pun turun tangan untuk membantu donasi karena luka tersebut tak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Harapannya sebenarnya tidak membeda-bedakan terkait hak-hak kami sebagai bagian dari kelompok LGBT. Biasanya, ketika ada bantuan, ini untuk kelompok perempuan, kelompok masyarakat rentan, kok belum ada yang secara spesifik untuk kelompok mayoritas seksual,” ujar Eman.

“Harapannya sih ya, pemerintah bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan tupoksi sesuai dengan standar, tetapi sampai sekarang, teman-teman transpuan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Perundungan di Ranah Digital

Perundungan pun tak terbatas pada tempat umum, melainkan juga masuk ke ranah-ranah digital, seperti sosial media.

Ratna mengisahkan betapa jengkelnya ia saat melihat unggahan-unggahan di sosial media yang malah menyalahkan kelompok LGBT atas penyebaran pandemi di Indonesia.

Konsekuensi terbesar ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT adalah persekusi atau perundungan terhadap kelompok transpuan karena memiliki ekspresi seksual yang paling terlihat. Ratna menilai bentuk perundungan kepada kelompok transpuan sebetulnya bukan hal baru. Salah satu contoh lama, ungkap Ratna, adalah penanaman perspektif keliru terkait transpuan sebagai penyebar virus HIV, hingga bencana alam.

Pernyataan Ratna pun tercerminkan dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat yang menunjukkan setidaknya terdapat 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif selama

2017. Korban terbanyak adalah kelompok transgender, yakni sebanyak 715 orang.

Ratna menilai bahwa persepsi-persepsi tersebut bisa muncul akibat dari kebencian dan diskriminasi yang memang sudah lama ditanamkan terhadap mereka, baik melalui para politisi yang menggunakan isu transgender demi kepentingan kampanye, pemberitaan media yang memojokkan kelompok transgender, hingga hinaan di sosial media.

“Jadi individu-individu kelompok trans ini semakin tidak percaya diri, takut, secara psikologis, kami semua terganggu,” ungkapnya.

Fadiyah, *Jurnalis lepas di Jakarta. Kini aktif sebagai pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Di waktu kosong, kerap kali mengubah khayalannya jadi fiksi.*

<https://www.konde.co/2020/09/makin-terisolasi-di-balik-pandemi.html?m=1>

TRANSPUAN BERHARAP PEMERINTAH MENGUBAH NASIB MEREKA, BUKAN MENDISKRIMINASI

KONDEWEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020



Banyak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia punya harapan pada pemerintah bisa mengubah nasib mereka. Namun kenyataannya, bertepuk sebelah tangan. Justru pemerintah adalah aktor yang banyak melakukan diskriminasi.

Khanzaa Vina, seorang transpuan pernah bertanya: bagaimana caranya agar pemerintah mau melakukan perlindungan untuk transpuan? kenapa mereka malah mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi?. Padahal harusnya pemerintah memberikan perlindungan pada warga minoritas seperti mereka

Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya persekusi yang dilakukan terhadap LGBT, peraturan daerah yang serba diskriminatif, serta aturan bagi calon pekerja LGBT yang justru membatasi mereka. Laporan dari Human Right Watch (HRW) menunjukkan bahwa pemerintah justru menjadi salah satu aktor yang menghadirkan, hingga melanggengkan bentuk-bentuk diskriminasi, hingga persekusi terhadap kelompok LGBT.

Ini tentu mengecewakan banyak transpuan.

“Di sisi lain kita berharap kepada pemerintah, tetapi di sisi lain pemerintah kita malah justru menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada orang-orang LGBT,” ujar Ketua Sanggar Waria Jakarta (Swara) Khanzaa Vina.

“Alih-alih memberikan akses dan kesempatan yang setara, tetapi malah kami masih dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Sebetulnya pemerintah juga sebagai kelompok yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan persekusi terhadap orang-orang LGBT atau transgender perempuan,” lanjutnya saat dihubungi Konde.co saat dihubungi pada Minggu (12/7/2020).

Bentuk pembatasan ruang pada para transgender antara lain adalah aturan tes Calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS yang tak memperbolehkan transpuan untuk ikut mendaftar. Kemudian, ujaran kebencian yang dilakukan oleh pejabat atau calon pejabat. Saat pemerintah menjadi pihak yang melestarikan kebencian terhadap kelompok minoritas tersebut, maka kekerasan yang hadir pun menjadi masalah struktural. Isu LGBT kerap kali hanya digunakan untuk kepentingan kampanye atau elektoral.

Dari narasi-narasi kebencian terhadap kelompok LGBTQ, kelompok transgender menjadi pihak yang paling rentan.

Pasalnya, mereka memiliki ekspresi gender atau seksual yang lebih terlihat oleh masyarakat.

Khanzaa menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, termasuk transgender. Terlebih, saat pandemi seperti saat ini, kelompok rentan menjadi pihak yang terdampak lebih buruk.

Tanpa ada pandemi, kelompok transgender sudah dibatasi ruang hidupnya. Mereka sulit mendapatkan akses terhadap pekerjaan, bahkan pembatasan akses tersebut kerap kali dibuat oleh pemerintah. Dengan itu, rata-rata mereka bekerja di bidang informal, seperti bekerja di salon, hingga pekerja seks.

“Teman-teman banyak yang tidak punya akses untuk pekerjaan yang formal dan tidak memiliki akses, apalagi skill yang mereka butuhkan untuk pekerjaan adalah skill yang membutuhkan akses secara langsung kepada customer,” jelas Khanzaa.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memiliki dampak yang sangat besar terhadap akses mereka untuk mendapatkan uang. Jika pun mereka memaksakan diri untuk tetap bekerja, jenis pekerjaan mereka rentan untuk membuat mereka tertular Covid-19.

“Ini kan berdampak pada teman-teman yang bekerja informal seperti mereka yang bekerja di salon mereka yang memiliki jasa terapis, bahkan yang sex worker sekalipun, mereka gak bisa menerima customer karena resikonya terlalu besar,” jelas Khanzaa.

Selain rentan terdampak secara ekonomi, mereka pun sulit untuk mendapatkan ruang aman selama Covid-19. Selama pandemi, kekerasan tetap terus hadir terhadap mereka, mulai dari kasus warga yang membakar salah satu transpuan di Jakarta Utara di awal April 2020, lalu kasus jebakan atau prank yang dilakukan oleh Youtubers terhadap transpuan di Bandung pada awal Mei 2020.

Khanzaa menilai pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi warganya, terlebih kelompok rentan dalam situasi pandemi ini. “Kalau saya secara pribadi, tidak mau mendapatkan perlakuan secara khusus, tetapi bagaimana sebenarnya [kami] juga mendapatkan kesempatan, akses, dan pola kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat umum, itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat LGBT,” tegas Khanzaa.

“Sesederhana itu, kami inginnya, merasakan hal-hal yang diberlakukan selayaknya manusia aja, tidak perlu ada embel-embel atau hal-hal yang memang dilakukan secara khusus diberlakukan kepada kelompok LGBT,” pungkasnya.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Imam Naheh menyatakan, transpuan merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak akibat pandemi karena posisinya yang masih menjadi minoritas, serta stigma masyarakat yang masih buruk terhadap mereka.

“Jika dampak pandemi covid ini, secara umum, meningkatkan kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan beban ganda yang berlipat dalam keluarga, maka bisa dipastikan kelompok yang paling rentan, waria ini, justru lebih terdampak lagi,” ungkap Naheh kepada Konde.co pada Selasa (4/8/2020).

Naheh menilai bahwa sikap pemerintah yang kerap kali justru menjadi pihak yang melanggengkan diskriminasi terhadap transpuan merupakan sikap yang ironis dan bermasalah.

Pemerintah seharusnya berpijak pada landasan konstitusional. Segala hak yang berlaku pada masyarakat, juga berlaku pada transgender, termasuk hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan akses yang sama, dan sebagainya.

“Kalau kita lihat dari cara pandang konstitusi, maka negara sama sekali tidak boleh melakukan pembatasan akses-akses kerja terhadap kelompok waria ini karena mereka ini nilainya sama,

derajatnya, martabatnya, di depan hukum itu sama manusia yang lain,” tegas Nahei.

Kemudian, pemerintah juga seharusnya menjadi pihak yang mampu mengambil kebijakan khusus untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Nahei menjelaskan bahwa sebetulnya hal tersebut telah menjadi janji pemerintah dalam CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. “Di sana [CEDAW], mengamanatkan bahwa ketika satu komunitas perempuan, termasuk di dalamnya waria, berada di dalam situasi yang sangat sulit terbelakang, maka negara penting mengambil langkah khusus yang disebut dengan affirmative action itu untuk memenuhi hak-hak mereka dan menghapus kekerasan terhadap mereka,” jelas Nahei.

“Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah, justru sebagian dari beberapa daerah membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap mereka,” ungkapnya.

Nahei pun menilai ada dua ranah yang seharusnya menjadi fokus advokasi pemerintah terhadap permasalahan ini.

Pertama, perlu ada penegakan hukum saat terjadi diskriminasi, persekusi, hingga kekerasan terhadap seluruh masyarakat, termasuk kelompok transgender.

Kedua, pemerintah seharusnya bisa memberikan pendidikan publik tentang gender yang lebih komprehensif, termasuk pemahaman terkait transgender.

Nahei menilai bahwa masyarakat masih memiliki stigma yang buruk terkait transgender, padahal belum tentu memahami mereka.

Pendidikan tersebut juga harus mencakup pemahaman bagaimana masyarakat perlu berhenti untuk menilai seseorang sebatas identitas atau ekspresi mereka. Pilihan terkait ekspresi

seksual merupakan hal yang menjadi pilihan personal.

“Dan ini memang membutuhkan pendidikan publik yang kuat,” tegas Nahei.

Fadiyah, *Jurnalis lepas di Jakarta. Kini aktif sebagai pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Di waktu kosong, kerap kali mengubah khayalannya jadi fiksi.*

<https://www.konde.co/2020/09/transpuan-berharap-pemerintah-mengubah.html?m=1>

Dafi Yusuf

PELECEHAN DAN INTIMIDASI, TEROR WARIA DI SEMARANG SAAT PANDEMI COVID-19

Pebriansyah Ariefana Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:48 WIB



Waria di Semarang. (Suara.com/Dafi).

SuaraJawaTengah.id - Sore itu di Kota Semarang, sebelum menghibur warga, Hani dengan cekatan mengambil perlengkapan dandan dari dalam tasnya. Ia kemudian memoles bibirnya dengan lipstik berwarna merah muda.

Hani adalah seorang waria asal Kota Semarang.

Pernak-pernik yang melekat di tubuhnya seperti tas, cincin, baju dan juga sepatu yang Hani pakai menunjukkan bahwa ia benar-benar mengetahui fashion dan cara berpakaian menarik untuk dipakainya.

Setelah persiapan selesai, ia pamitan dengan ibunya yang saat itu sedang sakit karena stroke yang menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Kini, ia hanya tinggal bersama ibu dan adik semata wayangnya yang masih duduk di bangku SMP.

Hani merupakan tulang punggung bagi keluarga. Semenjak bapaknya meninggal, ia harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia menjadi sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sembari berjalan menuju tempatnya bekerja, Hani bercerita tentang banyak hal buruk selama ia bekerja. Mulai dari pungli, intimidasi, pelecehan dan berbagai penolakan dari warga bahkan tak terkecuali keluarga paling dekat sekalipun.

“Dulunya sempat dipaksa keluarga agar tidak memakai baju perempuan saat di rumah,” katanya sembari mengingat-ingat memori kelam yang pernah ia alami.

Keluarganya memang sempat malu namun seiring waktu, berangsur-angsur keluarga sudah mulai menerima jalan hidup pilihan Hani.

Bully atau sindiran menjadi makanan yang kerap dia dapatkan selama beraktivitas. Kendati demikian dirinya tak mempermasalahkan orang-orang tersebut.

“Stigma negatif terhadap saya sudah biasa saya terima. Namun ketika kita diberi kesempatan hidup sekali, bermanfaatlah buat orang lain,” jelasnya.

Obrolan kami harus dihentikan ketika tiba tempat kerjanya.

“Maaf ya, saya mau pentas dulu menghibur warga,” katanya sembari mengarahkan tangannya ke arah panggung yang dipenuhi dengan alat musik.

Hari itu Hani diundang warga untuk menjadi penyanyi bersama group music asal Kota Semarang. Gelak tawa warga mulai pecah ketika Hani bernyanyi. Dengan sekejap, Hani menguasai panggung.

Hani memang kerap dipanggil sebagai penyanyi karena ia tidak hanya lihai dalam bernyanyi namun juga mahir mengocok perut warga ketika bernyanyi.

Selepas bernyanyi, Hani kembali menghampiri saya di samping rumah warga. Sebelumnya kami memang sudah bersepakat untuk bertemu di tempat tersebut.

Meski terlihat lelah, Hani masih bersemangat untuk bercerita soal perjalanannya sebagai waria.

“Sebenarnya masih banyak cerita, tapi saya ceritanya pas sudah sampai tempat tujuan kita saja ya” katanya.

Langit mulai mendung, pertanda Kota Semarang akan segera diguyur hujan dalam hitungan menit. Dugaan itu benar, selang lima menit hujan benar-benar turun. Beberapa pakaian kami basah, untungnya tempat yang kita tuju sudah dekat.

“Waduh teles kabeh,” cletuk Hani setelah kehujan.

Setiba di tempat tujuan, Hani mencari tempat yang berdekatan dengan kipas angin dengan harapan agar baju yang dia pakai lekas kering. Selanjutnya, kopi dan tahu goreng menjadi pembuka dari obrolan kami selanjutnya.

Nasib Waria Saat Pandemi Covid-19

Adzan maghrib berkumandang, suara gemuruh hujan semakin hingar mengiringi hari yang mulai petang. Sembari menunggu

adzan maghrib, Hani membalas pesan WhatsApp dari temannya yang sebelumnya belum sempat ia balas.

Jam menunjukkan pukul 18.30 WIB, Hani mulai melanjutkan ceritanya tentang diskriminasi yang menimpa teman waria selama Covid-19 di Kota Semarang. Beberapa teman waria Hani tidak bisa mendapatkan bantuan Covid-19 karena tidak mempunyai identitas diri.

Menurutnya, identitas diri merupakan masalah klasik yang sering kali menjadi masalah bagi para waria. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap waria masih negatif.

“Masih banyak masyarakat yang memandang waria itu sebelah mata bahkan kesannya itu negatif. Sering kali dibuat ejekan. Padahal kita kan manusia ya, yang berhak untuk hidup di negara kita,” keluhnya.

Meski mengeluh, Hani tetap sadar fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Ia dan teman-temannya tak bisa memaksakan kehendak masyarakat.

Hani dan teman-temannya hanya bisa mawas diri, yang terpenting anggota Perwaris harus sopan dan baik kepada siapapun.

Menurutnya, Perwaris merupakan rumah keduanya. Di komunitas tersebut ia bisa bertemu dengan seorang teman yang mempunyai nasib sama yaitu sama-sama waria. Hal itu wajar lantaran Perwaris merupakan komunitas yang mempunyai anggota semuanya adalah waria.

Baginya, pewaris tidak hanya komunitas melainkan keluarga baru yang setiap saat melindungi dan memperjuangkan hak Hani dan teman-temannya sebagai warga negara Indonesia.

Menurutnya, itulah alasan Hani kenapa sampai saat ini ia bertahan di sebuah organisasi yang telah berdiri sejak 2006 tersebut. Jika ia hitung, sampai saat ini anggota Perwaris sekitar 125 waria.

Selain diskriminasi, waria di Kota Semarang kerap kali menjadi korban pungutan liar (Pungli) oleh sejumlah preman yang berada di dekat pangkalan waria.

Mulai pukul 21.30 WIB, waria Kota Semarang mulai kumpul di tempat pangkalan. Di Kota Semarang terdapat dua pangkalan yang ia sebut pangkalan A dan pangkalan B. Kedua pangkalan tersebut juga mempunyai masalah yang berbeda-beda.

Untuk pangkalan A, masalah yang kerap dialami para waria adalah pungli. Biasanya para waria diminta uang sebesar Rp 20 ribu setiap orang. Rata-rata setiap malam waria yang mangkal di pangkalan A berjumlah paling sedikit 10 orang.

“Tidak berani melawan takut kalau misal terjadi sesuatu, kita memilih untuk memberikan uang meski belum dapat uang,” ungkapnya.

Sementara untuk pangkalan B para waria kerap kali mendapatkan teror seperti dilempar batu, plastik berisi air comberan, plastik berisi berak dan plastik berisi air kencing. Teror seperti itu, hampir setiap hari terjadi.

Meski setiap terjadi teror serupa para waria sudah berusaha untuk mencarinya namun masih saja tidak ketemu. Sampai saat ini, para waria masih belum mengetahui untuk apa dan siapa dalang dan pelaku di balik teror tersebut.

“Sebenarnya kita ingin tau agar mengerti alasannya. Kalau tiba-tiba meneror seperti itu kan tidak baik,” imbuhnya sembari melihat catatannya.

Menurutnya, masalah yang menimpa para waria di Kota Semarang membuat hatinya pilu. Apalagi Hani sendiri merasakan betapa sulitnya mencari penghasilan di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.

Selama masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang, penghasilan dari kerja Hani belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Beda dengan sebelum pandemi.

“Ya kalau dibbilang cukup ya tidak, dibbilang tidak cukup ya cukup. Pokoknya dicukup-cukupkan deh,” ujarnya.

Sebagian besar, waria di Kota Semarang membuka tempat salon, termasuk Hani. Sebelum pandemi Hani mempunyai salon yang berada di lokasi Sunan Kuning. Dalam sehari ia dapat laba Rp 400ribu setiap harinya.

Jika ditotal, penghasilan Hani dalam satu bulan sekitar Rp 6 juta hasil dari bekerja sebagai tukang salon. Karena ditutup pendapatannya berkurang. Hal itu membuat Hani bergelut di dunia malam sebagai pekerja seks.

Dari pekerjaannya itu, dalam sehari Hani bisa dapat penghasilan sekitar Rp300 ribu. Masalah tidak habis di situ saja, ketika masa pandemi Covid-19 banyak hotel langganan yang menolak karena takut.

“Akhirnya aku merasa kasihan kepada teman-teman. Banyak yang nganggur dan akhirnya tidak mendapatkan penghasilan. Padahal mereka mengeluarkan biaya kost dan makan setiap hari,” keluhnya.

Bahkan beberapa waria mendapatkan perlakuan yang lebih represif dari aparat penegak hukum, Satpol Pamong Praja(PP) Kota Semarang.

Oknum penegak hukum tega menggunduli rambut dan memaksa salah satu waria yang dibawa ke kantor Satpol PP Kota Semarang untuk bertelanjang dada, setelah itu baru diperbolehkan pulang.

Ketua Perwaris Silvi Mutiari mengatakan, untuk kejadian pelecehan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Awalnya korban mengamen di salah satu perempatan Kota Semarang, tiba-tiba ada Satpol PP datang dan korban terkena razia.

Setelah itu, korban dibawa ke Kantor Satpol PP yang berada di Jalan Ronggolawe, Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Semarang. Di tempat itu, korban mengalami tindak pelecehan seksual dari petugas Satpol PP.

Padahal saat itu, korban tidak sendirian, namun yang digunduli dan dipaksa bertelanjang dada hanya dia. Dari kejadian tersebut korban mengalami trauma berat.

“Jadi pelecehan dari Satpol PP menyamakan korban dengan laki-laki, hal itulah yang kemungkinan membuat oknum Satpol PP menggunduli dan memaksa korban untuk bertelanjang dada,” jelasnya.

Selain kasus pelecehan seksual, para waria juga kerap menjadi korban aksi kriminalitas ketika berada di ruang terbuka. Salah satunya adalah perampasan barang berharga seperti handphone maupun tas yang berisi uang cash.

Kalibanteng merupakan salah satu tempat terjadinya perampasan barang berharga milik para waria.

“banyak sekali preman yang mengambil handphone atau tas berisi uang cash di daerah Kalibanteng.” ungkapny.

“Sudah jatuh tertimpa tangga”, peribahasa itu rasanya tepat menggambarkan nasib para waria Kota Semarang. Selama masa pandemi Covid-19 sudah sulit mencari uang, malah menjadi korban pelecehan seksual dan perampasan.

Meski mengalami aksi pelecehan dan perampokan, Silvi memilih untuk sementara waktu diam. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya sudah beberapa kali Silva melaporkan kasus waria yang lain. Namun aparat hanya melihat dengan sebelah mata kasus tersebut.

Karena mempunyai pengalaman buruk tersebut, Silvi sudah pesimis ketika melapor kasus kejadian yang menimpa para waria di Kota Semarang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

Fajar Purwanto membenarkan hal tersebut. Ia mengakui jika tanggal 18 April 2020 memang menggunduli seorang waria.

Kendati demikian, Fajar tak mau dipersalahkan karena penggundulan sudah menjadi aturan baku Satpol PP Kota Semarang. Bahkan, menurutnya aturan tersebut sudah ada sebelum ia menjadi kepala Satpol PP.

“Soal penggundulan itu memang sudah menjadi aturan baku dari internal Satpol PP Kota Semarang,” kata Fajar.

Namun, ia menyangkal jika pihaknya dituduh melakukan pelecehan berupa telanjang dada untuk waria. Menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang karena tidak sesuai dengan aturan.

Tidak, tidak mungkin. Kita masih normal semua,” jawabnya.

Perbarui Sistem Bantuan

Program Manager Rumah Pelangi Indonesia, Gabriel Eel mengatakan soal masalah sistem pendataan penerima bantuan dari pemerintah harus diperbaharui.

Jangan sampai dengan anggaran bantuan yang begitu besar tidak diberikan pada target yang tepat.

“Pendataan saat ini berdasarkan KK, hal ini tentu membuat kelompok rentan yang tidak memiliki kartu identitas itu menjadi lebih sulit.”

Karena ada alasan tertentu mereka tidak bisa mengurus kartu identitas. Kebanyakan mereka enggan untuk kembali ke keluarga, seringkali kekerasan yang diterima itu berasal dari keluarga sendiri.

“Entah itu dalam bentuk fisik maupun psikis,” ucapnya.

Persoalan tersebut, menurut Eel, ditengarai oleh penolakan dan stigma yang dialami oleh transgender.

Semisal diusir dari kediaman orang tua dan terpaksa kabur saat usia masih belia.

Hal-hal semacam itu turut mempengaruhi para transgender kesulitan tak memiliki kartu identitas. Sehingga hal yang terlihat mudah bagi orang lain, akan terasa sulit bagi komunitas rentan ini.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Adi Tri Hananto mengatakan, tidak ada diskriminasi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, asal waria mempunyai alamat dan Kartu Keluarga (KK) pihaknya dapat membuat KTP. Namun, jika disuruh merubah keterangan kelamin pihaknya tetap tidak menyanggapi.

“Kalau kedua syarat tadi sudah terpenuhi bisa dibuatkan identitas tapi identitasnya sesuai dengan kondisi asli tidak boleh diganti keterangan jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki tapi minta wanita ya tidak bisa. Jadi harus sesuai ketika mereka lahir,” jelasnya.

Meski pihaknya tidak bisa mengganti keterangan jenis kelamin, Adi tetap menganjurkan jika para waria ingin mempunyai KTP dengan kondisi yang baru sebenarnya bisa ditempuh melalui pengadilan.

“Sebenarnya ada proses pengadilan seperti artis Lucinta Luna. Jadi ada jalan lain melalui pengajuan identitas baru di pengadilan,” katanya.

Jika sudah ada putusan pengadilan, lanjut Adi, pihaknya baru bisa membuatkan identitas baru sesuai yang diinginkan para waria.

“Meski dia transgender, sudah operasi plastik kek memang harus lewat pengajuan pengadilan, baru ke Disdukcapil,” imbuhnya.

Kepala Bidang Minoritas Kelompok Rentan LBH Semarang, Naufal Sebastian, merasa masalah ini perlu diperhatikan. Karena dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 ini, transgender juga berhak untuk mendapatkan bantuan.

Menurutnya, dengan adanya kartu identitas memang diperlukan untuk keperluan akuntabilitas, pertanggung jawaban ke mana bantuan itu diberikan. Tetapi bukan jadi penghalang komunitas transgender untuk mendapatkan bantuan. Bagaimanapun juga para waria merupakan warga Indonesia

“Mungkin bisa dicari alternatif lain, bisa menggunakan foto atau data yang lain. Karena ini sudah urusan kemanusiaan yang berhak didapatkan orang yang memang membutuhkan,” imbuhnya.

Kontributor : Dafi Yusuf

<https://jateng.suara.com/read/2020/08/09/144803/pelecehan-dan-intimidasi-teror-waria-di-semarang-saat-pandemi-covid-19>

Jekson Simanjuntak

POLEMIK DANA BERKALA DAN RELAKSASI KJP PLUS DI MASA PANDEMI, BUKTI MINIMNYA PENGAWASAN (PART-I)



Susan berorasi di Depan Gedung Kemendikbud (29/6) menuntut pembatalan PPDB DKI, karena aturannya dianggap lebih mengutamakan umur ketimbang nilai akademik siswa. (foto: Jekson Simanjuntak).

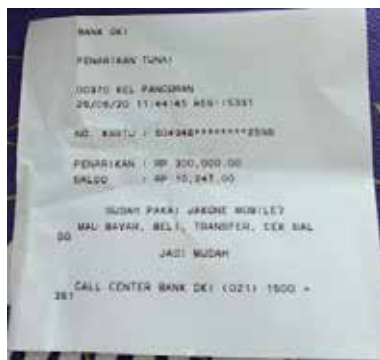
JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM - 22 Juli lalu, Susan (bukan nama sebenarnya) pulang ke rumah dengan hati gundah

diselimuti segudang pertanyaan. Ia bingung lantaran KJP Plus di rekening anaknya tidak bisa diambil utuh Rp.300 ribu, sebagaimana janji Pemprov DKI.

“Katanya kita mendapat Rp.300 ribu full, tapi nyatanya ada pemotongan,” ungkap Susan.

Untuk ketiga kalinya, Susan merelakan dana KJP Plus miliknya terpotong sebesar Rp.1.111. Sebelumnya hal serupa terjadi di tanggal 26 Juni dan 20 Mei 2020, saat ia mengambil tunai melalui ATM.

“Di bulan Juni, saya terima Rp.298 ribu. Diambil di Kelurahan dan anehnya di struk tertulis Rp.300ribu, padahal di saldo ATM tertulis Rp.298 ribu,” ujar Susan.



Bukti pengambilan lewat ATM, tertulis di layar Rp.298.880, sementara di struk tercatat Rp.300 ribu dengan saldo Rp.10.274. Pencairan KJP dilakukan pada Juni 2020 (foto : Susan).

Ketika mendapati duitnya berkurang, Susan tidak rela, karena penerima lainnya ternyata mendapatkan utuh Rp.300 ribu untuk siswa SMP. Jika pun KJPnya dipotong, Susan berharap mendapatkan penjelasan rinci soal itu.

“Saya gak ikhlas pas tahu dipotong, karena tidak ada penjelasan duitnya untuk apa? Misalnya untuk sedekah, itu gak ada. Gak ada keterangan ataupun pemberitahuan secara lisan atau tulisan soal itu,” papar Susan.

Menurut Susan, ia bisa memahami jika ATM tidak mengeluarkan struk, karena akhir-akhir ini sering dijumpai mesin ATM tidak mengeluarkan struk bukti transaksi. Susan juga mengetahui jika setiap transaksi melalui ATM akan tercatat di buku tabungan, dan seharusnya mesin ATM mengeluarkan struk.

“Mungkin jika transaksinya tarik tunai, tidak keluar struk tidak masalah, tapi jika transaksinya adalah transfer uang, tentu ini membuat nasabah bingung. Apakah transaksi telah berhasil diproses atau tidak,” papar Susan.

Menurut Susan, struk mungkin tidak dibutuhkan sebagian orang. Tapi bagi dirinya, hal itu penting untuk mengetahui apakah dana yang diambil sesuai dengan yang tertera di mesin ATM.

“Seingat saya struk hanya muncul di pengambilan kedua. Pengambilan pertama dan ketiga, tidak keluar sama sekali. Karena sudah pengalaman saat print-out rekening, tapi jumlah yang tertulis tidak sesuai rincian transaksi,” ungkap Susan.

Sementara itu, Dian (40) orangtua penerima KJP Plus jenjang SD menyebut dana yang diterimanya di masa PSBB sudah sesuai. Ia menarik uang sebesar Rp.250 ribu dari rekening KJP Plus melalui ATM.

“Selama 3 bulan ini, tidak ada potongan di KJP. Kalo besarnya Rp.250 ribu, maka yang diambil tetap Rp.250 ribu,” paparnya Dian.



Dian bersama anaknya yang sekarang duduk di kelas VI SD. Mereka tinggal bersama di rumah orang tuanya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (foto: Jekson Simanjuntak).

Sepengetahuan Dian, dana KJP Plus di masa pandemi COVID-19 bisa diambil semua dan tidak ada pemotongan. Dana itu khusus diberikan untuk meringankan beban orang tua siswa.

“Kalo yang kemarin-kemarin memang sempat ada potongan. Biasanya Rp.5000 untuk administrasi dan lain-lain dan sifatnya tidak rutin. Tapi kalo potongannya Rp.1.111 jadi aneh. Itu untuk apa, karena dibuku dijelaskan biaya administrasi jumlahnya genap Rp.1000,” ungkap Dian

Hal serupa juga diungkapkan Ati (43), orang tua dari siswa SD penerima KJP Plus. Dalam 3 bulan ini, Ati rutin mengambil secara tunai uang sebesar Rp.250 ribu.

“Untuk KJP di masa Covid sudah jelas, besarnya Rp.250 ribu tanpa potongan. Terakhir saya ngambilnya tanggal 20 Juli di kelurahan,” ungkap Ati.



Ati (43) bersama kedua anaknya di kontrakan. Yang paling besar baru tamat SMA sementara yang kecil naik ke kelas VI SD. (foto: Jekson Simanjuntak).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai KJP Plus seharusnya menjadi alat dalam membantu masyarakat miskin yang memiliki masalah terkait finansial, namun harus tetap mendapatkan layanan pendidikan.

Ketika terjadi pemotongan, meskipun jumlahnya kecil, namun jika yang mengalaminya banyak, hal itu menurut Ubaid akan merugikan penerima KJP Plus.

“Hal-hal semacam ini yang tidak pernah dimitigasi oleh Pemprov DKI. Risiko semacam ini dianggap lumrah, sehingga ada banyak pembiaran yang justru merugikan para penerima manfaat KJP itu,” ungkapnya.

Sayangnya hingga tulisan ini dibuat, pihak Bank DKI belum merespons permintaan wawancara yang diajukan. Sehingga konfirmasi terkait pemotongan dana tidak bisa dilakukan.



Ubaid Matraji Koordinator JPPI yang peduli terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. (foto: Ist).

Relaksasi KJP Plus

Medio Mei lalu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menggabungkan dana rutin dan dana berkala, serta menghapus sementara kewajiban pencairan non tunai, yang merupakan skema pencairan KJP Plus. Melalui kebijakan itu, Disdik DKI berharap keseluruhan dana yang masuk, dapat digunakan di masa pandemi COVID-19 ini.

“Sehingga, nominal yang diterima per bulan sebesar Rp 250.000 untuk jenjang SD, Rp 300.000 jenjang SMP, Rp 420.000 jenjang SMA, Rp 450.000 jenjang SMK, dan Rp 300.000 jenjang PKBM,” ujar Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, 15 Mei lalu.

Selain itu, Disdik DKI menghapus sementara belanja pangan murah bagi para penerima KJP Plus di masa pandemi ini. Sebagai gantinya, Pemprov DKI menyediakan paket bantuan sosial gratis selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ringkasan Besaran Dana KJP

JENJANG	TOTAL ALOKASI DANA PER-BULAN	TAMBAHAN SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA PER-BULAN
SD/MI/SDLB	Rp 250.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	-

Ringkasan Besaran Dana KJP. (sumber: <https://kjp.jakarta.go.id/>).

“Sehingga, dana KJP Plus yang awalnya untuk pembelian pangan murah, dapat digunakan untuk keperluan lain yang sifatnya mendesak”, kata Nahdiana.

Bagi Susan, jika paket bansos gratis selama PSBB dari Pemprov DKI diberikan, ia sangat berterima kasih. Hanya saja, ia belum menerimanya. Adapun bantuan yang pernah diterimanya berasal dari Kementerian Sosial.

“Bansos yang saya terima bukan dari Pemprov, tapi dari Kemensos. Saya juga tidak tahu bagaimana mengakses bansos dari pemprov,” tanya Susan.



Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (foto: ppid.jakarta.go.id).

Menurut Kadisdik DKI Nahdiana, kebijakan KJP Plus di masa PSBB mulai berlaku sejak Mei 2020 dan sifatnya sementara. Jika PSBB selesai, kebijakannya dikembalikan seperti semula.

“Skema ini sudah bisa dicairkan mulai Mei 2020, dan berlaku selama masa PSBB,” ujarnya pada Jumat (15/5).

Nahdiana juga menegaskan, dana tambahan tetap diberikan kepada siswa yang baru lulus SMA/SMK. “Penerima KJP Plus yang sudah di kelas XII atau bersiap memasuki jenjang kuliah, akan mendapat dana bridging Rp.500 ribu per orang,” ujarnya.

Pencairan dana KJP Plus bagi jenjang SMA diamini oleh Ati. Anaknya yang tamat SMA tahun ini, telah mengambil dana KJP Plus sebanyak 3 kali. Terakhir, pencairan dilakukan pada 23 Juli lalu, sebesar Rp.420 ribu, tanpa potongan.

“Kemarin udah ngambil 3 kali untuk yang baru tamat SMA. Pertama dapat Rp.500 ribu pas lebaran dan setelah itu Rp.450 ribu sebanyak 2 kali,” ujar Ati.

Sebelumnya, penerima KJP Plus menerima pencairan dalam 2 bagian. Untuk jenjang SD, misalnya, menerima dana sebesar Rp 250.000 setiap bulannya. Dana itu terdiri dari dana rutin dan berkala.

Dana rutin dicairkan sebesar Rp 135.000 perbulan. Namun yang dapat diambil tunai hanya Rp 100.000. Sisanya non tunai (Rp.35 ribu) untuk belanja pangan murah. Sementara dana berkala sebesar Rp 115.000 per bulan dicairkan setiap 6 bulan.

“Dicairkan di akhir semester. Dana tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan siswa secara non tunai,” kata Nahdiana.

Sayangnya di masa pandemi, Ubaid Matraji dari JPPI menyebut kebutuhan siswa meningkat tajam. Sejumlah kebutuhan yang sifatnya weekly, monthly juga daily tidak terelakkan, karena sifatnya rutin.

KJP **Jakarta** **BANK DKI**

Penerima KJP Plus - KJMU dihimbau agar memantau dana masuk dan bertransaksi melalui aplikasi JakOne Mobile dari smartphone masing-masing. Selama memanfaatkan atau membelanjakan dana KJP Plus - KJMU agar tetap memperhatikan pelaksanaan PSBB dan melakukan hal-hal sbb:

- Selalu menggunakan Masker tanpa kecuali**
- Sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk & bersin**
- Hindari berjabat tangan, bercium pipi dan ngerumpi. Gunakan metode lain untuk saling sapa tanpa harus bersentuhan**
- Tunda ke ATM dan Kantor Layanan Bank apabila terjadi kerumunan dan tidak bisa menjaga jarak aman minimal 1 meter**
- Lebih praktis, aman dan nyaman berbelanja di lebih dari 2,9 Juta merchant QRIS melalui Scan to Pay JakOne Mobile**

www.bankdki.co.id
www.bankdkiyarah.co.id

JakOne Mobile jakone_mobile jakone_mobile QRIS LPS

Prosedur pencairan Dana KJP di masa PSBB. (sumber: <https://kjp.jakarta.go.id/>).

“Sementara di masa pandemi, pendapatan mereka juga menurun. Karena itu KJP Plus seperti menjadi andalan,” terang Ubaid.

Untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan kebutuhan buku hingga ATK, misalnya. Ubaid menyebut hal itu sebagai kebutuhan pokok siswa di era pandemi.

“Untuk PJJ, kuota internet jelas sangat dibutuhkan. Juga perangkat lain seperti komputer atau laptop atau hp juga perlu untuk mendukung metode pembelajaran jarak jauh. Bayangkan berapa banyak anak yang terkendala alat, sehingga pemerintah perlu memikirkan hal itu,” jelas Ubaid.

Hilangnya Dana Berkala

Sejak Mei 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang pencairannya dilakukan setiap bulan. Jumlahnya bervariasi sesuai jenjang pendidikan dan pendistribusiannya melalui Bank DKI.

Susan yang anaknya menerima KJP sejak masih di bangku sekolah dasar, menjelaskan peruntukan dana KJP Plus, terbagi atas 2 bagian, yakni dana rutin dan dana berkala. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) no 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Dana rutin dapat kita pakai untuk kebutuhan sekolah, seperti transportasi, uang jajan dan pembelian buku,”katanya.

Sementara dan berkala yang dicairkan per 6 bulan, menurut Susan, sering digunakan saat masuk sekolah. Seperti untuk membeli buku, seragam, tas, sepatu dan keperluan lainnya.

“Karena kemarin anak saya SMP, maka dana berkala/ bulan sebesar Rp.115 ribu, sedangkan dana rutin/ bulan Rp.185 ribu,” paparnya.

Sebelum PSBB, dari dana rutin tersebut, hanya Rp.100 ribu yang bisa diambil tunai. Sisanya Rp.85 ribu digunakan untuk belanja pangan murah secara non-tunai.

“Namun sejak 21 Mei kemarin, sesuai keterangan Disdik DKI, KJP Plus untuk SMP Rp.300 ribu bisa diambil semua,” papar Susan.

Meskipun Susan telah mencairkan secara tunai KJP Plus di masa PSBB, ia masih berharap dana berkala untuk periode Januari hingga April juga bisa dicairkan.

“Ini kan, hak saya juga. Kok gak ada kejelasan sampai sekarang, padahal udah lebih dari 6 bulan,” ujanya.

Menurut Susan, jika dihitung-hitung dana berkala jumlahnya Rp.460 ribu. Bagi perempuan single parent itu, dana tersebut sangatlah bermakna.

“Saya berharap dana itu cair di bulan Juni kemarin. Namun sampai sekarang, dana itu gak tahu kemana?” terang Susan.

Susan khawatir jika dana berkala tidak disalurkan, berpotensi memunculkan praktik korupsi. Ditambah lagi jika pengelolaannya tidak transparan.

Susan lalu menghitung secara sederhana potensi kerugian negara jika dana berkala diselewengkan. Ia merujuk pada penerima KJP Plus di kelas anaknya yang berjumlah 7 orang

Berdasarkan perhitungan Susan, ketika kelas 9 diketahui ada 7 kelas, maka penerima KJP Plus sebanyak 49 orang.

“Kemudian jumlahkan dengan Kelas 8 yang punya 6 kelas dan kelas 7 ada 7 kelas. Hitungan saya khusus kelas 8 ada 42 anak dan kelas 7 ada 49 orang. Total penerima KJP di SMP anak saya 140 orang,” terang Susan.

Susan kemudian mengalikan dana berkala selama 4 bulan, yakni Rp.460 ribu untuk 140 siswa. Hasilnya Rp.64.4 juta. Menurut Susan, untuk ukuran satu sekolah, dana berkala yang hilang cukup besar.

“Bayangkan jika penerima KJP Plus jumlahnya ratusan ribu orang. Berapa kerugian negara akibat dana berkala yang tidak dibagikan. Jumlahnya pasti fantastis,” ujar Susan.

Cerita yang hampir sama juga dikisahkan oleh Dian. Menurut Dian, di SD negeri tempat anaknya bersekolah, jumlah penerima KJP Plus bervariasi antara kelas I hingga kelas VI. Penerima terbanyak ada di kelas V yang sekarang naik ke kelas VI.

“Di kelas kita aja, penerima KJP Plus ada 8 orang, di kelas B ada 7 orang,” paparnya.

Jika dirata-ratakan, di setiap kelas terdapat sedikitnya 7 anak penerima KJP Plus. Dari jumlah itu, Dian memperkirakan angkanya tak sampai 100 orang untuk satu sekolah.

“Jika tiap kelas ada 7 anak KJP, maka untuk 1 sekolah dengan 12 kelas, total siswa penerima KJP ada 84 orang,” ujar Dian.

“Lalu kita kalikan dengan dana berkala Rp.460 ribu/ orang, maka KJP Plus yang harus dicairkan Rp.38.64 juta. Ini baru satu sekolah,” tegas Dian.

Meski mengetahui potensi kerugian negara, Dian tak tahu harus berbuat apa. Seperti halnya penerima KJP Plus yang lain, Dian tak tahu mengadu harus kemana.

“Kasihannya kalo kita gak ngecek, sedangkan sekarang lagi PSBB dan kita gak boleh keluar rumah. Susah juga mau ngecek dan minta tolong ke siapa?” tanya Dian.

Menurut Dian, “Jika kayak gini kita mau protes kemana?” Apalagi, balai kota juga tertutup untuk didatangi.

“Beda dengan jaman sebelumnya. Kita gak tahu, apakah kalo protes ke gubernur, kita diterima atau tidak,” ucap Dian.

Karena itu, Dian berharap kebijakan KJP Plus di masa PSBB segera berakhir dan dikembalikan seperti semula. Harapan itu ia lontarkan, karena beredar informasi yang menyebut PSBB selesai paling cepat pada September tahun ini.

“Jika kebijakannya balik lagi, kami akan terima dana berkala per 6 bulan. Tapi uang Rp.460 ribu sejak Januari sampai April harusnya dikembalikan, karena itu hak kami,” tegas Dian.

Sementara bagi Ati, yang 2 anaknya merupakan penerima KJP berharap dana berkala tetap diberikan. Ia sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pandemi Covid-19 jelas berpengaruh bagi Ati, pasca-pendapatan suaminya yang terus menyusut.

“Dana berkala untuk yang SD harusnya tetap dicairkan, karena sejak Januari sampai April kita belum terima. Kita tunggu sampai Juli, ternyata tidak keluar juga,” terang Ati.

Ati menambahkan, untuk anaknya yang SMA, dana berkalanya sebesar Rp.185 ribu per bulan. “Jika ditotal jumlahnya Rp.740 ribu. Kan, lumayan untuk modal ikut tes perguruan tinggi negeri,” paparnya.

Sebelum Covid-19, menurut Ati, di setiap akhir semester, anaknya yang SD mendapatkan dana berkala sebesar Rp. 600 ribu. Pencairannya dilakukan di bulan Juli atau Januari.

“Sedangkan yang SMA dapat Rp.1.1 juta. Biasanya Rp.1 juta saya belanjakan di Ramayana, Pasar Minggu dan sisanya disimpan di rekening,” pungkask Ati.

Skema Baru Di Masa PSBB

Terkait polemik dana berkala, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana memastikan dana tersebut telah ditiadakan. Sejak Mei 2020, penerima KJP mendapatkan skema terbaru, dimana keseluruhan dana dapat digunakan secara tunai maupun non tunai, di masa pandemi COVID-19 ini.

“Sebelumnya, dana berkala sebesar Rp115.000 per bulan untuk jenjang SD dicairkan tiap enam bulan sekali di akhir semester, untuk dibelanjakan kebutuhan siswa secara non tunai,” ujar Nahdiana pada Jumat (15/5).

Bagi Ubaid Matraji, selaku pengamat pendidikan, tidak transparannya pencairan dana berkala bisa dimaknai sebagai indikasi delik korupsi yang disengaja. Menurutnya, dana dana berkala (Januari - April) harus tetap bagikan, karena tidak ada aturan terbaru yang menjelaskan soal itu.

“Ketika uang tidak didistribusikan, maka akan menjadi tertampung. Dan ketika uang mandeg, ada returnnya. Itu bisa dijadikan modus-modus korupsi,” terang Ubaid.

Jika Pemprov DKI berkomitmen terkait akuntabilitas pelaksanaan KJP Plus, Ubaid berpendapat, TGUPP yang dikenal sebagai KPK-nya DKI seharusnya bisa dilibatkan.

“Mereka seharusnya masuk ke ruang-ruang itu. Jika ditemukan ceruk yang memungkinkan modus korupsi, mereka masuk kesitu. Sehingga komitmen pemerintah melayani rakyat di bidang pendidikan akan berdampak pada akses pendidikan dan juga mutu pendidikan di DKI,” papar Ubaid.

Dengan kondisi seperti sekarang, Ubaid menilai, advokasi kebijakan yang dilakukan kebanyakan berasal dari luar Pemprov DKI.

“Kalo dari dalam, saya pikir berat. Karena kita tidak pernah mendengar ada kebijakan2 yang progresif di Pemprov DKI, wabil khusus Dinas Pendidikan,” ungkap Ubaid. (bersambung)

<http://www.mediajakarta.com/2020/08/polemik-dana-berkala-dan-relaksasi-kjp.html>

Jekson Simanjuntak

POLEMIK DANA BERKALA DAN RELAKSASI KJP PLUS DI MASA PANDEMI, BUKTI MINIMNYA PENGAWASAN (PART-2)



Pengumuman pencairan KJP Plus untuk Juli 2020. (sumber: <https://kjp.jakarta.go.id/>).

Beberapa waktu lalu, Dana JKP Plus tahap I tahun 2020 khusus bulan Juli telah dicairkan. KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Dikutip dari akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan @aniesbaswedan, Rabu (22/7/2020), ia menuliskan: Ada info penting yang harus banget kamu ketahui nih, yaitu pencairan dana KJP Plus Tahap I tahun 2020 bulan JULI dijadwalkan cair mulai tanggal 20 Juli 2020.

Anies menjelaskan bahwa pencairan menurut jenjangnya sebagai berikut:

Mulai 20/07/20 : SD/SDLB/MI

Mulai 22/07/20 : SMP/SMPLB/MTs/PKBM

Mulai 23/07/20 : SMA/SMALB/MA/SMK

“Nah catet tanggalnya ya adik-adik!”, demikian tulis Anies Baswedan.

KJP Plus seharusnya memberi manfaat dan dampak positif bagi siswa (dikutip dari laman <https://kjp.jakarta.go.id>), antara lain: meningkatkan akses bagi anak usia 6 - 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, meringankan biaya pendidikan, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Selain itu, KJP Plus diperlukan untuk mendorong siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

KJP Plus juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jumono menilai KJP Plus awalnya didesain untuk mencukupi menu tambahan, seperti membeli ikan, daging, sayur, yang secara prinsip tidak bisa digunakan untuk dana lain.



Jumono, Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. (foto: Ist).

“Karena itu, penganggarannya dilakukan jauh-jauh hari,” ujar Jumono.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, program KJP Plus tidak berjalan mulus, karena ditemukan sejumlah fakta, seperti penerima yang mengeluhkan berkurangnya dana dari rekening mereka.



Susan berorasi di Depan Gedung Kemendikbud (29/6) menuntut pembatalan PPDB DKI. (foto: Jekson Simanjuntak)

Salah satunya dialami oleh Susan (53), penerima KJP Plus untuk jenjang SMP. Susan heran saat mengetahui dana di layar ATM tertulis Rp.298 ribu, namun di struk tercatat Rp.300ribu. Kejadian itu ia alami sebanyak 3 kali.

“Saya gak ikhlas pas tahu dipotong, karena tidak ada penjelasan. Gak ada keterangan ataupun secara lisan atau tulisan untuk apa Rp.1.111 itu,” ujar Susan.

Terpotongnya dana dari rekening penerima KJP, menurut Jumono kemungkinan besar disebabkan oleh sistem. Namun jika itu kesalahan sistem, seharusnya tidak terjadi terus menerus.

“Karena ini sudah dua kali kejadian, seharusnya yang ketiga tidak boleh terjadi seperti itu. Harus diingatkan jika ada ada pemotongan,” kata Jumono.

Jumono berpendapat, pemotongan dana itu harus dijelaskan pihak Bank DKI, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Belum lagi, jika ternyata ribuan bahkan puluhan ribu penerima KJP Plus saldonya ikut berkurang, dipastikan nilainya menjadi besar.

“Jangan hitung jumlahnya kecil, cuma seribu ya, tapi kalo dikali ribuan bahkan ratusan ribu orang, maka jumlahnya menjadi besar,” papar Jumono.



Dewi Anggraeni Puspitasari Naipospos, Div. Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW. (Foto: Instagram Dewi Anggraeni).

Peneliti ICW, Dewi Anggraeni menyebut terpotongnya dana KJP Plus bukan fenomena baru. Ia menemukan banyak kasus seperti itu, namun menurutnya, hal itu perlu dicermati secara benar.

“Misalnya yang harusnya dapat Rp.300 ribu, ternyata yang bisa diambil Rp.250 ribu, karena yang tertera di saldo hanya Rp.298 ribu. Nah itu kemungkinan ada mekanisme di Bank DKI yang harus di cek di juknis pencairannya,” ujar Dewi.

Dewi Anggraeni menyebut program KJP Plus rawan pelanggaran dan penyelewengan, jika pelaksanaannya tidak diawasi. Pengawasan oleh semua pihak, termasuk masyarakat sangat diperlukan, karena dana KJP Plus bersumber dari APBD DKI Jakarta.

“Jadi kalo datanya ada, bisa dianalisis dana yang dianggarkan bagi siswa penerima KJP berapa banyak. Kita bisa lihat apakah dana itu terserap atau tidak. Nah, kalo di KJP plus ini, penerimanya tidak hanya yang sekolah, tapi juga yang putus sekolah,” papar Dewi.

Dewi Anggraeni juga menyoroti soal tidak transparannya pelaksanaan KJP Plus. Persoalan transparansi dan akuntabilitas dana KJP Plus, menurut Dewi, menjadi menarik jika Dinas Pendidikan Provinsi DKI membuka data yang bisa diakses publik.

“Kita bisa cari tahu, di satu sekolah ada berapa penerima KJP Plus, trus di kali berapa sekolah. Lalu dikali per-anak. Kita juga bisa lihat apakah penyerapan anggaran pendidikan Anies match dengan anggaran yang digadang-gadang sebelumnya,” papar Dewi.

Menurut Dewi, data terkait anggaran dan jumlah penerima KJP Plus penting diketahui untuk mengukur dan menganalisa kerugian yang mungkin dialami pemegang KJP, jika terjadi penyelewengan.



Susan berorasi di Depan Gedung Kemendikbud (29/6) menuntut pembatalan PPDB DKI. (foto: Jekson Simanjuntak)

“Hanya saja, data itu disembunyikan oleh mereka. ICW minta data anggaran juga susah banget,” ujar Dewi.

Terkait data anggaran dan jumlah penerima KJP Plus, hingga tulisan ini dibuat, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, belum merespon permintaan wawancara yang diajukan.

Terkait polemik KJP Plus, penulis sempat bertanya kepada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) selaku pengelola laman <https://kjp.jakarta.go.id>. Sayangnya, jawaban belum diberikan, meskipun pertanyaan telah diajukan melalui email: uptp60.disdikdki@gmail.com.

Untuk mengetahui jumlah penerima KJP Plus dan anggarannya, penulis menemukan satu laman yang merujuk pada data statistik Jakarta. Hanya saja, laman tersebut tidak melakukan pembaruan data dalam dua tahun terakhir (2019 dan 2020)

Informasi terakhir yang diinput menunjukkan pada tahun 2018, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 1.710.934, menghabiskan

anggaran Rp.3.975.271.062.000. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya (2017) dengan anggaran Rp.3.174.562.200.000 bagi 1.570.553 penerima KJP Plus.

REKAP ANGGARAN DAN JUMLAH PENERIMA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

Print Excel PDF Copy

SHOW ENTRIES SEARCH:

TAMBAH ANGGARAN	ANGGARAN	JUMLAH PENERIMA
2015	3.304.085.944.800	1.050.445
2016	2.464.554.705.000	1.323.008
2017	3.174.562.200.000	1.570.553
2018	3.975.271.062.000	1.703.834
Tahun Anggaran	Anggaran	Jumlah Penerima

Showing 1 to 4 of 4 entries

Rekap anggaran dan jumlah penerima KJP. (sumber: <http://statistik.jakarta.go.id>).

Mutasi Siluman

KJP Plus merupakan program pemberian akses bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu (seperti Susan), agar dapat mengenyam pendidikan minimal SMA/SMK dibiayai APBD Provinsi DKI Jakarta.



Siswa SD sedang bersiap mengikuti upacara bendera (sumber: IST).

Susan, seorang ibu rumah tangga sangat terbantu dengan program tersebut, karena beban biaya sekolah anaknya berkurang. KJP Plus ia gunakan untuk kebutuhan pendidikan, mencakup; seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan hingga biaya ekstrakurikuler.

Hanya saja, sejak kemunculan KJP Plus, Susan menemukan mutasi di rekening yang nilainya berbeda saat hendak diambil melalui ATM.

Salah satu kejadian yang paling diingat Susan adalah peristiwa 11 Mei 2019. Saat itu di buku tabungan tertulis mutasi Rp.1.8juta. Namun saat hendak mengambil uang, ia menemukan jumlah yang tertera di ATM hanya Rp.600 ribu.

“Saya bingung kok angkanya Rp.600 ribu di ATM, bukannya Rp.1.8 juta. Karena yang bisa diambil tunai hanya Rp.100 ribu, sisanya saya belanjakan non tunai Rp.500 ribu,” papar Susan.

Menurut Susan, pola-pola mutasi seperti itu masuk kategori white crime atau penipuan. Susan yang memang punya pengalaman bekerja di perbankan, mengerti betul praktik-praktik seperti itu.

“Secara akuntansi perbankan ini sudah ngaco, karena sebesar Rp.1.8 juta di uraian ini, tidak kita ambil sebanyak itu,” papar Susan.

Sepengetahuan Susan, mutasi Rp.1.8 juta di rekening KJP Plus miliknya bukan yang pertama terjadi. Pada 23 November 2018 ia menemukan hal serupa, setelah meminta pihak bank melakukan print out buku tabungan.

“Saya terkejut, kok dana itu saya tidak tahu, sehingga tidak pernah dicairkan. Saya juga heran, mengapa tertulis ada pengambilan Rp.345 ribu pada 8 Januari 2019, dan Rp.290 ribu pada 13 Januari 2019,” papar Susan.

Peminjaman Saldo.....				
1	10/03/17	0240	1,000.00	0
2	10/03/17	0208	1,000.00	0
3	10/10/17	0400	4,000.00	0
4	10/10/17	0400	152,400.00	0
5	10/10/17	0402	5,000.00	0
6	10/10/17	0240	1,000.00	0
7	10/10/17	0208	1,000.00	0
8	10/11/17	0240	1,000.00	0
9	10/11/17	0208	1,000.00	0
10	21/11/17	0239	2,000.00	0
11	21/11/17	0215	2,000.00	0
12	21/11/17	0400	85,000.00	0
13	21/11/17	0402	2,000.00	0
14	30/12/17	0100	40,000.00	0
15	10/12/17	0400	4,000.00	0
16	11/12/17	0402	5,000.00	0
17	12/12/17	0240	1,000.00	0
18	12/12/17	0208	1,000.00	0
19	12/12/17	0400	1,442,004.00	0
20	12/12/17	0208	1,000.00	0
21	4/01/18	0400	4,000.00	0
22	7/01/18	0400	300,000.00	0
23	7/01/18	0402	5,000.00	0
24	3/01/18	0400	4,000.00	0
25	3/01/18	0400	82,000.00	0
26	3/01/18	0402	5,000.00	0
27	10/01/18	0100	200.00	0
28	10/01/18	0240	1,000.00	0
Findan Kalkulasi.....				

Mutasi dana masuk Rp.1.8 juta pada 23/11/2018 & 30/5/2018. (sumber: Jekson Simanjuntak).

Karena jarang melakukan print out buku tabungan, Susan hanya mengambil dana rutin Rp.100 ribu secara tunai setiap bulannya. Pengambilannya tercatat, meskipun tanggalnya tidak beraturan.

“Lihat nih, saya selalu rutin mengambil tunai di awal bulan. Misalnya tanggal 8 bulan 12 tahun 2018, tanggal 7 Januari 2019, berlanjut di 11 Februari 2019. Begitu seterusnya,” ujar Susan.

Susan menilai, jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, pencairan KJP saat itu sangat tertib.

“Selalu tepat waktu di minggu pertama, sehingga kita tidak khawatir. Beda dengan sekarang, tanggalnya suka loncat-loncat. Kalo kita tidak cek, maka kita tidak tahu. Belum lagi banyak laporan soal kehilangan dana KJP di tabungan,” katanya.

Pada 30 Mei 2018, Susan juga menemukan mutasi Rp.1.8 juta di rekeningnya. Ketika mengetahui ada dana masuk, pada 24 Juli 2018, Susan melakukan pembelian non tunai kebutuhan sekolah sebesar Rp.980 ribu.

Karena mendapati mutasi yang tidak sinkron, antara pencatatan (di rekening) dengan saldo di ATM, Susan memberanikan diri menanyakan hal itu ke pihak Bank DKI di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan.

“Waktu saya tanya ke orang DKI Kecamatan, saya bilang, saya tidak pernah terima duit ini. Dimana kalian bisa mengeluarkan mutasi print out yang uangnya tidak diterima,” ujar Susan sembari menceritakan ulang pengalamanya itu.

Dihadapan Susan, petugas Bank DKI berdalih, dana tersebut memang ada, namun sisanya disimpan untuk biaya kenaikan sekolah, misalnya dari SMP ke SMA atau saat SMA ingin melanjutkan kuliah.

“Dia bilang begini; duit itu diturunkan oleh Pemda, tetapi yang dikeluarkan tidak sebesar itu. Sisanya disimpan, bahasa mereka. Disimpan untuk saat anak lulus. Baru akumulasi dikeluarkan,” papar Susan.

Susan menjelaskan bahwa saat anaknya masuk SMP di tahun 2017, ia tidak pernah menerima dana akumulasi yang dimaksud.

Lalu di tahun 2020, ketika anaknya diterima di salah satu SMA negeri di Jakarta, Susan juga tidak pernah menerima dana tersebut

“Mereka tidak jawab. Dia cuma bilang, ini menurut pemda DKI disimpan untuk nanti kelulusan. Sampai sekarang gak ada kejelasan soal itu, sementara anak saya sudah lulus SMP,” ucap Susan.

1	21/05/18	0438	Pemindahan Saldo.....	100,702.00		
2	30/05/18	0438		23,400.00	D	03EF
3	01/06/18	0439		1,000,000.00	A	12134
4	16/06/18	0240		100.00	K	0009
5	19/06/18	0200		1,000.00	D	0014
6	19/07/18	0103		1,000.00	A	0010
7	16/07/18	0240		1,000.00	D	0014
8	16/07/18	0200		1,000.00	D	0014
9	24/07/18	0408		300,000.00	D	03EF
10	10/08/18	0103		200.00	K	0010
11	10/08/18	0240		1,000.00	D	0014
12	16/08/18	0200		1,000.00	D	0014
13	1/09/18	004E		300,000.00	D	03EF
14	7/09/18	0400		400,000.00	D	03EF
15	10/09/18	0030		100.00	A	0010
16	11/09/18	0240		1,000.00	D	0014
17	17/09/18	0230		1,000.00	D	0010
18	6/10/18	0200		100,000.00	D	03EF
19	6/10/18	0408		300,000.00	D	03EF
20	16/10/18	0240		1,000.00	D	0014
21	16/10/18	0200		1,000.00	D	0014
22	16/11/18	0240		1,000.00	D	0014
23	12/12/18	0200		1,000.00	D	0014
24	20/12/18	004E		1,000,000.00	D	03EF
25	20/12/18	0400		24,000.00	D	03EF
26	23/12/18	0200		100,000.00	D	03EF
27	1/12/18	0400		1,000,000.00	D	03EF
28	6/12/18	0300		100,000.00	D	03EF
			Pindah Saldo.....			

Mutasi dana masuk Rp.1.8 juta pada 1/12/2017. (sumber: Jekson Simanjuntak).

Saat itu, petugas bank kembali berkilah dengan menyebut dana yang disimpan juga digunakan untuk biaya kuliah. Susan tidak terima, jika dana KJP anaknya diselewengkan, tanpa diketahui kemana uang tersebut mengalir.

Ia bahkan menjelaskan bahwa, “untuk kuliah ada dana sendiri. Namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)”.

Mendengar itu, petugas bank terdiam. Susan berkata begitu, karena ia paham soal KJMU. Menurutnya, KJMU adalah bantuan bagi calon mahasiswa PTN dari keluarga tidak mampu, sehingga mendapatkan kesempatan belajar di PTN dengan dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

“Mirip dengan KJP Plus, sih. Cuma kalau KJMU khusus untuk calon mahasiswa yang secara ekonomi terbatas, namun punya potensi akademik yang baik,” papar Susan.

TANGGAL	SANDB	MUTASI	SALDO	OP
		Pemindahan Saldo:.....	196.085,00	
1 11/05/19	0100	1,000,000.00 K	1,998,085.00	03262
2 10/05/19	0202	100,000.00 D	1,898,085.00	USER
3 15/05/19	0240	1,000.00 D	1,897,085.00	DC14
4 15/05/19	0208	1,000.00 D	1,896,085.00	DC14
5 27/05/19	0408	80,000.00 D	1,816,085.00	DC14
6 4/06/19	0208	4,000.00 D	1,812,085.00	USER
7 4/06/19	0241	100,000.00 D	1,712,085.00	USER
8 4/06/19	0223	7,000.00 D	1,705,085.00	USER
9 10/06/19	0109	365.00 K	1,704,720.00	DC10
10 11/06/19	0208	4,000.00 D	1,700,720.00	USER
11 15/06/19	0240	1,000.00 D	1,699,720.00	DC14
12 10/06/19	0208	1,000.00 D	1,698,720.00	DC14
13 21/06/19	0408	30,000.00 D	1,668,720.00	DC14
14 23/06/19	0608	35,000.00 D	1,633,720.00	DC14
15 30/06/19	0408	300,000.00 D	1,333,720.00	DC14
16 1/07/19	0608	300,000.00 D	1,033,720.00	DC14
17 5/07/19	0202	100,000.00 D	933,720.00	USER
18 3/07/19	0408	101,000.00 D	832,720.00	USER
19 10/07/19	0109	280.00 K	830,234.00	DC10
20 12/07/19	0408	30,000.00 D	800,234.00	DC10
21 19/07/19	0240	1,000.00 D	799,234.00	DC13
22 15/07/19	0208	1,000.00 D	798,234.00	DC13
23 5/08/19	0202	100,000.00 D	698,234.00	USER
24 2/08/19	0408	30,000.00 D	668,234.00	USER

Mutasi di buku tabungan milik Susan, ditemukan ada dana masuk Rp.1.8 juta pada 11 Mei 2019. (sumber: Jekson Simanjuntak).

Ketika mutasi Rp.1.8 juta di rekening terjadi lebih dari sekali, Susan bingung. Namun itu belum selesai. Kebingungan berikutnya, ketika secara berulang, ia menemukan adanya penarikan uang, sementara ia tidak merasa mengambil.

“Contohnya tanggal 30 Mei 2019 dan 1 Juli 2019. Ada penarikan dana masing-masing Rp.300 ribu. Padahal, yang boleh diambil, harusnya cuma Rp.100 ribu, karena aturannya seperti itu,” papar Susan.

Saat buku rekening mencatat semua transaksi, maka transaksi itu memang benar terjadi dan tidak mungkin direkayasa. Susan menyebut, “buku bank DKI tidak mungkin dipalsukan, karena bisa diselidiki jika dibutuhkan. Karena itu, jika ada penarikan Rp.300 ribu, maka otomatis di debet”

“Hanya saja, saat ada pendebitan, sementara saya tidak melakukan penarikan, ini jelas penipuan,” tegas Susan.

Peristiwa yang dialami Susan, merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di program KJP Plus. Karena itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta Pemprov DKI bertanggungjawab atas kebijakan yang dibuat. Menurut Ubaid, pemprov harus bisa memastikan bahwa kebijakan itu tidak bocor di tengah jalan.

“Artinya KJP Rp.1.8 juta itu harus sampai ke tangan siswa, dan ketika bocor, inilah yang terjadi tentang minimnya pengawasan di internal,” ujar Ubaid.

Ubaid mempertanyakan, mengapa pihak inspektorat internal tidak melakukan pengawasan. Sementara ketika publik ingin melakukan pengawasan, birokrasinya sangat tertutup.

“Kita tidak punya ruang untuk berdialog dengan pemerintah. Mereka sangat tertutup,” kata Ubaid.

Ubaid juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan menempati posisi ketiga teratas, sebagai sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu, tak heran jika praktik-praktik korupsi kerap terjadi disana.

“Dana pendidikan ini kan, bukan hal baru dalam konteks modus-modus yang bisa jadi celah korupsi, seperti yang diceritakan dalam riset ICW dan KPK,” papar Ubaid.

Sementara itu, Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengingatkan, jika ada dana masuk, namun tidak bisa diambil. Tidak serta merta hal itu dikategorikan sebagai penggelapan.

“Harus dikroscek dulu, apakah itu uang apa. Trus kenapa bisa masuk di mutasi, tetapi gak bisa diambil,” ujar Dewi yang juga anggota divisi pelayanan publik dan reformasi birokrasi ICW. Senada dengan Ubaid, Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jumono menilai sistem pengawasan KJP Plus masih

sangat lemah. Seharusnya kelemahan itu diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.

“Karena pendidikan untuk semua, maka setiap orang harus mendapatkan hak yang sama. Sekarang misalnya, ada yang dapat, dan ada yang tidak, lalu bagaimana verifikasinya, jumlahnya berapa, apakah sudah memadai dan transparan, kita tidak tahu. Karena itu, saya bilang pengawasannya lemah,” pungkas Jumono. (end)

http://www.mediajakarta.com/2020/08/polemik-dana-berkala-dan-relaksasi-kjp_11.html

Suwandi

MENGEJAR BANTUAN COVID-19 UNTUK ORANG RIMBA

Konten ini diproduksi oleh Jambikita.id



Seorang perempuan tua dari komunitas adat Kubu Lalan atau Suku Anak Dalam Yusnani berada di rumahnya di tepi Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. (Foto: Suwandi).

Jambikita.id - Deretan rumah papan beratap seng tampak menua dan rapuh. Dari rumah kecil muncul Perempuan tua dengan langkah gemetar menuruni anak tangga. Kulitnya bewarna hitam dan keriput dengan sorot mata yang lemah. Semburan senyumnya indah bercampur lelah.

Perempuan tua itu bernama Yusnani. Tinggal di tepi hutan dekat Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Muaro Jambi. Sebuah tempat hamparan sawit transmigrasi. Dia pun kecipratan berondol atau buah sawit yang terjatuh saat dipanen. Dalam sehari sekitar 5 kilogram terkumpul, dengan harga seribu sekilo.

Sayangnya, panen tidak setiap hari. Jika sedang tidak memetik berondol, dia ke hutan untuk mencari makanan atau ke sungai mencari ikan.

“Saat tidak punya uang belanja, aku pergi ke hutan, memetik pucuk rotan dan itulah yang dimakan dengan garam,” kata Yusnani dengan bening kristal menumpuk di sudut matanya, Selasa (21/7/2020) lalu.

Ia menarik nafas dalam-dalam, saat membayangkan nasib cucunya ke depan. Sebab hutan adat telah hilang. Mereka nantinya, kata Yusnani bertahan hidup tanpa ladang dan pendidikan. Sekarang saja sudah menderita.

Depati Kubu Lalan yang juga menantu Yusnani, Jupri menceritakan Suku Anak Dalam (SAD) atau Kubu Lalan sangat kesulitan mencari makan. Selain dilarang membuka ladang oleh pemerintah, aparat kepolisian dan perusahaan. Mereka mengaku takut keluar dari hutan karena pandemi COVID-19.

Ketakutan kepada COVID-19 membuat mereka di rumah. Mereka ragu memakan satwa liar hasil buruan. Kabar angin mengatakan hewan membawa virus. Kemalangan kian menyayat, kala babi hutan tak laku di pasaran. Pekerjaan pun bergantung mencari ikan.

Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas bernasib serupa. Mereka kesulitan mencari pangan saat pandemi COVID-19.

Direktur KKI Warsi, Rudi Syaf menuturkan untuk menghindari COVID-19, Orang Rimba menjalani tradisi besesandingan. Besesandingan adalah tradisi menjaga jarak Orang Rimba dengan masuk jauh ke dalam hutan dan tidak berinteraksi

dengan orang asing.

Saat besesandingan Orang Rimba terbelah dalam tiga tempat, yakni hutan TNBD, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Semua tetap bergantung dengan alam. Hidup dari berburu dan meramu. Sedikit kelompok yang bercocok tanam sederhana.

Saat berada dalam hutan, sambung Rudi, Orang Rimba masih mampu memenuhi pangan, dengan memakan gadung dan ubi. Kalau ubi tinggal direbus. Tetapi kalau gadung harus diolah tiga hari di darat dan tiga hari dalam air. Apabila salah mengolah maka akan keracunan atau mabuk gadung.

Sebagian besar Orang Rimba tinggal di kebun sawit dan hutan tanaman industri. Nah, tempat ini miskin sumber pangan. Ditambah hasil buruan tidak laku. Mereka hanya bergantung pada penjualan karet. Harganya itu Rp2.000-3.000 per kilogram. Ditolak Pemda

Sore itu, pertengahan bulan Juli, panas menyengat. Arief Munandar, Kepala Dinsos dan Dukcapil Provinsi Jambi menolak usulan Orang Rimba masuk dalam daftar penerima bantuan, skema Jaminan Pengaman Sosial (JPS) produk pemerintah daerah.

“Tidak bisa. Usulan yang masuk kita tolak. Kita telusuri betul, ini ia punya NIK atau tidak. semua ada aturan. Dalam penyaluran JPS kita dipantau inspektorat dan aparat hukum,” kata Arief. Penyaluran bantuan ke masyarakat umum memang ada yang tumpang tindih. Begitu banyak bantuan yang mengalir ke masyarakat. Secara aturan mereka memang berhak, karena memiliki NIK. Berbeda dengan Orang Rimba yang belum mengantongi NIK.

Ia juga mengakui bantuan dari Pemda mengalami gagal salur 457 orang. Kegagalan ini karena banyak penerima yang dobel dengan bantuan dari pemerintah pusat. Penerima tidak berani lalu mengembalikan ke pemerintah desa setempat.

Tidak hanya gagal salur, bantuan pemerintah daerah yang berhasil disalurkan hanya 27.731 orang dari kuota yang dianggarkan sebesar 30.000 orang. Selisihnya cukup besar memang, sambung Arief.

Sebenarnya Arief mau memecah bantuan dan menyalurkan ke Orang Rimba. Dampak dari gagal salur dan tidak terpenuhi kuota bantuan pemerintah daerah, paket bahan pangan mulai rusak, karena sudah sebulan ditumpuk di gudang Bulog. Hanya saja dia menunggu Orang Rimba memiliki NIK.

“Kalau Orang Rimba yang ada di Jambi ini punya NIK. Tentu pemerintah daerah dengan senang hati mau membantu. Kalau belum kan repot. Kita tidak tahu juga mereka ada dimana,” katanya dengan tegas.

Bantuan Terganjil KTP

Negara memang membantu rakyat saat pandemi COVID-19. Tetapi Jupri dan keluarga belum menerima bantuan. Meskipun mereka merasa tidak pantas menerima bantuan, karena tinggal di hutan tanpa adanya identitas.

“Banyak diantara kami yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),” katanya.

Kubu Lalan tersebar di sepanjang Sungai Lalan, Sungai Muaro Badak, Sungai Beruang dan Tigo Limo. Sebagian besar memang tidak memiliki KTP.

“Kami rasanya tidak dianggap pemerintah ada. Dimusuhi perusahaan saja, mereka (pemerintah) diam. Apalagi mau kasih bantuan,” kata Jupri menegaskan.

Kendati merasa tidak diperhatikan pemerintah, Jupri mengaku kalau pemerintah mau memberikan bantuan, dia dan 300 KK SAD yang berada dalam naungan adat Kubu Lalan, akan senang hati menerimanya.

Tentu akan membantu ekonomi mereka, yang tengah kesulitan mencari makan.



Kementrian Sosial bersama PT POS Indonesia saat menyerahkan bantuan Covid 19 kepada ribuan Orang Rimba di kantor lapangan KKI Warsi Jambi. (Foto: Suwandi).

Mangku Kubu Lalan, Rusdi juga mengharapkan bantuan pemerintah. Dia yang menghidupi sembilan orang anak, benar-benar kesulitan untuk mencari makan. “Kami makan ubi setiap hari. Beras itu jarang-jarang. Karena harganya mahal dan kami tidak punya uang banyak,” kata Rusdi lirih.

Persoalan bantuan yang terganjal identitas ini, mengetuk pintu hati Rudi Syaf. Pentolan lembaga yang puluhan tahun mendampingi Orang Rimba. Dia menyebutkan KKI Warsi mendorong agar Orang Rimba mendapat bantuan.

Pengajuan sempat ditolak karena terganjal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara pemerintah belum serius menangani legalitas Orang Rimba.

Sejak Indonesia merdeka, sebagian besar Orang Rimba belum memiliki NIK dan KTP. Sebabnya adalah mereka tidak terikat

dengan desa. Kondisi ini menjadi kendala dalam pencatatan administrasi.

Selanjutnya, tradisi melangun atau tidak menetap permanen pada suatu wilayah saat ada kematian. Pemerintah jadi kesulitan mengakses Orang Rimba.

Alasan lain adalah untuk mencari makan, Orang Rimba berburu dan meramu. Jadi mereka terus berpindah mencari tempat yang mudah mendapatkan makanan.

Persoalan kolom agama sempat menghambat Orang Rimba mendapatkan KTP. Orang Rimba penganut kepercayaan Bedewo. Enggan juga mereka disuruh mengaku salah satu agama, selain kepercayaan Bedewo. Ada juga yang terpaksa demi punya KTP, dalam kolom agama, mereka mau ditulis Islam atau Kristen.

“Setelah aturan agama ke tujuh, penghayat kepercayaan sudah tidak ada kendala. Tapi kadang tetap ada masalah di lapangan. Petugas ada yang kurang paham soal aturan ini. Mereka tetap mengalami diskriminasi,” kata Rudi menjelaskan.

Pemerintah sendiri juga kadang dihalangi jarak tempuh untuk mengakses Orang Rimba. Pasalnya untuk mendapatkan KTP, Orang Rimba harus menjalani perekaman. Tentu alat-alat itu, akan sulit dibawa berkeliling dalam rimba.

Perlu Jemput Bola

Dengan beragam persoalan yang menghalangi terdatanya jumlah Orang Rimba, Rudi berharap pemerintah jemput bola dan adaptif. Artinya pemerintah mendatangi Orang Rimba untuk merekam dan mengambil data.

Sementara untuk urusan alamat, pemerintah juga harus adaptif. Jangan lagi berbasis desa. Memang harus khusus. Rudi mencontohkan Orang Rimba bisa beralamat sesuai nama sungai tempat mereka bermukim, seperti Makekal, Kedudung Muda,

Sako Lado dan Terap.

Menurut Rudi, hampir empat bulan Orang Rimba kesulitan mencari makan. Mereka menunggu bantuan datang namun malah terganjal aturan. Besar kemungkinan akan ada bahaya kelaparan. Akhirnya Rudi menggedor pintu Kementerian Sosial dengan mengajukan ribuan nama Orang Rimba.

Bantuan harus segera dikucurkan demi nyawa. Aturan bisa menyusul kemudian.



Anak-anak saat belajar di perkebunan sawit perusahaan saat pandemi Covid 19 bersama tenaga pendidik dari KKI Warsi. (Foto: Suwandi).

Gayung bersambut. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kemensos, La Ode Taufik juga sedang bergegas. Ia hendak mengikuti arahan Mensos sesuai titah Presiden Joko Widodo, bahwa untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah sulit dan terisolir. Harus dipermudah dan jangan dipersulit.

Untuk mengucurkan dana BST ke Orang Rimba, La Ode pun mengabaikan syarat dari pemerintah. Yakni penerima bantuan merupakan penduduk yang tercatat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Sedangkan Orang Rimba tanpa NIK dan tidak bisa tercatat di DTKS.

Apalagi Orang Rimba adalah kelompok rentan, sesuai petunjuk presiden. Maka terbit ID Sementara bagi Orang Rimba. Sehingga bisa diberi bantuan COVID-19.

Sebelum KKI Warsi bergerak untuk menyampaikan data Orang Rimba yang berhak dibantu sesuai by name by address (BNBA). La Ode sudah menyurati seluruh dinas sosial provinsi dan kabupaten. Agar menyampaikan data, namun itu tidak dilakukan.

“Sampai akhir waktu. Belum ada daerah yang merespon surat itu. Dan mengirim nama-nama. Alasan daerah terkendala kebijakan PSBB. Untung saja Warsi ngasih data, jadi Orang Rimba bisa dibantu,” kata La Ode Taufik, Selasa 21 Juli 2020.

Setelah data dikirim Warsi, La Ode pun berunding dengan Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos. Maka sepakat SAD yang diberi bantuan sesuai usulan adalah Talang Mamak 47 Orang, Batin Sembilan 65 dan Orang Rimba 1.229 jiwa.

Pemberian bantuan kepada Orang Rimba memang terkesan melanggar aturan. Yakni bantuan diberikan kepada orang tanpa NIK. Meskipun begitu, proses administrasi tetap berjalan. La Ode mencontohkan sebelum turun bantuan, Dirjen Dayasos menyurati Dirjen Admuduk Kemendagri. Sehingga pencatatan penduduk KAT di Jambi bisa difasilitasi.

Jauh sebelum surat menyurat di pusat, Direktorat Pemberdayaan KAT sudah menyurati dinas kependudukan setempat, lalu ditembuskan ke tiap Bupati. Agar proses NIK dan input data ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dilakukan daerah. Dengan demikian semua berjalan secara paralel, baik di daerah maupun pusat.

Setelah semua administrasi terpenuhi, Setditjen PFM, Direktorat PKAT, Dinsos Dukcapil Jambi, Kantor Pos Jambi, dan KKI Warsi Jambi melakukan koordinasi untuk menentukan jadwal penyaluran BST ke kelompok Orang Rimba Jambi. Maka disepakati 17-18 Juli 2020 secara serentak.

Proses penyaluran melalui PT POS Indonesia, mereka menggunakan ID Sementara berbasis BNBA. Saat penyaluran itu mereka turun langsung ke lokasi Orang Rimba, yakni di kantor lapangan KKI Warsi.

“Jumlah SAD yang mendapat BST, yang telah ditetapkan Pusdatin sebanyak 1.341 KPM. Sementara yang diajukan 1.373 KPM. Jadi ada selisih 32 KPM mungkin karena dobel data. Besaran bantuan yang dikucurkan Rp2,4 miliar,” kata La Ode menegaskan.

Masing-masing orang menerima Rp1,8 juta untuk tiga bulan sekaligus. Setelah mereka menerima BST, La Ode berharap dokumen kependudukan dirampungkan tahun ini. Maka tugas instansi terkait di daerah sangat penting.

Bantuan untuk Makan

Menti Sungai Terab, Ngelembo menyebutkan bantuan yang diterima digunakan untuk membeli bahan makanan. Selama pandemi dia mengaku hanya makan rebus ubi. “Kami akan gunakan bantuan untuk beli beras,” kata Ngelembo.

Hal senada disampaikan Tumenggung Ngamal, pimpinan Orang Rimba yang berdiam di Sako Lado. Katanya sejak pandemi anggota kelompoknya makin jauh masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan bahan pangan mereka adalah gadung, benor dan umbut-umbut rotan.

Gadung harus diolah dengan teliti. Prosesnya diiris tipis, direndam pada air mengalir, lalu dijemur. Baru kemudian bisa dimasak. Salah dalam mengolah menyebabkan mabuk gadung. Rasanya kepala pusing, leher terasa terbakar bahkan pingsan sampai berjam-jam.

Untuk memasak benor, Orang Rimba harus menggali tanah sedalam dua meter. Kalau untung dapat umbinya. Buahnya itu sebesar jempol kaki. Sehari menggali paling banter baru dapat seperiuk.

Kebiasaan Orang Rimba mengonsumsi satwa liar pun ditinggalkan. Untuk menghindari penularan COVID-19.

Dengan adanya bantuan ini Orang Rimba merasa sangat tertolong. Kebanyakan menggunakan uang bantuan untuk membeli beras.

Sisa Bantuan Buat Melangun

Ia berharap setelah dibelanjakan bahan makanan, masih tersisa untuk persiapan melangun. Menurutnya, tidak lama lagi, akan memasuki musim kemarau. Mereka harus kembali bersiap menghadapi kekurangan makanan.

Saat musim kemarau, buah-buahan sulit ditemukan. Sumber air bersih itu menjadi sedikit. Ancaman seriusnya adalah kebakaran. Itulah yang ditakutkan Ngamal.



Para perempuan rimba bersama-sama anak-anak berada dalam Sudong ketika melangun sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. (Foto: Dok KKI Warsi).

Sisa dana bantuan tentu dapat digunakan mencukupi kebutuhan selama melangun. Perpindahan dari satu hutan, ke hutan lain, untuk mencari sumber makanan yang cukup. Selain itu, agar lebih dekat dengan sumber air bersih.

“Bantuan ini mudah-mudahan cukup untuk makan. Habis itu buat melangun. Karena musim kemarau bisa terjadi kebakaran hutan,” sebut Ngamal.

Selanjutnya, Rudi Syaf dari Warsi menegaskan sebagian Orang Rimba berpikir menghadapi musim kemarau, yang kadang disertai dengan kebakaran lahan, kekeringan air dan kesulitan mencari makan.

Kemarau akan membuat Orang Rimba melangun. Tentu apabila belum habis untuk belanja makan. Dana bantuan juga akan digunakan Orang Rimba menghadapi kebakaran hutan. Musim kemarau yang panjang berpotensi membuat Orang Rimba kelaparan.

Pada kebakaran tahun 2015, sebanyak 11 Orang Rimba meninggal dunia karena kekurangan bahan makan dan terbatasnya sumber air bersih. Kebakaran dan kabut asap pada saat itu, membuat Orang Rimba melangun sampai ke Riau. Mereka menempuh jarak ratusan kilometer.

Rudi berharap bantuan kepada Orang Rimba dilanjutkan. Artinya tidak hanya tiga bulan. Sebab mereka tidak hanya melawan korona, melainkan menghadapi musim kemarau dan terancam kebakaran hutan.

Tidak hanya ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Jumlah penerima bantuan juga ditambah. Pemerintah daerah diminta menyisir Orang Rimba yang belum menerima bantuan. Warsi juga akan terus melakukan pendataan.

Orang Rimba Banyak Tak Tersentuh

La Ode mengakui jika masih banyak Orang Rimba yang berada

di Jambi yang tak tersentuh dan belum menerima bantuan. Sebab data pada 2017 lalu, jumlahnya di Jambi sebanyak 6.423 KK. Dari jumlah tersebut 4.326 KK sudah diberdayakan melalui program pemberdayaan. Sehingga tersisa 2.097 KK yang belum diberdayakan.

“Kita tetap membuka pintu. Kalau ada pihak yang ingin mengajukan lagi seperti Warsi, untuk Orang Rimba yang tidak punya NIK atau yang sudah tapi belum mendapatkan bantuan. Kita akan proses. Selama ada data BNBA lengkap,” kata La Ode menjelaskan.

Ia meyakini apabila dinas di daerah memiliki komitmen membantu Orang Rimba, tentu proses akan dipermudah. Dokumen kependudukan itu hak sipil, wajib dipenuhi pemerintah tanpa kecuali.

Kendati demikian, tidak boleh juga dobel, artinya validitas data tetap berjalan, bagi Orang Rimba yang telah menerima bantuan dari tempat lain, tentu tidak bisa diajukan lagi.

Ketika ditanya terkait jaminan penerima bantuan tidak dobel dalam satu KK atau fiktif, La Ode menegaskan kita harus saling percaya di masa pandemi ini. Selagi orangnya ada dan memang membutuhkan bantuan, maka kita harus kerja cepat.

Ia menyebutkan masih ada Orang Rimba yang belum mendapat bantuan, karena saat pendataan ada yang melangun atau tidak berada di kelompoknya. Untuk mengantisipasi itu, maka tetap dibutuhkan bantuan dari pihak lain.

Kucuran bantuan bukan hanya tanggung jawab Kemensos. Pemerintah daerah seharusnya yang paling mengerti Orang Rimba. Ketakutan pada aturan bukanlah alasan untuk ‘menghilangkan’ Orang Rimba dari pandangan mata. Mereka berada di sekitar kita. Kelompok rentan yang saban hari terancam kelaparan. Entah sampai kapan Yusnani dan cucunya bertahan dalam kesulitan mencari makan. Bertahan hidup tanpa ladang. Makan pucuk rotan dengan garam. (suwandi)

Liputan ini adalah hasil fellowship transparansi anggaran COVID-19 bersama AJI Indonesia dan UNESCO

<https://kumparan.com/jambikita/mengejar-bantuan-covid-19-untuk-orang-rimba-1txJka6o3ff>

Suwandi

ISOLASI MANDIRI ALA ORANG RIMBA

Konten ini diproduksi oleh Jambikita.id



Orang Rimba saat berkumpul di kantor lapangan KKI Warsi Jambi untuk menerima bantuan Covid 19 dari Kementerian Sosial. (Foto: KKI Warsi).

Jambikita.id - Paparan COVID-19 menghantam bumi sepucuk Jambi Sembilan lurah. Beberapa daerah mulai melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ledakan kasus membuat semua daerah waspada.

Data hingga Jumat, 7 Agustus 2020, jumlah zona hijau hanya dua daerah di Jambi, yakni Kabupaten Merangin dan Bungo. Sedangkan zona kuning yakni Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat serta Kota Jambi dan Sungaipenuh.

Jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 205 orang. Dari angka itu jumlah pasien sembuh sebanyak 117 orang dan kasus

meninggal dunia empat orang. Sementara orang yang dicurigai terpapar sekitar 2.915 orang.

Juru Bicara Satuan Tugas Provinsi Jambi, Johansyah menuturkan selama pandemi, pihaknya telah melakukan beragam tindakan pencegahan. Mulai dari penjagaan dan pemeriksaan orang yang masuk ke Jambi di perbatasan. Sampai dengan melakukan rapid test massal di semua daerah.

Beberapa bulan pemerintah menutup pelabuhan dan bandara. Lalu menutup tempat ibadah, sekolah, kampus, mall, tempat hiburan dan wisata bahkan pasar-pasar kecil ditutup. Pekerja kantor juga melakukan kerja dari rumah.

Tidak hanya itu, aktivitas yang melibatkan banyak orang, misalnya pesta pernikahan pun dilarang. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara daring atau online. Semua aktivitas perdagangan distop sementara.

Beberapa daerah, kata Johansyah memberlakukan jam malam. Selanjutnya meminta seluruh masyarakat memakai masker, ada aturannya, melanggar dendanya Rp50.000. Semua tempat yang berpotensi didatangi banyak orang, harus menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan handsanitizer.

Tempat umum seperti perumahan, perkantoran, rumah sakit, taman, bahkan jalanan disemprot dispektan. Bagi orang yang datang dari jauh diminta isolasi mandiri selama 14 hari.

Beragam cara dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Termasuk Orang Rimba memiliki cara unik dan telah teruji ratusan tahun dalam melawan wabah. Orang Rimba juga menerapkan karantina wilayah (besesandingan), sosial distancing (seselungon) dan isolasi mandiri (cemenggo).

Berdasarkan catatan sejarah, Orang Rimba paling berhasil mengendalikan penyebaran wabah. Saat menghadapi wabah cacar mereka dilarang pergi ke dataran rendah dan berada di sekitar orang asing.

Bila harus melakukan transaksi, mereka akan melakukan dengan barter bisu, melakukannya dari jarak jauh dan menghindari dataran rendah. Kebiasaan itu ampuh menghindarkan Orang Rimba dari epidemi cacar. Dalam seabad, tercatat hanya tiga kali Orang Rimba terserang wabah cacar, jauh lebih sedikit dibanding daerah lain.

Untuk menghindari virus korona, kata Antropolog KKI Warsi, Robert Ari Tonang Orang Rimba masuk jauh ke dalam hutan. Lalu menghindari pertemuan dengan orang asing.

Apabila orang tak dikenal hendak menemui mereka, harus menunggu selama tiga hari di sudong atau rumah sederhana yang terbuat dari atap dan lantai kayu. Jika dirasa aman, barulah mereka bertemu.

Saat bertemu, kata Robert Orang Rimba juga menjaga jarak bicara sampai 10 meter. Istilahnya seselungan. Bahkan yang menarik adalah saat ada yang terdeteksi sakit. Maka langsung dibuatkan sudong di hutan yang jarang dilewati Orang Rimba.



Anak-anak rimba saat berada di kebun ubi, selama menjalani tradisi Besasandigon mereka hanya makan rebusan ubi untuk mencukupi kebutuhan pangan. (Foto: KKI Warsi).

Pengasingan bagi Orang Rimba yang sakit ini dinamakan cemenggo. Keluarga yang mau memberi makan dan obat-obatan yang sakit, juga menaruh makanan jauh dari kawasan sudong. "Mereka begitu berhati-hati dalam berhadapan dengan wabah," kata Robert.

Menurut catatan, Orang Rimba sudah terbiasa menghadapi wabah. Mulai dari cacar sampai dengan batuk bahkan demam berdarah. Perlakukan kepada yang sakit sama, semua diasingkan. Wabah diare terjadi 1990-an sempat merenggut belasan nyawa di Orang Rimba.

Ngelembo hidup di sepanjang aliran sungai Terap. Dia memboyong keluarganya masuk ke hutan, saat mendengar kabar wabah korona menyebar. Tradisi besesandingan pun diberlakukan.

Besesandingan ini memang mencegah penularan penyakit meluas pada kami, kata Ngelembo. Bentuk dari menjaga jarak dengan membuat sudong yang jaraknya ratusan meter. Aturan dalam membuat sudong juga harus dekat dengan air, dengan tanaman obat, tanah yang bedewo dan jauh tempat lalu lalang.

Setelah menjaga jarak, pengasingan atau isolasi mandiri kami sebut cemenggo, kata Ngelembo harus dilakukan segera dan mendesak jika ada anggota keluarga yang sakit. Semua Orang Rimba sudah paham, titik-titik sudong yang digunakan untuk cemenggo.

Pernah setelah seminggu, mungkin karena kurang makan, anak Ngelembo demam. Dia pun panik bukan kepalang dan segera membangun sudong khusus untuk anaknya yang sakit. Jarak sudong dari tempat Ngelembo, dibatasi pematang dan sungai.

Semenjak kejadian anak yang demam, semua anggota keluarga Ngelembo tinggal terpisah-pisah. Jaraknya hampir seratus meter setiap sudong. Ketika berbicara jarak antara mereka pun jauh. Jadi harus setengah berteriak.

“Kalau mau kasih makan, ditaruh saja makanan dekat dengan Sudong. Nanti biar dia ambil sendiri. Jadi tidak bertemu atau saling memegang,” kata Ngelembo.

Melihat keadaan anaknya sedikit parah, maka Ngelembo dan keluarganya pergi jauh. Anaknya ditinggalkan sendirian di sudong. Kendati demikian, dalam perjalanan meninggalkan anaknya, Ngelembo tetap meninggalkan jejak, dengan mematahkan kayu setiap perjalanan. Apabila anaknya sembuh, bisa menyusul.

Ngelembo sempat khawatir, sudah lewat sehari, anak Ngelembo belum juga menyusul. Terbitlah pikiran kalau anaknya sudah meninggal dunia. Namun kala mentari sudah masuk dalam peraduan, dia bernafas lega, anaknya datang dengan badan yang sehat.

Tidak hanya mengandalkan besesandingan. Ngelembo juga berharap pada obat ramuan, dia mengonsumsi ramuan obat agar tubuhnya kuat, tidak mudah sakit. Selanjutnya, untuk mendoakan ramuan obat itu dibutuhkan perempuan yang sehat.

Bagi Orang Rimba perempuan dilindungi dewa atau *dewo*, medium pengobatan dan penurun adat-adat kepada anak-anak. Sebagai perantara dewa, perempuan yang memimpin bebale dikenal dengan sebutan Malim. Ritual pengobatan dilakukan Orang Rimba, apabila ada yang sakit. Dalam ritual ini, si sakit akan diobati oleh *dewo*.

Sistem pengobatan Orang Rimba dalam menghadapi wabah adalah Besesandingan dilakukan untuk mencegah penularan lebih luas pada komunitas Orang Rimba.

Selanjutnya ramuan obat digunakan, untuk mengobati orang yang sudah terkena, lalu perempuan rimba yang dianggap perantara Dewo, bertugas untuk merawat dan mengobati Orang Rimba yang kena penyakit. (suwandi)

Liputan ini adalah hasil fellowship transparansi anggaran COVID-19 bersama AJI Indonesia dan UNESCO

<https://m.kumparan.com/jambikita/isolasi-mandiri-ala-orang-rimba-1txdS8FQN7t/full>

Rosniawanti Fikri

RISIKO DAPUR DAN ANCAMAN PANDEMI: SUARA PEKERJA PEREMPUAN DARI KOTA LULO

17:23 Wita, 26 September 2020



Ilustrasi.

Enam bulan sudah wabah SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 menyebar di Indonesia. Bermula hanya menyangkut persoalan kesehatan, Covid-19 akhirnya berdampak luas dan memukul banyak sektor.

Sektor yang juga ikut terpukul adalah tenaga kerja formal dan informal. Lalu bagaimana gambaran risiko para pekerja perempuan di Sultra selama pagebluk?

Matahari pagi belum meninggi, tatkala Amalia Astrid Regina, berangkat dari rumahnya di BTN Tawang Alun, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) ke tempat kerjanya di hotel Zenith Kendari. Butuh waktu sekitar 25 menit dari rumah Amel ke hotel Zenith yang berada di bilangan Kecamatan Korumba Kota Kendari.

Sebelum berangkat Amel memeriksa isi tasnya.

“Masker, hand sanitizer, tisu basah, oke komplet,” ujarnya meyakinkan bahwa barang-barang penting yang ia butuhkan terbawa.

Tak lupa, Amel membawa cardigan lengan panjang berpotongan casual. Melengkapi bekalnya pagi itu. Ya, pengecekan itu menjadi rutinitas saban pagi, yang dilakukan Amel sebagai bagian dari alat pelindung diri saat bekerja di tengah wabah pandemi saat ini.

Amel, begitu ia kerap disapa, bekerja sebagai marketing di hotel Zenith Kendari, melakukan penawaran kerjasama dan promosi kepada klien.

Perempuan 29 tahun itu bercerita, awal corona dia bersama rekan-rekannya dirumahkan. Menurut Amel, perusahaan terpaksa merumahkan karyawan gegara merosotnya okupansi hotel akibat wabah corona.

Dia bersama puluhan rekan-rekannya dirumahkan selama tiga bulan. Barulah pada Juli lalu dia kembali bekerja. Meski di tengah wabah pandemi, aktivitas Amel nyaris tak ada yang berubah. Kecuali satu hal, ia mesti beradaptasi dengan kebiasaan baru. Adaptasi pada protokol kesehatan Covid-19. Memakai masker, mencuci tangan, sampai menjaga jarak dengan orang lain saat ia beraktivitas di tempat umum.

Meski sudah kembali bekerja namun ia tak bekerja full time. Hotel memberlakukan kebijakan sistem kerja bergilir bagi karyawan.

“Sistemnya dibagi, pegawai digilir, sebagian dirumahkan sebagian lagi bekerja. Sistem upahnya pun tidak penuh, sesuai dengan hari kita bekerja,” terang Amel saat dihubungi medio Agustus lalu.

Ada tantangan tersendiri saat bekerja di masa pandemi ini katanya. Kekhawatiran yang paling besar adalah resiko tertular virus yang pertama kali menyebar dari Wuhan ini. Kondisi turun ke lapangan bertemu dengan orang yang berbeda setiap hari membuatnya dilematis. Jika tak bekerja ia tak mendapat upah, sementara jika bekerja ia beresiko terpapar corona. Tapi katanya ia tak punya banyak pilihan.

Alasan utama tentu karena itu menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi. Amel sudah menikah dan suaminya juga bekerja namun, pendapatan dari keduanya tak cukup karena Amel juga menanggung orang tua dan adik-adiknya yang tinggal bersama. Selain itu di masa pandemi ini Amel hanya menerima setengah dari upah, hal itu imbas dari adanya pembatasan hari kerja.

“Ndak bekerja tidak makan, kembali bekerja juga ada resiko terpapar corona. Ndak ada pilihan. Serba salah kalau nda keluar nda dapat tamu kalau nda dapat tamu yah nda dapat gaji,” jelas Amel yang mengaku bekerja sebagai marketing hotel sejak 2016. Cerita yang sama dialami Wardani (23), yang bekerja sebagai karyawan di Bank Sultra. Tahun 2020 ini adalah tahun kedua ia bekerja di bank plat merah Pemprov Sultra. Ia mengaku sejak awal pandemi hingga saat ini tetap harus hadir secara fisik di kantor.

Sehari-harinya perempuan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo (UHO) itu bertugas sebagai teller. Kontak fisik dengan nasabah yang berbeda setiap harinya tak terhindarkan karena tugasnya sebagai pekerja frontliner melayani penarikan, transfer,

hingga penyeteroran nasabah.

Menurut Wardani aktivitas yang ia lakoni inilah yang membuatnya sangat khawatir akan terpapar virus, meski petugas telah memastikan semua prosedur sesuai dengan protokol pencegahan dan penanggulangan pandemi ini.

“Pekerjaan kami juga beresiko tertular, lah buktinya saja ada bank-bank yang tutup karena ada pegawainya positif corona. Virus ini tidak kasat mata, saya berfikiran negatif jangan sampai saya tertular virus ini karena virus ini tidak kasat mata penyebarannya,” terang Wardani saat diwawancarai pertengahan Agustus lalu.

Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra Eko Dwi Sasono mengatakan pandemi Covid-19 memukul segala sektor termasuk pada industri perhotelan dan restoran. Hanya sepekan setelah adanya kasus positif Covid-19 di Kendari diumumkan, seketika itu juga hotel yang beroperasi tutup. Dari sekitar 300 hotel yang ada, 90 persennya terpaksa tutup.

Bahkan kata Eko yang juga mengelola hotel di bilangan Tipulu, terpaksa menutup dan memberhentikan karyawannya lantaran corona. Padahal usaha hotelnya itu sudah ia rintis selama 15 tahun.

“Covid-19 otomatis menghancurkan sektor jasa ini. Di awal, beruntung kalau okupansi sampai 10 persen. Sejak Juli, okupansi sampai saat ini hanya 40 persen saja okupansi hotel. Selama 6 bulan corona, menihilkan tamu atau pun hajatan baik yang digelar pemerintah atau warga” jelas Eko menceritakan dampak pandemi Covid-19 saat ditemui beberapa waktu lalu.

Alasan lain seperti penyewaan ruang atau pertemuan kerja atau meeting, incentives, conferencing and exhibition (MICE) juga merosot seiring imbaun pemerintah yang meniadakan pertemuan atau kegiatan tatap muka. Di Sultra secara keseluruhan menurut Eko industri ini bergantung 70 persen pada pemerintah. Hal itu lantas berimbas pada kebijakan merumahkan karyawan bahkan

yang paling miris pengusaha sampai harus mem-PHK.

Kepala Bidang Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra Muhammad Amir Taslim mengatakan sampai saat ini sudah ada 2.351 pekerja atau buruh dari 86 perusahaan yang tersebar di 17 kabupaten/kota yang dirumahkan. Dari jumlah itu, 97 pekerja yang terkena PHK.

Sayangnya menurut Amir Taslim, dari jumlah itu tidak diketahui berapa jumlah perempuan yang harus dirumahkan atau di-PHK. Namun menurutnya jika pekerja pria masih lebih dominan bekerja di sektor formal ini.

Meski begitu untuk kebijakan para pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK, menurut Amir pemerintah provinsi Sultra memberikan stimulan berupa bantuan non tunai dalam bentuk bantuan bahan pangan. Itu dilakukan selama 3 bulan. Berlaku pada Mei hingga Juli lalu. program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah setempat untuk mempertahankan kondisi ekonomi pekerja yang dirumahkan.

Program lain yang juga diluncurkan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat untuk mendukung pekerja yang dirumahkan akibat corona yakni pemberian kartu pra kerja. Di Sultra sendiri sejak awal diluncurkan sampai saat ini sudah ada 48 ribu pekerja yang mendapatkannya.

Di samping itu juga melalui Kementerian Tenaga Kerja memberikan subsidi upah terhadap pekerja di sektor formal yang kepesertaannya terdaftar di BPJS sampai 30 Juni 2020. Data yang ada perusahaan yang terdaftar 79 ribu perusahaan dengan total pekerja kurang lebih 91 ribu telah teralokasi kurang lebih 5000 pekerja yang sudah menerima bantuan subsidi. Besarannya 600 ribu per orang terhitung sejak September sampai Desember 2020.

“Masih ada perusahaan yang setiap pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di BPJS untuk mendapatkan perlindungan sehingga

saat terjadi resiko negara hadir," jelas Amir saat dikonfirmasi.

Perlindungan di Masa Pandemi

Aliansi Perempuan (Alpen) Sulawesi Tenggara, sebuah organisasi non profit yang berbasis di Kendari yang berfokus pada kampanye perlindungan hak-hak dan penghapusan diskriminasi serta eksploitasi perempuan, menjelaskan sejumlah kelompok perempuan beresiko terpapar corona. Mereka adalah tenaga kesehatan dan medis. Mereka berada di garda terdepan meresikokan diri terpapar corona.

Kelompok lain yang juga rentan terpapar adalah perempuan pekerja di lapis pelayanan langsung seperti kasir, resepsionis, layanan pelanggan (customer service) dan pemasaran (marketing) merupakan kelompok yang rentan terpapar corona. Direktur Alpen Sultra Midha Karim menjelaskan, di masa pandemi ini, perempuan pekerja baik yang bekerja di sektor formal ataupun informal selainya mendapatkan perlindungan. Perempuan di masa pandemik perlu dilindungi bukan hanya dari sisi kebijakan tapi juga perlindungan mengenai penyebaran covid. Selain itu mereka juga perlu mendapat insentif dari program-program yang diluncurkan pemerintah.

Kebijakan merumahkan pekerja yang disertai dengan pembayaran sebagian atau bahkan tanpa upah akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan pekerja. Bagi perempuan pekerja harian, kebijakan ini berarti kehilangan penghasilan karena ia dianggap tidak masuk kerja.

"Covid-19 bukan menjadi alasan untuk merumahkan karyawan tanpa upah, atau pemangkasan upah dibawah standar minimum. Pandemi kini dijadikan alasan untuk perusahaan mengeluarkan kebijakan yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan undang-undang tenaga kerja," jelas Midha yang dihubungi beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Midha mengatakan di tengah pandemi ini ia juga mencemaskan beban dan tekanan berlebihan yang dihadapi

perempuan pekerja. Jika perempuan pekerja seorang ibu rumah tangga (IRT) selain harus bekerja, ia juga harus bertanggung jawab untuk urusan domestik keluarga. Ia harus mengurus suami, mengurus anak, membersihkan rumah bahkan menjadi guru mendampingi anak saat belajar di rumah.

“Dan pekerjaan itu akan semakin berat ketika semua anggota keluarga berada di rumah. Beban ini menurut Midha bisa memicu tingkat stress dan mengganggu kesehatan mental perempuan,” terangnya lebih lanjut.

Siapa Lebih Sadar Bahaya Pandemi?

Di luar persoalan yang mendera perempuan terkait pandemi. Perempuan memiliki peran besar untuk mengoptimalkan perilaku adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan anjuran protocol kesehatan agar dapat memutus mata rantai SARS-CoV-2 penyebab Covid-19

Hal ini mengacu pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional yang menyebut jika perempuan lebih patuh pada penerapan protokol kesehatan dibanding laki-laki.

Menurut Midha Survei yang dilakukan terhadap parameter standar protokol kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker) menunjukkan perempuan lebih disiplin dan patuh. Sehingga dengan itu perempuan memiliki peran signifikan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pada kebiasaan menjaga jarak, kepatuhan perempuan mencapai 77 persen sedangkan laki-laki hanya 67 persen. Pada aspek mencuci tangan tingkat kepatuhan perempuan mencapai 85 persen, sedangkan laki-laki 76 persen saja. Lalu pada aspek penggunaan masker kepatuhan perempuan juga cukup tinggi mencapai 89 persen, sementara pria hanya 77 persen.

“Saya cenderung melihat perempuan lebih disiplin dibanding pria ini menjadi kekuatan oleh pemerintah untuk sosialisasi kepada perempuan. Perempuan kembali melakukan edukasi

di lingkungan terkecil pada keluarga, kawan juga pasangan, sehingga mata rantai penyebaran Corona dapat dipersempit” ujar Midha.

Reporter: Rosniawanti Fikri

<https://zonasultra.com/risiko-dapur-dan-ancaman-pandemi-suara-pekerja-perempuan-dari-kota-lulo.html>

Ignatius Dwiyana

LAHIR BATIN BERGULAT SAAT PANDEMI

Kamis, 03 September 2020



Ilustrasi (Sumber: Charlie Fischer - labourlist.org).

SATUHARAPAN.COM - Hampir enam tahun lamanya Agus bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Statusnya kontrak.

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, tidak saja sektor kesehatan, sektor ekonomi pun terdampak. Perusahaan tempat Agus bekerja tidak luput dari dampak pandemi Covid-19.

Perusahaan itu kemudian memutuskan melakukan penghematan. Hal ini berdampak pada para pekerjanya. Ada

yang dimutasi, dirumahkan, hingga di-PHK. Agus sendiri diputuskan perusahaan untuk dirumahkan.

Dengan alasan perusahaan tidak sanggup membayar upah ke pekerjanya akhirnya Agus diberi keputusan untuk dirumahkan pada awal April dengan upah dibayarkan sebesar 50 persen.

“Upah sebesar itu sangat terasa sekali bagi kami para pekerja. Terutama saya yang dirumahkan. Belum tahu yang di-PHK. Apalagi di saat pandemi seperti ini, untuk mencari lowongan pekerjaan itu juga susah,” keluh Agus.

Agus sendiri sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak berumur tujuh tahun. Dia pun mengetatkan pengeluaran. Kondisi ini makin berat karena selama dirumahkan oleh perusahaan, dia tak sanggup bayar kontrakan rumah tempat dia tinggal.

“Ada saudara mau meminjamkan uang untuk kehidupan kami sehari-hari. Apalagi kami ngontrak rumah. Selama dirumahkan, sudah ngutang belum bayar kontrakan rumah sama sekali,” jelas Agus.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi kelas pekerja. Hal ini dibenarkan Ketua Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih.

Para pekerja ini rata-rata merupakan pencari nafkah utama. Ketika pandemi terjadi mengakibatkan nasib mereka tidak menentu.

“Tidak ada kesiapan dan tidak menduga sama sekali kalau akan terjadi pandemi Covid-19,” kata Jumisih.

Lembaga penelitian perburuhan Sedane menemukan sejumlah dampak yang dialami para pekerja dalam pantauannya di sejumlah titik-titik kawasan industri. Seperti di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

“Pandemi Covid-19 itu memperparah situasi. Membuat legitimasi PHK semakin kuat. Untuk tahun ini situasinya makin parah. Karena angkanya sangat besar, dua kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Syarif Arifin.

Dampak pandemi bagi kelas pekerja juga ditampilkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya yang menyebutkan sekitar 29 juta warga Indonesia mengalami PHK pada masa pandemi Covid-19. Angka yang sama juga dikatakan Kadin Indonesia.

Sementara Bank Dunia menyebutkan 45 persen penduduk Indonesia atau 115 juta orang berpotensi miskin. Ahli ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa jumlah penduduk itu adalah golongan yang mudah terancam jatuh miskin akibat pandemi Covid-19. Seperti dilansir dari Kontan.co.id (4/5).

Situasi Kelas Pekerja

Bagaimana situasi kelas pekerja saat pandemi Covid-19 terjadi? Saat pandemi terjadi, situasi para pekerja ada yang mengalami dirumahkan, PHK tanpa kompensasi, dan PHK dengan kompensasi. Selain ada juga pekerja yang tetap bekerja normal. Hal ini disampaikan Syarif Arifin dari lembaga penelitian perburuhan Sedane.

Para pekerja ini rata-rata pencari nafkah utama. Selain itu juga memiliki tanggungan ekonomi tidak saja ke dirinya. Walau berstatus lajang sekali pun tetapi memiliki tanggungan di keluarganya. Biasanya orang tua atau saudara. Ketua Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih juga menyebutkan situasi pandemi berdampak ke hal lainnya.

Para pekerja yang merupakan pendatang di titik-titik kawasan industri membutuhkan tempat tinggal. Biasanya mereka ngekos. Tetapi biaya kos ini semakin tidak sanggup dijangkau.

Lalu para pekerja yang masih lajang melakukan hal ini. “Karena tidak sanggup bayar kos jadi mengumpul bersama-sama. Empat orang tinggal dalam satu kamar.”

Para pekerja yang sudah berkeluarga juga mengalami persoalan kesejahteraan lain. Seperti soal asupan gizi.

Sementara yang sudah memiliki anak yang harus bersekolah memiliki pengeluaran tambahan untuk pendidikan di saat pandemi. Seperti program belajar di rumah yang menambah pengeluaran untuk listrik dan internet. Dalam catatan Sedane, hampir rata-rata pekerja harus menambah pengeluarannya. Yang tadinya di bulan-bulan sebelumnya tidak ada.

Para pekerja di satu sisi berupaya melakukan penghematan tetapi rentan berhutang. Karena ada pengeluaran-pengeluaran tambahan yang terjadi.

“Hutangnya bisa ke temannya, ke pekerja lain, atau ke rentenir. Yang paling buruk berhutang ke rentenir,” terang Jumisih.

Sementara para pekerja yang di-PHK mencoba bertahan dengan berpindah tempat kerja.

“Dari pabrik masuk ke konveksi. Tetapi di konveksi juga tidak bertahan lama karena pekerjaan di konveksi menurun. Karena itu ada yang menjadi pedagang. Berjualan di pasar. Jualan apa saja,” lanjut Jumisih.

Selain Produksi, Surveilans Kesehatan Juga Dibutuhkan

Kondisi yang diakibatkan pandemi Covid-19 mengubah pola perilaku manusia. Warga pun diminta Presiden Jokowi untuk lebih banyak beraktivitas dari rumah. Seperti dalam hal bekerja, belajar, maupun beribadah. Seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (15/3).

Tidak lama setelah itu Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat di akhir Maret melalui

kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”. Ini mengatur pembatasan kegiatan pada sekolah, tempat kerja, dan keagamaan, juga mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

PSBB bila dipandang dari sisi epidemiologis dapat mengendalikan kasus Covid-19 dengan cepat. Menurut ahli epidemiologi Laura Navila Yamani.

Tetapi masalah nyatanya, tidak dalam semua situasi para pekerja bisa bekerja dari rumah. Para pekerja ada yang tetap masuk ke tempat kerjanya karena alat-alat produksi mereka berada di pabrik.

Di sisi lain, para pekerja yang masih survive di tempat kerjanya menghadapi persoalan protokol kesehatan yang terasa kurang. Padahal protokol ini sudah dirumuskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam Surat Edaran tentang “Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja”.

Persoalan penerapan protokol yang masih dirasa kurang ini disampaikan Ketua Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih. Hal ini senada dengan Syarif Arifin dari lembaga penelitian perburuhan Sedane.

Tempat kerja di saat pandemi dinilai ahli epidemiologi Laura Navila Yamani membutuhkan pengelolaan tersendiri. Selain berorientasi produksi, perusahaan perlu memikirkan surveilans kesehatan.

Surveilans dilakukan perusahaan dengan mendata kesehatan para pekerjanya secara kesinambungan. Hal ini jauh lebih mudah dibandingkan jika memantau orang di luar tempat kerja. Laura Navila Yamani menguraikan pendataan kesehatan ini.

“Apakah pekerja itu ada gejala? Jangan sampai dia tetap merasa harus masuk sehingga tidak jujur ketika mengalami gejala-gejala Covid-19. Atau dia habis melakukan perjalanan dari daerah-

daerah zona merah. Atau sudah ada keluarga yang positif atau terkonfirmasi positif. Sebetulnya itu bisa dilacak. Jadi manajemen surveilans kesehatan di perusahaan harus jalan. Artinya data pekerja itu jelas. History mereka bisa dikonfirmasi.” Kata Laura.

Oleh karena itu ahli epidemiologi ini juga menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jika hal itu tidak dilakukan lalu ditemukan kasus Covid-19 maka akan membahayakan para pekerja lain dan justru dapat merugikan perusahaan.

“Misalkan ada kasus positif di perusahaan atau justru kematian karena Covid-19 itu bisa memunculkan lockdown. Akhirnya merugikan semuanya,” ujarnya.

Pada pertengahan Mei lalu muncul wacana berkompromi atau hidup berdampingan dengan Covid-19 di tengah isu pelanggaran PSBB. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perubahan hidup dalam mengatasi risiko wabah ini sebagai new normal.

Tempat ibadah, aktivitas ekonomi, dan sekolah kemudian dibuka kembali dengan tahapan ketat. Di sisi lain, untuk pengurangan risiko dan dampak pandemi Covid-19 di tempat kerja maka keluar Keputusan Menteri Kesehatan tentang “Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.”

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Nasional juga mengeluarkan Surat Edaran tentang “Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)” tertanggal 14 Juni 2020.

Tujuan “New Normal” itu sendiri agar masyarakat tetap produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi. Selanjutnya “New Normal” yang diinternalisasi warga ini menjadi “Adaptasi

Kebiasaan Baru". Maksud "Adaptasi Kebiasaan Baru" adalah agar dapat bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi Covid-19. Demikian dilansir dari situs Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (19/6).

Seiring dengan kembalinya aktivitas di tempat kerja di era new normal maka tempat kerja menjadi salah satu klaster baru penyebaran Covid-19. Seperti dilansir dari Tribunnews.com (27/6).

Terkait klaster tempat kerja, Laura mengingatkan, situasi new normal atau adaptasi kebiasaan baru jangan sampai membuat warga lengah. Karena resiko penularan Covid-19 sebenarnya masih terjadi. Apalagi riset terbaru Covid-19 menyebutkan bahwa virus ini bisa menular melalui udara.

"Resiko penularan akan lebih masif ketika beraktivitas di ruangan-ruangan tertutup. Apalagi ketika sirkulasi udaranya jelek. Kemudian sanitasinya juga jelek," terang Laura.

Dapat Menghantam Psikologis

Situasi akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi hampir semua sendi kehidupan. Masalah di sektor ekonomi terkena imbas pandemi juga tidak akan menghentikan kebutuhan manusia. Malah ini dapat berdampak ke psikologis.

"Insting manusia adalah melanjutkan hidup sehingga dia akan melakukan hal-hal yang mendukungnya supaya tetap hidup," terang Pengajar Psikologi Universitas Pancasila Aully Grashinta. Selain faktor penghasilan yang semakin terbatas, orang pun dihadapkan pada situasi berbeda saat pandemi Covid-19. Hal ini juga dapat memicu tekanan psikologis yang lebih luas.

Sebelumnya orang biasa beraktivitas lebih banyak di luar rumah. Lalu karena pandemi tiba-tiba harus lebih banyak berdiam di rumah. Konflik di dalam rumah tangga juga dapat muncul.

Kondisi akibat pandemi dinilai Aully Grashinta itu berat dan krisis. "Kondisi ini dapat menyebabkan cemas, stress, hingga depresi. Bahkan dapat memunculkan simptom-simptom psikosomatis."

Kondisi psikologis ini juga akan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Karena itu perlu "daya lenting di saat krisis seperti ini. Orang dengan daya lenting yang baik akan berupaya mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya."

Situasi inilah yang sedang dihadapi kelas pekerja. Kelas pekerja lahir batin bergulat di tengah pandemi. Situasi mereka ibarat kapas terbang.

"Berterbangan ke sana kemari supaya dapat bertahan hidup demi dirinya dan keluarganya," pungkas Jumisih. ***

Editor : Sabar Subekti

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lahir-batin-bergulat-saat-pandemi>

Yulia Savitri

TRAUMA ASAP KARHUTLA DI MASA PANDEMI COVID-19

Redaksi - Minggu, 9 Agustus 2020 pukul 17.05



Ita warga Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. (sumber: wongkito/yuliasavitri).

PALEMBANG - Ita Septiana (28), warga Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sedang merapikan foto-foto keluarga saat disambangi di rumahnya, Senin 27 Juli 2020.

Ia dan suami, Ngadirun (35) baru pindah dari Dusun II ke Dusun III Desa Talang Buluh satu bulan terakhir. Rumah barunya

pun tampak setengah jadi. Masih ada adukan semen dan pasir untuk membangun pondasi bagian depan rumah. Rumah itu dikelilingi kebun karet. Lokasinya cukup jauh dari jalan utama ataupun kantor desa, terlihat hanya ada empat rumah tetangga.

Diakui Ita, mereka pindah tempat tinggal agar bisa melupakan trauma masa lalu. Pasangan muda ini telah kehilangan dua anak. Keduanya meninggal dunia diduga terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). “Kakaknya (putra pertama) yang berpulang lebih dulu,” ujarnya.

Ita menunjukkan foto dua buah hatinya. Salah satunya yakni Elsa Fitaloka, bayi empat bulan yang meninggal dunia pada 15 September 2019 lalu. Kala itu, Elsa sempat dibawa ke IGD Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang. Karena kondisinya semakin memburuk, lalu diarahkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Mohammad Hosein (RSMH) Palembang.

Belum sempat dirujuk, Elsa sudah menghembuskan nafas terakhirnya pukul 18.30 wib. Ia dimakamkan di TPU Desa pada Senin pagi dan pihak RS mengeluarkan diagnosa pada Senin sore. Dari pemeriksaan medis diketahui kondisinya mengalami pneumonia dan meningitis.

Sedih dirasakan pasangan ini mengingat tiga tahun sebelum kematian Elsa, putra pertama mereka, Jaru (4) meninggal dunia dengan penyakit yang sama. “Hanya foto-foto ini kenangan bersama anak-anak,” kata Ita, “Semua foto dirapikan sekarang karena baru ada uang untuk beli album foto,” tuturnya.

Kematian Elsa di Bulan September 2019 bertepatan dengan musim kemarau. Saat itu, kualitas udara wilayah setempat kurang baik lantaran asap karhutla. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tercatat, jumlah kasus ISPA untuk bulan September 2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan bulan lainnya di tahun itu, yakni sebanyak 59.784 kasus. Sama halnya dengan kasus pneumonia, pada September 2019 menjadi yang tertinggi dengan 2.047 kasus.

Untuk tahun 2020, berdasarkan pemantauan perkembangan cuaca yang dilakukan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) hingga tanggal 20 Juli 2020, diketahui Provinsi Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau.

Menjadi kekhawatiran sejumlah kalangan apabila bencana asap karhutla kembali terjadi di kemarau tahun 2020. Terutama atas meningkatnya kerentanan dan risiko penularan penyakit Covid-19 yang sedang mewabah. Berbagai diskusi dalam jaringan (daring) pun digelar membahas tentang ancaman bencana asap di saat pandemi Covid-19.

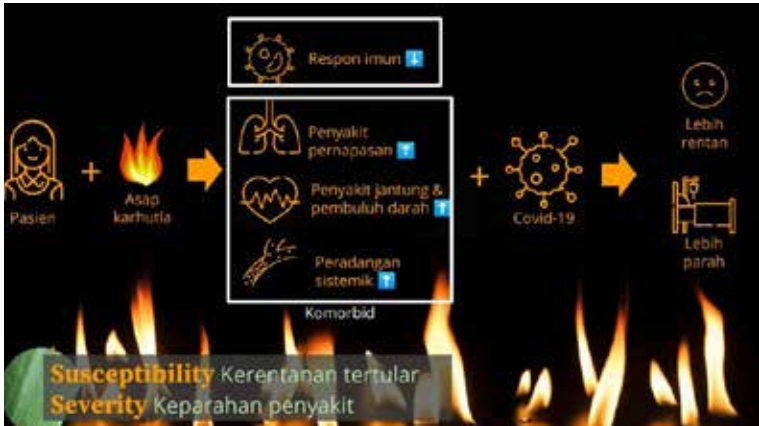
Dalam salah satu diskusi daring pada Selasa 28 Juli 2020, Senior Public Health Adviser Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), Monica Nirmala mengulas, masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dan terpapar asap karhutla di saat bersamaan akan merasakan dampak yang lebih parah terhadap kesehatan.

Serangan ganda itu bisa terjadi karena asap karhutla membuat sistem daya tahan tubuh melemah. Padahal, faktor imun penting dalam menghadapi penyakit yang belum ada vaksin dan obatnya tersebut. Akibatnya risiko tertular, kesakitan, sampai kematian akibat penyakit pernafasan, jantung, serta pembuluh darah berpotensi lebih besar.

“Lebih dari itu, bencana asap meningkatkan penyebaran virus lebih cepat. Sebab, asap mendorong warga untuk mengungsi di satu ruang tertutup bersama-sama. Sementara di situasi Covid-19, semua orang harus menjaga jarak guna mengurangi penularan virus,” ungkap Monica.

Disinggung rekomendasi untuk pemerintah dari sektor kesehatan, peraih gelar Master of Public Health dari Universitas Harvard ini justru mengingatkan yang terpenting adalah pencegahan karhutla berapa pun harganya. Menurutnya, sangat bagus apabila pemerintah dapat menjadikan adaptasi normal baru menjadi *better normal* (normal yang lebih baik) dengan kondisi Indonesia tanpa asap.

Pemerintah Daerah juga harus sediakan rumah singgah dengan penyejuk ruangan di kawasan rawan karhutla dan jauh dari fasilitas kesehatan. Hanya saja penerapan protokol kesehatan Covid-19 tetap harus disiapkan, misalnya dengan menyediakan tempat cuci tangan lebih banyak ataupun satu ruangan untuk satu keluarga.



“Tidak harus menimbun masker N95, meski memang hanya masker medis atau jenis N95 yang bisa menyaring dengan baik udara ketika bencana asap terjadi. Tapi masyarakat tetap harus diedukasi menggunakan masker di saat Covid-19,” katanya saat menjawab pertanyaan dalam forum.

Asap Karhutla dan Covid-19 Memperberat Penyakit Pernafasan Dibincangi di luar area rumah sakit, Dokter Spesialis Penyakit Dalam selaku Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) RSMH Palembang, Zen Ahmad mengatakan, kematian pasien anak pada kasus keluarga Ita dan Ngadirun tidak bisa sepenuhnya karena kabut asap. Tapi, bisa dikatakan asap memicu penyakit pneumonia yang dideritanya semakin berat.

Sumber oksigen yang dibutuhkan tubuh berkurang karena udara tercemar asap. Partikel kecil dari kandungan asap yang masuk ke paru-paru melalui saluran nafas juga dapat menyebabkan iritasi. Apalagi sistem imun anak-anak belum kuat dibandingkan orang

dewasa yang membuatnya lebih rentan.

“Bayi yang meninggal itu sudah ada penyakit pneumonia dan penyakit komorbid lain, tapi paparan asap memperberat kondisinya. Kalau tak ada asap, bisa jadi pneumonia yang dideritanya sembuh,” ulas Zen.

Begitu juga ketika dihadapkan pada virus penyebab Covid-19. Menurutnya, Covid-19 dan asap karhutla sama-sama berisiko bagi penderita penyakit saluran pernafasan. Virus bisa masuk ke saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, paru-paru, bahkan sampai ke jantung dan pembuluh darah.

“Virus SARS-Cov-2 sebagai benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan dapat menimbulkan keluhan yang lebih berat. Ketika asap datang bersamaan virus ini, bisa dibayangkan risiko besarnya. Kondisi mereka yang rentan jelas akan memburuk,” terangnya.

RSMH Palembang sebagai rumah sakit rujukan utama penanganan pasien Covid-19 fokus pada pasien pneumonia berat. Pada awal kasus positif Covid-19 bulan Februari 2020, RSMH hanya siap dengan lima tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi. Saat ini sudah ada 160 tempat tidur yang hampir semua terisi. Diakui Zen, terjadi peningkatan pasien pneumonia pada masa pandemi. Terlihat juga dari aktifnya dokter mengambil rontgen untuk kasus apapun guna ketajaman diagnosa penyakit dalam.

Di kesempatan yang berbeda, Pakar Mikrobiologi Sumsel dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Yuwono memandang hal yang sama. Menurutnya asap karhutla dapat memperberat penderita penyakit pernafasan. Meski tidak mengandung partikel biologi dan ukurannya lebih besar dari droplet, tapi asap dari karhutla dapat lebih cepat mengendap di paru-paru dan menyebabkan penyakit seperti asbestosis.

“Asap memberatkan penyakit pernafasan. Apabila ada yang terinfeksi Covid-19 tentu semakin berisiko keadaannya,” kata dia.

Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang ini mengingatkan, terkait hal tersebut masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Justru pemerintah yang punya kewajiban melindungi masyarakat patut memperhitungkan prediksi risiko terhadap warga yang rentan.

Diketahui, Sumatera Selatan termasuk tujuh provinsi yang mengalami karhutla berulang sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Enam provinsi lainnya yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Seperti disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam rakorsus karhutla di Jakarta pada 2 Juli 2020.

Berdasarkan data TERRA/AQUA, total hotspot atau titik panas di Sumatera Selatan pada 2019 tercatat sebanyak 3.872 titik. Luasan yang terbakar saat itu yakni 136.875 hektar lahan gambut dan 32.549 hektar lahan mineral pada laporan Sipongi.

Seperti tidak belajar dari kejadian karhutla tahun 2015, dengan titik panas dan luasan terbakar lebih besar, serta asapnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat, angka tahun 2019 tersebut menunjukkan tren kenaikan dibanding data tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut.

Adapun rincian pada tahun 2015 yakni sebanyak 13.628 titik panas dengan luasan 646.298 hektar lahan di provinsi ini. Dari sana, atensi pemerintah mulai terkonsentrasi pada persoalan karhutla, mengingat sebagian besar lahan terbakar merupakan lahan gambut. Pada 2016, titik panas dan kejadian karhutla pun berkurang signifikan. Tapi karhutla tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sampai akhirnya di tahun 2019 kembali jumlah titik panas dan kejadian karhutla melonjak.

“Sekarang kondisi mulai kering, sudah terpantau adanya kebakaran di enam wilayah, yakni Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, Ogan Ilir, Muaraenim, dan OKU Timur. Operasi pemadaman juga sudah mulai dilakukan,” kata Ansori, Kabid Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, 29 Juli 2020.

Di sisi lain, daerah-daerah terdampak karhutla masih masuk dalam wilayah risiko penyebaran Covid-19. Terutama Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Status wilayah zona merah pun masih fluktuatif, tim pakar epidemiologi satuan tugas Covid-19 mengingatkan potensi penyebarannya masih tinggi. “Kasus konfirmasi positif baru terus bertambah,” jelas Satgas Covid-19 Sumsel, Yusri.



Imbau Pakai Masker dan Kuatkan Imun

Sumatera Selatan menjadi provinsi tertinggi ke-7 kasus positif Covid-19 di Indonesia atau tertinggi pertama di Pulau Sumatera pertanggal 19 Juli 2020. Angkanya tembus 3.012 kasus terkonfirmasi, sembuh 1.413 orang (46,91%), dan meninggal 139 orang (4,61%). Para pasien inilah yang dikhawatirkan semakin rentan jika karhutla terjadi, terutama di kawasan gambut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau peralatan pemadaman karhutla di Base OP Lanud Talang Betutu Palembang, Rabu 29 Juli 2020. Wilayahnya

menyiapkan delapan unit water bombing helikopter berkapasitas 4 ton dan satu unit tambahan berkapasitas 5 ton.

Penetapan status siaga bencana asap karhutla pun sudah dikeluarkan sejak 20 Mei 2020. Upaya modifikasi cuaca dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga telah dilaksanakan. Untuk anggaran, dia menjamin tidak akan dipotong untuk Covid-19. Justru Pemprov memberikan stimulus Rp 45 miliar untuk 10 kabupaten kota yang rawan karhutla. Sanksi sesuai UU ataupun Peraturan Menteri LHK 10 tahun 2010 dipastikannya akan tegas diberikan, bukan hanya pelaku tapi juga pemilik lahan.

Hanya saja, disinggung langkah persiapan strategis di sektor kesehatan dalam menghadapi bencana asap kala pandemi, gubernur hanya mengatakan, masyarakat cukup sediakan masker dan menguatkan imun tubuh.

“Ya hanya itu, masker dan imun terjaga, makan yang bergizi,” ujarnya dibincangi. Menurutnya, standar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) saat ini masih di batas normal. Terbukti, belum terganggunya penerbangan udara karena jarak pandang terhalang kabut asap.

Dinas Kesehatan Sumsel sendiri mengharapkan tidak terjadi karhutla di saat Covid-19 sehingga tidak ada dampak pada kesehatan masyarakat. Dalam hal kesiapsiagaan kesehatan, pelayanan akan diberikan tidak hanya untuk warga tapi juga tim satgas karhutla di lapangan. Rumah singgah juga akan disiapkan tergantung kondisi.

“Kita berharap tidak ada asap karhutla karena dapat meningkatkan kerentanan dan menambah kasus Covid-19,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel, Ferry Yanuar. (yulia savitri)

<https://wongkito.co/read/trauma-asap-karhutla-di-masa-pandemi-covid-19>

M. Taslim Dalma

MENILIK DAMPAK PANDEMI: OMZET ANJLOK DI SEKTOR JASA, PEKERJA BANYAK DIRUMAHKAN

13:19 Wita, 10 Agustus 2020

ZONASULTRA.COM, KENDARI - Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Tenggara (Sultra) berdampak luas, di antaranya terhadap sektor ekonomi. Pada sektor ini, yang turut sangat merasakan dampaknya adalah para pekerja.

Pekerja usaha kecil menengah adalah salah satu yang paling terdampak karena tidak ada pelanggan atau jualan tak laku. Selain itu, ada pula pekerja hotel yang dirumahkan karena bisnis perhotelan yang tersendat.

Seperti pada keluarga Lenni (37). Ibu beranak dua ini, tergolong berkecukupan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Lenni memiliki usaha menjahit busana pengantin sedangkan suaminya adalah pekerja di salah satu perusahaan pembiayaan di kota mereka menetap, Kendari.

Lenni menjalankan usaha rumahan di tempat tinggal mereka, Kelurahan Anawai, Kota Kendari. Dalam sebulan Lenni bisa mendapat penghasilan sekitar Rp3 juta dan suaminya (42) memiliki gaji Rp1,8 juta. Dengan penghasilan yang demikian sudah mencukupi kebutuhan keluarga.

Namun, ketika pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia awal 2020 hingga akhirnya sampai ke Kendari, lambat laun Lenni tak lagi mendapat pesanan. Begitu pula suaminya dirumahkan oleh perusahaan pembiayaan tanpa gaji sama sekali dengan masa kerja yang sudah 2 tahun. Kondisi ini membuat mereka berupaya keras untuk mencukupi kebutuhan termasuk untuk dua putri mereka yang duduk di bangku SMP.

Lenni akhirnya berusaha mencari kerja di tempat penjahit yang lebih besar tapi tak diterima karena juga persoalan Covid-19 yang mana orderan turun. Sementara suaminya memanfaatkan motor mereka untuk ojek offline. Dengan penghasilan yang tak menentu, kurang lebih Rp50 ribu per hari. Dari hasil ojek inilah keluarga ini bertahan.

“Ih sangat kurang (Rp50 ribu per hari). Dicumuk-cukupkan saja,” ujar Lenni di sela-sela kegiatannya meningkatkan kemampuan menjahit di Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 10 Juli 2020.

Keluarga Lenni juga mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan. Sejak Mei hingga Juli 2020 ini, Lenni sudah tiga kali mendapat BLT tersebut. Setiap BLT cair, langsung digunakan untuk membeli sekarung beras 50 kg yang harganya Rp500 ribu lebih.

Lenni kadang kala stres bila memikirkan kondisi ekonomi keluarganya, apalagi mana kala suaminya pulang ke rumah dengan keluhan tak mendapat penumpang ojek.

Keluhan pandemi juga disampaikan pelaku usaha kecil, Sitti Rahmatia Ismail (52), warga Kelurahan Purirano, Kendari. Ia menjalankan usaha kerajinan aksesoris, jahit pakaian, dan ragam kue/camilan. Ibu yang berstatus orang tua tunggal (single parent) ini mesti berusaha mencukupi kebutuhan bersama seorang putranya (siswa SMA).

Pelaku usaha kecil, Sitti Rahmatia Ismail memperlihatkan aksesoris buatannya yang tak laku dijual selama masa pandemi Covid-19.

Dari usahanya itu, Rahmatia bisa mendapat omzet per bulan

mencapai Rp3 juta. Penghasilan inilah yang digunakan bersama anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Sejak bulan tiga, sampai sekarang tidak ada laku. Kue stop tidak ada. Kacang telur itu biasanya saya lancar sekali (distribusi) ke kios-kios, tapi sekarang tidak ada, pembeli kasihan kurang,” ucap Rahmatia yang juga sedang mengikuti pelatihan di BLK bersama Lenni.

Untuk bertahan selama pandemi ini, Rahmatia membuat masker mengandalkan satu unit mesin jahit miliknya. Harganya pun dijualnya dengan setengah harga, misalnya bila orang lain menjual Rp15 ribu per masker maka ia menjualnya Rp8 ribu.

Selain itu, Rahmatia juga terbantu dengan BLT sebesar Rp600 ribu yang sudah dua kali diterimanya pada bulan Mei dan Juni. Namun, kondisi ekonominya tetap pas-pasan, bahkan ia harus menguras rekeningnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sembari tetap menjalankan roda usaha jahit masker.

“Kalau orang tidak kuat imannya ini berbahaya kalau begini terus. Kalau saya alhamdulillah tidak stres. Kita bersyukur saja. Saya itu percaya dengan rezeki Allah, itu saja,” ujarnya.

Dengan statusnya sebagai single parent, Rahmatia mengaku ada problem tersendiri dibanding ibu-ibu lainnya yang turut terbantu karena ada suami. Baginya bekerja terus menerus adalah kuncinya, meskipun kadang kala masker yang dijahitnya tidak laku.

Kemudian, salah satu pekerja hotel yang dirumahkan adalah Siti Harlianti. Saat dirumahkan, ia baru saja 5 bulan bekerja di Hotel D’Blitz Kendari. Perempuan berusia 20 tahun ini berhenti sementara bekerja sejak corona merebak pada Maret 2020 lalu. Selama dirumahkan itu, gajinya pun terputus.

Ia yang masih lajang kini kembali bergantung pada ibunya, yang sudah menjanda. Selama di rumah saja, Siti membantu ibunya itu berjualan kue. Padahal, selama bekerja di hotel dengan gaji Rp1,5 juta per bulan, ia sudah mencukupi kebutuhannya sendiri dan turut membantu kebutuhan orang tuanya.

Selama pandemi ini, keluarga mereka cukup terbantu dengan bantuan pemerintah. Ibunya mendapat program keluarga harapan (PKH). Siti sendiri pernah mendapat uang tunai Rp300 ribu. Hanya saja Siti tak tahu asal bantuan uang yang diterimanya karena hanya menerima transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) setelah sebelumnya pernah mengisi data pekerja terdampak Covid-19 dari pemerintah. Itupun hingga awal Juli 2020 baru sekali diterimanya.

“Sudahme saya ditelpon kerja lagi, tapi masih takut-takut juga. Namanya kita kerja di hotel nda ditahu musibah (tertular corona). Tapi memang kan belum stabil semua. Yang masuk kerja juga belum banyak tidak selengkap yang dulu,” ujar Siti melalui telepon, 8 Juli 2020.

Dampak Terhadap Dunia Usaha

Salah satu bisnis yang terpukul dampak pandemi adalah perhotelan. Menurunnya tingkat hunian menyebabkan karyawan hotel banyak yang dirumahkan, sebagaimana yang dialami oleh Rahmatia tersebut.

Sales Marketing Hotel D’Blitz Kendari, Mitha mengatakan selama pandemi memang pihaknya merumahkan karyawan sekitar 30 orang. Mereka ada yang berstatus pekerja kontrak dan ada pula pekerja harian dengan berbagai posisi.

“Pada masa pandemi kemarin itu 80% karyawan dirumahkan, untuk gaji selama dirumahkan itu ikut terhenti juga,” ucap Mitha melalui pesan WhatsApp, 11 Juli 2020.

Penurunan tingkat hunian hotel Dblitz sejak kasus positif corona pertama di Kendari pada Maret 2020 lalu, hingga puncak penurunan hunian pada bulan Mei. Hal ini menyebabkan kurangnya pemasukan dan karyawan dirumahkan.

Pada bulan Juli 2020, tingkat hunian sudah mulai naik lagi sejak dicabutnya Maklumat Kapolri dalam rangka menuju

tatanan hidup baru atau new normal. Pihak hotel D'blitz juga sudah mendapat izin dari Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk menjalankan usaha dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19.

“Per Juli ini sudah hampir 50% karyawan sudah masuk aktif kembali,” ujarnya.

Khusus untuk hotel dan restoran yang terdampak pandemi, misalnya yang ada di Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sultra. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat di kota ini, pandemi menghantam bisnis 130 hotel yang 30 di antaranya kategori hotel berbintang, lalu sejumlah restoran, rumah makan, dan sejenisnya kurang lebih 150.

Sekretaris Umum PHRI Sultra Eko Dwi Sasono mengatakan pada pertengahan Juli 2020, bisnis hotel sudah mulai menggeliat lagi tapi tidak seluruhnya. Hotel-hotel yang masih tutup adalah yang non bintang sedangkan hotel kategori bintang sudah ada yang mulai beroperasi.

Hotel bintang seperti Claro, Same, Plaza In, Swiss Bell dan lainnya. Sedangkan hotel non bintang adalah kelas melati seperti milik Eko sendiri. Sejak lima bulan yang lalu Hotel Cendana milik Eko tutup 100 persen. Usaha tutup ini membuat pemasukan juga kosong sehingga karyawan harus dirumahkan dengan gaji yang diputus total.

Eko mengakui usaha hotel sudah kurang baik sebelum ada pandemi. Nah ketika terjadi pandemi ini semakin menghantam usahanya sehingga saat ini dalam proses untuk pailit.

Di tengah wacana new normal atau tatanan hidup baru saat ini, hotel bintang dalam proses recovery (pemulihan). Namun Eko ragu proses pemulihan dapat tercapai dalam jangka waktu 6 bulan, apalagi jumlah penularan corona ternyata terus menanjak naik.

Eko mengungkapkan sesungguhnya harapan hidup bisnis hotel

85 persen ada pada pemerintah. Misalnya banyak kegiatan pemerintah yang berlangsung di hotel. Namun anggaran-anggaran pemerintah untuk itu semua dipangkas karena adanya refocusing anggaran, belum lagi ada larangan soal berkumpul di masa pandemi semakin menambah beban bisnis perusahaan.

PHRI mencatat terjadi penurunan tingkat hunian yang signifikan. Pada hotel bintang tingkat hunian kamar hanya terisi paling tinggi 40 sampai 50 persen sedangkan pada hotel nonbintang hanya bisa terisi mencapai 30 persen. Ada pula yang sampai di titik 0 persen karena hotel ditutup total.

Masalah yang demikian berimbas pada penggajian karyawan, sehingga hotel ada yang memutus total gaji karyawannya (dirumahkan), dan ada yang gaji dikurangi dengan sistem kerja sif.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sultra mendata dari April hingga 10 Juli 2020, di Sultra ada 4.734 pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Rinciannya 4.518 dirumahkan dan 216 di-PHK.

Dalam data tersebut yang paling banyak adalah dari sektor pariwisata, misalnya perhotelan, rumah makan, restoran, termasuk juga tempat-tempat hiburan. Beberapa juga di sektor pertambangan.

Kebijakan dirumahkan ada beberapa skenario yang dilakukan manajemen perusahaan. Ada yang dirumahkan tanpa upah, ada yang dirumahkan dengan upah 50 persen, ada yang 75 persen, dan ada juga yang dirumahkan dengan tetap menerima gaji 100 persen.

“Terhadap mereka yang dirumahkan sangat bergantung dengan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Mereka dirumahkan berarti mereka diistirahatkan untuk sementara waktu, dalam status hubungan kerjanya tidak berakhir,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Industri dan Jaminan Sosial Disnakertrans Sultra Muhammad Amir Taslim, 16 Juli 2020.

Kata dia, terminologi “dirumahkan” ini dalam hukum ketenagakerjaan tidak dikenal. Akibat dari ada bencana nonalam seperti pandemi sehingga muncul kebijakan merumahkan karyawan karena kegiatan usaha yang lumpuh. Perusahaan tidak dapat menggaji karyawan karena tidak ada pemasukan, sehingga kebijakan dirumahkan itu dibolehkan.

Kalaupun seandainya ada pekerja yang memperkarakan kebijakan dirumahkan, Amir memastikan itu tidak akan diproses oleh Disnakertrans. Namun kata Amir, kebijakan merumahkan itu juga tidak serta merta dilakukan, mesti ada proses perundingan antara manajemen dan pekerja.

Sementara terhadap yang di-PHK, tetap mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Dengan aturan ini, pekerja yang di-PHK mendapatkan hak-haknya seperti pesangon.

Terkait 216 orang yang di-PHK, Disnakertrans belum mendapat laporan soal adanya pelanggaran aturan undang-undang ketenagakerjaan dan juga belum ada laporan bahwa PHK itu berkaitan dengan pandemi. Laporan yang berkaitan dengan pandemi hanya tentang pekerja yang dirumahkan.

Untuk meringankan beban pekerja yang dirumahkan dan di-PHK itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 adalah pemberian paket bantuan pangan nontunai. Paket itu berisi sembako (beras, mi instan, minyak goreng, gula, susu, ikan kaleng), juga alat pelindung diri (APD) berupa masker dan hand sanitizer.

Sebanyak 2.351 orang menerima bantuan tersebut, yang disalurkan sejak Mei hingga Juni. Untuk sementara kata Amir, baru kebijakan seperti itu yang diambil pemerintah untuk membantu.

Dampak pandemi terhadap dunia usaha juga terlihat dari

jumlah pedagang dan pelaku industri kecil menengah (IKM) yang terdampak. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sultra terdapat 18.292 warga yang masuk kategori pedagang dan pelaku IKM terdampak Covid-19 di 17 kabupaten/kota.

Data itupun belum mencakup keseluruhan karena Disperindag hanya mendata untuk keperluan penyaluran bantuan. Data tersebut diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dikhususkan yang belum mendapat bantuan jenis lain.

Dipserindag yang mengelola anggaran refocusing Covid-19 sebanyak Rp15 miliar melakukan penanganan dengan menyalurkan paket sembako, wastafel, masker, dan hand sanitizer. Anggaran sekitar Rp5,1 miliar telah digunakan untuk keperluan tersebut.

“Jadi tinggal Rp9,9 (miliar). Sisanya itu untuk dana stimulus tapi masih menunggu pergubnya (peraturan gubernur). Inilah untuk bantuan tunai, kita masih terus lakukan validasi data,” ujar Kepala Disperindag Sultra Siti Saleha.

Hantaman Covid-19 di Sektor Ekonomi

Perekonomian di Sultra dalam perspektif usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai akan sangat tergantung sejauh mana pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dapat diselesaikan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Halu Oleo (UHO) Dr. Syamsir Nur mengatakan proses pemulihan ekonomi sangat tergantung dari kondisi penyebaran virus. Kemampuan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan penularan sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat.

Meskipun tingkat penularan virus meningkat, ada hal yang membuat aktivitas ekonomi harus dijalankan. Itu adalah kebiasaan masyarakat, konsumen mencari kebutuhannya dan produsen menyiapkan produksinya.

“Cuma memang persoalan lain, bila pemerintah pusat maupun di daerah mengalami persoalan dalam kapasitas fiskal yang rendah. Nah apakah situasi ekonomi ini bisa diinjeksi terus hanya dengan memberikan kebijakan, saya kira pemerintah punya kemampuan fiskal yang terbatas,” ujar Syamsir di ruang kerjanya, 23 Juli 2020.

Di tengah kemampuan fiskal yang terbatas maka mau tak mau pemerintah harus memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk keluar beraktivitas dengan kebijakan “new normal”. Hanya saja kebijakan ini tidak langsung menginjeksi ekonomi, sehingga dia melihat kalau ada aktivitas ekonomi yang dilakukan beberapa individu justru mulai menguras tabungan untuk pemenuhan kebutuhan primer.

Terkait pemberian bantuan sosial (bansos) baik dari pusat maupun daerah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, menurut Syamsir hanya efektif untuk jangka pendek. Pemerintah seharusnya tidak hanya sampai memikirkan jangka pendek ini tetapi harus memikirkan bagaimana melibatkan pihak lain/swasta, atau bagaimana membangun kesadaran sosial untuk tetap melakukan antisipasi dampak jangka panjang.

Dengan adanya pandemi ini maka kemampuan pemerintah dari sisi penerimaan berkurang karena sumber penerimaan dari pajak berkurang juga. Misalnya yang paling nyata saat ini berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata hotel dan restoran.

Syamsir menekankan kebijakan yang bagus dan perlu ditingkatkan adalah subsidi secara tidak langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19. Misalnya mengurangi pungutan pajak di sektor pariwisata, tidak memungut retribusi pasar, penggratisan listrik, dan lain sebagainya.

“Ketika kita mendorong pajak di sektor itu dikurangi maka implikasinya adalah pendapatan daerah menjadi berkurang. Ketika pendapatan daerah dari pajak berkurang maka tidak ada duit untuk bansos, jadi ada pertalian. Kita memang harus

saling bahu membahu, kesadaran sosial menjadi penting,” ujar Syamsir.

Hal lain yang juga perlu didorong pada masa pandemi adalah peningkatan kapasitas terhadap pelaku UMKM dalam hal digitalisasi. Sebab saat Syamsir, saat pandemi ini kompetisi pasar berubah, penjualan lebih banyak dilakukan secara online. Makanya bila ada usaha kecil tidak mampu menggunakan platform bisnis online bisa gulung tikar.

Terkait kondisi perekonomian Sultra terkini, Syamsir memantau memang akibat pandemi terjadi angka kemiskinan meningkat (di kota dan desa) dan pengangguran bertambah. Sektor-sektor yang mempengaruhi hal itu adalah pekerja harian, serta usaha hotel dan restoran.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi Sultra masih lebih baik dibanding nasional. Adapun penopangnya adalah yang bukan bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, salah satunya sektor pertambangan.

Tambang yang banyak di beberapa daerah provinsi ini adalah nikel. Daerah yang terkenal sebagai penghasil nikel di antaranya Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, dan Bombana. Selain itu ada pula tambang yang tidak sedominan nikel, misalnya aspal di Buton, dan emas di Bombana.

Syamsir berkesimpulan, penopang ekonomi Sultra saat ini adalah pada sektor perdagangan luar negeri berupa ekspor komoditas pertambangan dan perikanan. Selain itu juga ditopang oleh pemerintah melalui belanja modal dan bansos.

Khusus pertambangan ini, pengaruhnya tidak inklusif. Menurut dia, laju kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.

“Jadi sekalipun mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan atau kondisi perekonomian daerah, tetapi belum mampu manjadi

sektor yang dijadikan andalan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Tenggara,” kata Syamsir.

Bagian lain yang juga bisa menggerakkan ekonomi Sultra jelang akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 adalah konsumsi lembaga nonprofit karena ada pilkada serentak 7 daerah.

Dengan adanya penopang-penopang tersebut, kata Syamsir, membuat pertumbuhan ekonomi di masa pandemi dapat bertahan di angka 3 persen sampai 5 persen.

“Di sektor yang lain misalnya konsumsi rumah tangga saya kira belum bisa bergeliat untuk lebih baik. Sementara untuk konsumsi swasta juga seperti itu, samalah situasinya,” ujar Syamsir. (*)

Reporter: Muhamad Taslim Dalma

<https://zonasultra.com/menilik-dampak-pandemi-omzet-anjlok-di-sektor-jasa-pekerja-banyak-dirumahkan.html>

M. Taslim Dalma

JADI PROFESI YANG RAWAN, INI KISAH TENAGA KESEHATAN TERPAPAR COVID-19

16:14 Wita, 10 Agustus 2020

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Tenaga kesehatan (nakes) menjadi kalangan yang paling terdampak dari adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pekerjaan yang mereka jalani membuat tubuh mereka rawan tertular Covid-19, seperti yang dialami oleh Karmila Dewi dan Sri Cahya Nabakin. Dua tenaga kesehatan di Kota Baubau ini positif Covid-19, diduga karena pekerjaan mereka.

Sejak April 2020 Karmila Dewi (44) ditugaskan menjadi perawat yang menangani pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau selama satu bulan masa tugas. Dalam bertugas, dia dan rekan-rekannya menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap. Sebelum bertugas pun, mereka sudah dibekali tentang tata cara penanganan pasien Covid-19.

Mereka secara khusus diinapkan di salah satu hotel di Kota Baubau dan tak kembali ke rumah. Selama awal-awal masuk hotel, mereka dilayani semisal untuk makanan diantarkan di kamar masing-masing. Namun begitu jelang akhir tugas, makanan sudah tak diantarkan lagi, sehingga Karmila terpaksa keluar kamar.

Karmila lalu bergabung dengan rekannya yang lain untuk makan bersama (berbuka puasa). Beberapa waktu kemudian rekannya ada yang mengalami gejala Covid-19, batuk dan sesak napas hingga akhirnya dinyatakan positif. Rekannya inilah yang diduga jadi penyebab Karmila juga positif Covid-19.

Beban kerja mereka juga membuat Karmila merasa kelelahan. Pekerjaan yang mereka jalani tanpa libur, dalam satu minggu 7 hari kerja. Dalam satu hari kerja dibuat sistem sif dengan waktu kerja 4 sampai 6 jam kerja.

“Memang banyak tenaga-tenaga perawat yang menolak untuk dijadikan perawat tim covid karena faktor takut dan lain sebagainya. Saya sendiri mau karena memang saya terpanggil. Saya berpikir siapa lagi yang bertugas kalau bukan saya. Terus kalau semua perawat takut, siapa yang akan melayani pasien-pasien ini,” ucap Karmila melalui telepon, 15 Juli 2020.

Ibu beranak tiga yang sudah 22 tahun jadi perawat ini dinyatakan positif Covid-19 persis ketika memasuki masa akhir tugas pada pertengahan Mei 2020. Untung Karmila hanya mengalami gejala ringan, sehingga selama dikarantina dia tidak begitu merasakan sakit.

Selama bertugas hingga akhirnya dirawat sebagai pasien, Karmila tak berkontak langsung dengan keluarga. Bahkan ketika ibunya sendiri meninggal dunia, Karmila tidak sempat mengikuti prosesi pemakamannya. Ibunya sakit karena terjatuh di rumah dan dirawat oleh kakak Karmila, hingga akhirnya meninggal setelah dua hari setelah terjatuh.

Insentifnya selama bertugas kurang lebih Rp5 juta rupiah. Sedangkan untuk perawatannya selama positif Covid-19 dengan menggunakan klaim BPJS Kesehatan. Karmila juga menerima donasi khusus dari RSUD Baubau Rp500 ribu dan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Rp500 ribu.

Untuk penanganan pasien Covid-19, Karmila melihat terbatasnya jumlah perawat yang terlibat. Dia berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi. Misalnya perawat

banyak menolak menjadi tim Covid-19, sehingga koordinasi dengan organisasi profesi seperti PPNI dibutuhkan.

Kisah lainnya, adalah Sri Cahya Nabakin yang merupakan tenaga kesehatan sukarela di Puskesmas Batara Guru, Baubau. Dengan honor Rp300 ribu per bulan, Sri bertugas di bagian rekam medik sebagai petugas pcare yang melayani kartu BPJS Kesehatan pasien.

Sehari-hari, Sri berhadapan dengan pasien umum, hingga tiba-tiba dia dinyatakan reaktif Covid-19 berdasarkan hasil rapid test pada 13 Juni 2020. Kemudian menyusul hasil swab test yang menyatakan dia positif Covid-19.

Setelah itu, dua orang anggota keluarganya juga positif Covid-19. Sri menduga ayah dan kakak laki-lakinya itu tertular Covid-19 dari dirinya. Sri dan Kakaknya dikarantina di Rumah Sehat Baubau sedangkan ayah mereka menjalani karantina mandiri di rumah. Anehnya, kata Sri, mereka bertiga baik-baik saja dan tidak mengalami keluhan sakit akibat Covid-19.

Sri mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan saat bertugas maupun pulang ke rumah dengan selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Dia menduga mungkin saja dirinya tertular Covid-19 melalui perantara kartu BPJS pasien, tapi hal ini belum pasti. Sebab, ada masyarakat di wilayah kerja puskesmas itu yang pernah dinyatakan positif Covid-19.

Selama hampir dua minggu, Sri akhirnya negatif Covid-19 dan siap bertugas kembali di puskesmas, hanya belum dibolehkan karena masih diminta istirahat. Sri bahkan mengaku sudah siap bila dibolehkan jadi tim relawan Covid-19.

“Saya ini sebenarnya sempat ikut daftar jadi relawan covid. Sudah lolos mau langsung ditempatkan. Cuma karena saya positif, yah sudah, saya jadi pasien. Tapi seandainya saya mau dipanggil kembali, saya siap,” ucap Sri yang memiliki latar belakang pendidikan Kesehatan Masyarakat (Kesmas).

Dari kejadian yang dialaminya, Sri berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan APD tenaga kesehatan yang bertugas di setiap puskesmas. Sebab para tenaga kesehatan puskesmas banyak berhubungan dengan masyarakat yang sakit.

Data di Gugus Tugas Covid-19 Sultra, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang tertular Covid-19 sejak April hingga 22 Juli 2020 terdapat 148 orang yang positif Covid-19. Mereka adalah dokter, perawat, bidan, apoteker, sarjana farmasi, hingga nakes yang berlatar belakang sarjana lingkungan.

Namun, belum dirinci terkait di mana nakes tertular, apakah berhubungan dengan pekerjaannya atau tidak. Para nakes itu adalah yang bertugas di Kendari, Kolaka Utara, Kolaka, Baubau, Buton, dan Muna.

“Contoh yang di RS Bahteramas, itu ada 10 orang (nakes). Tiga orang di antaranya itu perawat kamar isolasi jadi hampir dipastikan kemungkinannya terpapar karena pekerjaannya,” ujar Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Sultra, dr. La Ode Rabiul Awal.

Dari 148 nakes positif Covid-19 itu, satu di antaranya yang berasal dari Kolaka meninggal dunia, bernama Asni (42). Sedangkan yang lainnya rata-rata sudah sembuh.

Rabiul yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra, mengatakan memang pekerjaan nakes risikonya tinggi karena berkontak dengan orang tanpa gejala (OTG) yang jumlahnya banyak. Jadi, meskipun nakes ada yang tidak menangani pasien Covid-19 tetap tertular juga karena OTG banyak berkeliaran tanpa diketahui positif atau tidak.

Para nakes yang tertular itu ditangani seperti pasien pada umumnya mulai dari diisolasi dan menjalani perawatan sesuai dengan gejala penyakitnya. Kalaupun ada nakes positif Covid-19 yang kehilangan nyawa juga tidak ada perlakuan khusus, terkecuali ada asuransinya maka bisa saja memperoleh santunan dari asuransi tersebut.

Khusus yang mendapatkan insentif adalah nakes yang bertugas menangani pasien Covid-19. Hal ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Maksimal insentif adalah Rp15 juta dalam sekali bertugas (sekitar satu bulan), disesuaikan dengan posisi pekerjaan dan tingkat risiko nakes ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Namun kata Rabiul, insentif tidak sampai di angka maksimal karena disesuaikan dengan pagu APBD.

Penanganan Covid-19

Terdapat 5 kategori penularan covid-19 yaitu zona hitam, merah, kuning, oranye, dan zona hijau. Provinsi Sultra masuk zona oranye yang artinya penularan Covid-19 dapat dikendalikan. Namun kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Sultra dr. Muhammad Ridwan, tingkat penularan sifatnya fluktuatif sehingga yang tampak tenang bisa tiba-tiba merebak.

Ridwan belum dapat memastikan kapan akan terjadi puncak lonjakan Covid-19. Untuk saat sekarang ini kebutuhan anggaran penanganan kesehatan diklaimnya masih tercukupi.

Ridwan menjelaskan terkait untuk insentif dan fasilitas tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 ditangani oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Anggarannya pun ada yang bersumber dari APBD masing-masing dan ada juga dari APBN.

“Alhamdulillah sampai sekarang ini tenaga yang ada di lapangan ini sudah tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan pasti ada gejala toh,” ucap Ridwan di kantornya, 17 Juli 2020.

Kendati tak ada keluhan itu, Ridwan mengakui apa yang terjadi di lapangan membuat tenaga kesehatan rawan, sampai ada beberapa yang terpapar Covid-19. Bahkan ada tenaga kesehatan yang sampai meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19. Dia adalah Asni, seorang wanita berusia 42 tahun yang bekerja di Puskesmas Baula, Kabupaten Kolaka.

Wanita itu meninggal dunia selagi menjalani perawatan di Rumah Sakit Bahteramas pada 13 Juli 2020 lalu. Mulanya dia masuk kategori orang tanpa gejala (OTG) dan ada rekan kerjanya di Puskesmas Baula yang telah lebih dulu positif Covid-19.

“Pemerintah daerah di sana yang menentukan (santunan). Kemarin saya bicara dengan wakil bupati, dia akan usahakan santunan terhadap tenaga tersebut,” jawab Ridwan ketika ditanya apakah tenaga kesehatan yang meninggal tersebut mendapat santunan.

Penanganan kesehatan lainnya adalah dengan menyiapkan lima tempat isolasi yakni ruang isolasi di RSUD Bahteramas, gedung eks SMA Angkasa, gedung Rumah Sakit Jiwa, gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Lima tempat isolasi itu dapat menampung 200 orang. Sebanyak 50 tenaga kesehatan telah dilatih untuk bertugas di ruang isolasi tersebut sesuai standar operasional penanganan pasien Covid-19. Hingga 7 Agustus 2020 ini, gedung isolasi yang sudah digunakan di Bapelkes dan RSUD Bahteramas.

Terkait anggaran refocusing Covid-19 yang dikelola oleh Dinkes Sultra mencapai Rp71,5 miliar yaitu alokasi untuk belanja program Rp56,5 miliar dan belanja tidak terduga (BTT) Rp15 miliar.

Anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk di antaranya kegiatan pengembangan ruang isolasi di gedung Bapelkes, kegiatan penyemprotan dan penyediaan bahan disinfektan, penyediaan insentif bagi tenaga kesehatan, termasuk penyuluhan Covid-19, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kabid Bina Pengembangan Program dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sultra, Usnia mengatakan untuk belanja kebutuhan-kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD) dan rapid test sudah terealisasi. Termasuk untuk kebutuhan polymerase chain reaction (PCR) test, Dinkes bekerja sama dengan Balai POM.

“Digratiskan (rapid test dan PCR test). Jadi kami di sini itu yang menangani covid untuk itu di Laboratorium Kesehatan semua gratis, kita kerja sama dengan Gugus Covid. Kalau sudah ditangani dinkes semua gratis,” ucap Usnia di ruang kerjanya, 28 Juli 2020.

Dinkes juga mengelola anggaran penyuluhan sekitar Rp3 miliar. Penyuluhan ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pihak Dinkes melakukan komunikasi langsung, penyuluhan melalui baliho, dan lainnya.

Terkait untuk anggaran insentif, dikhususkan untuk tenaga kesehatan di lingkup Dinkes Sultra. Kata Usnia, yang akan mendapat insentif itu adalah 50 tenaga kesehatan yang sudah direkrut oleh Dinkes Sultra untuk ditempatkan di 5 tempat isolasi.

Sampai akhir Juli, sudah ada 20 tenaga kesehatan yang mulai bertugas di Bapelkes. Dengan masa tugas satu bulan, masing-masing perawat akan mendapat insentif sekitar Rp5 juta.

Tes Covid-19 di Sultra

Untuk mendeteksi Covid-19 terdapat dua jenis tes yang saat ini ada di Provinsi Sultra yaitu tes cepat molekuler (TCM) dan polymerase chain reaction (PCR). Dua alat tes swab ini ada di RSUD Bahteramas.

Direktur RSUD Bahteramas dr. Hasmudin mengatakan selama dua bulan terakhir (Juni-Juli) sampel yang sudah diperiksa kurang lebih 4.800. Untuk saat ini pihak RSUD hanya menerima sampel dari kabupaten/kota dan belum dapat memastikan target masyarakat yang harus dites.

Soal kendala yang ada, kadang terjadi kekurangan bahan tes seperti reagen. Kendala seperti ini dapat diatasi dengan adanya suplai dari Dinkes Sultra sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan reagen.

Alur pemeriksaan tes swab tersebut yaitu dinkes masing-masing kabupaten kota se-Sultra mengirim sampel ke dinkes provinsi, lalu sampel diantar ke RSUD Bahteramas untuk diperiksa. Kemudian hasil pemeriksaan diserahkan ke dinkes provinsi untuk dilanjutkan ke kabupaten kota.

Dua unit alat TCM dan PCR itu memiliki kapasitas yang berbeda. Kapasitas TCM terbatas dengan hanya bisa sekitar 40 sampel per hari. Alat TCM ini juga digunakan untuk kasus-kasus darurat, misalnya yang harus segera diketahui hasilnya. Sedangkan PCR bisa sampai 120 sampel per hari.

“Sekitar lima hari yang lalu alat PCR ini sedikit bermasalah karena kita masih mau kalibrasi (cek alat oleh teknisi), kita tidak operasional dulu. Terpaksa sampel-sampel yang sudah ada itu dikirim ke Makassar. Hari ini alat TCM ini sudah mulai beroperasi lagi,” ujar Hasmudin melalui telepon selulernya, Selasa (4/8/2020).

Hasmudin mengaku selama ini sudah cukup memaksimalkan penggunaan alat tersebut. Dengan dua alat itu sudah bisa mengakomodir sampel dari kabupaten-kota. Selain RSUD Bahteramas, daerah seperti Kabupaten Kolaka Utara juga sudah membeli alat tes swab hanya belum beroperasi karena belum ada izinnya.

Update Covid-19 di Sultra

Update data perkembangan Covid-19 yang dirilis Satgas Covid19 Sultra, hingga Minggu, 9 Agustus 2020, pukul 17.00 Wita.

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Covid-19 Sultra, hingga Minggu, 9 Agustus 2020, pukul 17.00 Wita, total kasus positif Covid-19 di Sultra sudah berjumlah 1020 kasus.

Rincian dari jumlah itu, pasien positif yang masih dalam perawatan sebanyak 310 kasus, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 693 kasus, dan pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 17 kasus.

Sebanyak 310 kasus pasien positif yang masih dalam perawatan tersebut tersebar di kabupaten/kota yakni Kendari 148, Konawe Selatan 11, Konawe Utara 3, Konawe 7, Kolaka 7, Kolaka Utara 13, Buton 8, Kota Baubau 88, Buton Tengah 5, Buton Selatan 7, Wakatobi 4, Muna 7, dan Muna Barat 2. (*)

Reporter: Muhamad Taslim Dalma

<https://zonasultra.com/jadi-profesi-yang-rawan-ini-kisah-tenaga-kesehatan-terpapar-covid-19.html>

M. Taslim Dalma

DANA BESAR COVID-19 YANG TRANSPARANSI DAN EFEKTIVITASNYA DIPERTANYAKAN

09:21 Wita, 11 Agustus 2020

ZONASULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan anggaran refocusing atau pergeseran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp400 miliar. Anggaran sebesar ini diprioritaskan pada tiga sektor terdampak.

Tiga sektor itu adalah penanganan kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Anggaran itu dibagikan ke 29 organisasi perangkat daerah (OPD), plus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Alokasi anggaran pergeseran ditetapkan dan dijabarkan dalam sebuah produk hukum yaitu peraturan kepala daerah (perkada) ke-4, tahun 2020.

Anggaran gelondongan itu selanjutnya ditransfer ke setiap OPD untuk belanja program dan belanja tak terduga (BTT). Namun ada OPD hanya diberi BTT karena terlambat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban belanja Covid-19 tahun 2020 per tanggal 24 Juli di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD), jumlah anggaran yang dikelola masing-masing OPD adalah sebagai berikut.

Hingga 24 Juli 2020, dari anggaran Rp400 miliar tersebut realisasi anggaran Covid-19 sudah mencapai Rp273 miliar (68,28 persen). Dalam laporan pertanggungjawaban itu juga tampak penggunaan anggaran yang sangat besar untuk penyuluhan hampir mencapai Rp17 miliar.

Totalnya untuk penyuluhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yaitu Rp16.967.600.000,- berasal dari belanja program 14.575.000.000 (penyerapan sudah 100 persen) dan belanja tidak terduga (BTT) 2.392.600.000 (penyerapan masih 0 persen).

Anggaran penyuluhan itu tersebar di 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, dan Dinas Kominfo. Dikbud, anggaran penyuluhannya mencapai Rp7 miliar, Dinkes sekitar Rp3 miliar, dan Kominfo Rp4,2 miliar (plus BTT Rp2,6 miliar).

Untuk pengembangan ruang isolasi juga menyedot anggaran yang besar yakni 34.952.200.000,- berasal dari anggaran belanja program 17.670.850.000,- (penyerapan 100 persen dengan jumlah volume 5 paket) dan sebanyak BTT 17.281.350.000,- (penyerapan 51 persen dengan jumlah volume 2 kegiatan).

Belanja Tidak Terduga (BTT)

Dalam laporan pertanggungjawaban belanja Covid-19 tahun 2020 per tanggal 24 di BPKAD, belanja tidak terduga terdistribusi ke tiga prioritas yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Berikut adalah tabelnya.

Kasubbid Pendanaan, Pembiayaan Pembangunan Daerah Bappeda Sultra Wa Ode Muslihatun menjelaskan BTT terbagi atas BTT induk yang memang direncanakan sebelum adanya refocusing anggaran, dan saat adanya Covid-19. Saat refocusing ada tambahan anggaran di BTT yang dibagi ke tiga prioritas (kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial).

“Di situ juga ada beberapa OPD yang sudah pernah merencanakan, tapi karena bersifat bisa dicairkan nanti dibutuhkan. Jadi BTT itu bukan sesuatu yang direncanakan tapi disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga masalah yang timbul tidak menyebabkan masalah lebih jauh,” kata Wa Ode Muslihatun di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2020).

Contohnya, OPD ada yang menggunakan BTT untuk membeli beberapa alat kesehatan pelindung diri karena sebelumnya tidak direncanakan. Karena waktunya mendesak, maka dikeluarkan dana BTT.

Muslihatun menjelaskan yang membedakan BTT, hanya saat merencanakan, memanfaatkan, dan mencairkannya. Soal pertanggungjawaban BTT sama dengan mekanisme pertanggungjawaban belanja program, sebagaimana penggunaan anggaran pada umumnya.

Dia mencontohkan untuk pencairan BTT maka OPD harus mengajukan permohonan disertai alasan. Pengajuan ini diperiksa oleh tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang di dalamnya ada kejaksaan dan inspektorat. Bila sudah ditinjau oleh APIP, maka yang disetujui dapat dibiayai.

Terkait Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki BTT cukup besar Rp37.110.200.000, Muslihatun menjelaskan satuan ini ada di BPKAD.

SKPKD mengelola anggaran untuk hibah daerah terkait penanganan Covid-19. Misalnya bila lembaga seperti Kesatuan Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, dan lainnya memerlukan anggaran penanganan Covid-19 maka dianggarkan melalui SKPKD.

Dikbud Mendapat Anggaran yang Besar

Dari data penggunaan anggaran, terlihat selain Dinas Kesehatan yang tinggi adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra. Terkait penggunaan anggaran ini

dijelaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud Sultra Asrun Lio.

Dia mengungkapkan pada Dinas Dikbud segmentasinya adalah pada aspek mengatasi masalah kesehatan dan social safety net (jaring pengaman sosial).

Untuk mengatasi masalah kesehatan maka anggaran Rp17,6 miliar dialokasikan, salah satunya untuk memastikan bahwa tersedia protokol kesehatan area institusi pendidikan di sekolah-sekolah. Di setiap sekolah disediakan sarana air bersih, alat cuci tangan, masker. Pendanaan juga agar sekolah-sekolah secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan.

Dari dana Rp17,6 miliar juga digunakan untuk mengedukasi masyarakat, utamanya masyarakat pendidikan. Dinas Dikbud melakukan talkshow, penyebaran informasi cara-cara mengatasi Covid-19 dengan memanfaatkan media massa. Anggaran ini sudah mulai digunakan sejak Mei dan ditarget akan segera tuntas.

Rinciannya adalah Rp7 miliar untuk fasilitas cuci tangan, Rp3 miliar untuk masker. Sekitar Rp7 miliar untuk penyuluhan penanganan Covid-19 di area pendidikan. Bentuk penyuluhan ini misalnya sekitar Rp3 miliar digunakan untuk pembuatan video-video pendek edukasi Covid-19.

Kemudian untuk jaring pengaman sosial, Dinas Dikbud mengalokasikan anggaran Rp22,3 miliar untuk lingkup sekolah SMA, SMK, SLB yang menjadi kewenangan pemprov. Lewat anggaran ini, diberikan insentif kepada guru-guru honorer, tenaga dapodik, dan siswa terdampak.

“Guru-guru honorer itu diberi stimulus untuk memotivasi mereka tetap melakukan proses pembelajaran meskipun sekarang prosesnya belajar dari rumah,” kata Asrun di ruang kerjanya, 21 Juli 2020.

Kurang lebih 4.093 guru kontrak di jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB, masing-masing akan menerima Rp1 juta.

Kemudian 450 tenaga operator dapodik masing-masing Rp800 ribu.

Dikbud juga memorsikan bantuan langsung tunai untuk kurang lebih 1.000 siswa miskin sebesar Rp1 juta untuk setiap siswa.

Selain itu, Dikbud memberikan Rp195.000 kepada lebih dari 85.000 lebih siswa untuk bisa terus melakukan pembelajaran dari rumah. Kata Asrun, ini untuk membantu biaya pulsa, dan minimal bila ada sisanya bisa untuk vitamin.

Stimulan dari anggaran Rp17 miliar itu adalah untuk satu kali pembayaran. Penyalurannya ditarget pada bulan Juli lalu, hanya saja masih dalam proses administrasi.

DPRD Bentuk Pansus Tapi Belum Ada Hasil

Alokasi anggaran yang mencapai Rp400 miliar untuk penanganan bencana Covid-19, membuat publik mempertanyakan tentang penggunaannya, bahkan sampai ke DPRD Sultra. Hal ini dijawab oleh DPRD Sultra dengan membentuk pansus.

Melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang, Pansus dibuat pada akhir Juni 2020. Mereka bertugas ditarget paling lama 60 hari untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan Covid-19 baik dari perspektif anggaran, program, maupun implementasi di lapangan.

Pansus terdiri dari 15 anggota DPRD yang diketuai oleh Suwandi Andi. Alasan utama pembentukan pansus menurut DPRD adalah karena banyak aspirasi publik yang ingin mengetahui bagaimana birokrasi bekerja menggunakan APBD.

“Aspirasi itu diwujudkan dalam bentuk pansus. Saya dengar mereka sudah panggil dinas-dinas, mereka turun lapangan. Yah kita tunggu hasilnya pansus itu,” ujar Endang, 13 Juli 2020.

Salah satu aspirasi yang ada adalah pertanyaan publik mengapa harus anggaran Covid-19 disebar di 27 (kemudian jadi 29) organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk hal ini, DPRD masih menunggu hasil klarifikasi pansus ke pemprov.

Menurut Endang, untuk sementara ini memang tak dapat dipungkiri bahwa ada keberhasilan Pemprov Sultra dalam penanganan Covid-19. Misalnya banyak tayangan yang memperlihatkan video penyaluran bantuan.

“Tetapi banyak juga yang kita dengar, misalnya harusnya dapat tapi tidak dapat. Kemudian ada proyek-proyek yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung covid tapi memakai kata covid,” ujar Endang.

Selama ini, Endang mengaku juga memantau lewat pemberitaan media massa, bahwa ada proyek-proyek yang perlu diklarifikasi. Misalnya proyek yang memakai kata Covid-19 untuk sumber anggarannya, tujuan pelaksanaan proyeknya. Informasi seperti ini kata Endang yang sedang digali oleh pansus.

Hasil kerja pansus ini adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan ke publik melalui rapat paripurna. Rekomendasi juga akan diberikan ke sejumlah pihak yang ada kaitannya.

Namun, batas kerja pansus yang 60 hari itu tak dapat tercapai. Hal ini diakui oleh Ketua Pansus Suwandi Andi. Sebab, pansus membutuhkan waktu 6 bulan.

Suwandi beralasan hingga 21 Juli 2020, kerja pansus baru di kisaran 20 persen dari 100 persen yang ditargetkan. Terkait penggunaan anggaran yang Rp400 miliar ini, pansus belum dapat menyimpulkan apapun karena masih banyak hal yang perlu ditelusuri mulai dari penggunaan anggarannya, besaran anggaran, dan ketepatan sarannya.

“Kami sudah turun lapangan untuk menelusuri pendistribusian (anggaran) itu dan ke depan masih ada yang belum didistribusikan. Kami perlu rapat internal lagi dengan OPD

terkait sejauh mana serapan itu,” ucap Suwandi di ruang kerjanya, 21 Juli 2020.

Penganggaran Covid-19 Dinilai Tidak Efektif

Anggaran refocusing Rp400 miliar tersebut dianggap sangat besar untuk Provinsi Sultra, sebagai daerah kecil dibanding daerah lainnya. Di lain sisi, hal ini juga pertanda baik karena pemerintah memberikan perhatian yang besar.

“Akan menjadi aneh kalau anggaran yang masyarakat sudah harapkan jika tidak didistribusi atau tidak tepat sasaran. Karena kalau kita lihat sampai bulan lalu, itu kan dana bansos belum didistribusi kurang lebih Rp80 miliar. Sementara dalam penanganan covid bukan hanya di bansos, ada terkait pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan, ada juga untuk pemulihan ekonomi,” ujar Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra Kisran Makati, 22 Juli 2020.

Menurut Kisran bansos tidak dapat disebut sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi sehingga harus ada kreativitas dari pemerintah. Bansos juga ini jadi sorotan sebab beberapa OPD juga menyalurkan bansos.

Bansos dinilai tidak dapat membantu atau menanggulangi dalam jangka panjang. Misalnya nilai bansos per paket sembako hanya setara Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Ini diperkirakan habis tidak sampai satu bulan bagi satu keluarga.

Daripada mengandalkan sembako, Kisran lebih menyarankan pemberian insentif jangka panjang. Misalnya untuk pelaku usaha kecil bisa diberikan tambahan modal atau bentuk lain.

Kisran menyoroti sebaran anggaran refocusing ke 29 OPD, yang di antaranya ada yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan Covid-19. Pada akhirnya masing-masing OPD juga melakukan pengadaan sembako. Semestinya kata Kisran untuk bansos ini terkonsentrasi di dinas sosial (dinsos) atau di BNPB. Apalagi dinsos memang memiliki basis data dari

tahun ke tahun.

Pangalokasian anggaran yang disorotinya adalah karena tidak berhubungan langsung dengan Covid-19, salah satunya alokasi untuk Dinas Dukcapil yang mencapai Rp1 miliar.

Selain itu, Kisran juga menyoroti banyaknya gedung yang dibangun daripada potensi pasien Covid-19. Misalnya banyaknya gedung direhab dengan alasan untuk tempat karantina pasien, padahal ditengarai sebagian proyek-proyek itu hanya melanjutkan proyek sebelum refocusing. Misalnya yang dibangun di Kantor BPSDM Sultra.

“Kalau dilihat dari proses di BPSDM itu kesannya hanya melanjutkan dari yang lalu-lalu karena kita ketahui di awal bulan Juni (setelah Mei anggaran ditetapkan), proyeksi pekerjaan sudah 60 persen. Belum lagi ada item-item pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan covid seperti pagar, paving blok. Saya rasa itu sangat tidak tepat sasaran,” ungkap Kisran.

Kisran menilai apa yang terjadi di BPSDM ini merupakan salah satu contoh penggunaan anggaran yang tidak efisien, apalagi dengan anggaran yang mencapai miliaran. Apalagi menimbang bahwa pemerintah kabupaten/kota juga sudah menyiapkan ruang isolasi, sehingga menurut Kisran bila terlalu banyak akan mubazir.

Untuk mengefisienkan anggaran, katanya, mestinya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar prioritas, bukan malah banyak membangun bangunan. Misalnya dengan memaksimalkan rapid test dan swab test.

“Kita masih temukan misalnya masih banyak pungutan-pungutan terhadap masyarakat yang hendak mengurus rapid test untuk kebutuhan pribadi. Harusnya kan pemerintah sudah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari,” ucap Kisran.

Kisran juga mengkritisi adanya anggaran penyuluhan Covid-19 yang tinggi. Dana kurang lebih Rp14 miliar (belanja program)

terdapat di 3 OPD, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Biaya penyuluhan ini bila dilihat dari praktiknya lebih banyak biaya iklan atau produk-produk alat kampanye yang menurut Kisran tidak begitu tampak di publik, padahal anggarannya sangat besar. Maka dari itu kata dia, perlu perumusan yang baik dari kuasa pengguna anggaran agar tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran penyuluhan.

“Jadi banyak hal memang yang menjadi tanda tanya besar dalam penggunaan anggaran refocusing ini,” kata Kisran.

Terkait pengawasan anggaran refocusing ini, Puspaham bersama sejumlah organisasi seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Swadaya Masyarakat Daerah (Forsda), Suara Pinggiran, Komunitas Berpikir Sehat, dan Serikat Tani Konawe Selatan. Mereka membentuk Forum Pemantau Pelayanan Publik dengan membuka Posko Pengaduan Distribusi Jaring Pengaman Sosial serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Sejauh ini, kata Kisran, masih sedikit pengaduan secara resmi dari masyarakat yang menerima bansos. Namun bukan berarti tidak ada masalah, persoalan di Konawe Selatan, Konawe, dan Kendari modusnya kurang lebih sama.

Misalnya nama yang terdaftar tapi saat penerimaan justru orang lain yang terima. Ada juga yang harusnya menerima Rp500 ribu tapi begitu realisasinya hanya menerima Rp100 ribu atau Rp80 ribu.

Terkait anggaran refocusing Pemrov Sultra belum ada yang mengadu ke posko tersebut. Olehnya forum itu masih terus melakukan pemantauan penggunaan anggaran refocusing Rp400 miliar itu.

Proyek di BPSDM yang Gunakan Anggaran Covid-19

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu OPD yang mengelola total Rp6,5 miliar terdiri atas Rp1,17 miliar untuk belanja program dan Rp5,32 miliar untuk belanja tidak terduga (BTT).

Dalam realisasinya, BPSDM menggunakan anggarannya untuk sejumlah proyek dengan konsep “ruang isolasi”. Dari pembangunan gudang hingga rehab pos jaga juga turut dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) refocusing Covid-19.

Berdasarkan papan pengumuman, proyek-proyek itu dimulai 13 Mei dan selesai 11 Juli 2020 lalu. Dalam pembangunan gudang, anggaran yang digunakan Rp550 juta. Untuk paket rehabilitasi pagar, gapura, dan pos jaga Rp866.400.000. Pemasangan paving block jalan masuk antar asrama dan parkir Rp314.490.000. Pembangunan guest house Rp550 juta. Selain itu paket pekerjaan lainnya adalah media center dan rehabilitasi gedung Asrama A, B, dan C. Total ada 6 paket pekerjaan.

Nur Endang Abbas selaku Kepala BPSDM Sultra, menjelaskan bahwa penggunaan bangunan BPSDM untuk tempat karantina atas instruksi pemerintah pusat. Dengan begitu bukan saja di Sultra, tapi bangunan BPSDM di provinsi lainnya juga untuk tempat karantina pasien Covid-19.

Namun kata Endang, ketika awal masa pandemi fasilitas di BPSDM belum memadai. Kondisi sarana prasarana sebelumnya dianggap sangat memprihatinkan, maka dilakukan sejumlah rehabilitasi seperti media center, asrama, dan pagar. Ada pula yang bangun baru yaitu guest house, gudang, dan pemasangan paving blok.

“Terus kenapa harus ada gudang. Sekarang inikan tidak ada tempat APD, bantal, seprai. Sementara mereka inikan protapnya harus diganti terus. Limbah-limbah APD itu kan harus dikelola dengan baik supaya tidak bercampur dengan barang yang masih steril,” ujar Endang (kini menjabat Sekda Sultra), 30 Juli 2020.

Soal pembangunan pagar dianggap penting untuk menjaga kenyamanan bagi pasien nantinya. Begitu pula untuk pemasangan paving blok untuk keperluan jalan penghubung terkait penanganan medis.

Kemudian soal adanya media center, kata Endang, itu juga diperlukan untuk evaluasi dan koordinasi antar pihak terkait informasi perkembangan pasien. Begitu pula tujuan adanya guest house adalah untuk tempat tenaga medis yang bertugas.

Kata Endang, fasilitas yang sudah dibangun di BPSDM masih dalam keadaan siaga untuk menampung pasien Covid-19 yang akan dikarantina. Sehingga, pendidikan dan pelatihan dilakukan di tempat lain.

Anggaran sebesar Rp1,17 miliar untuk belanja program telah digunakan oleh BPSDM. Anggaran ini digunakan untuk belanja sarana dalam ruang karantina seperti genset, AC, lemari, dan lainnya. Sedangkan anggaran BTT Rp5,32 miliar untuk belanja tidak terduga, realisasinya telah digunakan sekitar Rp2,4 miliar untuk pembangunan fisik.

Endang memastikan pembangunan fisik tersebut tidak melanjutkan proyek sebelum ada refocusing anggaran. Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) induk sebelum refocusing, tidak ada paket-paket seperti yang ada saat ini.

Penggunaan Rp400 Miliar dan Harapan Terhadap Herd Immunity

Dari 29 OPD, terdapat beberapa OPD yang tidak mendapat anggaran belanja program. Misalnya Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat tidak mendapat karena tidak mengajukan rancana penggunaan anggaran, meskipun memang dalam skenario awal penganggaran semua OPD disiapkan.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, Johannes Robert Maturbongs mengatakan OPD yang tidak mendapat belanja program itu diporsikan melalui

BTT. Hal ini untuk mengantisipasi bila ada hal mendesak dari tiga OPD tersebut.

Robert beralasan, semua OPD mesti diporsikan anggaran karena penanganan Covid-19 berdasarkan urusan masing-masing OPD meskipun secara garis besar kebijakan prioritas hanya ada tiga yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

“Sekarang saya mau tanya sedehana saja, apakah kesehatan itu urusan dinas kesehatan saja. Kan tidak. Misalnya masker, ada masker medis dan nonmedis. Masker medis itu dilaksanakan oleh dinas kesehatan karena untuk kebutuhan paramedis, terus masker nonmedis kan boleh diadakan oleh siapa saja. Di pasaran dijual bebas, apakah itu perlu dinas kesehatan yang tangani?,” ujar Robert di ruang kerjanya, 27 Juli 2020.

Dia menjelaskan persoalan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan. Sehingga, penanganan Covid-19 diintervensi secara menyeluruh dan terintegrasi oleh semua organisasi atau instansi pemerintah. Begitu pula soal penanganan dampak ekonomi, semua dinas-dinas kemakmuran yang menangani urusan ekonomi dan infrastruktur dikerahkan. Oleh karena itu, Pemprov Sultra memberikan dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing OPD.

Soal OPD seperti Dinas Dukcapil yang diberi anggaran Rp1 miliar, Robert menjelaskan itu untuk keperluan verifikasi data penerima bansos. Verifikasi data yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sehingga perlu dianggarkan untuk dinas yang mengelola data tersebut.

“Kan kalian protes kita selalu jangan terjadi duplikasi apa segala macam. Salah satu analisis kita itu hanya berbasis NIK. Siapa yang kelola NIK? Memangnya dinas lain itu tahu supaya NIK itu tidak tumpang tindih? Kan verifikasi supaya tidak tumpang tindih itu ada di Dukcapil. Verifikasi itu ada dua, lapangan dan administrasi,” ucap Robert.

Terkait anggaran penyuluhan yang mencapai Rp16 miliar lebih di 3 OPD, Robert mengatakan jangan melihat jumlah uangnya tapi luas wilayah. Misalnya edukasi untuk anak SMA dan sederajat (kewenangan pemprov) yang tersebar di semua wilayah kabupaten/kota.

Kemudian ada juga anggaran penyuluhan untuk Dinas Kominfo, misalnya digunakan untuk anggaran di media massa. Kata Robert, publikasi di media massa ini tidak bisa hanya satu kali tapi harus berkali-kali sehingga memakan banyak anggaran.

“Edukasi itu harus berulang-ulang, baru masyarakat itu paham. Yah kalian hitung saja berapa operasionalnya untuk membiayai yang seperti itu. memasang pamflet, tersebar di seluruh wilayah, menyampaikan apa segala macam. Saya kira kalau dihitung jadinya kecil itu anggaran Rp16 miliar,” ucap Robert.

Robert menganggap wajar apa yang dibangun di BPSDM sebagai ruang isolasi. Pembuatan pagar dan pos jaga dianggap sebagai bagian dari kebutuhan ruang isolasi. Meskipun pagarnya tidak begitu tinggi, kata Robert, paling tidak dapat membatasi orang secara psikologis.

Menurut Robert pembangunan itu atas instruksi menteri untuk memanfaatkan semua fasilitas untuk kebutuhan mengantisipasi terjadinya ledakan penularan Covid-19.

“Yang kita bangun inikan institusi pemerintah, aset pemerintah. Toh tidak digunakan itu tetap menjadi kepentingan pemerintah, dan kita bersyukur kalau pasca covid sudah tidak digunakan, penilaian akreditasi terkait keberadaan BPSDM-nya kita meningkat,” ujar Robert.

Terlepas apa yang dibangun di BPSDM itu yang mempertimbangkan pasca Covid-19, Robert mengakui anggaran Rp400 miliar itu digunakan bukan untuk jangka panjang. Anggaran itu disiapkan untuk penanganan yang bersifat darurat sehingga banyak penganggaran untuk bansos, APD,

dan belanja-belanja lainnya yang bersifat darurat.

Rencana jangka panjang pemprov adalah mengupayakan agar bisa kembali pada kondisi normal di mana masyarakat tetap berkontribusi dalam pembangunan dan bidang perekonomian. Sehingga kebijakan yang didorong adalah, bagaimana agar terjadi pemulihan.

Namun demikian kata Robert, pemerintah tidak akan bisa terus menggelontorkan anggaran darurat. Bila kondisi pandemi tak berubah ke arah yang lebih baik maka Indonesia terancam resesi seperti Singapura.

Robert mengakui selama pandemi ini pendapatan asli daerah berkurang. Misalnya selama pandemi, penurunan jumlah penyeberangan sehingga tidak ada pendapatan dari retribusi. Contoh lainnya adalah tidak ada retribusi pada sektor pariwisata di Pulau Bokori karena tidak ada yang berkunjung. Padahal, pendapatan-pendapatan seperti ini yang digunakan untuk belanja pemerintah.

Termasuk hotel-hotel yang beroperasi, ada pajak daerah. Namun selama pandemi hotel tidak beroperasi, sehingga pajak daerah dari hotel dan restoran berkurang.

“Kalau tidak ada kan berarti tidak ada pendapatan daerah untuk kita belanjakan. Akhirnya kita kolaps, makanya skenarionya kita harus kembalikan aktivitas kembali normal sehingga ada produksi ada pendapatan. Jadi tidak mungkin dalam darurat kita mau biayai terus, uang dari mana?,” ucap Robert.

Robert mengatakan bila penangkal tak kunjung ada, maka akan terjadi situasi pengkondisian untuk bersahabat dengan Covid-19 atau dalam konsep herd immunity atau kekebalan kelompok.

Epidemiologist Kolaborator dari Laporan Covid-19, Henry Surendra menjelaskan herd immunity merupakan sebuah konsep bahwa populasi bisa terlindung dari suatu penyakit apabila sekian persen dari populasi sudah terinfeksi dan punya

anti bodi.

Namun dalam kaitannya dengan Covid-19, belum banyak diketahui berapa persen dari pasien yang terinfeksi Covid-19 punya antibodi. Kata Hendry, dari beberapa publikasi dan pernyataan dari WHO bahwa banyak pasien Covid-19 yang sembuh tidak memiliki antibodi ketika diperiksa dengan alat virologi.

“Ini yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan. Katakan saja 80 persen masyarakat Indonesia itu sudah pernah terinfeksi Covid-19, kita belum yakin apakah yang 80 persen ini tidak akan terinfeksi kembali,” ucap Henry melalui telepon seluler, Jumat (7/8/2020).

Antibodi terbagi dua dari faktor berapa lama bertahan dalam tubuh yaitu ada yang disebut dengan immunoglobulin M (IgM) dan immunoglobulin G (IgG). IgM adalah antibodi yang diproduksi cukup cepat, di kisaran hari ke-8 setelah infeksi lalu hilang seiring sembuhnya pasien.

Sementara IgG adalah antibodi jangka panjang yang bertahan di tubuh cukup lama, yang muncul di kisaran hari ke-14 setelah terinfeksi. Antibodi ini bisa bertahan beberapa bulan sampai dengan tahun. Kata Henry, dari beberapa penelitian menunjukkan IgG ini cenderung menghilang dari tubuh sehingga butuh infeksi kedua.

Seseorang yang sudah punya antibodi IgG ini, bila terinfeksi kedua kalinya (biasanya tidak sakit) akan segera memproduksi antibodi yang serupa. Antibodi dari infeksi kedua inilah yang bisa bertahan lama sampai satu tahun, bahkan lebih. Namun kata Henry, hal ini belum banyak diketahui dalam kaitannya dengan Covid-19 karena risetnya butuh waktu yang panjang.

“Jadi yah nanti vaksin ditemukan dan kita divaksin, kemudian mencapai herd immunity, atau ternyata nanti keduluan populasi kita banyak yang terinfeksi hingga ada herd immunity (secara alamiah). Mau tak mau memang kita akan menuju ke sana (herd

immunity),” tutur Henry.

Kata Henry, untuk mencapai herd immunity secara alamiah ini banyak yang akan meninggal. Sementara berdasarkan riset yang diterbitkan dalam jurnal the lancet, hasil tes di Spanyol (salah satu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi) menunjukkan hanya sekitar 5 persen dari populasi yang mengembangkan antibodi. Hasil ini kata Henry masih jauh dari herd immunity.

Untuk menunggu vaksin juga, ini yang belum jelas tentang apakah bisa cepat ditemukan dan seberapa efektif. Olehnya pilihan yang ada saat ini adalah terus menekan angka penularan dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Apa yang kita lakukan sejauh ini, itu yang masih bisa terus diperkuat, tetap social distancing. Kalau terpaksa kerja ke luar ya tetap pakai masker, social distancing, dan jangan lupa jaga daya tahan tubuh,” jelas Henry.

Transparansi Anggaran Covid-19

Soal penggunaan anggaran refocusing Covid-19 yang mencapai Rp400 miliar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, tampak hanya mengumumkan realisasi penggunaannya melalui BPKAD bila diwawancara oleh wartawan.

Namun, khusus untuk informasi langsung kepada publik tidak ada. Misalnya pada laman <http://www.sultraprov.go.id/>, hingga 5 Agustus 2020 tidak ditemukan peraturan kepala daerah maupun pergub tentang anggaran refocusing yang ditayangkan. Begitu pula di laman <https://bappedasultra.go.id/> dan <http://bpkad.sultraprov.go.id/>.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Syaifullah mengatakan perkara soal refocusing itu memang tidak ada di laman resmi Pemrov Sultra (<http://www.sultraprov.go.id/>). Ia hanya mengarahkan untuk laman OPD, seperti BPKAD (<http://bpkad.sultraprov.go.id/>) atau untuk keperluan data langsung ke kantor BPKAD.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sultra, Firman mengatakan laporan penggunaan anggaran refocusing dan rinciannya itu dilaporkan secara berkala ke Kementerian Keuangan dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Dokumen-dokumen pun semacam perkara maupun laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 tidak ditayangkan di laman Pemprov secara online.

“Yang perkara 4 (tentang refocusing) itu tidak (ditayangkan secara online). Tapi kalau kita mau dalam kapasitas sebagai media bisa kita datang wawancara,” ucap Firman melalui telepon selulernya, Kamis (6/8/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sultra Andi Hatta mengatakan segala sesuatu tentang publik mestinya dipublikasikan karena merupakan hak publik, termasuk soal perkara refocusing tersebut. Namun dalam undang-undang informasi publik, ada hal-hal yang dikecualikan seperti persenjataan, rahasia negara, dan data pribadi.

“APBD dengan perubahannya itu kan masuk perda, berhak diketahui oleh publik. Malah kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dan mensosialisasikan semua perda dan peraturan perundang-undangan,” ujar Andi Hatta melalui telepon selulernya, 5 Agustus 2020.

Terkait tidak adanya data perkara tentang penganggaran Covid-19 di laman resmi Pemprov Sultra, Andi Hatta menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kominfo belum berjalan normal dan belum terkelola dengan baik. Salah satunya dapat dilihat, PPID tidak mengumumkan secara berkala informasi publik secara online.

Andi Hatta mengungkapkan sebenarnya ada sanksi bila pemerintah tidak mengumumkan informasi publik, tapi kurang efektif dalam konsep keterbukaan informasi. Bila diperkarakan prosesnya panjang, dan denda bisa Rp3 juta sampai Rp5 juta, yang pada akhirnya kembali pada negara. Cara yang lebih

efektif, kata Andi, lewat Ombudsman yang bisa menegur maupun merekomendasikan secara administrasi.

Untuk mengawal transparansi publik ini, Komisi Informasi Provinsi Sultra juga penuh dengan keterbatasan. Komisi ini kesulitan menjalankan tugas utamanya yakni mengantisipasi terjadinya gugatan antara publik dengan PPID provinsi.

Komisi informasi ini menyimpan masalah tersendiri. Komisi ini kata Andi dibentuk seperti diberi motor tapi tidak diberi bensin. Sekretariat khusus komisi tidak ada, ruang sidang tidak ada, kepala sekretariat juga tidak ada. Sementara dalam menjalankan tupoksinya komisi informasi butuh kepala sekretariat karena berfungsi sebagai panitera.

“Ruangan tempat kami itu di ruang rapatnya kadis kominfo yang dikavling sedikit. Tapi kan tidak ada juga fasilitas apa-apa di sana selain meja. Jadi tidak bisa menjalankan tupoksi secara penuh sebenarnya kita ini,” ucap Andi.

Komisi Informasi Provinsi Sultra ini mulai terbentuk dan dilantik pada 4 Oktober 2017 dengan lima anggota termasuk ketua. Mereka adalah Andi Hatta, Husnawati, Arifudin Bakri, Supriadin, dan Muhammad Jufri. Namun kini tersisa tiga orang karena Arifudin Bakri dan Supriadin sudah mengundurkan diri. Kata Andi, dari tahun lalu dirinya sudah mengusulkan pengganti antar waktu (PAW) untuk dua orang yang mengundurkan diri tersebut namun belum ada tanggapan pemerintah provinsi.

Sementara, Direktur Puspaham Sultra Kisran Makati mengatakan untuk informasi secara online tentang anggaran refocusing Pemprov memang sangat terbatas. Pihaknya hanya mendapat sedikit informasi melalui aplikasi sistem informasi rencana umum (sirup) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

“Kalau di LPSE itu kan artinya sudah ada proses tender. Misalnya informasi yang sudah ditender hanya dua tentang pengadaan bibit. Kalau yang di sirup hanya sebagian kecil informasinya, yang bersifat perencanaan, informasinya sementara dan bisa

berubah. Memang kenyataannya tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana covid,” ujar Kisran.

Saat ini Puspaham sedang berusaha mengumpulkan informasi tentang penganggaran covid. Selain mengumpulkan lewat pemberitaan media massa, mereka juga sedang mengajukan permintaan data detail penggunaan anggaran refocusing ke instansi-instansi pemprov.

Kisran mengatakan mungkin pihaknya tak akan mengajukan permintaan data andai saja pemprov mau terbuka secara online semua informasi, supaya bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Apalagi sudah ada laman-laman web pemprov yang mestinya dimanfaatkan dengan baik.(*)

Reporter: Muhamad Taslim Dalma

<https://zonasultra.com/dana-besar-covid-19-yang-transparansi-dan-efektivitasnya-dipertanyakan.html>

Yunita Kaunar

TERNATE GAGAP ATASI COVID-19: PAKSAKAN NEW NORMAL (I)

Tandaseru!Rabu, 12 Agustus 2020 06:50



Salah satu pasien COVID-19 dirujuk ke RSUD Chasan Boesoerie Ternate. (Wahyudi Mochtar).

Tandaseru -- Pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Provinsi Maluku Utara pada 23 Maret 2020. Namun, publik meyakini bahwa virus corona sudah masuk di wilayah Maluku Utara jauh hari sebelumnya.

Pada 7 Maret 2020 misalnya, kala itu ada salah satu warga berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang dicurigai

sudah terpapar COVID-19 karena memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta-Ternate. Warga tersebut langsung dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Maluku Utara untuk menjalani perawatan.

Di rumah sakit, petugas kesehatan lalu mengambil spesimennya untuk uji laboratorium di Jakarta. Ironisnya, sebelum hasil uji spesimen keluar pada 21 Maret 2020, pasien sudah dipulangkan ke rumahnya di Kecamatan Ternate Tengah dengan alasan kondisi kesehatan pasien sudah membaik karena telah melewati masa inkubasi selama 14 hari.



Pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Ternate dengan metode pemulasaran jenazah COVID-19.(Faris Bobero).

Namun pada 23 Maret 2020, tim medis di RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan menggunakan satu unit mobil ambulans lengkap dengan tim yang mengenakan Alat Pelindungan Diri (APD) tiba-tiba menuju ke kontrakan pasien tersebut. Ia dijemput untuk diisolasi lagi di RSUD Chasan Boesoirie karena hasil uji laboratorium spesimen dari Jakarta sudah keluar dan yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19 dengan status Pasien 01 di Ternate.

Masa tenggang waktu 2 hari berada di rumah, Pasien 01 sudah melakukan kontak fisik dengan anak dan istri. Akibatnya, sang anak (usia 24 tahun) dinyatakan positif pada tanggal 8 April 2020. Sementara sang istri dinyatakan negatif COVID-19.

“Karena kondisi fisiknya sudah membaik dan sudah 14 hari jadi kita pulangkan, ketika hasilnya keluar dan positif dia dijemput kembali oleh tim medis dengan protap kesehatan menggunakan APD lengkap,” ungkap dr. Rosita Alkatiri, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Utara, saat konferensi pers di Sahid Bela Hotel Ternate, Senin (23/3/2020).

Di tempat berbeda, Pasien 01 saat dikonfirmasi pada 26 Maret 2020 mengaku merasa tertekan dengan model penjemputan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Malut.

“Saya malu karena sudah dinyatakan sembuh tiba-tiba petugas datang menjemput dengan menggunakan APD lengkap. Saya malu karena banyak tetangga yang menyaksikan, dan takut juga tetangga bakal menjauhi anak saya dan keluarga,” ungkapnya dengan suara gemetar melalui sambungan telepon.

Tak butuh waktu lama setelah Pasien 01 Covid-19 diumumkan, Kota Ternate selaku pintu masuk Provinsi Maluku Utara harus bertindak. Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara langsung menyusun strategi pencegahan dini dan penanganan pandemi tersebut. Seperti menerapkan protokol kesehatan, penggunaan masker, pemasangan tempat cuci tangan di ruang publik hingga pembatasan kerumunan orang. Langkah ini mereka anggap efektif mengatasi virus corona.

Padahal kenyataan di lapangan korban terus-menerus berjatuh. Buktinya, pada 8 April 2020, Pemerintah kembali mengumumkan penambahan jumlah kasus positif. Kali ini yang mereka umumkan adalah Pasien 02. Lalu pada 15 April 2020 bertambah lagi 2 kasus positif baru.

Di tengah ketidakjelasan penanganan itu pada 22 April 2020,

Ketua Pengendalian dan Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate, M. Arif Abdul Gani lantas mengerahkan petugasnya untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah titik keramaian, seperti pasar, jalanan, rumah ibadah, rumah-rumah warga hingga taman kota pun tak luput dari aksi penyemprotan cairan yang dianggap ampuh membunuh virus itu.

Namun upaya ini dianggap tidak optimal karena setiap pekannya kasus baru terus-menerus melonjak. Misalnya pada 28 April 2020, di mana Pemerintah melalui Kepala Pengendalian dan Operasional Gugus Tugas M. Arif Abdul Gani kembali melaporkan jumlah kasus baru terus bertambah menjadi 10 kasus. Meski begitu, Arif mengaku upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan virus ini sudah masif dilakukan.

“Semua Prosedur tetap (Protap) kesehatan sudah kita lakukan, bahkan kita buat juga Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2020 tentang wajib menggunakan masker. Namun masih ada saja masyarakat yang tidak menaati protap tersebut,” kata Arif.

Setelah dikroscek di lapangan, pusat-pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, taman kota, masjid, pasar, café dan sejumlah tempat lainnya sudah memasang tempat cuci tangan. Namun masih ditemukan banyak masyarakat yang beraktifitas tidak menggunakan masker.

“Jika masih ada yang belum menggunakan itu hal yang wajar karena orang belum terbiasa dengan kondisi saat ini yang kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan. Kita sebagai pemerintah terus mengingatkan agar masyarakat harus patuh dengan protokol yang telah ditetapkan,” jelas Arif.

Teriakan Protes Pedagang di Pasar Higienis

Di tengah-tengah himpitan ekonomi di masa darurat pandemi, sejumlah pedagang di pasar Higienis Bahari Berkesan Kelurahan Gamalama, Kota Ternate mulai gerah dengan penerapan protokol

kesehatan. Akibatnya, pada 03 Mei 2020, muncullah gelombang protes dari pedagang secara besar-besaran. Usut punya usut, ratusan pedagang ini protes karena Pemerintah Kota Ternate mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah pedagang di pasar tersebut. Sementara di lain sisi, akses bandara di Ternate tetap dibuka.

Nurhayati, seorang pedagang di pasar itu mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Ternate membatasi jumlah pedagang, sedangkan akses Bandara Sultan Babullah Ternate tetap dibuka.



Seorang pedagang meneriakkan protes terhadap kebijakan Pemkot Ternate di tengah pandemi. (Zulkifli Ahmad Yusuf).

“Kami dilarang jualan di pasar sementara Bandara Babullah Ternate dibuka. Kami ini tidak membawa virus, yang bawa virus itu orang dari luar yang masuk ke Ternate,” kesal Nurhayati.

Menanggapi itu, Sekretaris Kota Ternate, Thamrin Alwi justru mengungkapkan aksi protes para pedagang ini berkaitan dengan penataan tempat berdagang. Di mana ada sejumlah pedagang yang enggan dipindahkan.

“Ada pedagang yang tidak mau dipindahkan. Saat ini pandemi jadi Pasar Higenis Bahari Berkesan harus ditata agar tidak berdempetan,” kata Thamrin.

Mengenai alasan Bandar Udara Sultan Babbullah Ternate tidak ditutup, Thamrin beralasan karena bandara itu merupakan pintu masuk utama orang-orang dari luar daerah sehingga tidak ditutup meskipun di rentang waktu bulan berjalan jumlah kasus baru COVID-19 yang tumbuh sudah mencapai 99 orang.

“Kita tidak bisa tutup bandara, jika ada instruksi dari pusat jika bandara ditutup baru kita minta agar ditutup,” kata Thamrin kala itu. Dia menegaskan, menutup atau membuka bandara adalah kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan.

Di tengah-tengah gelombang protes itu, kasus baru COVID-19 di Maluku Utara terus naik. Kondisi ini bahkan memaksa perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H pada 24 Mei 2020 dilakukan menggunakan standar protokol kesehatan.

Penerapan New Normal

Meski pada 4 Juni 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ternate sudah mencapai 113 pasien, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman justru bersikeras menerapkan tatanan kehidupan normal baru (New Normal) pada 5 Juni 2020. Penerapan new normal membuat semua pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan cafe dibuka saat transmisi lokal virus ini sudah menyerang warga Ternate.

“Penerapan normal baru ini, kita tetap patuh pada protap COVID-19. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan jaga imun agar tetap kuat,” kata Wali Kota Burhan.

Kebijakan ini menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Mereka menganggap kebijakan New Normal ini tidak mencerminkan respons cepat terhadap keadaan krisis.

Ridwan Yamko, Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pada Selasa (30/6/2020) mengungkapkan, naiknya jumlah pasien ini menunjukkan bahwa Pemerintah gagal menangani wabah ini. Menurutnya, rapid test saat ini tidak lagi maksimal karena tidak dapat memastikan orang itu terkonfirmasi positif.



Fasilitas cuci tangan mudah ditemui di ruang publik, namun angka kasus positif corona di Ternate terus meningkat. (Tandaseru/Yunita Kaunar).

“Kita itu terlambat dalam melakukan swab test, dan saat ini kita sudah masuk dalam transmisi lokal, artinya sangat rentan orang akan terpapar,” ungkapnya.

Pada 1 Juli 2020, Kepala Bidang Kajian Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Maluku Utara, Irwan Mustafa, mengatakan ada beberapa rekomendasi yang telah dikaji dan memenuhi persyaratan untuk direkomendasikan kepada Gugus Tugas Ternate untuk dilakukan Perbatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK), bukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penerapan PSBK ini hanya berskala kecamatan atau kelurahan. Artinya wilayah yang dianggap zona merah akan di-lock agar

aktivitas warga dibatasi dan tidak diperbolehkan memasuki zona hijau. Dalam rekomendasi itu, kata Irwan, area zona merah yang dimaksud meliputi Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan dan Pulau Ternate. Zona hijau diantaranya Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua.

“Skema kuncinya ya aktifkan tim gugus kelurahan atau RT/RW serta petugas kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) agar bisa pantau wilayah zona merah,” jabarnya. Sementara Kepala Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate M. Arif Gani ketika dikonfirmasi mengenai upaya penanganan di masa penerapan New Normal, Selasa (28/6/2020) mengungkapkan, pihaknya sudah menempatkan petugas untuk berjaga-jaga di empat pintu masuk jalur laut yakni di Pelabuhan Bastiong, Pelabuhan Semut, Pelabuhan Ahmad Yani, dan Pelabuhan Dufa-Dufa.

“Kita siapkan tenaga medis, dibantu juga dengan BPBD untuk menjaga pintu masuk agar semua orang yang masuk ke Ternate harus diperiksa suhu tubuh dan juga mengambil data setiap orang yang masuk maupun keluar dari Ternate,” jelas Arif.

Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kota Ternate

Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Maret–Agustus 2020

Tanggal/Bulan/Tahun	Total Kasus Positif COVID-19	Bulan
23 Maret 2020	1	23 – 31 Maret
01 April 2020	20	01 – 30 April
01 Mei 2020	99	01 – 30 Mei
01 Juni 2020	353	01 – 25 Juni
01 Juli 2020	616	01 – 26 Juli
27 Juli 2020	698	27 Juli – 11 Agustus

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ternate dr. Muhammad Sagaf melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Maret 23-31 terdapat 1 kasus, kemudian tanggal 1-30 April terdapat 20 kasus terkonfirmasi positif, 1-30 Mei bertambah 99 kasus, 1-25 Juni bertambah 353 kasus, dan 1-26 Juli bertambah 616 kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 698 kasus, di mana 18 di antaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara terdapat 1.691 kasus positif. Menurut Sagaf, Kota Ternate merupakan sentral Pasien COVID-19 terbanyak di Maluku Utara.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Nurbaity Rajabesi yang ditemui Kamis (9/7/2020) mengaku, kasus terkonfirmasi positif di Kota Ternate terus meningkat meskipun segala upaya telah dilakukan. Dikatakan, sejak virus ini masuk di Ternate hingga kini sudah tercatat sebanyak 1.200 jumlah APD yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Ternate, tersisa 400 yang belum digunakan. Sementara alat rapid test yang disiapkan sebanyak 5.000.

Ada juga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Provinsi Maluku Utara sebanyak 1.060 alat rapid test, sehingga totalnya menjadi 6.060. Sejauh ini yang sudah terpakai sebanyak 4.400 alat.

Penulis : Yunita Kaunar

<https://www.tandaseru.com/2020/08/12/ternate-gagap-atasi-covid-19-paksakan-new-normal-1/>

Yunita Kaunar

TERNATE GAGAP ATASI COVID-19: PAKSAKAN NEW NORMAL (2)

Tandaseru!Kamis, 13 Agustus 2020 01:13



Pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Ternate dengan metode pemulasaran jenazah COVID-19.(Faris Bobero).

Fasilitas Karantina dan Jumlah Tenaga Medis

Lokasi yang disiapkan sebagai tempat karantina pasien positif COVID-19 ditolak ramai-ramai oleh warga. Penolakan itu terjadi gedung Asrama Haji Ternate di Kelurahan Ngade, gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan Dufa-Dufa, Grand Majang Hotel Kelurahan Kampung Pisang, dan sejumlah titik lainnya. Penolakan itu dilakukan dengan membentangkan tulisan bertuliskan “*Kami Tolak Tempat Ini Menjadi Lokasi Karantina*” .



Spanduk penolakan warga atas penunjukan lokasi karantina di lingkungan tempat tinggal mereka. (Istimewa).

Menanggapi aksi penolakan itu, Juru Bicara Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Ternate dr Muhammad Sagaf mengaku, penolakan terjadi karena minimnya sosialisasi Gugus Tugas terhadap masyarakat setempat.

“kita akan pelan-pelan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata dr Muhammad Sagaf, 7 Mei 2020.

Meski ditolak warga di beberapa tempat, Pemerintah Kota Ternate berhasil mendapatkan dua hotel untuk dijadikan lokasi karantina pasien terkonfirmasi reaktif rapid test dan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, yakni Hotel Vellya dan Hotel Dragon.

Muhammad Sagaf mengungkapkan, dua tempat ini sudah mulai ditempati pasien terkonfirmasi positif sejak bulan Mei-Juni 2020. Namun karena setiap hari pasien terus bertambah banyak, pasien berstatus OTG (orang tanpa gejala) dipulangkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah.

“Karena dua hotel yang digunakan sudah penuh jadi pasien positif dengan status OTG kita lakukan karantina mandiri di rumah dengan pengawasan perawat di puskesmas lingkungan yang ditinggali pasien,” kata Muhammad.

Dalam penanganan COVID-19 di Ternate, jumlah tim medis yang disiapkan sebanyak 45 orang. 8 di antaranya ditugaskan di puskesmas, ruang isolasi sebanyak 4 orang, dan RSUD Chasan Boesoerie sebanyak 31 orang. 2 di antaranya merupakan dokter spesialis paru yang menangani pasien COVID-19.

Adapun penanganan sejumlah pasien positif COVID-19 yang tidak memiliki gejala hanya diberi vitamin C dan vitamin E, ditambah dengan menjaga pola makan, minum susu dan berolahraga.

Penolakan Protokol Pemakaman Pasien COVID-19

Gugus Tugas Kota Ternate juga menemui kendala lain dalam penanganan COVID-19. Yakni adanya penolakan pemulasaran jenazah sesuai protokol tetap COVID-19 terhadap pasien suspek corona maupun pasien terkonfirmasi positif.

Salah satu penolakan muncul dari keluarga Adi, warga Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara. Sang ibu yang meninggal dunia di rumah sakit COVID-19 harus dimakamkan dengan pemulasaran jenazah sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Ini mendapat penolakan pihak keluarga.

Adi bilang, sang ibu sakit sejak 4 Juni 2020 dan dirujuk ke RSUD Chasan Boesoerie. Ketika dirawat, kata Adi, ibunya tidak dilayani dengan protap COVID-19. Namun begitu meninggal dunia pihak RSUD meminta pasien dimakamkan dengan protak

COVID-19. Hal ini membuat keluarga bertanya-tanya dan menuntut penjelasan.

“Ibu sejak awal dirawat dengan penyakit penyerta jantung, dan ibu sudah lama sakit. Sejak awal ibu masuk saya dan kakak saya bergantian menjaga ibu di RSUD CB. Ketika ibu meninggal pihak RSUD CB meminta untuk dimakamkan dengan protap COVID-19,” ujarnya.



Prosesi pemakaman jenazah karyawan PT NHM. (Azhar Arfane).

Ia juga pernah memohon kepada petugas saat mengkremasi ibunya di ruang jenazah untuk dibawa pulang, tetapi ia dimarahi oleh petugas tersebut.

Penolakan pemakaman pasien dengan status PDP di kota Ternate terjadi pada tanggal 13 Juni 2020. Ironisnya, pasien dengan status PDP diboyong keluarga dengan menggunakan mobil Toyota Rush pada pukul 07.30 pagi.

Fitra, salah satu anak pasien membenarkan penolakan dari pihak keluarganya untuk pemulasaran jenazah sesuai protap

COVID-19. Ia mengaku ada penolakan lantaran sejak ibunya dirawat pada 12 Juni 2020 tidak menggunakan protokol COVID-19. Namun ketika meninggal beberapa jam kemudian pihak rumah sakit meminta dimakamkan dengan protap pemulasaran jenazah COVID-19.

“Kami mengambil (jenazah) secara paksa karena sejak awal mama tidak dirawat dengan protap COVID-19. Saat meninggal saja baru diminta untuk dimakamkan dengan protap COVID-19, makanya keluarga paksa untuk bawa pulang,” ungkapnya dengan nada kesal.

“Mama itu punya penyakit penyerta sakit jantung, saya juga turut merawat beliau. Ketika mama meninggal diminta menggunakan protap COVID-19, kami sekeluarga tolak. Lagian saat itu mama masih dengan status PDP belum dinyatakan positif,” kata Fitra ketika dikonfirmasi (12/6/2020).

Fitra juga mengaku petugas di rumah sakit rujukan itu sempat meminta dirinya menandatangani persetujuan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19.

“Saya dan keluarga tolak untuk tanda tangan surat persetujuan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19,” kata dia. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tanggal 26 Juli 2020, angka kematian untuk kasus pasien yang dimakamkan dengan menggunakan protap COVID -19 sebanyak 18 kasus. Wakil Direktur RSUD Chasan Boesoirie Zubaeda Drakel ketika dihubungi melalui sambungan telepon Selasa 28 Juli 2020 mengaku pasien yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 merupakan pasien dengan status positif COVID-19 atau pasien dengan status PDP, ODP dan OTG.

“Jika pasien merupakan pasien dengan status OTG, ODP, PDP maupun status positif maka pemakamannya menggunakan protokol COVID-19,” jelas Zubaeda Drakel.

Per 12 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ternate sebanyak 709 (Provinsi Maluku Utara

1.709 kasus), di mana 18 orang di antaranya meninggal dunia dan 574 orang dinyatakan sembuh.

<https://www.tandaseru.com/2020/08/13/ternate-gagap-atasi-covid-19-tenaga-kesehatan-kurang-penolakan-dari-warga-2/2/>

Manfred Kudiai dan tim

AGAR COVID-19 CUKUP DI NABIRE SAJA

Agustus 2020



Nabire City. (sumber: google).

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, Indonesia dengan jumlah penduduk 147.921 jiwa (2018), saat ini menjadi salah satu Kabupaten yang terpapar Covid-19. Perkembangan terakhir, Kabupaten Nabire bertambah 10 kasus pasien positif Covid-19 (12/8), ini urutan kedua setelah Kabupaten Mimika yang bertambah 11 orang.

Tim Satuan Tugas Covid-19 Papua pada Rabu (12/8/2020) mengumumkan 31 kasus baru pasien terinfeksi virus korona di provinsi itu. Dengan tambahan 31 kasus baru itu, total kasus

kumulatif Covid-19 bertambah menjadi 3.225 kasus di provinsi Papua.

Sejumlah 31 kasus baru berasal dari Kabupaten Mimika (11 kasus), Kabupaten Nabire (10 kasus), Kabupaten Lanny Jaya (4 kasus), Kabupaten Biak Numfor (3 kasus), Kabupaten Jayapura (1 kasus), Kabupaten Pegunungan Bintang (1 kasus), dan Kabupaten Merauke (1 kasus). Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Papua secara khusus memantau tingginya pertambahan kasus baru di Mimika dan Nabire.

Tingginya pertambahan pasien Covid-19 di Nabire sangat mengkhawatirkan banyak pihak, karena kabupaten ini adalah pintu masuk menuju 4 kabupaten lain di pegunungan. Kabupaten Nabire berada di wilayah adat Meepago, bersama Kabupaten Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai. Disebut pintu masuk, karena Nabire mempunyai pelabuhan laut dan bandara yang menghubungkan dengan Jayapura, ibukota provinsi dan daerah luar Papua. Mereka yang hendak berkunjung ke Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai, mesti mendarat dulu di pelabuhan atau bandara Nabire, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke 4 kabupaten itu lewat jalan darat atau udara (pesawat kecil).

Benteng pertahanan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Nabire itu runtuh paska ditemukan tiga pasien positif Covid-19 dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 17 April 2020 di Nabire. Untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, maka Rumah Sakit Unit Daerah (RSUD) Nabire ditunjuk sebagai rumah sakit satu-satunya yang menangani pasien Covid-19 di wilayah Kabupaten Nabire dan kabupaten sekitarnya.

Karena posisi Nabire sebagai pintu masuk, maka penanganan wabah ini harus lebih ketat, mengingat minimnya fasilitas kesehatan di empat kabupaten tersebut. Nabire diharapkan mampu menekan laju penyebaran virus ini sehingga tidak berdampak ke 4 kabupaten di pegunungan.

Upaya pencegahan lebih lanjut, para bupati di wilayah ini tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago telah melakukan

pertemuan pada tanggal 16 April 2020 di KM 100 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire. Bupati Nabire, Isaias Douw memimpin langsung jalannya pertemuan yang dihadiri empat bupati lainnya, antara lain Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa; Bupati Deiyai, Aten Edowai; Bupati Intan Jaya, Meki Nawipa dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Oktovianus Gobai.

Dalam pertemuan itu, salah satu poin yang disepakati akan ada kucuran dana senilai 1 miliar dan alat kesehatan dari tiap kabupaten lain yaitu Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya kepada pemerintah Nabire guna memperketat penanganan dan pencegahan agar tidak menyebar ke wilayah Meepago.

Dana untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Nabire yang sudah ada saat ini, berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya, sebanyak Rp. 33.882.366.989,54 berasal dari APBD Kabupaten Nabire yang merupakan hasil pemotongan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sumber lainnya, dari pemerintah Provinsi Papua yang telah mentransfer Rp. 7.000.000.000. Sementara dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan DAK Penugasan yang diperkirakan total nilainya 28 milyar rupiah, sampai saat ini belum ada.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD) Nabire, Slamet, SE, M.Si mengatakan untuk dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire.

Dana dan APD Terbatas

Ditemui di ruang kerjanya, Direktur RSUD Nabire, Papua, Direktur RSUD Nabire dr. Andreas Pekey, Sp.PD mengatakan, perkembangan Covid-19 masih terus mengalami kenaikan dan tidak menutup kemungkinan RSUD Nabire akan ditutup untuk sementara waktu jika pasien naik terus sementara dana terbatas.

Gejala Covid-19 ini tidak jelas tetapi yang paling umum adalah pasien mengalami gejala demam. Demam yang dialami kebanyakan berasal dari batuk dan flu. Bisa disertai dengan sesak nafas, atau diare. Untuk itu, petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu ini karena pada umumnya demam, walaupun tidak selalu.

“Jadi, kalau soal gejala, kita tidak bisa pastikan bahwa pasien flu dinyatakan terkena Covid-19. Jadi untuk memastikannya, terhadap pasien yang terkena flu, demam dan sesak nafas, kami melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini kami melakukan pemeriksaan PCR Swab,” jelas Pekey.

PCR Test adalah kependekan dari Polymerase Chain Reaction. Para ahli dan dokter sejatinya lebih menyarankan pemerintah mendeteksi virus penyebab Covid-19 menggunakan rapid moleculer test berbasis PCR. Pemeriksaan PCR tidaklah murah, sehingga hal tersebut menjadi kendala pihak RSUD Nabire.

“Kami punya alat tetapi bahan untuk periksa itu, kita harus didatangkan dari luar Papua melalui Dinas Kesehatan,” katanya.

Sebelum 1 Juni 2020, pasien di Nabire untuk uji tes swab, spesimennya harus dibawa ke di Jayapura atau di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) provinsi Papua. Ini membuat lamanya waktu pasien untuk mengetahui hasil laboratorium.

Per 1 Juni 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire telah memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang juga berfungsi untuk menguji sampel swab Covid-19. Pasien bisa segera dilayani mendapatkan hasil dengan melakukan tes swab di Nabire, tidak perlu lagi mengirimkan sampel swab Covid-19 ke Litbangkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

TCM dapat beroperasi jika ada alat khusus atau catridge untuk memeriksa Covid-19. Karena awalnya alat TCM ini adalah untuk menguji tuberkolosis. Dengan ditambah cartridge khusus, TCM bisa memeriksa Covid-19. Namun tidak mudah mendatangkan

peralatan kesehatan seperti cartidge maupun yang lainnya ke Nabire, karena ada kebijakan lockdown provinsi.

“Bukan hanya peralatan Covid-19 saja tetapi hampir seluruh alat layanan juga tertahan gara-gara lockdown. Dengan demikian, kami harus mencari cara bagaimana agar peralatan medis tersebut sampai di Nabire,” katanya.

Untuk persediaan APD (alat perlindungan diri) bagi tenaga kesehatan juga terbatas, padahal dibutuhkan untuk pencegahan ketika memeriksa pasien meskipun belum tentu terpapar virus Covid-19. Pada pasien yang masuk kategori ODP (Orang dalam Pemantauan), tingkat kehati-hatian sudah harus dilakukan. ODP adalah mereka yang mengalami demam, flu tapi tidak disertai sesak napas/ radang .

“Bagi ODP, sebelum kami lakukan pemeriksaan lanjut, kami harus menggunakan masker. Sebab kami belum tahu, apakah pasien tersebut terkena Covid-19 atau tidak sehingga lebih utama melindungi diri sebelum menangani pasien,” kata Pekey lagi.

Namun RSUD Nabire mengalami kendala, di antaranya adalah fasilitas alat kesehatan yang minim serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan di RSUD Nabire.

“Kalau misalnya Pemerintah mau dan sungguh-sungguh untuk memastikan berapa banyak PDP, ODP dan lainnya, maka semua masyarakat yang bergejala atau sakit itu harus menjalani pemeriksaan Covid-19. Tapi masalahnya adalah berapa dana yang disediakan?” tanya Pekey.

Karena peralatan kesehatan yang tersedia terbatas, sementara orang yang sakit terus bertambah banyak, akhirnya pihak RSUD Nabire menerapkan kebijakan penggunaan APD maupun pemeriksaan Covid-19 hanya diterapkan pada pasien yang memang betul-betul dicurigai. Tidak semua orang yang mengalami gejala demam, flu dan lainnya diperiksa tes Covid-19 terlebih dulu. Ini karena dana dari kabupaten sudah habis,

sehingga harus berhemat. Begitu juga dengan APD bagi tenaga kesehatan yang terbatas, apalagi jika sampai di Papua harga APD bisa sangat mahal. Pakaian lengkap APD 1 set mencapai 1 juta di Nabire.

“Misalnya saja lima orang memakai APD dalam waktu yang bersamaan. Dokter, perawat, petugas cleaning service, yang masuk ke ruangan isolasi itu kan mereka wajib pakai juga. Sedangkan harganya satu set satu jutaan. Untuk satu hari saja mencapai lima juta. Sekarang dikali dengan berapa lama kita rawat pasien. Apakah pemerintah daerah mampu membiayai itu semua?” tanya Pekey lagi.

RSUD Nabire menerima alokasi dana dari Pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini sebesar 5 miliar. Ini merupakan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah disalurkan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Nabire.

“Dana 5 M ini digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan modifikasi ruang perawatan menjadi ruang isolasi; pengadaan APD, alokasi untuk cartridge, transportasi obat-obatan dari Jayapura ke Nabire,” jelas Pekey, saat dihubungi Rabu, (12/08).

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Yeremias Degei, Kabag Humas Kabupaten Nabire. Dalam penjelasannya, Degei mengatakan dana telah disalurkan untuk penanganan Covid-19 seperti ruang isolasi dan perlengkapan lain yang dibutuhkan sudah belanjakan ventilator (alat bantu nafas), alat PCR dan penambahan alat lain-lain untuk membantu proses pemeriksaan pasien Covid-19 di Nabire.

Yeremias Degei mengatakan Covid-19 merupakan pandemi global dimana siapapun yang memiliki paru-paru berpotensi terpapar virus ini.

“Jadi tidak ada satu penyakit pun di dunia ini yang rasis. Bahwa ada pernyataan maupun informasi dari intelektual maupun masyarakat, bahkan dari hamba Tuhan yang mengatakan bahwa

Covid-19 hanya menyerang orang pendatang (non Papua), itu tidak benar. Buktinya ada di sini, ada dua pasien orang asli Papua,” kata Degei di ruang kerjanya, Selasa (21/07/2020).

Di Timika dan Jayapura, pasien Covid-19 telah mencapai 300-an orang, dan dari jumlah itu orang asli Papua hampir 200 kasus. Jadi, Degei meminta masyarakat untuk tidak menganggap sepele Covid-19. Apalagi orang Mee dan suku lain di Nabire, ketika sakit mulai parah baru mau berobat ke rumah sakit. Apalagi penyakit seperti flu, batuk, demam atau sesak nafas itu dianggap biasa.

“Ketika satu orang kena, dia akan pergi dan bertemu lebih dari 10 orang. Hari ini bertemu kelompok ini, besok bertemu lagi dengan kelompok yang lain. Saat itu OTG (Orang Tanpa Gejala) menyebarkan virus ini ke banyak orang. Dan ini berbahaya sekali,” jelas Degei.

Direktur RSUD Nabire, dokter Andreas Pekey juga khawatir kondisi layanan kesehatan di 4 Kabupaten lain di daerah adat Meepago. Di Kabupaten Intan Jaya belum memiliki rumah sakit sama sekali, hanya memiliki 6 puskesmas: 1) Puskesmas Agasiga yang terletak di Distrik Agisiga, 2) Puskesmas Bilogani, Distrik Sugapa, 3) Puskesmas Danggatadi, Distrik Biandoga, 4) Puskesmas Hitadipa, Distrik Hitadipa, 5) Puskesmas Pogapa, Distrik Homeyo dan 6) Puskesmas Wandae, Distrik Wandai yang terletak di Sugapa, Ibukota Intan Jaya.

Sebenarnya Pemda Intan Jaya telah membangun RSUD di Desa Wapoga akan tetapi sampai saat ini pelayanan di RSUD belum berjalan akibat insiden Pilkada sebelumnya, yang membuat terjadi kerusakan di peralatan RSUD.

Sedangkan untuk Kabupaten Dogiyai, terdapat 15 Puskesmas termasuk satu unit RSUD Dogyai yakni, RSUD Pratama Dogiyai. Namun Rumah Sakit ini minim fasilitas dan jarang aktif. Sementara di Kabupaten Deiyai telah memiliki rumah sakit meski tidak memiliki dokter spesialis. Dokter umum pun hanya ada 2-3 orang. Sedangkan di Kabupaten Paniai kondisi di sana lebih baik, karena memiliki RSUD yang sudah masuk kategori Tipe C.

Kondisi layanan kesehatan yang minim di 4 Kabupaten tersebut, membuat selama ini, jika ada warga yang sakit keras maka harus dibawa ke RSUD Nabire yang lebih lengkap. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Tentu ini membutuhkan biaya besar bagi warga.

“Jadi, kita siap menangani Covid-19 tapi yang perlu diingat bahwa hanya ada satu rumah sakit di Nabire. Berbeda jauh dengan kabupaten lain di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di Timika ada tiga rumah sakit. Begitu pun dengan Merauke, terdapat tiga rumah sakit. Di Jayapura terdapat sekitar tujuh lebih. Di Biak ada tiga. Di Sorong juga ada tiga dan di beberapa tempat lainnya,” ujar Pekey.

Hampir semua telah memiliki lebih dari dua rumah sakit tetapi di Nabire yang juga adalah pintu masuknya empat kabupaten di wilayah Meepago hanya satu RSUD.

Pekey melanjutkan bahwa RSUD Nabire juga melayani beberapa pasien yang berasal dari beberapa tempat termasuk Kabupaten Wasior, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Serui. Untuk pasien umum sesuai data base yang ada, RSUD Nabire saat ini melayani pasien dari 11 Kabupaten. Jika angka pasien Covid-19 meningkat di kabupaten-kabupaten tersebut, ada kemungkinan juga dirujuk ke RSUD Nabire.

“Kita mestiantisipasi adalah dari Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya. Nabire sudah siap alat, petugas, dan ruang isolasi. Masalahnya, jika kasus ini bertambah maka RSUD Nabire terancam bahkan bisa ditutup. Apalagi saat ini jumlah pasien Covid-19 mencapai 25 kasus. Tujuh orang masih diisolasi dan sisanya dinyatakan sembuh,” jelas Pekey lagi.

Berkaca dari berbagai kasus di daerah lain, lanjut Pekey, terutama di Jayapura yang memiliki sekitar tujuh rumah sakit terancam tutup karena petugas medis terinfeksi Covid-19, RSUD Nabire perlu mengantisipasi hal serupa terjadi di Nabire dengan membatasi jam layanan.

Menurut Pekey yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Meepago, Nabire sudah harus membuka tiga atau empat unit rumah sakit lagi. Di Dogiyai, harus mulai aktif dengan mendatangkan dokter spesialis. Begitupun dengan Deiyai dan Intan Jaya.

Menurut Yeremias Degei, Pemda Nabire telah melakukan rapid tes terhadap 4.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari mereka yang sudah melakukan kontak langsung dengan ODP dan PDP. Termasuk para pihak yang terdampak, misalnya karyawan bank dan sopir angkutan kota.

“Mereka itu pihak yang beresiko karena pekerjaan mereka mengharuskan berinteraksi dengan banyak orang. Ini langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda Nabire,” jelasnya.

Penutupan Akses, Mahasiswa Diberangkatkan ke Jayapura

Dalam pertemuan kelima para Bupati Meepago pada Kamis (16/07/2020), secara khusus mereka membahas dan membicarakan berbagai upaya agar Covid-19 hanya bertahan di Nabire tidak menyebar. Langkah yang diambil antara lain: Pertama, menutup bandara dan pelabuhan selama dua minggu ke depan. Kedua, dengan demikian Pemda Nabire akan memfasilitasi mahasiswa baik mahasiswa baru maupun lama untuk berangkat kuliah ke Jayapura.

“Wilayah Laa Pago sudah jebol, di beberapa kabupaten sudah masuk. Ini kalau, Covid-19 masuk di wilayah Meepago (Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Paniai) ini sangat bahaya. Karena itu kebijakan yang dibuat oleh para bupati, baik penutupan jalan darat, udara dan laut, adalah kebijakan untuk melindungi masyarakat,” kata Yeremias Degei.

Namun kebijakan para bupati ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa asal Meepago yang hendak melanjutkan kuliah melakukan aksi protes pada Selasa

(21/07/2020) di depan kantor bupati Nabire. Mereka meminta Pemda Nabire menyediakan transportasi untuk melanjutkan studi di kota studi masing-masing.

Menurut Yeremias Degei, pihak yang melakukan protes, meminta akses dibuka hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Sementara pihak yang bertanggung jawab adalah para bupati.

“Jadi, mereka yang banyak protes kepada pemerintah tidak berpikir tentang keselamatan kelompok besar masyarakat Meepago yang ada di Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiyai,” bebernya.

Sementara itu, mahasiswa meminta kepada Pemda Nabire untuk menyiapkan kapal mengingat jadwal pesawat belum pasti karena jadwal pendaftaran di beberapa perguruan tinggi di Jayapura maupun di luar Papua memasuki gelombang ketiga dan ini berdampak buruk bagi kelanjutan studi mereka.

“Kami minta, mahasiswa baru yang hendak mau ke Jayapura, dalam minggu ini harus diutamakan bagi mahasiswa baru, dan mahasiswa lama pada minggu kedua,” pinta Hubertus Dogomo, salah satu peserta aksi protes pada 21 Juli lalu.

Keinginan mahasiswa di Nabire untuk berangkat ke Jayapura disebabkan Universitas Cendrawasih (Uncen) dan beberapa PTS di Jayapura tidak memberlakukan kuliah jarak jauh atau online. Sehingga mahasiswa di Nabire yang kuliah di Uncen, harus segera menuju Jayapura untuk kuliah.

Sebenarnya pada tanggal 18 Maret 2020, Rektor Uncen menghentikan perkuliahan untuk cegah Covid-19 dan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun justru kebijakan ini ditolak oleh mahasiswa Universitas Cendrawasih dan beberapa PTS/PTN di Kota Jayapura. Mahasiswa Uncen Yulianus Boma mengatakan, “Kuliah secara online ini, kami menyatakan tolak dengan tegas. Karena

kebanyakan yang sedang kuliah di kampus Uncen ini tidak kenal dengan IPTEK Online dan ada banyak mahasiswa-mahasiswi juga yang belum sama sekali tidak kenal. “

Maka mulai masa perkuliahan semester ganjil ini (Agustus), Universitas Cendrawasih dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jayapura memberlakukan kembali sistem kuliah tatap muka.

Menanggapi hal tersebut, Isaias Douw, Bupati Kabupaten Nabire mengatakan pihaknya berusaha mendapat pesawat dan kapal berangkat ke Jayapura untuk keperluan para mahasiswa tersebut.

“Saat ini Pemda Kabupaten-kabupaten di wilayah adat Meepago sepakat untuk membiayai pelajar yang baru tamat dari SMA/SMK sederajat yang hendak melanjutkan kuliah ke Jayapura. Tidak hanya bagi mahasiswa baru tetapi bagi mahasiswa lama yang sedang menyusun tugas akhir sehingga mereka akan diberangkatkan bersama dengan mahasiswa baru ke ke Jayapura. Bagi mahasiswa lain, Pemda akan menyediakan kapal,” kata Isaias Douw.

Mahasiswa yang akan berangkat harus memenuhi persyaratan menjalani rapid tes di Nabire. Apabila ada yang ingin melanjutkan perjalanan ke luar Jayapura atau luar Papua, biaya perjalanan menjadi tanggung jawab pribadi.

Data di Pemda tercatat ada 1.000 lebih mahasiswa dan calon mahasiswa yang berencana berangkat ke Jayapura. Keberangkatan mereka ini dilakukan bertahap. Tanggal 12 Agustus 2020 kemarin adalah keberangkatan tahap ketiga, sebanyak 116 pelajar dan mahasiswa. Sebelumnya Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Isaias Douw, S.Sos.MAP telah melepas 300 mahasiswa menggunakan pesawat udara sebanyak 5 flight dan sebanyak 600 lebih mahasiswa menggunakan dua kapal laut bertujuan ke Jayapura. Sehingga total sudah 1.000 lebih mahasiswa dan pelajar diberangkatkan ke Jayapura dari Nabire.

Seluruh biaya keberangkatan mereka ditanggung oleh Asosiasi Bupati Wilayah Meepago. Karena mahasiswa dan calon mahasiswa tersebut berasal dari Wilayah Adat Meepago, Papua: Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, dan Intan Jaya.

Bantuan Kepada Mahasiswa

Selama pandemi ini, Pemda Nabire juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi mahasiswa dan masyarakat di Nabire.

“Terkait bantuan sosial, Kabupaten Nabire yang telah melakukan penyaluran bantuan kepada mahasiswa, setiap mahasiswa mendapatkan satu juta rupiah, kabupaten-kabupaten lain di wilayah Mee Pago juga melakukan hal yang serupa,” kata Yeremias Degei.

Terkait dana mahasiswa, lanjut Yeremias Degei, kuota yang disediakan hanya untuk 300-an mahasiswa. Jadi dana itu terbatas. Padahal jumlah mahasiswa yang terdata mencapai 800 mahasiswa.

Selain menyalurkan BLT, Pemda Nabire juga telah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah sosialisasi bahaya Covid-19 kepada masyarakat dengan memanfaatkan beberapa perangkat media seperti: 15 baliho di 15 titik Kota Nabire, selain juga memberi pengumuman melalui mobil komando, media massa dan RRI Nabire. Pendekatan dan sosialisasi langsung pada komunitas, seperti Komunitas Enaimo juga dilakukan.

“Untuk penerapan protokol kesehatan, sosialisasi dilakukan ke pasar-pasar tradisional meski kadang diabaikan oleh para pedagang di pasar. Terutama Mama-mama pedagang,” sesal Degei.

Tidak Ada Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi yang mana diatur dalam Undang-

Undang No. 14 tahun 2008 tidak maksimal dijalankan oleh Pemda Nabire. Apa lagi soal pengalokasian dana penanganan Covid-19 yang simpan siur dan tidak tersampaikan ke publik secara transparan.

BLT yang seharusnya diterima masyarakat sebesar 600 ribu, di beberapa desa, dari hasil pantauan redaksi Kabar Mapeгаа, setiap KK di Distrik Uwapa hanya menerima 300 ribu per KK. Sementara itu salah satu warga Nabire, Alfredus Pekei mengatakan, dirinya hanya mendapatkan 250 ribu untuk BLT. Keluhan yang didengarnya dari desa lain yaitu setiap KK hanya mendapatkan 150 ribu rupiah.

Sementara itu, Jubir Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP), Mikael Kudiai mengatakan pihaknya tidak lihat secara detail ke dalam (Pemda Nabire -red) tetapi pihaknya paham bahwa dana penanganan dan Protokol Covid-19 sangat besar dari Kementerian Kesehatan RI.

“Khusus untuk Nabire, ada dana dari Kementerian RI, ditambah Asosiasi Bupati Meepago di mana masing-masing bupati menyumbang 1 M untuk Nabire. Sayangnya, sejauh yang saya lihat, Tim Gugus Covid-19 tidak maksimal dalam pencegahan, buktinya sudah ada 2 orang di minggu ini” jelas Mikael saat di temui di Sekretariat (APAP), Jalan Yapris, Nabire Papua, (24/07/2020).

Melihat perkembangan Covid-19, kata Kudiai, angka terakhir yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait jumlah orang terpapar virus ini, ada yang sembuh, ada yang masih dirawat. Ada juga yang masih berstatus OPD, PDP. Artinya bahwa Covid-19 ini masih ada, belum selesai.

“Jadi kita harus melihat Nabire secara keseluruhan. Saat ini masih dalam status kewaspadaan tetapi apa yang dikerjakan Tim Gugus Tugas tidak maksimal. Dana sudah besar tetapi masih ditemukan kasus,” paparnya.

Ia mencontoh Italia, Cina dan Kuba yang melakukan pemeriksaan

massal. Sayangnya, di Indonesia tidak. Alasannya karena dana tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan massal.

“Kita hanya bisa buat status waspada, tetap gunakan masker dan lain-lain mengingat fasilitas medis yang minim sehingga kewaspadaan itu sangat penting,” ujarnya lagi.

Penanganan Covid-19 Tidak Maksimal

Masyarakat adat Nabire yang terdampak Covid-19, atas nama Adam Dimi juga menuturkan kekecewaan teradap pemerintah dan Tim Gugus Covid-19.

“Akses, dana yang dikasih itu besar, padahal protokol yang disampaikan pemerintahan itu tidak sampai ke masyarakat. Buktinya di tempat-tempat umum tidak tersedia, tempat cuci tangan maupun hand sanitizer.

Menurut Dimi karena statusnya, pemerintah gratiskan rapid tes. Dana yang diberikan itu besar jadi jangan tunggu gejala baru dilakukan pemeriksaan. Jangan tunggu masyarakat ke rumah sakit baru diperiksa. Apalagi masih dipungut biaya lagi. Inikan tidak sesuai dengan amanah.

Semasa Covid-19 melanda Nabire, beberapa relawan yang tergabung dalam komunitas-komunitas inisiatif melakukan sosialisasi dan membagi-bagi masker dan sembako bagi yang membutuhkan. Salah satunya adalah APAP.

“Mengenai Covid-19, kami telah membantu mama-mama Pasar yang terdata. Kami memberi masker bagi mama-mama pasar,” jelas Aholiab Pekei selaku Sekretaris di Asosiasi Pedangan Asli Papua (APAP).

Kata dia, kondisi sekarang setelah new normal, setelah membuka transportasi, pihaknya akan kembali melakukan kegiatan sosial ini.

“Sembako, itu penting, kios-kos dihimbau Pemda untuk tutup.

Sementara jalur masuk sembako juga ditutup sehingga APAP juga pernah melakukan penggalangan sembako untuk dibagikan kepada mama-mama Pasar,” ujar Aholiab Pekei.

Pihaknya juga mengaku ikut mengkampanyekan bahaya pada Covid-19 kepada masyarakat luas. Kegiatan APAP adalah kegiatan sosial rakyat bantu rakyat.

“Tidak ada campur tangan Pemda Nabire dalam hal ini Team Gugus Tugas Covid-19,” kata Pekei.

Pekei berharap, Tim Gugus Covid-19 bergandengan tangan dengan komunitas-komunitas yang ada agar ini menjadi kerja bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Standar dunia yang ditetapkan WHO, tes yang betul itu adalah tes swab, karena mendeteksi dengan tepat. WHO tidak merekomendasikan rapid test, karena kurang akurat. Lalu minimal 1 orang per 1.000 penduduk, sebaiknya dites swab, untuk mengetahui persebaran Covid.

Kemudian update terkini jumlah terpapar Covi-19 di Inonesia, per 22 Agustus 2020 di 34 Provinsi, 485 Kabupaten terkonfirmasi 151.498 orang. Pasien yang sembuh terdapat 105.198 orang dan mninggal Dunia terdapat 6.594 orang.

Per 14 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi postif Covid-19 di Kabupaten Nabire secara kumulatif telah menembus angka 65 kasus. Dari jumlah ini, 29 kasus telah dinyatakan sembuh secara medis dan telah dipulangkan, sementara 36 orang masih dirawat. Kasus meninggal hingga saat ini belum ada.

Kepada humas.nabirekab.go.id, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nabire, dr. Frans Sayori mengatakan, “Mereka yang dirawat masing-masing 31 dirawat di Diklat, 5 di ruang isolasi RSUD. Kondisi pasien di Diklat ringan bahkan tanpa gejala,” kata dr. Sayori.

Sebanyak 36 pasien yang masih dirawat tersebut terdiri dari masing-masing 22 orang dari Paniai, 12 dari Deiyai, dan 3 orang dari Nabire.

Alokasi Dana Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nabire

NO	JUMLAH DANA	ASAL DANA	PERUNTUKAN
1	7 Milyar	Provinsi Papua	Dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua senilai 7 milyar rupiah telah direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire
2	33 Milyar lebih	Pemotongan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	<p>Sesuai laporan bulan Mei 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> total dana penanganan kesehatan sebesar Rp. 16.482.366.989,54. <p>Terbagi masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak terduga (DID) sebesar Rp. 4.448.913.000 <p>Telah terealisasi sebesar Rp. 4.400.000.000 (98,9%),</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak terduga (DAU) sebesar Rp. 500.000.000 <p>Telah terealisasi sebesar Rp. 500.000.000 (100%),</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak terduga (DBH) sebesar Rp. 8.836.778.139 <p>Telah terealisasi sebesar Rp. 7.670.000.000 (86,80%),</p> <ul style="list-style-type: none"> Belanja tidak terduga (SILPA OTSUS) Rp. 2.696.675.850,54 <p>Telah terealisasi sebesar Rp. 2.446.600.000 (90,73%).</p> <p>Dari total anggaran Rp. 16.482.366.989,54 yang telah terealisasi sebesar Rp. 15.016.600.000 (91,11%).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sementara untuk penanganan dampak ekonomi, anggaran yang dialokasikan Rp. 5.100.000.000.

3	4 Milyar	Dana dari Empat Kabupaten (Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai)	Setiap empat kabupaten akan menyumbang 1 M. Hal itu di bahasa saat pertemuan pada tanggal 16 April 2020 di KM 100 Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
4	50 M lebih.	Dana Otus untuk Pemda Nabire	Dipotong untuk PON

Pewarta: Manfred Kudiai

https://kabarmapegaa.com/ArtikelBaca%20agar_covid-19_cukup_di_nabire_sajahtml?fbclid=IwAR04oSp0Y8eG2FGq7QBWUtAy6t6hC5iE-H5xx6UfsLMXpblTVkXLc3bah8kw

Riska dan tim

MENGAIS REZEKI DI TENGAH KOTA NYARIS MATI

30 Agustus 2020



[Ilustrasi] Suasana di Kota Lama Semarang saat pandemi Covid-19. (serat.id/A.Arif).

Sebagian pedagang barang bekas dan antik di kota lama beralih ke online tapi hasilnya tak maksimal.

Serat.id – Suwarni berusaha tabah di tengah kesunyian saat menunggui lapak kaki lima di kawasan kota lama yang ia kelola. Perempuan berusia 51 tahun itu masih menjajakan barang bekas peralatan dapur yang ia kelola sejak 2008, meski hasil penjualan sekarang sepi tidak seperti biasanya.

“Penghasilan jauh banget, orang-orang tidak berani jalan-jalan. Turun 75 persen dan hanya bisa buat makan,” kata Suwarni, kepada serat.id akhir Juli lalu.

Tak seperti biasanya, usaha berdagang barang bekas mulai sepi saat pandemi Covid-19 menerpa di segala sektor, termasuk pada lapak yang ia kelola di kawasan kota lama Semarang. Penjualan yang ia rasakan kali ini jauh berbeda jika dibanding musim liburan atau weekend sebelum pandemi.

Keluhan juga dirasakan Tri Putu 49 tahun, pedagang barang yang mengaku dagangannya tidak selaris seperti dulu. Tri Putu yang sebelumnya berdagang sekitar taman Srigunting, namun di Galeri Industri Kreatif Gedung Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Kawasan Kota Lama Semarang, mengaku sepi pembeli.

“Selama Covid-19 ini tutup tiga bulan dan baru buka dua minggu ini dan penghasilan turun sampai 80 persen,” kata Putu. Kondisi itu semakin memprihatinkan saat kota lama menghadapi pembatasan sosial sehingga mematikan kehadiran kunjungan. “Sebelum covid gedung tersebut buka 9 pagi sampai 10 malam tetapi sekarang jam 10 pagi sampai 6 sore. “Padahal pengunjung mulai datang malam,” kata Putu menjelaskan.

Para pedagang harus memutar otak agar penghidupan mereka bisa tetap bertahan di tengah gempuran Covid-19. Sebagian dari mereka memilih memanfaatkan momentum pandemi dengan beralih usaha ke pembuatan masker dan jamu dengan layanan penjualan online.

Selain itu, lokasi wisata yang menarik pengunjung seperti 3D Trick Art Museum, Gereja Blenduk, Taman Sri Gunting juga ditutup. Sebagian besar nasib pelaku usaha di kawasan Kota Lama mengalami penurunan omzet yang sangat signifikan.

Ketua paguyuban pedagang Galeri Industri Kreatif (GIK) kota lama, Anton Susatyo Singgih mengakui kondisi yang dialami anggotanya selama menghadapi pandemi Covid-19. “Kami

benar-benar sedih dengan kondisi sekarang ini. Imbas pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian pedagang di Kota Lama Semarang,” kata Anton.

Menurut dia bisa dikatakan tak ada pengunjung yang mampir di pasar yang khusus menjual barang antik di Kota Lama Semarang itu .

Padahal sebelum pandemi setiap malam di pasar klithikan selalu ramai pengunjung wisatawan. Kebanyakan yang mampir wisatawan dari luar kota datang untuk membeli barang antik sebagai hiasan rumah maupun kafe.

“Sebelum pandemi di GIK ini sangat ramai kayak pasar. Bahkan bisa tutup sampai pukul 22.00 malam. Namun sekarang harus tutup pukul 18.00 sore untuk mengikuti anjuran dari pemerintah dan tak ada satupun pengunjung dari pagi sampai sore,” kata Anton menjelaskan.

Menurut dia, setiap pedagang dari 36 anggotnya per tahun mampu menghasilkan uang Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Namun sejak pandemi ini benar-benar memukul para pedagang. Penurunannya bisa mencapai 50 persen lebih. Padahal mereka masih punya tanggungan cicilan di bank. Ada yang masih menanggung cicilan bayar motor dan sebagainya.

“Paling berat pada pandemi ini masih punya tanggungan cicilan motor. Harus kerja ekstra keras,” katanya.

Kini para pedagang klithikan Kota Lama hanya bisa pasrah dan menurut dengan anjuran pemerintah. Meskipun sudah diperbolehkan buka kembali harus menerapkan protokol kesehatan.

Beralih ke Penjualan Online Hanya Alternatif Sementara

Hoesie, seorang pedagang barang antik di gallery industri kreatif Kota Lama Semarang, terpaksa memanfaatkan media sosial untuk menjajakan dagangannya. Itu terpaksa saat lapaknya

tutup selama lima bulan saat pandemi ini.

“Lapak sudah seperti gudang, jadi kalo ke sana (lapaknya) ya cuma ambil barang saja jika ada yang pesan online. Kalau teman-teman yang tidak online ya bisa semapat betul itu,” kata Hoesie.

Meskipun beralih jualan online, Hoesie mengaku tetap tidak sepadan dengan penghasilannya jika dibanding sebelum pandemi Covid-19, karena barang yang laku yang memang benar-benar antik dan asli.

“Tapi ya tetap bisa jalan dan ada pemasukan. Jadi yang pesan itu pelanggan lama yang memang berduit dan tau barang saja,” kata Hoesie menjelaskan.

Selain minimnya penjualan akibat pandemi, Hoesie juga mengeluhkan kelangkaan barang antik yang harus ia jual kembali. Menurut dia, upaya memburu barang antik susah karena pemilik takut berinteraksi, hal itu menambah pengaruh perputaran penjualan semakin sulit.

Anggota DPRD Jateng Riyono menyesalkan minimnya terobosan pemerintah dalam membangkitkan perekonomian Jateng, termasuk bagi pelaku UMKM di kota lama yang sedang digalakkan sebagai kawasan destinasi wisata.

“Harusnya pemerintah itu bisa menolong UMKM yang sekarat di tengah pandemi,” kata Riyono.

Riyono menilai pemerintah juga lambat dalam realisasi program recovery ekonomi yang membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri.

Selain itu sosialisasi terkait stimulus anggaran senilai Rp 2,4 Juta yang akan digelontorkan untuk UMKM tidak menjangkau ke seluruh UMKM.

“Padahal ada wacana dari pemerintah pusat akan memberikan uang untuk modal UMKM tapi nyatanya masih ada pelaku

UMKM yang belum tahu program tersebut,” kata Riyono menjelaskan.

Selain itu anggaran sebesar Rp 1 Triliun dari pemerintah Jawa Tengah untuk dana stimulus UMKM hanya 20 persen yang terserap. Sedangkan dari total 4 juta UMKM yang tersebar di Jateng hanya 26 ribu UMKM yang mendapatkan anggaran tersebut.

” Belum ada setengah yang mendapatkan dana stimulus UMKM itu harus diperhatikan lagi,” katanya. (*)

Edisi khusus “MENDADAK SUNYI DI TENGAH PANDEMI”
Tim Liputan : Praditya Wibby, Anindya Putri, Kontributor 1,
Kontributor 2, Kontributir 8,
Pengolahan Bahan : Edi Faisol, Ilustrasi : A. Arif

<https://serat.id/2020/08/30/mengais-rezeki-di-tengah-kota-nyaris-mati/>

Riska dan tim

MENGGELONTORKAN RATUSAN MILIAR TERHAMBAT PANDEMI

30 Agustus 2020



[Ilustrasi] Suasana di Kota Lama Semarang saat pandemi Covid-19. (serat.id/A.Arif).

Pembatasan sosial saat pandemi menjadikan program pembangunan tersendat, pembangunan yang seharusnya kelar Juli 2020 akhirnya diadendum April 2021.

Serat.id – Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Hevearita Gunaryanti, tak menyangka rencana pembangunan besar-besaran kawasan kota lama yang diprogramkan terhadang pandemi Covid-19. Meski

ia mengatakan proses pembangunan Kota Lama masih tetap berlangsung, termasuk menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR juga tetap berjalan.

“Pembangunan tetap berlangsung, anggaran dari pusat juga masih berjalan. Hanya saja terkendala suplai kebutuhan bahan bangunan,” kata Hevearita Gunaryanti Rahayu, disapa Ita.

Sebelumnya, pembangunan revitalisasi Kota Lama tahap I telah rampung pada tahun 2019 dengan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp179 miliar.

Sedangkan pembangunan revitalisasi memasuki tahap II ini telah berjalan 70 persen dengan anggaran dari pemerintah pusat Rp75 miliar. Namun, akibat pandemi, revitalisasi tahap II yang sedianya ditargetkan rampung pada Juli 2020 diundur hingga April 2021.

Ita mengatakan pembatasan sosial saat pandemi menjadikan program pembangunan tersendat, yang seharusnya kelar Juli 2020, akhirnya diadendum April 2021.

“Tapi targetnya akhir Desember ini sudah selesai,” kata Ita menambahkan.

Meski ia mengatakan proses pembangunan Kota Lama selama pandemi sebenarnya bisa lebih cepat dikerjakan karena tidak ada keramaian pada saat pembatasan. Wakil Wali Kota Semarang itu menyebut revitalisasi tahap II ini bakal diprioritaskan pembangunan di Bundaran Bubakan. Rencananya, Bundaran Bubakan akan dijadikan museum karena telah ditemukan sebuah situs peninggalan bersejarah yakni seperti batu sisa bangunan benteng peradaban kuno.

Tercatat sebelum ditemukan situs bersejarah, di area tersebut rencananya akan dibangun polder dan taman terbuka untuk tempat berkumpul masyarakat. Namun di tengah pembangunan ditemukan situs bersejarah, sehingga diubah menjadi museum.

Temuan itu berupa kota lebih tua era zaman pertama kali Pelanda masuk setelah Portugis menguasai pantai utara Jawa. Situs yang terpendam di kawasan kota lama itu berupa bangunan batas benteng yang melingkar, bentuknya segi lima. "Situsnya akan ditutup kaca agar masyarakat bisa melihat. Sampingnya ada kolam dan ruang terbuka hijau," kata Ita menjelaskan.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun Rumah Pompa jembatan Mberok serta sarana dan prasarana jalan. Pembenahan kabel jaringan listrik yang dimasukkan ke dalam ducting di sepanjang jalan di kawasan Kota Lama juga dilakukan untuk menghindari kesan kumuh tiang listrik di kawasan itu.

"Karena sudah banyak sarpras yang dibenahi, otomatis jaringan-jaringan milik PLN, Telkom ini kan harus masuk dalam ducting. Ini kan belum kelar. Memang untuk memasukkan kabel ke bawah, harus keluarkan anggaran dari masing-masing stakeholder. Ini yang kami harapkan bulan ini akan mengundang semua pemilik jaringan di Kota Lama " katanya.

Setelah pembenahan jaringan tersebut selesai dilakukan, selanjutnya akan memastikan seluruh infrastruktur di Kota Lama seperti di Branjangan, Sri Gunting dan Swari juga segera dirampungkan.

Tantangan lain yang harus dihadapi Pemkot Semarang yakni masih adanya warung remang-remang dan para pemulung yang masih berkeliaran di sekitar Kota Lama. Selain itu juga ada parkir liar yang mencari peluang beroperasi di kawasan Kota Lama saat pandemi merebak.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng, Sinung N Rachmadi, mengatakan revitalisasi pembangunan Kawasan Kota Lama Semarang baru menyentuh sepertiga bagian dari keseluruhan pembangunan yang ada.

"Sepertiga bagian dari bangunan yang sudah kelar itu merupakan kompleks bercorak Eropa," kata Sinung.

Padahal pembangunan akan dilanjutkan hingga beberapa kompleks, selain bercorak Eropa, namun juga bercorak Arab-Melayu, dan kawasan Pecinan.

Sinung menyebut antusias masyarakat terhadap Kawasan Kota Lama Semarang sebagai salah satu destinasi sangat tinggi menjadi alasan pemerintah membangun kawasan tempo dulu itu. “Sambutan masyarakat yang positif terhadap perkembangan sebagai sebuah destinasi, itu menurut kami prospektif,” kata Sinung menambahkan.

Ia mengakui pembangunan terhenti karena ada pandemi Covid-19, namun Sinung optimistis pembangunan kawasan akan segera rampung. “Kami melihat ini prospektif untuk dilanjutkan di tahun-tahun mendatang agar menjadi sebuah kawasan yang dipugar secara utuh,” terangnya.

Terkait dengan sumber dana, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara detail ihwal sumber dana pembangunan di kawasan itu.

Namun demikian, dia menyebut ada kolaborasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sama anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Semarang terkait revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang.

“Kalau untuk dana saya tidak tahu persis, bisa konfirmasi ke Pemkot Semarang,” katanya.

Pandemi Hambat Pengawasan

Sedangkan Ita mengakui saat pandemi ini agak kurang pengawasan parkir liar yang diakui tak masuk kas Kota Semarang. “Ada yang curi-curi kesempatan peluang. Ini yang memang harus selalu patroli. Tak hanya pemulung tapi parkir liar juga,” katanya.

Meski Ita menyatakan akan mengecek lagi yang

dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata. Termasuk mengintensifkan sejumlah kendala yang dialami dalam mengelola kawasan kota lama selama pandemi. “Selain itu, mohon maaf PSK, juga parkir harus ditertibkan. Ini yang memang agak longgar. Harus dicereweti,” kata Ita.

Ia akan terus mendorong Kota Lama agar menjadi bersih dan indah dengan deretan bangunan-bangunan cagar budaya untuk menarik wisatawan. Terlebih, kawasan Kota Lama juga ditargetkan masuk daftar warisan budaya dunia (world heritage) UNESCO pada 2020 yang meliputi kawasan Semarang Lama yakni kawasan Melayu, Pecinan, Kauman dan Kota Lama dengan luas sekitar 100 hektare.

Upaya Pemkot Semarang membangkitkan kembali ruh Kota Lama setelah sekian lama akhirnya membuahkan hasil. Menurut Ita, saat ini kawasan Kota Lama baru saja ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kemendikbud. Hal itu merupakan salah satu syarat untuk menuju ditetapkannya Kota Lama sebagai warisan budaya dunia (world heritage).

Status Kota Lama sudah cagar budaya nasional sudah dapat SK dari menteri. Status Itu menjadi salah satu syaratnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota pusaka tingkat dunia oleh UNESCO.

Upaya lain yang digenjot untuk mempercantik Kota Lama, merevitaliasi Gedung Oudetrap menggunakan dana dari pusat. Gedung Oudetrap adalah satu di antara gedung cagar budaya bernuansa bangunan Belanda di Kawasan Kota Lama Semarang difungsikan sebagai galeri kesenian dan kebudayaan di Kota Semarang.

Dulunya pada abad 18, gedung yang terletak dekat dengan Taman Sri Gunting ini adalah gudang rempah-rempah. Pada masa itu, gedung-gedung di Kawasan Kota Lama Semarang memang difungsikan untuk mendukung jalur rempah di Indonesia.

Gedung itu dibeli Pemkot Semarang pada tahun 2015 senilai Rp 7,8 miliar dari seorang pengusaha di Kota Semarang. Meski sempat menuai polemik karena persoalan harga pembelian.

“Renovasi Oudetrap itu awal-awal mencapai Rp 15 miliar. Itu kan sudah milik Pemkot dibeli sekitar Rp 7,8 miliar kalau tidak salah. Diresmikan tahun 2017. Jadi dari Kementerian itu hanya sarpras seperti jalan, street furniture, drainase, museum, dan rumah pompa,” katanya.

Ita optimistis Pemkot Semarang mampu menyongsong era kebiasaan baru semakin menggeliat demi menghidupkan kembali kawasan Kota Lama. Keyakinan itu ditambah tahapan Kota Lama menuju status world heritage tinggal sejengkal lagi setelah berproses sejak 2015. (*)

Edisi khusus “MENDADAK SUNYI DI TENGAH PANDEMI”
 Tim Liputan : Praditya Wibby, Anindya Putri, Kontributor 1,
 Kontributor 2, Kontributor 8,
 Pengolahan Bahan : Edi Faisol, Ilustrasi : A. Arif

<https://serat.id/2020/08/30/menggelontorkan-ratusan-miliar-terhambat-pandemi/>

Riska dan tim

OMZET TEMPAT KONGKOW KOTA LAMA SEMARANG MEROSOT TAJAM

30 Agustus 2020



[Ilustrasi] Suasana di Kota Lama Semarang saat pandemi Covid-19. (serat.id/A.Arif).

Kesunyian juga sangat terasa di Tekodeko Koffiehuis, di jalan Letjend Suprpto nomor 44. Ruangan lantai dasar kafe itu yang biasaya ramai hanya diisi dua orang pengunjung. Yang hadir jauh dari sebelumnya rata-rata 48 orang. Suasana kelihatan lengang ketika meja dan kursi dikurangi untuk jaga jarak. Kondisi di lantai bawah menunjukan secara umum, di atas sama sekali tak ada pengunjung.

“Sejak pandemi pendapatan di kafe tekodeko mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi jumlah pengunjung benar-benar bisa dihitung jari, kunjungan bisa kurang dari 10 persen,” ujar pengelola Tekodeko Koffiehuis, Jessie Setiawati, kepada jurnalis serat.id, akhir Juli lalu.

Jessi mengatakan kemerosotan pendapatan dan perputaran keuangan hingga 90 persen. Meskipun kafe tersebut sudah mulai beroperasi kembali, namun jumlah pengunjung atau customer yang datang sekitar 10 persen.

Beragam upaya dilakukan untuk meyakinkan publik berkunjung di Tekodeko yang sebelumnya ramai. Kafe lantai dua dengan arsitektur yang khas bangunan tropis era kolonial itu menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung.

Di pintu masuk pengunjung diwajibkan cuci tangan di wastavel yang disediakan, termasuk cek suhu tubuh. Bahkan saat di tempat pemesanan, tangan pengunjung disemprot handsanitizer, termasuk tempat duduk yang diterapkan berjarak lebih dari satu meter untuk menghindari kerumunan.

“Demi keamanan setiap dua hari sekali, ruangan selalu disemprot disinfektan. Kemudian untuk penerapan jaga jarak meja dan kursi diberi tanda silang dan jaraknya lebih satu meter,” Jessie menjelaskan.

Menurut dia, ruangan yang biasanya kapasitas 48 orang pun dikurangi hanya 25 orang saja. Pandemi saat ini begitu berat dirasakan Jessie, selain bertarung melawan ancaman penularan virus yang nyaris menghentikan pemasukan usahanya. Ia juga harus berhadapan dengan pembatasan jam operasional kafe yang ia kelola.

Sebagaimana tempat usaha kongkow lain di Kota Lama Semarang, Tekodeko Koffiehuis juga mengikuti batasan jam buka. Jessie mengaku baru memulai usaha dari pukul 12.00 siang hingga menjelang pukul 21.00 malam harus sudah tutup. Keadaan itu menjadikan kafe yang ia kelola mengurangi tim operasional usaha.

Kesulitan lain yang dialami selama pandemi ini terkait dengan pembayaran pajak saat pendapatan terus menurun. Sementara kepedulian yang diberikan pemerintah hanya memberikan penundaan pembayaran pajak hingga 30 Juli.

Belum lagi harus membayar tagihan listrik. Tagihan yang diberikan PLN cukup besar. Namun beruntung dari berbagai upaya yang dilakukan, tagihan berhasil mendapat keringanan.

“Sempat kaget pada awal April tagihan dari PLN sangat tinggi. Alasannya karena PLN tidak sempat melakukan survei ke Tekodeko selama tiga bulan. Jadi tagihannya sangat besar. Bersyukur pembayaran bulan depan berhasil dikurangi,” kata Jessie gusar.

Kesunyian kunjungan juga terasa di Resto Spiegel, Kota Lama Semarang. Sebelum pandemi Covid-19, resto yang menempati gedung unik bekas N.V. Winkel Maatschappij yang dibangun tahun 1895, itu sebelum pandemi selalu ramai pengunjung yang ingin menikmati suasana tempo dulu.

“Penurunan omzet sangat terasa karena Spiegel merupakan ikon wisata Kota Lama. Perbandingan kunjungan jauh lebih sepi dibanding sebelum pandemi,” kata bagian HRD Spiegel, Intan.

Intan menjelaskan, selama pandemi ini hampir semua sektor usaha di Kota Lama mengalami penurunan ekonomi. Hal itu dirasakan juga di resto Spiegel yang menyediakan bar dan masakan khas Eropa. Ia mengaku sebelumnya resto yang ia kelola ramai dikunjungi wisatawan.

Maklum Spiegel menempati gedung di jalan Letjend Suprpto nomor 59 itu diuntungkan dengan posisi strategis dan ikonik, sehingga menjadi jujugan para pengunjung kota lama.

“Apalagi Kota Lama sudah bangun dengan bagus sehingga banyak wisatawan asing dan relawan domestik yang mampir ke Spiegel,” kata Intan menambahkan.

Namun pandemi telah memukul mimpi usaha yang ia kelola, hal itu ia rasakan dengan perputaran ekonomi merosot hingga 70 persen. "Akibatnya banyak karyawan yang harus dirumahkan," katanya.

Data pemasukan pajak di badan pendapatan daerah Kota Semarang menunjukkan persentase penurunan 25 usaha resto dan kafe di kawasan Kota Lama Semarang anjlok jika dibanding sebelum pandemi.

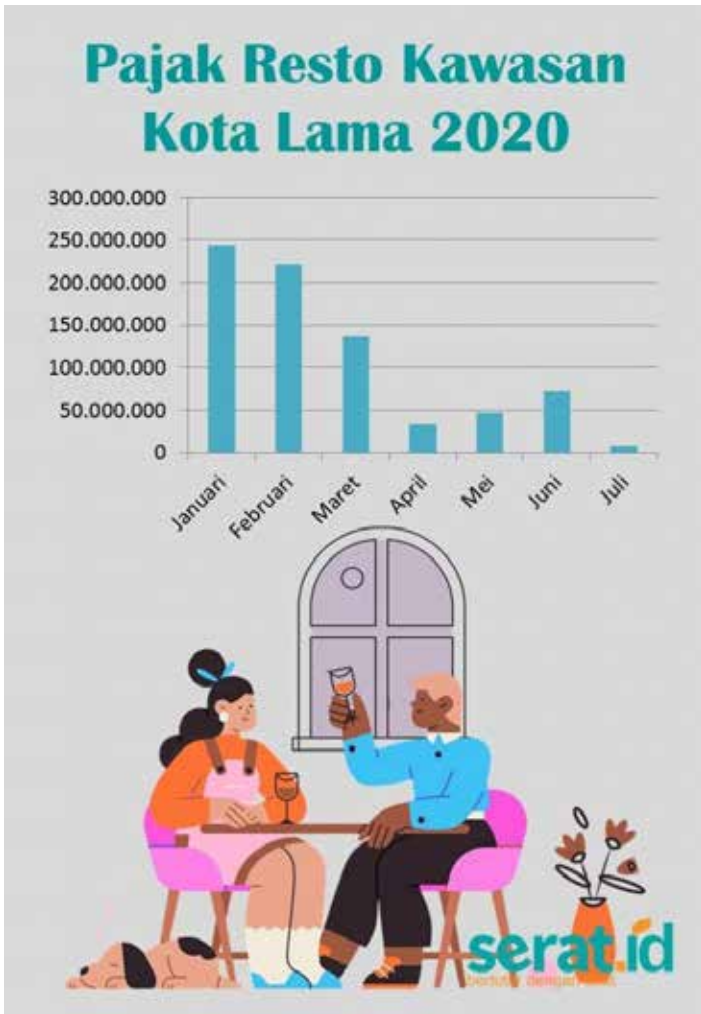
Kepala Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto mengatakan data pendapatan pajak resto di kawasan kota lama pada bulan Januari hingga Maret 2020 belum terdampak pandemi masih aman.

"Namun mulai bulan April, Mei, Juni dan Juli mulai turun drastis,"kata Agus.

Berdasarkan data Bapenda Kota Semarang menunjukkan pemasukan pendapatan pajak resto di kawasan kota lama mulai anjlok jika dibanding dengan beberapa bulan sebelum pandemi. Salah satunya di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur tercatat pada bulan Januari pajak yang disetor mencapai Rp126,7 juta namun mengalami penurunan drastis memasuki pandemi pada bulan April menjadi Rp18,2 juta. Sementara pada bulan Juni mengalami kenaikan mencapai Rp47,9 juta. Sedangkan pada bulan Juli Rp0.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Spiegel Kafe, pada bulan Januari pajak yang disetor sebesar Rp19,5 juta mengalami penurunan drastis memasuki pandemi pada bulan April menjadi Rp532 ribu. Kafe ini mulai menggeliat pada bulan Juni mampu membayar pajak sebesar Rp1 juta. Sementara pada bulan Juli kembali menurun drastis menjadi Rp0.

Teko Deko yang sebelumnya mampu menyettor sebesar Rp11,2 juta pada januari 2020, mengalami penurunan drastis memasuki pandemi pada bulan April menjadi Rp837 ribu. Kafe yang identik tempat kongkow kalangan anak muda itu mengalami kenaikan menyettor pajak Rp4,8 juta pada bulan Juni.



Serat.id menghitung total keseluruhan dari 25 resto dan kafe di Kawasan Kota Lama, awalnya mampu memberikan kontribusi pemasukan di Kota Semarang hingga Rp244,7 juta pada Januari, mulai runtuh bulan April hanya sebesar Rp32,9 juta. Kondisi itu kian terpuruk yang dibuktikan pada akhir Juli, yang hanya mampu menyumbang pajak hanya Rp8,1 juta.

Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui pandemi telah menghantam sektor bisnis di kawasan kota lama yang sedang dirintis untuk dihidupkan kembali.

“Termasuk revitalisasi tahap II yang sedianya ditargetkan rampung pada Juli 2020 diundur hingga April 2021,” kata Hevearita yang akrab disapa Ita.

Ia mengaku Pemkot Semarang berencana menggeliatkan kembali Kota Lama untuk memulihkan roda perekonomian dan meningkatkan kunjungan wisatawan dengan percepatan pembangunan revitalisasi Kota Lama tahap II agar selesai pada Desember 2020.

Menurut Ita, pembangunan tetap berlangsung dari anggaran pusat. Meski ia mengakui terkendala pasokan bahan bangunan karena pandemi dan pembatasan sosial. Hal itu menjadikan upaya pembangunan tersendat sehingga diubah dari jadwal selesai Juli 2020 akhirnya diadendum April 2021.

“Tapi targetnya akhir Desember ini sudah selesai,” jelas Ita yang juga Wakil Wali Kota Semarang itu. (*)

Edisi khusus “MENDADAK SUNYI DI TENGAH PANDEMI”
 Tim Liputan : Praditya Wibby, Anindya Putri, Kontributor 1,
 Kontributor 2, Kontributir 8,
 Pengolahan Bahan : Edi Faisol, Ilustrasi : A. Arif

<https://serat.id/2020/08/30/omzet-tempat-kongkow-kota-lama-semarang-merosot-tajam/>

Luh De Suriyani dan tim

MEMBURU DOLAR DI TENGAH SAMPAR

Mesuryak.... hu! Mesuryak... hu!

Demikian aba-aba ajakan yel-yel di microphone Pura Besakih. Mengikuti sebuah prosesi Yadnya Pemahayu Jagat saat Gubernur Bali dan pejabat lain. Mereka membawa benda sakral dalam situasi berdesak-desakan. Prosesi ini juga diikuti warga yang ikut persembahyangan saat Purnama Kasa, 5 Juli lalu.

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin persembahyangan untuk mulai era pelonggaran pembatasan kegiatan yang disebutnya dengan istilah Tatanan Kehidupan Era Baru. Salah satu yang ditekankan dalam tatanan era baru ini adalah pembukaan sejumlah tempat publik dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, rapid test bagi pekerja lokasi tempat hiburan dan wisata, dan lainnya. Namun di Pura Besakih sendiri, Gubernur tidak bisa menunjukkan kesiapan protokol ini. Salah satu lokasi cuci tangan tidak terisi air, hanya sebagian yang menggunakan masker sepanjang ritual, dan tidak ada pengaturan jarak minimal satu meter.

Spanduk-spanduk imbauan banyak terpasang, namun saat itu suasana di pura seperti kondisi biasa sebelum pandemi. Bahkan saat sesi foto bersama para pejabat pun ada sesi membuka masker.

Seperti kebijakan di masa bencana dan krisis lainnya di Bali, Tatanan Era Baru masa pandemi Covid-19 ini pun nampak memprioritaskan pada industri pariwisata.

Dalam pidatonya, Koster menyebut pada 9 Juli adalah tahap pertama pembukaan lokasi dan kegiatan secara terbatas. Tahap kedua, mulai 31 Juli melaksanakan aktivitas secara lebih luas, termasuk sektor pariwisata, terbatas untuk wisatawan domestik. Tahap ketiga, memperluas aktivitas sektor pariwisata termasuk wisatawan mancanegara, mulai 11 September.

Dampak pandemi sangat terasa di Bali Selatan. Restoran dan klub pantai fancy di seputaran Seminyak, Kuta terlihat masih ditutup pada Minggu (25/7). Hanya petugas keamanan yang lalu lalang berjaga di pinggi pantai karena sebagian besar aksesnya terbuka memanfaatkan panorama laut.

Pantai Petitenget, salah satu yang teramai di kawasan ini sudah dibuka. Warga cukup ramai, ada yang bermain voli pantai, jogging, duduk-duduk di pasir, dan ada yang sedang menggelar ritual di salah satu lokasi persembahyangan di pantai. Keramaian terlihat berpusat di pantai, sementara di jalan yang biasanya sangat macet, nampak lengang sampai bulan kelima kesiapsiagaan Covid-19 ini.

Kadek Bayu, anak muda 20 tahun ini hendak menengok bekas tempat kerjanya di sebuah beach club tersohor di Seminyak. "Tumben ke sini lagi," selorohnya. Ia diberhentikan saat sedang semangatnya bekerja. Namun ia merasa usaha wisata tak akan seramai dulu lagi pasca pandemi ini. Bayu bingung apa yang akan dilakukannya nanti.

Pertumbuhan sektor pariwisata di Bali memang menjanjikan bagi investor. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam sembilan tahun saja, jumlah kamar hotel meroket tiga kali lipat. Jumlah kamar hotel berbintang hampir 30 ribu pada tahun 2000, kemudian melejit hampir tiga kali lipat jadi 80.200 pada 2019. Sementara jumlah hotel non bintang pada 2019 sebanyak 72 ribu. Hingga 23 April 2020, menurut Dinas Tenaga kerja dan ESDM Provinsi Bali, jumlah tenaga kerja Bali yang di PHK dan dirumahkan sekitar 56 ribu orang. Terdiri dari PKH 1.315 orang dan yang dirumahkan sebanyak 55.409 orang.

Data ini diyakini terus bertambah. Itu baru data versi pemerintah yang bekerja di sektor formal di Bali. Sedangkan, data sektor informal di Bali didata oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Menurut data Diskop dan UKM, jumlah pekerja informal yang terdata dan kolaps karena Covid-19 di Bali sebanyak 17.296 orang dari perkiraan sekitar 50 ribu orang.

Kunjungan Turis di Titik Nadir

Sejak akhir Januari 2020, Bali mulai mengalami dampak pandemi COVID-19. Jumlah turis terus menurun bahkan kemudian nyaris tidak ada setelah adanya penutupan penerbangan komersial maupun perhubungan darat dan laut, untuk mencegah meluasnya penularan virus corona baru penyebab COVID-19 di kiblata pariwisata Indonesia ini.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara anjlok dari 6,2 juta orang pada 2019 jadi 1 juta orang sampai Mei 2020 ini. Mengikuti kurva pandemi, kunjungan mulai menurun secara drastis pada Januari. Dari lebih dari 500 ribu orang menjadi hanya 36 orang pada Mei ini. Indonesia baru menyatakan secara resmi adanya kasus Covid-19 pada Maret dan kasus kematian pertama yang diumumkan pertama dari Bali menimpa warga negara Inggris.

Ketergantungan pada industri pariwisata lagi-lagi beri pukulan telak pada Bali. Kali ini dampaknya jauh lebih panjang dan meluas dibanding Bom Bali pada 2002 dan 2005, dan erupsi Gunung Agung pada 2017-2018. Bila dibandingkan dengan bulan Mei 2019, jumlah wisman ke Bali tercatat turun hampir 100 persen.

Seremonial untuk mempercepat pembukaan industri turisme terus berlanjut. Kali ini dihelat di kawasan resor elit, pusat konvensi internasional kawasan ITDC Nusa Dua, Badung, 30 Juli. Karena keesokan harinya akan ada penyambutan turis domestik.

Event ini bertajuk Deklarasi Pariwisata Bali Era Baru dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar

Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Bali, Komisi XI DPR, dan pejabat lainnya.

Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bali memastikan pertumbuhan ekonomi Bali minus selama dua triwulan pertama tahun ini. Ia yakin dengan transformasi ekonomi berbasis digital, salah satunya menggunakan aplikasi QRIS, dan pembukaan wisata, ekonomi Bali akan bangkit kembali.

Gubernur Bali Wayan Koster berjanji bekerja keras menangani Covid dengan sebaiknya. “Astungkara perkembangan penanganan berjalan sangat baik,” klaimnya. Indikator keberhasilan menurutnya adalah angka kesembuhan yang tinggi, saat itu ia menyebut 82%, dan meninggal dapat dikendalikan, saat pidato sudah berjumlah 48 orang.

Upacara keagamaan 5 Juli di Pura Besakih sebelumnya adalah mohon doa restu agar aktivitas perekonomian berjalan sukses. “Sebanyak 52% perekonomian ditopang pariwisata, praktis kelompok berdampak pada dunia usaha. Hotel dan restoran kosong. Kami memberanikan diri melakukan aktivitas bertahap dengan komitmen protokol kesehatan. Jangan sampai besok kasus baru dan mencoreng pariwisata,” sebutnya saat pidato.

Untuk menggerakkan perekonomian, Koster mohon Menko Kemaritiman dan Menteri Pariwisata menghelat kegiatan kementerian dan rapat-rapat di Bali. Ia juga mohon Peraturan Menteri Hukum dan HAM 11/2020 terkait pelarangan sementara orang luar negeri ke Indonesia dapat dievaluasi. “Sempat telp Menlu dan Menhukham akan datang membicarakan ini pada 10 Agustus. Harap bahas ini di Sidang Kabinet agar Bali dapat prioritas terutama wisatawan mancanegara. Makin terpuruk jika makin lama,” mohonnya.

Wishnutama mengakui indikator kesehatan adalah pertimbangan pertama bagi turis sehingga penerapan harus sebaiknya. Ia menyebut sejumlah program pemulihan pariwisata difokuskan di Bali dan sejumlah persiapan seperti prototipe toilet bersih di Pantai Kuta, dana talangan, dan keringanan listrik PLN bagi industri pariwisata.

Melupakan Pariwisata, Menuju Lahan Pertanian

Salah satu yang banting stir saat pandemi ini adalah Wayan Sukerta. Dari supir khusus pariwisata jadi peternak bebek.

Pria yang juga pernah bekerja di hotel ini memperkirakan dampak pandemi ini akan berlaangsur lama, entah sampai kapan. Setelah sekitar 2 bulan menganggur, ia memberanikan diri membuat kandang dan memelihara sekitar 650 ekor bebek di sebuah lahan pertanian.

Ia belajar dari adik-adiknya, para peternak bebek di Desa Leping, Klungkung. Salah satu sentra peternakan yang berdampingan dengan sawah dan pantai. Iklim dan suhu dinilai lebih cocok beternak bebek dibanding ayam.

Persiapan jadi peternak tak mudah, mulai dari penyiapan kandang, mencari bebek, dan mengakses modal untuk pakan. “Baru bertelur sekitar 30% dari 650 ekor. Masih norok untuk makanan,” ujarnya.

Jika pandemi usai dan turis datang lagi apakah ia akan kembali beralih jadi supir wisata?

“Susah diprediksi, kayanya lama ini, pariwisata rentan sekali dengan bencana alam, penyakit menular. Walau pulih belum tentu mau berkunjung, kita saja ke desa tetangga tidak berani,” ia memberikan penjelasan yang logis.

Dibanding peristiwa darurat lainnya seperti Gunung Agung Meletus dan peristiwa Bom Bali, pandemi Covid-19 inilah yang paling parah. Kalau gunung meletus, penghasilannya berkurang sekitar 2-3 minggu saja lalu kembali lagi.

Sejauh ini ia akan terus melihat perkembangan peternakan dan situasinya. Termasuk menambah ternak jika memungkinkan. Jika ia merasa bisa kembali jadi supir pariwisata lagi, peternakannya akan diurus istrinya.

Sebagai supir freelance yang biasa mangkal di Legian, Kuta dan juga menggunakan website, ia merasa makin terjepit oleh perusahaan transportasi aplikasi online. “Padahal kan kita supir taksi konvensional yang berjasa memperkenalkan Bali, tapi kenapa bantuan lebih diutamakan ke perusahaan online?” herannya.

Sementara itu di Kabupaten Buleleng, sekitar 3 jam berkendara dari Kota Denpasar ada seorang kepala desa 33 tahun, Dewa Komang Yudi yang sedang memutar otak dan merancang strategi jangka panjang dampak matinya usaha turisme ini.

Ratusan warga kembali ke desa setelah merantau atau kehilangan pekerjaan di usaha wisata. Desa Tembok yang dikelolanya dikenal sebagai daerah gersang karena berada di dekat gunung berapi Gunung Agung dan pesisir laut. “Kalau pandemi tak berhenti, bagaimana kalau 3-6 bulan masih berlanjut, perputaran ekonomi melambat, tapi kita perlu bertahan hidup,” kisahnya saat diskusi online tentang desa menghadapi pandemi, Jumat (24/7).

Namun, banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan, tak bisa dibantu menggunakan dana desa saja. Mulai Mei-Juni, Komang Yudi merencanakan program padat karya tunai non infrastruktur, sehingga belanja modal tak terserap. Bidang yang dikembangkan adalah pertanian dengan intensifikasi lahan dengan komoditas sayur dan pohon mangga, serta usaha konveksi menjahit masker. Warga yang dipekerjakan mendapat upah harian.

Di sisi lain, ia merasa strategi ini akan menguras dana desa. Karena harus membuka puluhan lapangan pekerjaan, sekitar 90% warganya yang kena PHK atau dirumahkan.

Yudi merancang skema baru, rencananya sederhana yakni menyediakan pangan. “Kita tak bisa membeli terus menerus. Caranya dengan menanam. Sudah ada warga tak mampu beli vocer listrik Prabayar, beli seragam sekolah baru, atau beli beras,” paparnya.

Ia yakin warga akan memikirkan kebutuhan dasar saja, yakni makan. Tidak masalah kalau tak melanjutkan sekolah, tapi bermasalah kalau tak bisa masak. Ia tak lagi memberi upah harian karena dari hitung-hitungan tak bisa menutup sampai beberapa bulan ke depan, karena pandemi ini tak menunjukkan masa berakhir di Bali.

Misalnya untuk upah harian saja sekitar Rp 70 ribu x 100 hari saja sudah Rp 7 juta. Pola diubah, upah diganti sembako untuk menjamin warga. “Pangan akan jadi masalah serius, bukan persediaannya tapi tak punya daya beli memperoleh pangan,” ingatnya.

Yudi berharap pemerintah lebih sinergis menjawab persoalan desa. Dibutuhkan pangan di tengah situasi pandemi ini. Ini hal sederhana tapi mendasar dan harus jadi prioritas. “Momentum rekonstruksi kebijakan di desa. Mengajak mengembangkan apa yang selama ini kita abaikan,” katanya.

Ketika pandemi menghantam Bali dan pariwisata terpuruk, wacana ini selalu muncul, Bali sebaiknya kembali ke pertanian sebagai penopang utama pembangunan ekonominya. Selama ini, Bali dianggap terlalu memomorsatukan pariwisata dan sebaliknya, melupakan pertanian sebagai akarnya.

Laporan Bank Indonesia Perwakilan Bali juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2020 ini melambat menjadi kisaran 3,7 persen hingga 4,1 persen. Kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, seperti menutup penerbangan internasional dan penghentian visa bagi warga asing menjadi penyebabnya.

Ketika awal pandemi global, menariknya, nilai ekspor barang dari Bali justru naik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor barang dari Bali melalui berbagai pelabuhan pada Februari 2020 lalu mencapai 50.764.165 dolar Amerika. Nilai itu naik 8,95 persen dibanding bulan sebelumnya atau 4,37 persen dibanding Februari tahun lalu.

Produk pertanian termasuk barang yang tetap diekspor. Pada Minggu, 26 April 2020 lalu, Bali tetap mengekspor 1 ton buah manggis dan 504 kontainer kerajinan ke Uni Emirat Arab lewat Pelabuhan Benoa, Bali.

Pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer, yaitu pertanian dalam arti luas, ke sektor tersier yaitu jasa terkait pariwisata meningkat pada tahun 2000. Perubahan struktur perekonomian Bali itu terlihat di sensus pertanian pada 2003 dan 2013 oleh BPS Provinsi Bali.

Selama sepuluh tahun (2003-2013) jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun sebesar 17,09 persen. Dari 492.394 RT pada tahun 2003 menjadi 408.233 rumah tangga pada 2013. Alih fungsi lahan pertanian diperkirakan sekitar 1000 hektar per tahun.

Sejalan dengan data BPS Bali yang menyebutkan kontribusi pertanian terus menurun selama sepuluh tahun terakhir, 2010 hingga 2019. Dari 17 persen menjadi 13 persen. Sebaliknya, peran pariwisata justru terus naik dari 45 persen pada 2010 menjadi 47 persen.

Tapi menariknya, enam bulan setelah pandemi ini, secara nasional rilis data BPS per 5 Agustus menyebutkan pertumbuhan ekonomi triwulan II ini dipuncaki pertanian yakni 16%, disusul infokom 3%. Sementara defisit terbesar adalah transportasi dan pergudangan minus 29%, disusul akomodasi dan makan minus 22%.

Tiada alokasi anggaran pertanian dalam penanganan Covid-19

Jika pertanian cukup tangguh di tengah bencana termasuk bertahan di tengah pandemi ini, alokasi anggaran penanganan Covid-19 tak difokuskan ke potensi ini. Seperti tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali.

Juga dikutip dari Siaran Pers 23 April 2020, skema kebijakan

penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 261.300.000.000 terdiri dari 2 Skema.

Skema Pertama, penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin berbasis Desa Adat berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan pagu anggaran sebesar Rp 149.300.000.000. Bantuan diberikan kepada Krama Desa Adat di 1.493 Desa Adat. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Skema Kedua, Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112,0 milyar. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak COVID-19 berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari 5 Paket.

Paket 1 untuk keluarga miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima Paket 1 berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 10.000.000.00.

Paket 2 untuk kelompok pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan bidang pariwisata, perdagangan, dan industri Rp 36.000.000.000

Paket 3 untuk kelompok pekerja informal (buruh lepas, sopir, dan tukang parkir) Rp 27.782.700.000.

Paket 4 untuk bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak COVID-19, dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Rp 15.717.300.000.

Paket 5 adalah bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang orang tuanya atau yang bersangkutan terkena dampak COVID-19, berupa subsidi biaya pendidikan semester Rp 22.500.000.000.

Menunggu Pandemi atau Bergerak

Kapan turis akan datang lagi di Bali? Jika kenormalan baru mensyaratkan sejumlah hal seperti penurunan kurva dan kasus positif baru, kondisi di Bali penambahan kasus cenderung fluktuatif. Bahkan pada 2 Juli, malah rekor penambahan kasus baru 113 pasien dalam satu hari sejak awal pendataan 10 Maret 2020 lalu. Saat ini kumulatif per 26 Juli 3219 kasus, dalam perawatan 601 kasus, sembuh 2570 kasus, dan 48 meninggal (2%).

Data ini, terutama kematian perlu dipertanyakan. Karena ada sejumlah kasus positif yang baru dipastikan setelah pasien meninggal namun tak tercatat dalam jumlah kasus meninggal.

Sampai kapan Bali atau Indonesia bisa dinyatakan bebas pandemi halnya Selandia Baru? Prof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, salah satu ahli epidemiologi Bali mengatakan kampanye turisme tidak bisa jalan bareng dengan penanganan Covid-19. "Saya juga pelaku usaha wisata, saya punya hotel, tapi saya tidak yakin warga asing diijinkan ke Bali karena mereka memantau angka-angka statistik," urai dokter senior yang baru dilibatkan sebagai tim ahli tracing kasus oleh Pemprov Bali ini.

Sebagai ahli kesehatan ia memilih setia pada analisis kesehatan dalam memberi masukan. Termasuk apakah Bali akan kembali ramai turis mulai pembukaan awal September nanti.

Wirawan meyakini, turis mancanegara baru akan diijinkan oleh pemerintahnya untuk datang ke Bali bila terpenuhinya indikator-indikator epidemiologi. "Bukan dari pernyataan bahwa kita telah siap dengan protokol kesehatan," ingatnya. Walaupun turis mancanegara mengatakan ingin ke Bali, tetapi bila tidak diijinkan oleh pemerintahnya, mereka tidak akan bisa datang.

Indikator-indikator epidemiologi tersebut adalah pertama, jumlah orang (bukan jumlah spesimen) yang dites PCR swab, minimal 1 per 1000 penduduk per minggu. Jika penduduk Bali sekitar 4,6 juta maka targetnya sekitar 650 orang per hari tes swab PCR. Target ini akan tercapai jika penelusuran kasus optimal. Karena tidak sembarang orang bisa dites swab.

Kedua, persen positif (positivity rate) stabil di bawah 5%. Tidak fluktuatif. Positivity rate adalah persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif Covid-19. Caranya menghitung jumlah positif dibagi jumlah yang dites. Ini sangat tergantung.

Dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul “Melebihi Batas WHO, Positivity Rate Covid-19 di Indonesia 12,3 Persen, Apa Dampaknya?” disebutkan hingga 24 Juli 2020, ada 777.100 orang dites swab secara nasional. Ada 95.418 kasus infeksi positif, maka positivity rate secara total di Indonesia sekitar 12,3 persen. Artinya, setiap 100 orang Indonesia yang dites swab/PCR, akan ada 12 orang yang positif.

Ketiga, rata-rata jumlah orang kontak yang ditelusuri (tracing) dari satu kasus minimal 25 orang secara rata-rata dari keseluruhan kasus. “Dari penelusuran kontak kasus positif, Bali rata-rata 14 orang sementara standar WHO 25 orang,” sebut epidemiolog yang sebelumnya terkenal karena memberikan analisis data kasus HIV dan AIDS di Bali sejak awal ditemukan. Keempat, reproduction rate (RT) atau angka penularan stabil di bawah 1. Ini dihasilkan dari modeling atau penghitungan memakai rumus disertai asumsi untuk menyimpulkan satu orang positif bisa menulari berapa orang? Angka ini di Bali diduga di bawah 1, namun perlu dipastikan lagi dengan data akurat.

Menurutnya turis tidak akan diijinkan datang oleh konsulatnya jika RT di atas 1 dan positivity rate di atas 5. “Bila 4 indikator tersebut belum bisa kita capai dalam waktu lama, tidak terbayangkan kondisi penduduk Bali yang hidupnya tergantung dari sektor pariwisata,” imbuhnya.

Di laman pendataan kasus Covid-19 Bali, angka-angka indikator ini tak ditemukan. Hanya ada angka penambahan kasus, meninggal, dalam perawatan, dan sembuh. Menurut Wirawan indikator-indikator ini sangat penting ditampilkan secara rutin. Kurangnya keterbukaan membuka data ini menurut Wirawan juga akan mempersulit Bali untuk meyakinkan turis asing datang.

Kunci lain adalah pencegahan seperti penerapan protokol kesehatan. Alasannya, beda dengan SARS, virus penyebab Covid-19 ini berada di hidung dan tenggorokan, sehingga bersin atau bicara bisa menularkan jika berhadapan dengan orang yang positif.

Menurutnya dibandingkan HIV yang waktu perawatannya lama, Covid-19 ini bisa ditangani cepat jika sejumlah syarat diikuti. Misalnya penemuan kasus aktif dengan tracing yang optimal, deteksi dan pengobatan dengan kepastian jumlah ruang perawatan, isolasi, dan karantina untuk orang tanpa gejala (OTG). Masalah lain, jumlah OTG ini besar rata-rata 40% jika tak dikarantina, akan jadi biang kerok wabah dan sulit selesai.

Sebagai pulau kecil yang kondisi ekonominya tergantung pariwisata, menurutnya Bali harusnya bisa lebih progresif menangani pandemi ini. Kebijakan pusat juga tak serta merta bisa diterapkan di Bali karena beda persoalan. Misalnya di Bali tidak ada pabrik atau industri besar, yang dominan jasa pariwisata yang lebih sensitif pada penyakit menular dan bencana.

“Tampaknya nunggu vaksin saja. Proyeksi kasus sulit karena data kurang akurat. Seperti ramalan cuaca, kalau data suhu, kelembaban, arah angin tidak akurat, ya ramalannya juga,” jelas Wirawan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dokter Ketut Suarjaya mengatakan cara penelusurannya dengan tes swab pada hasil rapid reaktif. Sejauh ini, dari yang diswab, sekitar 30% positif PCR-nya. “Sebagian besar tidak bergejala,” sebutnya.

Hanya yang bergejala diisolasi dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan positif tanpa gejala dikarantina. Ada enam tempat isolasi saat ini yakni Bapelkes, Hotel Ibis Kuta, Gran Mega, dan Hotel Ramada. Kapasitasnya 600 tempat tidur.

Ada 13 rumah sakit dengan kapasitas mencapai 585 tempat tidur ruang isolasi. "Selama ini terisi 250-300 bed," jelasnya ditemui 22 Juli 2020. Sementara ruang karantina provinsi rata-rata terisi 250 bed, bahkan sempat 500 pada saat puncak kasus di awal Juli. Ada juga yang karantina mandiri jika terkonfirmasi positif dan tanpa gejala. Dengan pengawasan oleh rumah sakit, desa adat, dan lainnya.

Suarjaya menyebut angka kesembuhan di Bali cukup tinggi, sekitar 74 persen. Angka kematian dinilai masih rendah meskipun sempat naik, sekitar 1,7 persen.

Ia menyebut tidak hanya mengobati di hilir, tapi juga mencegah di hulu. Lewat edukasi dan promosi sehingga mereka memahami bahwa COVID-19 ini bisa dicegah. "Kita jangan terlalu pesimis, paranoid dengan pandemi ini agar bisa menaikkan imun," imbuh Suarjaya.

Jika dilihat kasus per kasus, kematian dominan pada usia tua dan komorbid (dengan penyakit penyerta). Terbanyak ginjal, diabetes melitus, paru menahun, dan jantung. Umurnya di atas 45 tahun.

Naiknya kasus positif menurutnya karena beberapa hal, pertama karena disiplin yang kurang. Orang dengan risiko tinggi disebut disiplinnya rendah. "Sebenarnya banyak yang mungkin positif, tapi memang tanpa gejala. Tiap kita tracing, kita ketemu orang tanpa gejala. Jadi, makin banyak tracing ya makin banyak kita mendapatkan OTG," sebut Suarjaya.

Situasi kesehatan ini makin menguatkan bahwa pandemi ini belum memperlihatkan titik akhirnya di negeri ini. Alih-alih promosi dan menggaet turis untuk plesiran, bukankah lebih

realistis untuk menguatkan yang nyata dan beri harapan di tengah krisis bencana ini yakni bahan pangan.

Masalah lain adalah, serapan pangan lokal dalam bantuan-bantuan bansos sembako sangat minim. Hal ini terangkum dalam diskusi publik daring melalui bertajuk “Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa” yang digelar oleh kolaborasi sejumlah lembaga, Selasa sore (4/8/2020), antara lain Balebengong, Sakti Bali, LBH, dan AJI Denpasar.

I Wayan Parmiyasa, Kabid Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali menyatakan paket sembako tidak ditentukan pihaknya, namun pusat dan Pemprov. Padahal, penyerapan produk pangan lokal sangat penting mengingat anggaran untuk itu cukup besar.

Dari data Dinsos Bali, penyerapan BPNT/bansos pangan/program sembako dari Kemensos di Bali untuk April dan Mei mencapai lebih Rp 51 miliar. Itu belum termasuk bantuan pangan yang bersumber dari provinsi, kabupaten, desa, maupun desa adat.

Nyoman Suma Artha dari Pasar Rakyat Bali mengatakan hasil pertanian lokal di Bali banyak yang tidak terserap di pasar. Padahal banyak yang membutuhkan. Karena itu ia ikut mendistribusikan dengan membeli dari petani untuk dijual, dan sebagian hasil diputar lagi untuk sumbangan ke dapur-dapur yang jadi relawan produsen nasi bungkus gratis. [b]

<https://balebengong.id/mendalam/memburu-dolar-di-tengah-sampar/>

Kumpulan Liputan
“Cerita di Balik Pandemi”

Buku ini merupakan kumpulan 20 liputan karya jurnalistik tentang Pandemi Covid-19 di Indonesia. Liputan berasal dari beberapa wilayah, dari Jambi sampai Nabire. Mengangkat isu-isu soal kesehatan, dampak ekonomi, sampai soal masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal di era pandemi Covid-19. Buku ini merupakan program AJI Indonesia dengan dukungan dari UNESCO.